

Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir



Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPD

Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 serta kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan proyeksi APBD Tahun 2022, maka rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 tersebut merupakan landasan penyusunan KUPA/PPAS Perubahan Tahun 2022 untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman perumusan penyempurnaan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.
- b. bahan evaluasi penyusunan evaluasi penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
- b. pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah :

- a. sistematika;
- b. penyusunan perubahan RKPD.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 terdiri dari sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| BAB VI | PENUTUP |

BAB III
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

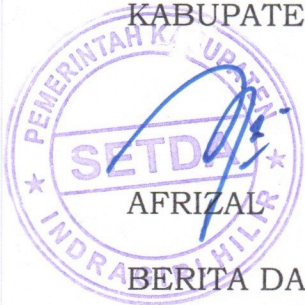
Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 13 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 32

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-9
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan	I-15
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-16
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN	II-1
BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-1
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-83
2.2.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-83
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-86
2.2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-86
2.2.2.2 Aspek Pelayanan Umum.....	II-89
2.2.2.3 Aspek Daya Saing.....	II-103

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH....	III-1
3.1	Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-4
3.2	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-5
3.2.1	Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-6
3.2.2	Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-10
3.2.3	Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-13
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran.....	IV-4
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022... ..	IV-12
4.2.1.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-12
4.2.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022.....	IV-14
4.2.3.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	IV-14
4.3	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir....	IV-13
BAB V	RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VII	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan II Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2	Rekapitulasi Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022	II-3
Tabel 2.3	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	II-6
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2023	III-3
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir	III-5
Tabel 3.3	Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022	III-8
Tabel 3.4	Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022	III-12
Tabel 3.5	Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022	III-14
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	IV-6
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Tahun 2022.....	IV-21
Tabel 4.3	Urusan Pemerintahan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.....	IV-25
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.....	IV-29
Tabel 4.5	Sandingan Antara Sasaran/Indikator Sasaran dan Proritas Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV-32
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2022.....	IV-60

Tabel 4.7	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2022 dengan PN RKP 2022.....	IV-61
Tabel 4.8	Konsistensi Prioritas Dan Sasaran Pembangunan pada RKPD tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi 2022.....	IV-79
Tabel 4.9	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas pada RKPD Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir.....	IV-93
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	V-2
Tabel 5.2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	V-5

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-15
------------	------------------------------------	------

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 343 telah diatur bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Berdasarkan arahan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah digariskan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir segera mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan beberapa kali Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 Tahap Pertama, berdasarkan

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat

dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan serta dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

4. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, terdapat Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.17.028.000.000,- .

B. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 Tahap Kedua, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 17 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran

tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/653/M.SM.02.03/2021 Hal Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan penghasilan dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan;
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat ASN untul pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan.

C. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 Tahap Ketiga, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 22 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi

kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan serta dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan Kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, di anggarkan Kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ, Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, terdapat pemetaan Sub Kegiatan yang digunakan untuk penganggaran belanja DAK Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, SiLPA pada APBD Tahun 2021 penerimaan SILPA sebesar Rp. 214.956.335.766,19.

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan Perubahan RKPD dimulai dari penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD dan penetapan. Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan teknokratis yaitu dengan lebih memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 juga disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan baik pemerintah pusat maupun provinsi khususnya terkait dengan target-target pembangunan nasional dan Provinsi Riau.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005- 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023; dan

17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUPA/PPAS Perubahan dan penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP) sebelum menjadi APBD Perubahan. Sedangkan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD Perubahan.

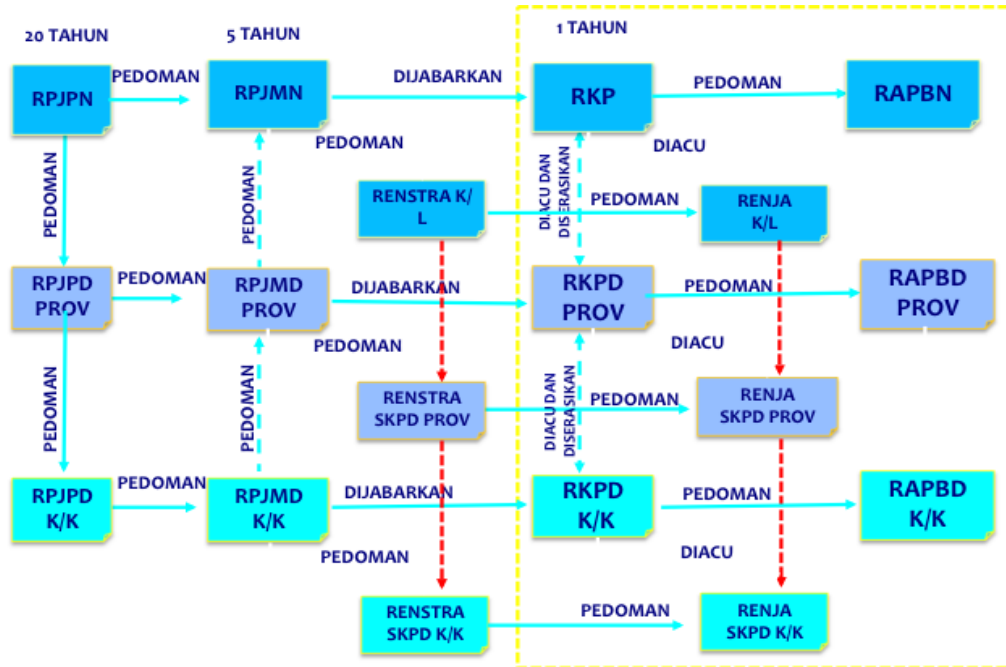
Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan

sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;

2. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
4. Perubahan RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) didasarkan atas dokumen Perubahan RKPD. KUPA dan PPAS Perubahan yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Perubahan.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun 2022 guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 sesuai Perubahan RPJMD periode tahun 2018-2023.

Tujuannya adalah:

1. Menyediakan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam pasal 345 dan pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Adapun tahap dalam Persiapan Penyusunan Perubahan RKPD adalah :

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan.

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mencakup :

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;

- b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran, dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/ atau secara tertulis dan/ atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.

Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Permendagri ini memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. Penutup.

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini terdiri dari dua pokok bahasan yaitu Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan, realisasi RPJMD dan capaian kinerja serta permasalahan pembangunan daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2022 sampai triwulan II dengan memperhatikan dokumen RPJMD. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Telaahan hasil evaluasi mencakup (i) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (ii) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iii) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iv) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.

(v) implementasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dan (vi) kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Triwulan II Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022	Realisasi APBD 2022	%
1	PENDAPATAN DAERAH	1.877.404.581.681,00	845.305.748.000,40	45,03
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.123.679.389,00	76.361.300.174,40	38,35
1.1.01.	Pajak Daerah	45.375.457.247,00	17.759.539.647,00	39,14
1.1.02.	Retribusi Daerah	4.993.272.500,00	1.824.247.050,00	36,53
1.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.925.469.840,00	13.759.140.178,00	115,38
1.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	136.829.479.802,00	43.018.373.299,40	31,44
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.678.280.902.292,00	768.944.040.726,00	45,82
1.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.560.316.284.270,00	729.873.466.922,00	46,78
1.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.964.618.022,00	39.070.573.804,00	33,12
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	407.100,00	
1.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	
1.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	407.100,00	
2	BELANJA DAERAH	2.087.404.581.681,00	677.358.576.044,22	32,45
2.1.	BELANJA OPERASI	1.610.077.228.484,00	556.106.182.359,15	34,54
2.1.01.	Belanja Pegawai	851.662.829.685,00	332.331.388.760,00	39,02
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	698.262.780.169,00	218.403.274.826,15	31,28
2.1.04.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.05.	Belanja Hibah	58.345.738.630,00	4.057.943.935,00	6,95
2.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.805.880.000,00	1.313.574.838,00	72,74
2.2.	BELANJA MODAL	174.876.377.598,00	13.230.521.759,07	7,57
2.2.01.	Belanja Modal Tanah	450.000.000,00	0,00	0,00
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.526.339.053,00	5.705.772.888,00	9,43
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.133.198.000,00	3.906.998.711,15	10,25
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.552.493.800,00	3.297.543.159,92	4,81

2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.699.346.745,00	0,00	0,00
2.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.515.000.000,00	320.207.000,00	0,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.296.605.924,00	2.058.617.903,00	8,84
2.3.01.	Belanja Tidak Terduga	23.296.605.924,00	2.058.617.903,00	8,84
2.4.	BELANJA TRANSFER	279.154.369.675,00	105.963.254.023,00	37,96
2.4.01.	Belanja Bagi Hasil	5.036.872.975,00	0,00	0,00
2.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	274.117.496.700,00	105.963.254.023,00	38,66
	SURPLUS/(DEFISIT)	(210.000.000.000,00)	167.947.171.956,18	(79,97)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	210.000.000.000,00	214.970.324.001,19	102,37
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	210.000.000.000,00	214.970.324.001,19	102,37
3.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	210.000.000.000,00	214.956.335.766,19	0,00
3.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	13.988.235,00	0,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
3.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	210.000.000.000,00	214.970.324.001,19	102,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	382.917.495.957,37	
	TOTAL APBD	2.087.404.581.681,00	677.358.576.044,22	32,45

Sedangkan Rekapitulasi target dan realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD MURNI 2022 (Rp)	REALISASI KINERJA TRIWULAN II (Rp)	PERSENTASE	KINERJA
1	2	4	5	6
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	975.870.730.698	451.876.977.577	46,31	30,93
Dinas Pendidikan	467.197.987.250	223.472.160.094	23.78	23,91
Dinas Kesehatan	171.763.073.065	88.370.229.333	20.55	22,11
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	90.781.795.142	81.249.832.428	35.18	38,95
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	8.407.707.764	3.980.342.514	20.17	20,22
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	18.461.791.153	11.976.280.445	28.55	31,24
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	122.728.165.929	14.614.243.154	20.62	25,09
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	44.030.151.878	4.429.033.794	19.21	15,76
Satuan Polisi Pamong Praja	19.479.312.812	9.880.784.535	40.03	40,76
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.852.934.520	6.840.178.321	68.64	64,88

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.798.091.840	4.019.201.793	26,84	30,92
Dinas Sosial	13.369.719.345	3.044.691.166	23,88	26,41
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	152.777.574.003	53.461.647.085	34,99	28,96
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	6.689.591.838	2.421.432.101	41,02	42,85
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.671.591.838	3.467.537.968	18,23	18,49
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	17.629.432.118	6.996.620.890	22,24	22,09
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.592.108.390	5.138.526.119	24,63	26,53
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	27.816.073.987	7.118.799.256	30,85	33,45
Dinas Perhubungan	18.416.165.459	4.438.491.940	13,79	12,74
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	15.238.131.162	4.581.072.860	33,49	36,21
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	10.443.340.363	4.027.036.312	19,08	20,61
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.521.221.264	6.022.446.148	29,34	30,35
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	19.451.852.658	7.327.076.751	25,38	27,24
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	4.308.064.926	1.922.606.740	47,28	48,03
Urusan Pemerintahan Pilihan	76.511.576.169	19.559.843.486	25,56	23,11
Dinas Perikanan	11.882.184.727	3.085.480.478	21,08	22,74
Dinas Perkebunan	27.628.691.683	4.774.968.485	17,95	18,84
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	21.825.480.328	7.731.810.295	26,09	27,54
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	15.175.219.431	3.967.584.228	20,98	23,30
Unsur Pendukung	189.931.245.164	47.501.035.468	25,01	38,81
Sekretariat Daerah	88.824.025.124	26.503.488.577	44,26	47,13
Sekretariat DPRD	101.107.220.040	20.997.546.891	29,68	30,48
Unsur Penunjang	401.963.215.210	126.296.028.618	31,42	34,40
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.340.825.165	3.988.861.714	29,99	40,00
Badan Pendapatan Daerah	18.709.484.172	6.963.387.114	37,03	39,56
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	356.535.005.632	112.655.705.852	29,46	31,61
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	14.377.900.241	2.688.073.938	25,72	26,44
Unsur Pengawas	10.809.636.007	4.195.787.617	38,82	36,49
Inspektorat Daerah	10.809.636.007	4.195.787.617	33,66	36,49
Unsur Kewilayahan	76.893.093.953	30.531.312.169	39,71	52,64
Kecamatan Tembilahan	10.723.776.820	4.456.446.088	47,00	57,91
Kecamatan Tembilahan Hulu	4.609.779.530	1.966.961.145	45,04	44,73
Kecamatan Tempuling	5.630.676.644	2.005.206.740	56,00	55,75
Kecamatan Batang Tuaka	3.245.673.857	989.790.701	64,67	63,66
Kecamatan Concong	2.458.849.791	1.110.121.841	59,50	59,34
Kecamatan Enok	4.427.521.417	1.783.325.080	41,00	41,25
Kecamatan Gaung	2.909.863.537	953.433.948	63,00	62,63
Kecamatan Gaung Anak Serka	4.191.558.633	1.734.853.561	63,60	62,99
Kecamatan Kateman	3.715.686.089	1.626.895.624	60,50	59,99

Kecamatan Kempas	4.022.653.778	1.510.603.371	54,75	53,78
Kecamatan Kemuning	2.973.556.975	1.094.200.270	59,87	61,57
Kecamatan Keritang	3.521.173.844	1.348.911.497	37,54	37,22
Kecamatan Kuala Indragiri	2.717.276.169	999.482.619	53,20	50,97
Kecamatan Mandah	3.114.825.828	1.167.535.198	51,75	51,40
Kecamatan Pelangiran	3.170.885.008	1.353.551.391	41,20	40,26
Kecamatan Pulau Burung	2.695.357.046	1.160.430.517	31,00	30,16
Kecamatan Reteh	4.503.283.064	1.755.818.823	65,99	65,48
Kecamatan Sungai Batang	2.742.912.300	1.181.601.990	52,82	52,65
Kecamatan Tanah Merah	3.132.218.677	1.251.410.538	58,64	60,02
Kecamatan Teluk Belengkong	2.385.564.946	1.080.731.227	41,29	41,08
Unsur Pemerintahan Umum	15.630.462.113	3.820.002.929	24,44	22,61
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15.630.462.113	3.820.002.929	23,50	22,61
Total	1.900.387.533.317	737.242.634.949	38,26	37,27

RKPD tahun 2022 merupakan RKPD tahun keempat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2019 - 2023. Total nilai APBD tahun 2022 sebesar Rp.2,006 triliun.

Secara ringkas, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					TW I		TW II			K	(Rp)			K	(Rp)
					K	(Rp)	K	(Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 + 8	11	12	13			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS PENDIDIKAN		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		467.197,99									DINAS PENDIDIKAN		
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	344.423,57	63.410,75	112.521,95	175932,70			DINAS PENDIDIKAN		
1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	persen	90	333,31	18	47,36	18	79,96	36	127,31	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	5	333,31	1	47,36	1	79,96	2	127,31	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di berikan Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	337.580,59	3	62.853,05	3	111.891,98	6	174745,03	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Bulan	12	337.580,59	3	62.853,05	3	111.891,98	6	174745,03	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.03	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Bulan	12	24,00	3	6,03	3	6,01	6	12,04	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor Dibayarkan	Bulan	12	24,00	3	6,03	3	6,01	6	12,04	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.05	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang didata dan diolah	Orang	100	212,27	100	63,29	100	53,88	200	117,17	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.05	3	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang didata dan diolah	orang	100	212,27	100	63,29	100	53,88	200	117,17	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	2.387,35	13	197,53	20	281,52	33	479,05	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	jenis	10	14,22	3	3,21	3	4,28	6	7,49	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	3	444,73	0	-	0	-	0	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	4	128,42	1	20,56	1	38,75	2	59,31	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Jenis	11	45,25	3	11,21	3	11,31	6	22,52	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordiasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	134	337,35	15	37,59	28	69,73	43	107,31	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sekolah yang akan dilakukan inventarisasi	sekolah	35	500,00	4	54,56	4	55,26	8	109,82	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan elektronisasi data yang dikelola	persen	100	547,38	13	70,40	19	102,21	32	172,61	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen	100	774,00	25	192,17	25	188,51	50	380,69	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	3	187,20	3	42,21	3	39,06	6	81,27	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	46	586,80	46	149,96	46	149,45	92	299,42	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		3	3.112,05	2	51,32	0	20,08	2	71,40	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		3	75,65	2	42,22	0	10,98	2	53,20	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diselakkan	Jenis	4	36,40	1	9,10	1	9,10	2	18,20	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	3.000,00	0	-	0	-	0	0,00	DINAS PENDIDIKAN
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	41	40,25				
									Predikat kinerja :	T	T				
1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		APS SD	Persen	115,6	122.093,52	596,91	28.129,08	28725,99			DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.01	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		115,6	80.832,43	216,56	20.408,61	20625,17		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas SD/MI yang dibangun		24	5.195,00	0	33,09	0	34,45	0	67,54	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Sekolah	10	1.062,00	0	54,11	0	224,38	0	278,49	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebelur SD/MI yang diadakan		2150	3.500,00	0	-	0	32,25	0	32,25	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik SD	Orang	722	1.000,00	0	-	0	40,86	0	40,86	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Ujian Sekolah Tingkat SD/MI		15000	150,00	0	35,68	15000	120,06	15000	155,74	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah pelaksanaan monitoring pembangunan sarana dan prasarana sekolah SD/MI yang dilakukan	Satuan	124	200,00	9	-	41	57,14	50	57,14	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa, Pembina dan Pelatih Seleksi dan Pembinaan Peserta Lomba Bidang Sains, Olahraga dan Seni Siswa SD	Orang	124	152,89	0	5,82	124	92,47	124	98,29	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Bantu Daerah Penerima Honor	Orang	13	16.267,41	0	65,02	3	3.008,46	3	3073,48	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Karier	Orang	40	327,24	0	12,18	0	28,34	0	40,53	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Bimtek Kegiatan Mutu Satuan Pendidikan Dasar	Orang	84	24,56	0	-	0	-	0	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri penerima dana BOS	Sekolah	520	82.906,40	-	93	17.018,23	93	17018,23	DINAS PENDIDIKAN	
1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang dibina dalam pengelolaan Dana BOS	Sekolah	410	167,67	41	16,48	90	21,19	131	37,67	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.02	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	Persen	100	32.810,63	16,67	168,86	39,08	7.183,74	56	7285,21	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang SMP/MTs yang Dibangun		14	2.980,00	0	-	0	6,89	0	6,89	DINAS PENDIDIKAN
1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Sekolah	4	450,00	0	-	0	71,93	0	71,93	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)			K					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Ruang SMP/MTs yang direhab	1	150,00	0	-	0	-	0	0,00		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebelur SMP yang diadakan	2655	2.170,00	0	-	0	-	0	0,00		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Beasiswa	330	803,56	0	-	0	43,99	0	43,99		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Ujian Sekolah Tingkat SMP	6255	112,55	0	-	6255	75,61	6255	75,61		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba yang mewakili Kabupaten Inhil Ke Tingkat Provinsi	28	93,09	0	5,82	0	10,76	0	16,58		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru Bantu Provinsi Penerima	1021	6.570,54	1021	133,20	1021	1.260,80	1021	1394,00		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik yang mengikuti sosialisasi	40	384,38	0	-	0	33,68	0	33,68		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Monitoring Kurikulum 2013 Tingkat SMP yang dilaksanakan	29	47,84	0	-	20	20,81	20	20,81		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri Penerima Dana BOS	109	18.812,00	0	29,84	109	5.538,12	109	5567,96		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang dibina dalam pengelolaan Dana BOS	136	236,67	136	29,84	136	23,93	136	53,77		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio guru terhadap murid pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	100	8.109,95		175,50	464,82	1091,16			DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun	13	2.396,94		36,39	0	-	0	36,39		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang direhab	1	310,24		5,59	0	24,94	0	30,53		DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pelaksanaan Pendidikan Karakter PAUD	Orang	162	265,62	0	7,78	0	-	0	7,78		DINAS PENDIDIKAN	
1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Vistasi dan Monitoring Lembaga PAUD	Kali	162	201,93	16	13,34	31	36,99	47	50,33		DINAS PENDIDIKAN	
1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Guru Bantu Daerah Penerima Honor	Orang	650	3.965,23	650	8,42	650	299,66	650	308,08		DINAS PENDIDIKAN	
1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru yang lulus PPG dan mendapat Sertifikat Pendidik	Orang	40	320,25	0	-	0	9,65	0	9,65		DINAS PENDIDIKAN	
1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta Bimtek Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Orang	120	649,74	120	554,82	0	93,58	120	648,40		DINAS PENDIDIKAN	
1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	100	340,51		35,99	71,91	107,90				DINAS PENDIDIKAN		
1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga Pendidik Non Formal yang mengikuti pelatihan	Peserta	70	155,00	0	11,41	70	60,05	70	71,46		DINAS PENDIDIKAN	
1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Vistasi dan Monitoring Lembaga Nonformal	Kali	102	185,51	24	24,58	0	11,87	24	36,44		DINAS PENDIDIKAN	
											Rata-rata capaian kinerja (%) :	31	23,10				
											Predikat kinerja :	R	SR				
1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	50	680,89		26,00		31,14	0	57,14		DINAS PENDIDIKAN		
1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah SD yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal	Sekolah	550	271,35		-	16,18	0	16,18		DINAS PENDIDIKAN		
1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar	Orang	120	271,35	0	-	0	16,18	0	16,18		DINAS PENDIDIKAN	
1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal	Sekolah	450	409,54	26,00		14,96	0	40,96		DINAS PENDIDIKAN		
1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum Paud	Orang	120	409,54	0	26,00	0	14,96	0	40,96		DINAS PENDIDIKAN	
											Rata-rata capaian kinerja (%) :	0	7,98				
											Predikat kinerja :	SR	SR				
											Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	24	23,78				
											Predikat kinerja :	SR	SR				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN		
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			135.269,93								DINAS KESEHATAN		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	88.004,45	13.858,66		24.138,24		37996,90		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	460,03	25	36,00	25	72,54	50	108,54		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	9	221,86	1	24,00	2	39,37	3	63,37		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	238,18	0	12,00	1	33,18	1	45,18		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen	100	75.495,59	25	13.620,10	25	18.949,54	50	32569,64		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	75.457,01	1	13.611,10	1	18.940,54	1	32551,64		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	1	38,58	0	9,00	0	18,00		DINAS KESEHATAN		
1	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	123,37	0	17,70	37	27,26	37	44,96		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata	Unit	8	123,37	0	17,70	1	27,26	3	44,96		DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	280,00	3,00		83,23	86,23			DINAS KESEHATAN		
1	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data	1	100,00	0	-	0	13,70	0	13,70		DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	1	180,00	0	3,00	1	69,53	1	72,53		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	594,32	11,11	34,66	32,72	63,83	44	98,49		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Set	15	243,95	0	-	0	0	0,00		DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	10	140,18	2	19,81	3	37,12	5	56,93		DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
				8	7	8	(Rp)	9	(Rp)	10 = 9 : 8	11	12	13					
1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	4	14,75	0	-	3	10,50	3	10,50					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	36	12,00	2	0,60	13	4,20	15	4,80					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi K daerah yang dilaksanakan	Kali	40	183,45	10	14,25	9	12,01	19	26,25					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	90	148,35					0	0,00					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang disediakan		4	148,35	0	-	0	-	0	0,00					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	90	10.728,59			92,87		4.893,58	4986,45					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	Lembar	1500	15,00	0	-	500	5,00	500	5,00					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	7	525,60	7	92,87	7	160,58	7	253,45					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	37	54,98	0	-	28.1981.6674	41,90	29	41,90					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersahannya	Ruang	30	10.133,01	30	-	30	4.686,09	30	4686,09					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	90	174,20			54,32		48,27	102,59					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipanjangkan Perizinannya		15	92,20	0	2,55	2,55	8,02	3	10,57					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service		223	60,00	47	51,77	58	34,25	105	86,03					DINAS KESEHATAN		
1 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang diperlihara	Ruang	9	22,00	9	-	9	6,00	9	6,00					DINAS KESEHATAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	40	39,00						
										Predikat kinerja :	T	T						
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	95	45.729,75			920,38		19.967,48	20887,86					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Fasyankes sesuai standar	Persen	90	9.110,72			90,76		386,56	477,32					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	Unit	1	241,09	0	6,00	0	21,23	0	27,23					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes	Kali	1	1.326,18	0	16,41	0	28,43	0	44,84					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya	Puskesmas	30	128,80				29,28	0	29,28					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	Unit	2	2.875,00	0	-	0	-	0	0,00					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarpras Pustu yang di sediakan	Unit	1	225,00	0	-	0	10,32	0	10,32					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Unit	10	1.342,64	0	-	0	6,72	0	6,72					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di puskesmas dan jaringannya	Jenis	1	2.218,57	0	41,03	0	75,28	0	116,31					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas yang Hasil dilakukan pemeliharaan	Puskesmas	1	177,63	0	27,33	0	18,00	0	45,33					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Sarana Prasarana Pustu yang Dilakukan	Kali	1	474,82	0	-	0	133,59	0	133,59					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Obat, BMHP dan Vaksin ke Puskesmas se Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemanfaatan sistem Elektronik logistik obat dan BMHP di UPTD IFK Kab. Indragiri Hilir	Puskesmas	30	101,00	0	-	19	63,70	19	63,70					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Fasyankes sesuai standar	Persen	90	34.449,23			455,92		19.137,64	19593,55					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Program KIA	Puskesmas	30	150,00	1	4,26	15	71,73	16	76,00					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Balita yang diberikan Imunisasi	Balita	10	120,00	1	6,99	1	11,91	2	18,90					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kasus Gizi dan Balita Stunting	Kali	1	100,00	0	8,76	1	29,05	1	37,81					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BIAS di kabupaten Indragiri hilir	Puskesmas	30	60,00	1	4,44	6	15,71	7	20,16					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas yang telah di evaluasi program lansia	Puskesmas	30	560,14	1	12,05	2	191,74	3	203,79					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	130	514,83	17	68,60	18	68,31	35	136,91					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	13916	701,96	179	9,00	3907	15,48	4086	24,48					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian keluarga sadar gizi	Puskesmas	30	150,00	2	7,69	7	33,78	9	41,47					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan limbah dan sampah fasyankes	Puskesmas	30	203,80	0	-	5	31,52	5	31,52					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengembangan media promosi kesehatan	Puskesmas	30	845,96	1	4,01	4	94,85	5	98,86					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi pelayanan kesehatan Tradisional	Puskesmas	30	150,00	2	9,38	6	28,09	8	37,47					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang dilaksanakan	Puskesmas	47	100,00	1	4,50	25	51,11	26	55,61					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan	Satuan	30	300,00	2	14,22	5	44,59	7	58,81					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan NAPZA	Puskesmas	30	250,00	1	2,00	4	28,51	5	30,51					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	100	148,46	100	15,68	100	23,39	100	39,08					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kegiatan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Kali	10	350,00	1	10,35	1	28,99	2	39,34					DINAS KESEHATAN		
1 2 2 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Peserta terlayani bagi peserta Pelayanan Kesehatan dan Rujukan	Persen	100	27.707,64	1	150,42	56	15.368,68	57	15519,10					DINAS KESEHATAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	(Rp)	9	(Rp)	10 = 9 : 8	(Rp)	11	(Rp)	12	(Rp)		13	
1.2.2.2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran serta masyarakat demi terwujudnya kesehatan	Orang	20	343,52	1	6,12	1	7,71	2	13,83				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Laboratorium yang dikelola dan dipelihara	Laboratorium	1	324,94	1	23,98	1	69,42	1	93,41				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Keliling yang disediakan	Unit	1	884,86	0	-	0	-	0	0,00				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian	Sarana	30	423,27	1	18,00	5	63,90	6	81,90				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dinilai berprestasi	Puskesmas	15	450,00	1	5,68	5	141,94	6	147,63				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Fogging Fokus DBD	Kali	11	4.676,80	0	69,77	6	2.619,40	6	2689,16				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase penggunaan IT dalam Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Persen	100	1.461,10		312,49		377,37		689,85				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen profil kesehatan yang dirangkum dari data-data dinkes & Plm	Dukumen	1	216,27	0	19,78	1	48,18	1	67,95				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase terbentuknya sistem pengelolaan dan penyimpanan data terpadu	Persen	90	576,15	32	207,07	26	161,55	58	368,62				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Akses Jaringan di wilayah kerja Puskesmas yang ditingkatkan	Puskesmas	30	668,69	6	85,64	8	167,64	14	253,28				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Fasilitas Kesehatan	Persen	100	708,69	36	61,21	20	65,92	56	127,13				DINAS KESEHATAN		
1.2.2.2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sarana	Sarana	83	201,85	30	61,21	17	65,92	47	127,13				DINAS KESEHATAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%):	29	26,17						
										Predikat kinerja:	R	R						
1.2.3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	Persen	60	580,60		24,88		773,23		798,11				DINAS KESEHATAN		
1.2.3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Persen	90	349,99		24,88		764,08		788,96				DINAS KESEHATAN		
1.2.3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Ketersediaan tenaga kesehatan	Orang	100	3.010,30	0	24,88	26	764,08	26	788,96			DINAS KESEHATAN		
1.2.3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Manajemen Puskesmas/loka Karya Mini Tribunal		30	200,00	0	5,91	6	30,22	6	36,12			DINAS KESEHATAN		
1.2.3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Persen	90	230,61		-		9,15		9,15				DINAS KESEHATAN		
1.2.3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan, jenis, dan kualitas tenaga kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan (sesuai standar)	Desa	10	230,61	0	-	1	9,15	1	9,15			DINAS KESEHATAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%):	19	16,08						
										Predikat kinerja:	SR	SR						
1.2.4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek dan Keamanan Pangan yang Beredar Sesuai Standar	Satuan	251,09		6,12			15,82		21,94				DINAS KESEHATAN		
1.2.4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan	Persen	100	153,14		6,12		11,81		17,93				DINAS KESEHATAN		
1.2.4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan terhadap sarana TTU/TPM dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		30	153,14	2	6,12	3	11,81	5	17,93			DINAS KESEHATAN		
1.2.4	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	Persen	100	97,96		-		4,01		4,01				DINAS KESEHATAN		
1.2.4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kali	2	97,96	0	-	0	4,01	0	4,01			DINAS KESEHATAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%):	8	7,90						
										Predikat kinerja:	SR	SR						
1.2.5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	85	704,04		22,56		49,48		72,04				DINAS KESEHATAN		
1.2.5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	239,51		6,92		27,06		33,98				DINAS KESEHATAN		
1.2.5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Puskesmas	30	239,51	1	6,92	4	27,06	5	33,98			DINAS KESEHATAN		
1.2.5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	114,53		4,92		-		4,92				DINAS KESEHATAN		
1.2.5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promosi, sosialisasi, pembinaan dan edukasi hidup bersih dan sehat	Puskesmas	30	114,53	2	4,92	0	-	2	4,92			DINAS KESEHATAN		
1.2.5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persen	100	350,00		10,72		22,42		33,14				DINAS KESEHATAN		
1.2.5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang di beri pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar	Puskesmas	30	350,00	1	10,72	2	22,42	3	33,14			DINAS KESEHATAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%):	11	9,32						
										Predikat kinerja:	SR	SR						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														DINAS KESEHATAN		
1.2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				36.493,14										DINAS KESEHATAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	6.823,40		1.408,67	1.301,67	0	2710,34						RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	120	1.871,00	30	427,17	548,38	60	975,56						RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung Pelayanan dan Manajemen yangterjaga kebersihannya	Gedung	2	4.952,40	2	981,50	753,29	2	1734,79					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	persen	100	55.055,00		15.613,66	26.482,00	0	42095,66						RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.1.2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	55.055,00	28	15.613,66	49	26.482,00	77	42095,66				RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	45	39,55						
										Predikat kinerja :	T	T						
1.2.2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	Persen	100	1.970,99		79,63	932,13		1011,76					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kevenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	1.949,71		-	579,55	0	579,55						RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.2.2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	Paket	1	529,59	0	-	1	519,07	1	519,07				RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.2.2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat Rumah Sakit yang di adkan	Jenis	45	1.420,12		-	60,48	0	60,48					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	21,28		79,63	352,58	0	432,21						RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.2.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi HIV	Orang	60	14,08	0	-	60	10,30	60	10,30				RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.2.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Operasional Pelayanan Penyakit menular dan tidak menular yang tersedia	Paket	1	6.798,94	0	79,63	0	342,29	0	421,92				RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	50	45,40						
										Predikat kinerja :	ST	T						
1.2.5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	75,00		4,50	77,80		82,30					RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebijakan PHBS dan berwawasan kesehatan	Persen	100	50,00		-	52,80	0	52,80						RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.5.2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Orang yang di lakukan promkes di Rumah Sakit	Orang	30	300,00		-	6	52,80	6	52,80				RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	25,00		4,50	25,00	0	29,50						RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
1.2.5.2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pemberian Materi Promosi Kesehatan yang di laksanakan	Kali	50	125,00	2	4,50	10	25,00	12	29,50				RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	22	20,60						
										Predikat kinerja :	SR	SR						
										Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	39	35,18						
										Predikat kinerja :	S	S						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			8.407,71											RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	8.081,71		1.007,81	2.048,99	0	3056,80					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	3.916,71		539,01	785,97	0	1324,99						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji ASN	Orang	52	3.916,71	52	539,01	52	785,97	52	1324,99				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	90	199,16		11,94	51,39	0	63,33						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Persen	100	10,00	5	0,50	17	1,65	22	2,14				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan dan Urusan Pemerintah	Persen	90	95,80	1	0,37	9	9,40	10	9,77				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persen	90	30,66	9	2,47	21	6,96	30	9,43				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Persen	90	12,70	9	1,26	21	2,97	30	4,23				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Makan dan Minum Pasien dan Petugas Ramadhan	Persen	90	50,00	13	7,35	55	30,41	68	37,76				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.957,84		16	313,59	30	583,04	46	896,63				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	100	8,24	13	1,00	24	2,00	37	3,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Jasa Komunikasi ,Air dan Listrik	Persen	100	80,00	30	24,29	46	36,44	76	60,73				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persen	100	1.869,60	16	288,30	29	544,60	45	832,90				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	8,00		3	0,31	15	1,28	18	1,58				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	90	8,00	4	0,31	14	1,28	18	1,58				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan BLUD	Persen	100	2.000,00		7	142,96	32	627,31	39	770,27				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K
				K	(Rp)	K	(Rp)	8	9			10 = 9 : 8				
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tercapainya Kegiatan BLUD	Persen	100	2.000,00	7	142,96	32	627,31	39	770,27				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG	
								Rata-rata capaian kinerja (%):		40	38,20					
								Predikat kinerja:		T	S					
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam kondisi baik	Persen	90	326,00		18,64		74,86		93,50				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persen	90	316,00		18,29		73,86	0	92,15				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG	
1 2 2 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Kebutuhan Obat Rumah Sakit	Persen	90	120,00	0	-	0	-	0	0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG	
1 2 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Ketersediaan Sarana, prasarana dan penunjang medik sesuai standar	Persen	90	196,00	8	18,29	34	73,86	42	92,15				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	10,00		0,35		1,00	0	1,35				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG	
1 2 2 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan	Persen	100	10,00	4	0,35	10	1,00	14	1,35				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG	
								Rata-rata capaian kinerja (%):		20	20,17					
								Predikat kinerja:		SR	SR					
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program(%):		33	32,98					
								Predikat kinerja:		S	R					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-											RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			18.461,79											RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	17.960,79		4.867,84		4.126,26		8994,10				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	4.622,79		718,13		1.059,82	0	1777,95				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tenaga ASN	Orang	59	4.622,79	59	718,13	59	1.059,82	59	1777,95				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	816,20		192,58		131,03	0	323,61				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	jenis	39	32,86	9	7,33	1	1,15	10	8,48				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang disediakan	Jenis	3	425,54	1	147,96	1	107,03	2	254,99				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	30	207,81	6	37,30	3	22,85	9	60,15				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	50	149,99	0	-	0	-	0	0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	4.019,20		498,69		913,83	0	1412,52				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang terlayani	jenis	1000	10,00	50	0,50	100	1,00	150	1,50				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan	jenis	5	272,40	5	58,37	5	54,21	5	112,58				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Yang dibayarkan	Orang	72	3.736,80	72	439,82	72	858,62	72	1298,44				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	100	8.500,00		3.458,44		2.021,57	0	5480,01				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	Persen	100	8.500,00	41	3.458,44	24	2.021,57	65	5480,01				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
								Rata-rata capaian kinerja (%):		39	34,30					
								Predikat kinerja:		T	S					
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persen	90	501,00		12,59		12,03		24,62				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Sarana, prasarana dan penunjang medik sesuai standar	Persen	100	501,00		12,59		12,03	0	24,62				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 2 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat yang di Kalibrasi	Unit	3	150,00	0	-	0	-	0	0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 2 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat-obat rumah sakit yang disediakan	Jenis	90	315,00	0	-	0	-	0	0,00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
1 2 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Kebersihan yang disediakan	Jenis	10	36,00	4	12,59	3	12,03	7	24,62				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
								Rata-rata capaian kinerja (%):		23	22,79					
								Predikat kinerja:		SR	SR					
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program(%):		31	28,55					
								Predikat kinerja:		R	R					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			122.728,17											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Dokumen	10	12.668,31		1.796,13		2.554,22		4350,36				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	8.456,18		1.147,79		1.660,05	0	2807,84				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7		8	9	8	9	10 = 9 + 8	11	12	13					
1.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	70	8.448,90	70	1.146,70	70	1.658,93	70	2805,63			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen	10	7,28	1	1,09	2	1,12	3	2,21			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	100	301,47	11,98				0	11,98			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		25	301,47	3	11,98	0		3	11,98			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.714,81	198,74			368,58	0	567,32			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	90	268,17	3	8,20	20	58,71	23	66,90			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	8	170,00	2	33,64	3	54,68	5	88,32			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	10	72,56	1	9,08	2	10,97	3	20,05			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	40	3,60	0		0		0	0,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	168	1.200,48	21	147,83	34	244,23	55	392,05			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	1.669,59	389,31			393,90	0	783,21			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	90	11,50	56	7,11	10	1,31	66	8,42			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	10	272,39	10	70,05	10	66,73	10	136,77			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	86	1.385,70	86	312,15	86	325,87	86	638,02			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	526,25	48,31			131,68	0	180,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit	9	55,00	3	16,43	9	52,05	12	68,48			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit	32	108,00	2	6,63	5	15,77	7	22,39			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	201	25,00	77	9,49	117	14,43	194	23,92			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	89	338,25	4	15,77	14	49,43	18	65,20			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
										46	42,30							
										Predikat kinerja :								
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi baik	Persen	60	27.386,24	374,75			948,43		1323,18			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.2.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Persen	70	21.344,20	120,60			320,46	0	441,07			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.2.2.01.4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	1.170,55	0	43,08	0	32,23	0	75,32			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.2.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah panjng turap/tahud/bronjong di wilayah sungai yang di bangun		86	925,50	0	16,75	0	37,85	0	54,60			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.2.2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalsasi		112	19.136,45	0	58,62	0	234,94	0	293,56			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.2.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi pengelolaan air baku / air permukaan yang dikeluarkan		15	111,70	0	2,15	3	15,44	3	17,59			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.2.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	60	6.042,04	254,15			627,97	0	882,11			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.2.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	KM	12	1.832,83	0	27,24	0	110,10	0	137,34			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.2.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang di monitoring dan dievaluasi	Kecamatan	20	4.209,21	226,91		1	517,87	1	744,77			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
										4	9,13							
										Predikat kinerja :								
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	Unit	11	10.587,87	48,00			1.434,57	0	1482,58			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	70	10.587,87	48,00			1.434,57	0	1482,58			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.3.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen DED Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin yang disusun	Dokumen	12	1.691,75	0	1,90	0	8,71	0	10,61			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.3.2.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang jaringan perpipaan dan sambungan rumah yang dibangun	SR	1500	7.423,08	39,77		360	1.387,80	360	1427,57			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.3.2.01.4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan perpipaan dan sambungan rumah yang dibangun	SR	1500	1.043,04	0	6,33	0	38,07	0	44,40			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
										8	8,04							
										Predikat kinerja :								
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan/gedung dalam kondisi baik		90	16.027,65	41,77			3.985,35		4027,12			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
1.3.8.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah dalam kondisi baik		90	16.027,65	41,77			3.985,35	0	4027,12			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	(Rp)	TW I		TW II								
						K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)		K
						8				10 = 9 ÷ 8		12		13		
1.3.8.2.01.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring pada Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Bangunan	Kali	87	15.969,10	6	37,64	13	3.978,36	19	4016,01					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.8.2.01.9	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Monitoring Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB yang dilaksanakan	Kali	90	58,55	9	4,13	10	6,98	19	11,11					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Rata-rata capaian kinerja (%):				21	22,06					
						Predikat kinerja:				SR	SR					
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	75	53.817,54		2.590,30		6.903,34		9493,65					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	74	53.817,54		2.590,30		6.903,34	0	9493,65					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.10.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun	Persen	100	3.148,50	0	8,26	0	188,49	0	196,75					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.10.2.01.3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Sektoral yang disusun	Persen	20	987,55	0	-	0	15,44	0	15,44					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.10.2.01.8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di Rekonstruksi	Km	6	15.203,99	0	12,00	1,00	3.085,45	1	3097,45					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.10.2.01.9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi	Km	1	10.179,78	0,13	2.389,08	0,32	3.007,46	0	5396,55					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan Wilayah III yang dibangun	Unit	10	17.895,10	0	-	0	24,15	0	24,15					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Di Rehabilitasi	Unit	10	5.709,12	1	117,29	1	505,70	2	622,99					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan	Laporan	2	693,50	0	63,67	1	76,64	1	140,31					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Rata-rata capaian kinerja (%):				19	16,07					
						Predikat kinerja:				SR	SR					
1.3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	Persen	90	440,56		3,85		103,23		107,09					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola	Persen	100	211,54		1,95		97,38	0	99,33					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.11.2.02.7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data ASBU yang di update	Dokumen	1	211,54	0	1,95	1	97,38	1	99,33					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan Monev Jasa Konstruksi	Persen	100	103,83		1,90		5,85	0	7,75					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.11.2.04.3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Kompeten dibidangnya	Rekomendasi	33	103,83	1	1,90	2	5,85	3	7,75					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Rata-rata capaian kinerja (%):				55	27,21					
						Predikat kinerja:				SR	R					
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)		100	1.800,00		58,51		270,61		329,12					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR	Dokumen	2	603,69		8,11		106,52	0	114,64					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.01.4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Berita Acara yang ada	Dokumen	1	603,69	0	8,11	0	106,52	0	114,64					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Ruang yang Tersusun sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan	Persen	1	219,64		12,32		85,45	0	97,77					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang tersedia	Dokumen	1	219,64	0	12,32	1	85,45	1	97,77					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Lama Waktu Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Hari	4	404,74		27,94		37,25	0	65,19					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Inventarisasi Pemanfaatan dan pengembahan lahan terkait investasi dan pembangunan Daerah	Dokumen	1	404,74	0	27,94	0	37,25	0	65,19					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	100	571,94		10,14		41,39	0	51,53					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.04.3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Berita Acara Laporan	Laporan	20	278,45	1	8,07	2	24,06	3	32,13					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.3.12.2.04.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Berkas Informasi Tata Ruang	Berkas	100	293,49	0	2,07	0	17,33	0	19,40					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Rata-rata capaian kinerja (%):				23	19,55					
						Predikat kinerja:				SR	SR					
						Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program(%):				25	20,62					
						Predikat kinerja:				SR	SR					
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			44.030,15												DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	7.459,59		1.129,85		1.670,11		2799,95					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	100	-		-		-	0	0,00					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	1	-	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen	3	5.647,21		785,38		1.133,50		1918,88					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun	1	5.487,46	1	742,58	1	1.075,19	1	1817,77					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKPD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7	7	8	9	9	10 = 9 : 8	11	11	12	12	13				
1.4.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan	3	159,75	1	42,80	1	58,31	2	101,11				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	121,20		34,80		34,80		69,60				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	Orang	8	121,20	8	34,80	8	34,80	8	69,60				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	483,99		71,86		96,56		168,41				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis	6	17,42	6	3,53	6	2,55	6	6,07				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jaman makan minum rapat yang tersedia	Kali	15	77,10	1	5,77	10	31,94	11	37,71				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang disediakan	Ls	26	36,00	7	9,50	6	8,50	13	18,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Media	14	33,60	1	1,44	1	3,24	2	4,68				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali	69	319,87	11	51,62	11	50,33	22	101,95				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	975,23		213,24		254,25		467,49				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran	Buah	2550	12,90	1285	6,50	160	0,80	1445	7,30				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	Rkening	5	295,26	5	56,69	5	52,54	5	109,23				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	26	93,47	4	12,05	17	60,51	21	72,55				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga supir yang dibayarkan	Orang	1	573,60	1	138,00	1	140,40	1	278,40				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	204,45		24,56		151,00		175,57				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Unit	25	25,00	16	16,37	5	4,54	21	20,90				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinan	Unit	20	20,00	2	1,20	5	5,04	7	6,24				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/Service	Unit	4	20,00	1	5,64	1	2,55	2	8,17				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Ruang	10	126,45	0	-	10	134,60	10	134,60				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	2	13,00	0	1,36	1	4,30	1	5,66				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
									Rata-rata capaian kinerja (%):	50	45,20							
									Predikat kinerja:	ST	T							
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	45	1.875,00		61,85		93,25		155,10				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.2.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dilaksanakan	Persen	100	1.517,66		32,97		63,12		96,09				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.2.2.03.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Site plan dan DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit	7	681,86	0	17,20	1	5,61	1	22,81				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.2.2.03.4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang dibangun	Unit	10	835,80	0	15,76	1	57,51	1	73,28				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.2.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun	Persen	100	52,55		-		-		0,00				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.2.2.05.2	Penausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Pemanfaatan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Laporan	1	52,55	0	11,18	0	11,60	0	22,78				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.2.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlayani	Persen	100	304,79		17,70		18,52		36,22				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.2.2.06.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang di Monitoring	unit	10	304,79	1	17,70	1	18,52	2	36,22				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
									Rata-rata capaian kinerja (%):									
									Predikat kinerja:	SR	SR							
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar	75	1.083,13		45,80		50,66		96,46				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.3.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak	BKM	2	857,33		34,08		34,84	0	68,92				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.3.2.02.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DED	Dokumen	7	433,63	0	15,72	0	9,33	0	25,06				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.3.2.02.3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Penerima	BKM	1	423,70	0	18,36	0	25,50	0	43,86				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak	Persen	100	225,80		11,72		15,83	0	27,54				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.3.2.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit	5	225,80	0	11,72	0	15,83	0	27,54				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
									Rata-rata capaian kinerja (%):	0	9,44							
									Predikat kinerja:	SR	SR							
1.4.4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar	75	537,24		31,47		37,04		68,51				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.4.4.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Tertelaksananya Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persen	100	537,24		31,47		37,04	0	68,51				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 + 8	11	12	13	14	15				
								Rata-rata capaian kinerja (%):	69	67,39								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
1	5	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	4.407,45	380,69	2.895,58	0	3276,27			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	5	3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani	Persen	100	4.373,95	380,69	2.895,58	0	3276,27			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan yang disediakan	Jenis	5	3.311,75	1	102,69	3	2.612,42	4	2715,11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang bersertifikat sebagai pengelola penanganan kebakaran	Orang	3	1.062,20	3	278,00	3	283,16	3	561,16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
								Rata-rata capaian kinerja (%):	65	67,41								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	147,74	93,78	84,36	0	178,14			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	5	4	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase efektivitas pencegahan, pengendalian pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun	Persen	100	41,78	65,90	55,99	0	121,89			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah sarana prasarana evakuasi dan penanganan korban yang dilakukan	Jenis	15	124,83	15	65,90	15	55,99	15	121,89	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1	5	4	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tertaksamnya Inspeksi dan proteksi Kebakaran	Persen	100	64,47	8,67	14,37	0	23,04			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pralatan Proteksi kebakaran yang didata	Unit	450	64,47	450	8,67	450	14,37	450	23,04	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1	5	4	2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	hasil Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen	100	41,49	19,21	14,00	0	33,21			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	5	4	2.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Kejadian	8	41,49	4	19,21	3	14,00	7	33,21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
								Rata-rata capaian kinerja (%):	60	71,14								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program(%):	65	68,64								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.798,09							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	90	5.671,37	922,63	1.366,81	0	2289,43			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	161,19	29,33	19,12	0	48,45			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	9	28,04	1	4,52	2	1,82	3	6,34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	25	133,14	5	24,81	3	17,29	8	42,10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	3.829,18	692,00	1.023,34	0	1715,34			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	35	3.765,09	35	675,44	35	1.004,75	35	1680,18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen	9	64,09	2	16,56	3	18,59	5	35,15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Stel	98	131,18	17,10	103,78	0	120,88			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Stel	98	131,18	98	17,10	98	103,78	98	120,88	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	643,17	98,01	118,17	0	216,18			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	10	6,12	2	1,46	3	1,30	5	2,76	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	5	110,46	1	14,77	1	25,42	2	40,19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	4	238,31	1	49,43	1	49,43	2	98,86	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	3	7,02	1	1,73	1	1,83	2	3,56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Exemplar	816	8,60	117	1,23	80	0,84	197	2,07	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	70	272,67	8	29,38	10	39,36	18	68,75	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	390,83	-	-	0	0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	10	390,83	0	-	0	0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	90	113,64	27,63	27,75	0	55,39			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100	2,70	24	0,65	32	0,85	56	1,50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
				8	9	10 = 9-8	11	12	13									
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	5.574,59		895,66		1.377,40		2273,06					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	pesen	100	58,35		-		32,35		32,35					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	7	31,93	2	-	3	18,98	5	18,98					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	dokumen	5	26,42	1	-	2	13,37	3	13,37					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen	100	4.469,59		667,85		1.002,91		1670,75					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	32	4.469,59	32	667,85	32	1.002,91	32	1670,75					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	perse	100	370,74		102,30		136,02		238,32					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	jenis	6	5,31	2	1,50	8	7,38	10	8,88					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	2	13,55	0	-	2	13,55	2	13,55					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	8	43,01	2	8,60	4	18,90	6	27,50					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	2	16,30	1	6,36	1	6,10	2	12,46					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	exampler	50	80,00	0	-	3,125	5,00	3	5,00					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	47	212,57	19	85,84	19	85,10	38	170,94					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen	100	576,70		113,72		157,71		271,43					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	215,86	26	55,21	36	77,54	62	132,75					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Atr dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	3	139,44	3	11,71	3	13,02	3	24,73					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	13	221,40	13	46,80	13	67,15	13	113,95					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	persen	100	99,22		11,80		48,41		60,21					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	27	19,00	5	3,75	15	9,95	20	13,70						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	14	10,00	0	-	0	-	0,00	0	0,00					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	53	15,97	27	8,05	31	9,21	58	17,26					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	54,25	0	-	1	29,25	1	29,25						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
									Rata-rata capaian kinerja (%):	69	62,91							
									Predikat kinerja:	ST	ST							
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	165,00		11,88		22,73		34,61					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	persen	100	165,00		11,88		22,73	0	34,61					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 3 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	5	124,68	0	2,19	0	19,68	0	21,86					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 3 2.01 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kerjasama antar lembaga/sector swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	6	40,32	0	9,70	2	3,05	2	12,75						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
									Rata-rata capaian kinerja (%):	17	24,58							
									Predikat kinerja:	SR	SR							
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan/Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	persen	85	600,00		6,62		161,14		167,76					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 4 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Informasi Pasar kerja	persen	100	600,00		6,62	0	161,14		167,76					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 4 2.01 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja	orang	3000	40,00	600	-	900	19,48	1500	19,48					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 4 2.01 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang teresap dalam Bentuk Kelompok Kerja	orang	180	560,00	27	6,62	27	141,66	54	148,28					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
									Rata-rata capaian kinerja (%):	40	37,58							
									Predikat kinerja:	T	S							
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100	150,00		15,93		36,91		52,83					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 5 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Jumlah Perselisihan Hunungan Industrial	persen	90	150,00		15,93		36,91	0	52,83					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 5 2.02 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ketetaggerjaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir	kasus	10	40,00	10	13,18	10	9,60	10	22,78					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 5 2.02 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey KHL yang dilakukan	kali	10	70,00	1	2,75	2	13,79	3	16,54					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2 7 5 2.02 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsotek	100	40,00	0	-	34	13,52	34	13,52						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
									Rata-rata capaian kinerja (%):									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	(Rp)	9	(Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
							Predikat kinerja :				SR	SR					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-										DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				200,00										DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi	persen	100	133,40		34,07		111,93		145,99			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	3	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi	dokumen	1	133,40		34,07		111,93	0	145,99		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	3	2.01	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi		1	32,85	0		1	12,33	1	12,33	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	lokasi	1	163,11	0	28,78	1	61,26	1	90,04	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan		1	34,00	0	3,55	1	25,79	1	29,34	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	3	2.01	7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahannya tentang Peningkatan SDM	orang	225	33,40	45	1,74	56,25	12,55	101	14,29	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
											Rata-rata capaian kinerja (%) :		60	55,45			
											Predikat kinerja :		ST	ST			
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	persen	100	66,60		1,60		16,72		18,32			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	4	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	lokasi	1	66,60		1,60		16,72	0	18,32		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahannya tentang Peningkatan SDM	orang	225	33,30	33,75	0,80	33,75	8,49	68	9,29	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	orang	225	33,30	33,75	0,80	33,75	8,23	68	9,03	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
											Rata-rata capaian kinerja (%) :		30	27,51			
											Predikat kinerja :		R	R			
											Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :		43	41,02			
											Predikat kinerja :		T	T			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8.762,66										DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	6.573,92		936,76		1.638,97		2575,72			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Satuan	90	320,67		13,31		80,81		94,12		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	9	320,67	1	13,31	2	80,81	3	94,12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	4.451,59		773,12		1.154,56		1927,68		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40	4.451,59	40	773,12	40	1.154,56	40	1927,68	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.053,86		51,17		296,61		347,78		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		5	2,82	0	-	0	-	0	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	7	177,16	0	-	5	103,31	5	103,31	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9								
1	2	3	4	7		8	9	8	9	10 = 9+8	11	12	13				
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	3	37,63	0	2,68	1	5,07	1	7,75		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	20	38,21	5	9,18	4	7,77	9	16,96		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar	720	136,00	2	0,38	456	86,18	458	86,56		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	104	662,04	6	38,93	15	94,28	21	133,21		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Satuan		403,33		92,61		95,23		187,84		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	100	4,10	26	1,05	30	1,22	56	2,27		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	9	90,00	9	16,63	9	16,75	9	33,38		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	24	309,23	24	74,93	24	77,26	24	152,18		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	344,47		6,55		11,76	0	18,31		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara/dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	90,40	2	5,09	1	1,89	3	6,98		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	45,00	2	1,46	0	-	2	1,46		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	209,07	0	-	0	9,87	0	9,87		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
													35	31,22			
													5	8			
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Satuan		785,00		14,82		144,48		159,30		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG dengan kategori baik	Persen	10	190,00		5,36		15,36		20,72		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		380	190,00	0	5,36	0	15,36	0	20,72		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Satuan		135,00		-		25,83	0	25,83		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)	
						8	9	8	9										
1	2	3	4	7		8	9	10 = 9 : 8		11	12	12		13					
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		40	135,00	0	8	-	10	25,83	10	25,83			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen	100	460,00			9,46		103,30	0	112,76			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		5	460,00	0		9,46	2	103,30	2	112,76			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Satuan		332,00			19,74		21,04		40,77			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan Upaya Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Satuan		292,00			19,74		21,04		40,77			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		40	292,00			19,74		21,04	0	40,77			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	40,00			-		-		0,00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		6	40,00			-		-	0	0,00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	240,00			34,91		16,91		51,82			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pendampingan dalam peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	100	90,00			3,95		-		3,95			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1	50,00	0		-	0	-	0	0,00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1	40,00	0		3,95	0	-	0	3,95			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	100	150,00						0	0,00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		30	150,00	0		-	0	-	0	0,00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	100	91,75			-		5,71		5,71			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10	9 + 8								
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13							
2 8 5 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Dukungan Penyajian Data Gender dan Anak	Satuan	100	91,75					0,00					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 8 5 2.01	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		1	91,75	0	-	0	-	0,00					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	0	0,00					
										Predikat kinerja :	SR	SR					
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen	100	400,00	-		177,20		177,20					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 8 6 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen	100	400,00	-		177,20		177,20					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 8 6 2.02	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2	400,00	0	-	1	177,20	1	177,20				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	50	44,30					
										Predikat kinerja :	ST	T					
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pemenuhan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Satuan		340,00		20,98		76,20		97,18				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 8 7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	100	340,00		20,98		76,20		97,18				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 8 7 2.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		20	50,00	0	-	0	3,24	0	3,24				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 8 7 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		180	290,00	13	20,98	46	72,95	59	93,93				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	16	19,44					
										Predikat kinerja :	SR	SR					
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				908,93										DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		1	158,93	-			27,96		27,96				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Mitra dalam Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Program KKBPK	Mitra	2	158,93	-			18,96	0	18,96				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 2 2.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1	118,93	0	-	0	18,96	0	18,96				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 2 2.01	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Sekolah	5	40,00	0	-	0	-	0	0,00				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	0	7,97					
										Predikat kinerja :	SR	SR					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10 = 9 + 8	11									
1	2	3	4	7		8	9	9		10 = 9 + 8	11	11	12	12	13			
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Satuan		460,00		13,18		402,15		415,33					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pendayagunaan bagi Tenaga Lini Lapangan	Satuan		150,00		7,03		27,95		34,98					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 3 2.02 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	50	150,00	0	7,03	12	27,95	12	34,98					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 3 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Faskes KB)	Kesehatan	38	210,00		6,15		80,07		86,22					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 3 2.03 3	Peningkatan Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Lokasi	3	70,00	0	-	2	38,33	2	38,33					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 3 2.03 9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Sekolah	5	50,00	0	6,15	0	-	0	6,15					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 3 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Orang	50	90,00	0	-	15	25,87	15	25,87					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	Per	50	100,00		-		64,61		64,61					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 3 2.04 1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	Organisasi	3	100,00	0	-	1	18,11	1	18,11					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
										31	27,45							
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Satuan		290,00		22,51		38,90		61,41					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pembinaan Anggota Kelompok Kegiatan	Satuan		170,00		4,92		12,19		17,11					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 4 2.01 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		50	170,00	5	4,92	6	12,19	11	17,11					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 4 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	63,46	120,00		17,59		26,71		44,30					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 14 4 2.02 3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1	120,00	0	17,59	0	26,71	1	44,30					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
										31	23,49							
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-											DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				17.629,43											DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2 11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	6.575,26		1.051,33		1.638,08		2689,41					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10 = 9 + 8	11									
1	2	3	4	7	7	8	9	9	10 = 9 + 8	10 = 9 + 8	11	11	12	12	13			
2.11.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	89,10		12,08		31,50		43,58					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2.11.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	11	89,10	3	12,08	3	31,50	6	43,58				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	4.914,09		767,90		1.138,36		1906,26				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	40	4.914,09	40	767,90	40	1.138,36	40	1906,26				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	229,20		52,86		53,06		105,92				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	13	229,20	13	52,86	13	53,06	13	105,92				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen	100	775,57		77,70		271,86		349,57				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan	Jenis	5	15,00	0	-	5	14,92	5	14,92				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	9	150,84	1	13,55	5	86,68	6	100,23				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	4	60,00	1	7,24	2	28,71	3	35,95				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	6	21,31	1	1,95	1	3,10	2	5,05				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Eksemplar	7	61,16	0	0,50	1	2,63	1	3,13				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	118	467,26	14	54,46	34	135,82	48	190,28				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	446,17		114,89		110,61		225,50				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	Persen	100	7,00	25	1,74	14	1,00	39	2,74				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	2	103,88	2	27,72	2	25,26	2	52,98				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan	Orang	27	335,29	27	85,43	27	84,35	27	169,78				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	121,14		25,89		32,69		58,58				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		6	70,00	2	24,24	3	25,07	5	49,31				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		39	44,14	0	-	4	3,83	4	3,83				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	28	7,00	7	1,65	16	3,79	23	5,44				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
										53	48,46							
2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	2	499,12		1,12		10,27		11,39				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.2.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	99,12		1,12		10,27		11,39				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.2.2.01.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PPLH yang tersedia	Dokumen	2	99,12	0	1,12	0	10,27	0	11,39				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Indeks	60,32	787,30		47,71		76,26		123,97				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan yang dimonitoring	Lokasi	9	124,41		32,47		25,92		58,39				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Sampel Sungai yang diperiksa kualitas airnya	Sungai	3	72,25	0	9,45	1	23,26	1	32,71				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.3.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Sosialisasi Kampung Iklim yang dilaksanakan	Kali	2	52,15	1	23,02	0	2,66	1	25,68				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.3.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang direhabilitasi	Ha	100	662,89		15,24		50,34		65,58				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.3.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas udaranya	Lokasi	8	71,64	0	2,25	1	8,07	1	10,32				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.3.2.03.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah titik pemasangan alat pantau tinggi muka air tanah	Titik	20	591,26	1	12,99	1	42,27	2	55,26				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	65	264,77		-		7,04		7,04				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.4.2.01	Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH yang ditangani	Persen	60	264,77		-		7,04		7,04				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.4.2.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	Lokasi	4	264,77	0	-	0	7,04	0	7,04				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2.11.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	limbah B3 dan bahan berbahaya lainnya yang dikelola	Ton	3670	76,86		8,59		14,25		22,83				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10	11									
1	2	3	4	7	7	8	9	9	10	9-8	11	11	12	12	13			
2 11 5 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 yang tertangani	Persen	60	76,86		8,59	14,25		22,83					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2 11 5 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pembumihanaan	Jumlah Fasilitas yang diberi sosialisasi pengelolaan limbah medis/Covid-19		40	76,86	5	8,59	8	14,25	13	22,83			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
										Rata-rata capaian kinerja (%):	33	29,71						
										Predikat kinerja:	R	R						
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	202,07		9,15	24,17		33,32				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang diawasi yang persetujuan lingkungannya dan atau persetujuan pemerintah di terbitkan oleh kabupaten	Usaha	17	202,07		9,15	24,17		33,32				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 6 2.01 1	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan	Rekomendasi	30	51,79	3	4,67	7	11,25	10	15,92			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 6 2.01 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang diawasi yang persetujuan lingkungannya dan atau persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Kabupaten	Usaha	17	150,28	1	4,48	2	12,92	3	17,40			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
										Rata-rata capaian kinerja (%):	25	21,16						
										Predikat kinerja:	SR	SR						
2 11 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1	63,41		10,35	7,82		18,17				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 9 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan	Persen	100	63,41		10,35	7,82		18,17				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 9 2.01 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang diberikan penghargaan Adiwiyata	Sekolah	6	63,41	1	10,35	1	7,82	2	18,17			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
										Rata-rata capaian kinerja (%):	33	28,65						
										Predikat kinerja:	S	R						
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	35,85		-	6,81		6,81				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen	100	35,85		-	-		0,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 10 2.01 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Kali	7	35,85	0	-	0		0,00				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
										Rata-rata capaian kinerja (%):	0	0,00						
										Predikat kinerja:	SR	SR						
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persen	100	9.124,79		1.681,08	1.923,40		3604,48				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik	Persen	90	9.124,79		1.681,08	1.923,40		3604,48				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 11 2.01 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayarkan	Orang	425	5.853,11	95	1.306,79	103	1.419,52	198	2726,31			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 11 2.01 4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan	Kali	2	820,00	0	-	0	35,54	0	35,54			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2 11 11 2.01 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan/dipelihara		30	2.451,68	5	374,28	6	468,35	11	842,63			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
										Rata-rata capaian kinerja (%):	28	28,43						
										Predikat kinerja:	R	R						
										Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%):	22	22,24						
										Predikat kinerja:	SR	SR						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.592,11									DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	9.829,50		1.609,41	2.613,64		4223,05				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	80,88		1,17	2,07		3,24				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	7	80,88	0	1,17	0	2,07	0	3,24			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji ASN	Tahun	1	6.236,11		1.044,04	1.554,53		2598,57				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	-									DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	45	6.236,11	45	1.044,04	45	1.554,53	45	2598,57			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.392,66		173,09	648,82		821,91				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	5	9,83	1	1,61	2	3,84	3	5,45			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	9	743,90	0	18,00	7	520,28	7	538,28			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2 12 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	4	65,48	1	12,92	1	15,96	2	28,88			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12	13								
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	2	23,00	1	8,18	1	6,87	2	15,05					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	24	3,60	4	0,60	6	0,90	10	1,50					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali	97	546,85	23	131,79	18	100,97	41	232,76					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	90	1.429,59		383,19		388,83		772,02					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	90	6,00	18	1,18	44	2,94	62	4,12					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Rekening	4	129,08	4	29,17	4	30,28	4	59,45					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	93	1.294,51	93	352,85	93	355,61	93	708,46					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	90	394,38		7,90		19,40		27,30					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara		22	34,00	2	3,05	6	9,25	8	12,30					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		50	30,00	8	4,86	17	10,15	25	15,01					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	52	47,91							
									Predikat kinerja :	ST	ST							
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,75	402,79		5,29				262,82					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terlayani Sesuai SOP	Persen	90	188,75		-		-		0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.2.2.01.1	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan yang di terbitkan dokumen kependudukan	Jiwa	75	49,80	0	-	0	-	0	0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.2.2.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak yang di terbitkan	Keping	34000	89,30	0	-	0	-	0	0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.2.2.01.6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah SKP/SKD WNI yang di terbitkan		2400	49,65	0	-	0	-		0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.2.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	90	214,04		-		200,44		200,44					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.2.2.02.2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko KIA yang diadakan	Keping	36000	214,04	0	-	33714	200,44	33714	200,44					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	31	31,22							
									Predikat kinerja :	R	R							
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	90	69,98		-		23,20		23,20					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Akta Kelahiran	Lembar	4000	69,98		-		-		0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen	4000	69,98	0	-	0	-	0	0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	0	0,00							
									Predikat kinerja :	SR	SR							
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan		90	289,84		14,09		56,70		70,79					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan	PKS	7	14,00		1,50		2,70		4,20					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4.2.01.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan	PKS	7	14,00	1	1,50	2	2,70	3	4,20					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jenis pelayanan kependudukan yang menggunakan IT	Persen	100	96,57		12,59		27,50		40,09					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4.2.02.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi tentang administrasi kependudukan	Kecamatan	20	96,57	3	12,59	6	27,50	9	40,09					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan database kependudukan	Persen	90	179,27		-		26,50		26,50					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	OPD	5	36,22	0	-	0	-	0	0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4.2.03.5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi administrasi kependudukan	jiwa	3000	39,25	0	-	0	-	0	0,00					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4.2.03.8	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah buku mengenai data kependudukan yang dipublikasikan	Buku	110	103,80	0	-	29	26,50	29	26,50					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	23	19,41							
									Predikat kinerja :	SR	SR							
									Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	27	24,63							
									Predikat kinerja :	R	SR							
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				27.816,07											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	Persen	100	5.606,59		880,62		1.169,09		2049,71					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	65,75		10,85		11,00		21,85					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12	13								
2.13.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	65,75	1	10,85	2	11,00	3	21,85					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	3.530,15		597,19		915,46		1512,65					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	29	3.530,15	29	597,19	29	915,46	29	1512,65					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.224,00		120,64		94,73		215,37					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan	Jenis	6	4,80	2	1,20	0	-	2	1,20					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	7	91,82	2	18,50	1	15,99	3	34,50					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	4	44,38	0	3,23	1	2,32	1	5,55					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	8	18,96	2	4,54	2	4,77	4	9,32					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Eksemplar	240	429,80	2	2,61	2	3,75	4	6,36					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	205	634,24	29	90,56	22	67,89	51	158,45					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	602,49		139,18		133,02	0	272,20					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	Persen	100	5,00	2	0,10	11	0,55	13	0,65					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	48	93,54	48	13,70	48	7,02	48	20,72					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan	Orang	41	503,95	41	125,38	41	125,45	41	250,83					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	148,78		12,76		14,89		27,65					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		8	101,20	1	11,56	1	11,67	2	23,23					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	6	47,58	0	1,20	1	3,22	1	4,42					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
										30	27,79							
										R	R							
2.13.2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	90	4.816,08		647,75		1.943,18		2590,93					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.2.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	90	4.816,08		647,75		1.943,18		2590,93					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.2.2.01.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Validasi Data Batas Desa	Desa	50	3.338,61	10	627,81	10	653,18	20	1280,99					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.2.2.01.6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Lokasi Kegiatan Pelaksanaan TMMD	Desa	2	1.477,47	0	19,94	2	1.290,00	2	1309,94					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
										70	63,52							
										ST	ST							
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	Persen	75	14.702,98		1.471,59		2.916,42		4388,02					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi Baik	Persen	75	14.702,98		1.471,59		2.916,42		4388,02					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Jumlah Perangkat Desa yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	50	502,47	1	12,48	3	27,71	4	40,19					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Informasi	Orang	73	643,83	7	59,52	8	65,27	15	124,79					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	25	350,00	6	85,03	3	38,43	9	123,46					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Kecamatan yang Dikuti	Kecamatan	20	66,92	2	4,72	0	-	2	4,72					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01.7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa	Desa	36	17,87	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01.8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang Aktif membangun Desa	BUMDes	48	1.222,04	1	17,43	4	92,11	5	109,54					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang telah Melakukan Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan		58	342,90	4	23,37	3	16,04	7	39,41					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.4.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pendamping Program Desa Maju Tahil Jaya Plus Terintegrasi	Orang	230	11.048,65	27	1.269,04	56	2.676,86	83	3945,90					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
										17	15,74							
										SR	SR							
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	90	2.492,90		274,94		300,90		575,84					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	Persen	90	2.492,90		274,94		300,90		575,84					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)		
						8	9	10	11										12	13
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan yang dibina	Lembaga	8	1.075,20	1	163,98	1	37,71	2	201,69				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang memiliki Produk Hasil Desa dalam Menunjang PAD	Desa	55	290,05	2	8,89	1	7,38	3	16,27				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat yang ditampilkan dalam Gelar TTG	Alat	7	218,00	0	1,70	0	3,51	0	5,21				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang dibina dan Berjalannya 10 Program Pokok PKK	Kelurahan	55	909,66	6	100,37	15	252,30	21	352,67				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	17	16,38				
														Predikat kinerja :	SR	SR				
														Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	33	30,85				
														Predikat kinerja :	S	R				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-											DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				18.416,17											DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	9.662,22		1.447,31		1.932,07		3379,38					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	152,30		3,50		32,36		35,86					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	8	152,30	0	3,50	2	32,36	2	35,86					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	6.070,42		992,26		1.399,55		2391,81					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	60	6.062,54	60	989,76	60	1.399,55	60	2389,31					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	1	7,88	0	2,50	0	-	0	2,50					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	141,32		-		-		0,00					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata	Unit	2929	141,32	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.088,94		144,09		86,77		230,86					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	45	212,46	8	35,02	2	11,91	10	46,93					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	5	113,58	1	19,23	1	20,88	2	40,12					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	26	127,45	7	35,11	1	2,85	8	37,96					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	36	3,85	3	0,30	6	0,60	9	0,90					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	269	631,60	23	54,43	22	50,53	45	104,96					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	1.576,80		256,48		371,60		628,08					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100	7,90	11	0,90	13	0,99	24	1,89					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	4	291,30	1	53,39	1	51,98	2	105,37					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	139	1.277,60	22	202,19	35	318,63	57	520,82					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	90	251,20		50,98		41,79		92,76					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		4	105,00	1	25,35	1	25,86	2	51,21					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		9	89,70	2	19,49	2	15,93	4	35,42					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		10	56,50	1	6,14	0	-	1	6,14					DINAS PERHUBUNGAN
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	29	28,12				
														Predikat kinerja :	R	R				
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen	70	4.663,59		51,95		272,44		324,39					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang tersedia	Persen	90	373,24		-		-		0,00					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia		15	373,24	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi standard	Persen	85	1.445,34		-		-		0,00					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang di Pelihara	Unit	10	1.445,34	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji kir angkutan umum yang terlaksana	Persen	85	1.450,19		10,16		3,30		13,46					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Sediakan	Unit	1	1.387,01	0	-	0,002379212	3,30	0	3,30					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan/Angkutan Umum yang di Lakukan Pengujian		750	63,18	121	10,16	0	-	121	10,16					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	80	376,49		15,39		113,50		128,89					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota yang di Laksanakan		73	376,49	3	15,39	2	113,50	5	128,89					DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah		85	1.018,32		23,26		142,64		165,89					DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)	
						8	(Rp)	9	(Rp)									10 + 9 + 8
1	2	3	4	7		8		9		10 + 9 + 8	11	12	13					
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di Sediakan		36	1.018,32	1	23,26	5	142,64	6	165,89			DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	70	4.090,35		7,60		126,52		134,12			DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	80	4.090,35		7,60		126,52		134,12			DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibuat	Dokumen	70	75,74	0	-	1	0,69	1	0,69			DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan/Dermaga yang di Bangun		70	4.014,61	0	7,60	3	125,83	3	133,43			DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				15.038,13									
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	7.070,57		1.075,73		1.403,30		2479,03			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	7	21,06		1,00		5,00		6,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	7	21,06	0	1,00	2	5,00	2	6,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Orang	30	3.981,33		590,24		826,64		1416,87			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	30	3.967,73	30	588,74	30	824,14	30	1412,87			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	1	13,60	0	1,50	1	2,50	1	4,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	3	37,80		6,35		9,50		15,85			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	3	37,80	1	6,35	1	9,50	2	15,85			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	13,32		-		-		0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		2	13,32	0		0		0	0,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan	Jenis	3	590,64		66,93		160,91		227,84			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	3	6,27	0	-	0	0,50	0	0,50			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	27	184,98	0	1,30	14	93,44	14	94,74			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	1	74,47	0	13,12	0	14,63	0	27,75			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	6	20,02	2	4,70	2	5,70	4	10,40			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Eksemplar	350	35,00	31	3,00	32	3,20	63	6,20			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	100	269,91	17	44,81	16	43,44	33	88,26			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	Persen	20	1.900,83		407,59		375,57		783,16			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	20	2,50	4	0,50	4	0,50	8	1,00			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10 = 9 + 8	11								
1	2	3	4	7	8	9	10 = 9 + 8	11	12	13							
2.16.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	4	476,44	1	104,24	1	106,09	2	210,33				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	4	1.421,89	1	302,85	1	268,98	2	571,83				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3	87,10		3,62		25,69		29,31				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jmlh Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		3	31,60	0	2,14	1	9,17	1	11,31				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		100	55,50	3	1,48	30	16,53	33	18,00				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	43	32,93						
									Predikat kinerja :	T	R						
2.16.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persen	65	7.075,33		1.570,80		2.789,32		4360,12				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan	Persen	100	7.075,33		1.570,80		2.789,32		4360,12				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.2.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat, Profile Desa dan Talkshow yang dipublikasikan	Publikasi	34	99,99	1	3,60	11	31,34	12	34,94				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama yang dikelola Melalui Media Cetak, Online dan TV	Kerjasama	80	6.277,61	19	1.525,39	34	2.654,27	53	4179,66				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Penyediaan Informasi Publik yang dikelola dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik	20	75,59	3	9,46	4	15,64	7	25,10				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.2.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Saluran Informasi Pemerintah yang dikelola Berupa TV, Radio, Website dan Facebook, Aplikasi InPas	Jns Saluran Informasi	5	622,15	0	32,55	1	88,06	1	120,42				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	41	38,52						
									Predikat kinerja :	T	S						
2.16.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen	90	892,23		106,17		118,01		224,18				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah Sub Domain lingkup pmda yang dikelola	Persen	90	133,00		12,57		21,64		34,21				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.01.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain/Sub Domain yang didaftarkan	Satuan	30	70,00	4	9,78	6	13,42	10	23,20				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang ditatalaksanak dan diawasi Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan	30	65,00	1	2,79	4	8,23	5	11,01				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi	Persen	90	759,23		93,60		96,37		189,97				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Daerah	9	132,00	1	14,72	2	28,14	3	42,86				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola	Unit	11	65,67	1	3,27	2	12,60	3	15,87				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Arus Bisnis yang dikembangkan	Aplikasi	2	277,22	0	5,97	0	28,22	0	34,19				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Infrastruktur TIK-nya dikembangkan dan dikelola	Daerah	34	86,34	0	-	3	6,30	3	6,30				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.16.3.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan	Kali	280	200,00	98	69,64	30	21,11	128	90,75				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	26	24,72						
									Predikat kinerja :	SR	SR						
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				100,00										DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dan statistik yang terintegrasi	Persen	100	100,00		2,20		8,96		11,16				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.20.2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	Persen	100	100,00		2,20		8,96		11,16				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2.20.2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	Data	55	100,00	1	2,20	5	8,96	6	11,16				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K
				7		8		9		10 = 9 : 8		11		12		
21742.012	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan melalui pelaksanaan RAT tepat waktu	Koperasi	10	68,25	2	15,45	1	6,99	3	22,44					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja (%):		33	33,35					
								Predikat kinerja:		S	S					
2175	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Berdaya saing	Persen	90	247,00		9,28		18,28		27,56					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21752.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memiliki Kompetensi	Koperasi	90	247,00		9,28		18,28		27,56					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21752.011	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Perkoperasian	Orang	30	247,00	1	9,28	2	18,28	3	27,56					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja (%):		11	11,16					
								Predikat kinerja:		SR	SR					
2177	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM aktif	Kelompok	90	1.717,47		25,67		74,09		99,76					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21772.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru yang Mandiri	Persen	90	1.717,47		25,67		74,09		99,76					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21772.011	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem ODS	Mikro	5001	140,59	0	-	200	5,60	200	5,60					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21772.012	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Sosialisasi Permodalan melalui KUR dan Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	Orang	30	36,00	0	-	0	-	0	0,00					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21772.013	fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi P-IRT dan Halal	Orang	60	133,51	0	-	20	43,45	20	43,45					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21772.014	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dan Kelompok UMKM yang di Fasilitasi	Satuan	2	1.252,64	0,0382928	23,98	0,015169574	9,50	0	33,48					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21772.015	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	10	154,73	0	1,69	1	15,54	1	17,23					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja (%):		10	10,07					
								Predikat kinerja:		SR	SR					
2178	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset UMKM	Persen	2	1.155,81		13,98		10,77		24,75					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21782.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen	1	1.155,81		13,98		10,77		24,75					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21782.011	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pngolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kelompok Usaha Mikro yang di fasilitasi	UKM	19	1.155,81	0	13,98	0	10,77	0	24,75					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja (%):		2	2,14					
								Predikat kinerja:		SR	SR					
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%):		21	19,08					
								Predikat kinerja:		SR	SR					
218	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				12.521,22											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	11.242,75		1.150,69		1.757,18		2907,86					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	40,78		-		14,10		14,10					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	7	40,78	0	-	3	14,10	3	14,10					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	4.655,92		769,67		1.397,74		2167,41					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	35	4.655,92	35	769,67	35	1.397,74	35	2167,41					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	16,50		-		0		0,00					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.059	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		2	16,50	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	5.894,38		226,65		203,32		429,97					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	47	5.170,10	0	33,80	0	25,83	1	59,63					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21812.064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	10	56,46	4	22,75	2	10,62	6	33,37					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10	11								
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13							
2 18 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	3	16,65	0	-	0	-	0	0,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	121	651,18	32	170,09	31	166,87	63	336,97				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	556,90		125,94		127,56		253,50				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100	4,50	0	-	43	1,92	43	1,92				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	9	54,60	1	8,67	2	9,01	3	17,69				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	37	497,80	9	117,26	9	116,63	18	233,89				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	78,27		28,43		14,45		42,88				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		14	56,67	5	19,53	3	12,10	8	31,63				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	30	21,60	12	8,90	3	2,35	16	11,25				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	34	32,55					
										Predikat kinerja :	S	R					
2 18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah sektor yang berhasil di promosikan	Sektor	1	640,00		2,30		43,88		46,17				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 3 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kali	1	640,00		2,30		43,88		46,17				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 3 2.01 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan		1	640,00	0	2,30	0	43,88	0	46,17				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	7	7,21					
										Predikat kinerja :	SR	SR					
2 18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan penanaman modal	Persen	100	345,00		16,54		30,32		46,86				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani	Dokumen	575	345,00		16,54		30,32		46,86				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 4 2.01 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang terlayani melalui sistem OSS dan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (SIMPATI)	Dokumen	575	225,00	33	12,92	55	21,28	88	34,20				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 4 2.01 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Unit Perizinan tertentu yang di monitoring	Unit	20	80,00	1	3,62	2	5,69	3	9,31				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 4 2.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan	Orang	20	40,00	0	-	2	3,35	2	3,35				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	13	11,74					
										Predikat kinerja :	SR	SR					
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	100	180,00		7,88		193,05		200,93				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	3	180,00		7,88		193,05		200,93				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 5 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pemantauan	Usaha	3	72,72	0	4,42	1	21,53	1	25,95				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 5 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan	Satuan	2	48,17	0	-	4	104,62	4	104,62				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 5 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan	Usaha	3	215,25	0	3,47	1	66,90	1	70,36				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	97	95,19					
										Predikat kinerja :	ST	ST					
2 18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf	A	113,47		14,39		13,65		28,04				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	113,47		-		-		0,00				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	(Rp)	9	(Rp)								
1	2	3	4	7		8		9		10 = 9 : 8	11	12	13				
2 18 6 2.01 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan	1	113,47	0		0		0	0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-									DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				15.678,16									DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	7.378,16		1.340,36		1.685,24		3025,60			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	576,02		70,97		125,67		196,63			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen	4	359,90	1	64,52	1	87,28	2	151,79			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	5	216,12	0	6,45	1	38,39		44,84			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	4.902,99		720,22		1.060,39		1780,61			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Orang	35	4.878,24	35	720,22	35	1.060,39	35	1780,61			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	1	10,00	0	-	0	-	0	0,00			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen	1	14,75	0	-	0	-	0	0,00			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	50	10,12		-		-		0,00			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		2	10,12	0	-	0	-	0	0,00			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	966,59		332,69		247,11		579,80			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	15	20,06	19	25,06	12	15,25	31	40,31			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	10	124,13	7	84,02	7	77,58	14	161,60			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	5	75,00	1	17,12	2	17,16	3	34,28			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	3	135,00	3	138,25	1	11,50	4	149,75			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplarr	1	4,80	0	1,71	0	0,51	0	2,22			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	40	407,60	4	44,13	10	105,46	15	149,59			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.06 10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Usulan Hibah dan bansos yang diverifikasi	Proposal	60	200,00	7	22,40	6	19,65	13	42,05			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	766,14		182,73		189,29		372,01			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	33	5,00	25	3,72	0	-	25	3,72			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	3	165,00	1	49,14	1	54,60	2	103,74			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			
2 19 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	63	596,14	14	129,87	14	134,69	28	264,55			DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12	13								
2 19 1 2.09	Pemeliharaan Barang MBK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	10	135,00		33,76		62,78		96,54					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		4	65,00	0	5,53	2	35,09	2	40,62					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2	30,00	1	15,00	1	14,84	2	29,84					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		5	40,00	2	13,24	1	12,85	3	26,09					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
										63	59,95							
										57	57							
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	70	1.070,00		41,16		162,97		204,13					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan	Persen	90	920,00		36,55		162,97		199,52					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 2 2.01 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang mengikuti bintal Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Orang	50	200,00	7	28,39	37	147,90	44	176,29					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 2 2.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah tahapan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kali	3	600,00	0	8,16	0	15,07	0	23,23					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 2 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan	Persen	90	150,00		4,61		-		4,61					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 2 2.02 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemiraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Sosialisasi kewirausahaan yang dilaksanakan	Kali	5	50,00	0	4,61	0	-	0	4,61					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 2 2.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang diberikan bantuan	Organisasi	1	100,00	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
										25	25,31							
										58	58							
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	6.380,00		403,44		1.162,98		1.566,42					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Olahraga Pendidikan yang dibina dan dikembangkan	persen	80	2.375,00		5,35		23,03		28,39					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disediakan	Unit	30	2.375,00	0	5,35	0	23,03	0	28,39					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan/dikuti		100	1.495,00		19,16		970,94		990,10					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan	Event	7	795,00	0	-	3	333,31	3	333,31					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dikuti	Cabor	5	700,00	0	19,16	5	637,63	5	656,79					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Olahraga Prestasi yang dibina dan dikembangkan	Persen	80	630,00		378,93		163,21		542,13					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.03 1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Yang Dibina	Orang	10	294,53	5	143,11	1	26,78	6	169,89					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.03 2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga Yang Dikirim Untuk Pelatihan	Orang	6	580,00	2	235,82	2	136,43	4	372,25					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan	Persen	80	1.740,00		-		-		0,00					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya Hibah Uang kepada Organisasi ke Olahraga	Persen	100	1.740,00	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	Persen	80	140,00		-		5,80		5,80					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2 19 3 2.05 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Yang Dilaksanakan	Kali	2	140,00	0	-	0	5,80	0	5,80					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
										41	37,56							
										7	5							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10	11									
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13								
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibuka	khusus	7	7,59	0	-	0,00	-	0	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang dilayani	Orang	65000	772,23	6675	79,30	1397	16,60	8072	95,90			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi buku Perpustakaan yang disediakan	Eksemplar	1000	7,30	0	-	0,00	-	0	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Baca dan Literasi yang dilaksanakan	Persen	100	3,30									DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta Didik yang dikutsertikan	Orang	60	3,30	0	-	0,00	-	0	0,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	6	5,50		
														Predikat kinerja :	SR	SR		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				107,50									DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD	Persen	100	107,50		36,99		32,15		69,14			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang terpelihara	Persentase	100	107,50		36,99		32,15		69,14			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang dilatih	OPD	25	35,00	24	33,14	15	21,36	39	54,50			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dipelihara	Dokumen	500	20,00	96	3,85	20,00	0,79	116	4,64			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diaudit dan dibina	OPD	55	52,50	0	-	11,00	10,00	11	10,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	66	65,99		
														Predikat kinerja :	ST	ST		
														Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	48	47,28		
														Predikat kinerja :	ST	ST		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-									DINAS PERIKANAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.882,18									DINAS PERIKANAN
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	6.452,60		907,58		1.271,48		2179,06			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	196,51		19,99		15,26		35,25			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	5	133,12	1	19,99	0	3,01	1	23,00			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	4	63,39	0	-	1,00	12,25	1	12,25			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen	100	4.630,18		702,24		1.046,62		1748,87			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	39	4.630,18	39	702,24	39	1.046,62	39	1748,87			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	993,11		93,97		127,15		221,12			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	10	20,00	0	0,95	1,00	1,00	1	1,95			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	8	102,50	0	4,50	0	4,62	1	9,13			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	3	112,00	1	28,00	1,00	29,00	2	57,00			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	4	18,75	0	1,40	1,00	3,08	1	4,48			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	1776	153,92	27	2,32	27,00	2,32	54	4,64			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	190	585,94	18	56,80	29,00	87,13	47	143,93			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	336,17		51,64		67,71		119,36			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	3,00	8	0,25	33	1,00	42	1,25			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	4	99,38	0	10,72	1,00	10,32	1	21,04			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	18	233,79	3	40,68	5,00	56,39	8	97,07			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	188,00		39,73		14,73		54,46			DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	6	93,00	1	19,66	1,00	9,18	2	28,84			DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	45,00	0	15,00	0	-	0	15,00			DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	60	50,00	6	5,07	7,00	5,55	13	10,62			DINAS PERIKANAN	
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	30	25,69		
														Predikat kinerja :	R	SR		
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	81000	2.842,49		68,39		125,88		194,27			DINAS PERIKANAN
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KUB/Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Sapras Penangkapan ikan	100	2.565,17		62,03		120,66		182,69				DINAS PERIKANAN
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah jenis data perikanan tangkap yang dihasilkan	Jenis	3	100,00	0	5,71	0	6,45	0	12,16			DINAS PERIKANAN
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap yang diberikan kepada KUB/Kelompok	8	3.525,45	0	13,11	0	58,55	0	71,66				DINAS PERIKANAN
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB/Kelompok Nelayan yang di Bantu	37	2.465,17	1	43,21	1,00	55,66	2	98,87				DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12	13								
3 25 3 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persen	100	125,00		-				0,00					DINAS PERIKANAN		
3 25 3 2.02 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah KUB/Kelompok Nelayan Binaan yang mampu Meningkatkan Pendapatan Nelayan		10	125,00	0		0		0	0,00					DINAS PERIKANAN		
3 25 3 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI sesuai standard	Persen	100	152,32		6,36		5,22		11,58					DINAS PERIKANAN		
3 25 3 2.03 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang di Kelola	Unit	3	152,32	0	6,36	0	5,22	0	11,58					DINAS PERIKANAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%):	5	5,16						
										Predikat kinerja:	SR	SR						
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5000	2.312,10		112,64		163,04		275,68					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki izin usaha budidaya perikanan	Persen	100	70,87		9,40		5,92		15,32					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.01 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Unit Budidaya yang dapat dikembangkan sistem usahanya	Usaha	3	70,87	0	9,40	1,00	15,32	1	24,72					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sapras Pembudidayaan Ikan yang tersedia	Persen	100	2.151,02		103,24		157,12		260,37					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.04 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data Perikanan Budidaya	Jenis	3	170,36	0	21,93	0	18,85	1	40,79					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.04 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan perikanan	Unit	8	200,00	2	38,85	2	60,15	4	99,00					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.04 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan Yang Dibantu	Pokdakan	20	1.354,17	0	13,87	0	26,36	1	40,23					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.04 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Budidaya yang dapat dikendalikan kesehatan ikan dan lingkungannya	Lokasi	3	112,00	0	14,02	0	15,27	1	29,29					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.04 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Lokasi Pembudidayaan yang dipantau	Lokasi	6	84,50	0	4,26	1,00	12,63	1	16,89					DINAS PERIKANAN		
3 25 4 2.04 6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kajian Pengembangan Lahan Budidaya Perikanan	Dokumen	1	230,00	0	10,32	0	23,86	0	34,17					DINAS PERIKANAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%):	27	24,61						
										Predikat kinerja:	R	SR						
3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Perkapita Per tahun	Th	44,68	275,00		9,50		67,04		76,54					DINAS PERIKANAN		
3 25 6 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Scaled Mikro dan Kecil	Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan disalurkan	Persen	100	125,00		0,35		49,77		50,12					DINAS PERIKANAN		
3 25 6 2.01 1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prodak Perikanan yang dipromosikan dan dipasarkan	Jenis	25	125,00	0	0,35	10,00	49,77	10	50,12					DINAS PERIKANAN		
3 25 6 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan disalurkan	Persen	100	150,00		9,16		17,27		26,43					DINAS PERIKANAN		
3 25 6 2.03 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Menu Serba Ikan yang dikonsumsi dan diolah	menu	67	150,00	4	9,16	8,00	17,27	12	26,43					DINAS PERIKANAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%):	29	28,86						
										Predikat kinerja:	R	R						
										Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%):	23	21,08						
										Predikat kinerja:	SR	SR						
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															DINAS PERKEBUNAN		
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.628,69											DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	10.690,64		1.212,39		1.755,63		2968,02					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	14	681,11		16,44		21,59		38,04					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	6	531,29	0	13,36	0	15,39	0	28,74					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	laporan	4	28,29	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	4	121,53	0	3,09	0	6,21	0	9,29					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen	100	7.046,29		935,21		1.371,70		2306,91					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji ASN	tahun	1	7.039,84	1	935,21	1	1.371,70	1	2306,91					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	6,45	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terdistribusi	Persen	100	282,60		14,40		44,67		59,07					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan gedung kantor yang dibayar	orang	4	57,60	1	14,40	1	14,40	2	28,80					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset barang milik daerah pada dinas perkebunan yang didata	jenis	5	225,00	0	-	1,00	30,27	1	30,27					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persen	100	1.752,73		105,97		156,94		262,91					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	jenis	3	14,47	0	-	1	6,38	1	6,38					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	20	253,00	1	9,74	2,00	20,85	3	30,59					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	jenis	2	126,76	0	15,08	1,00	28,42	1	43,49					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12	10,34	0	-	9,00	7,60	9	7,60					DINAS PERKEBUNAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3 27 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	media	21	620,00	0	-	0	1,35	0	1,35					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	kali	156	728,16	17	81,15	20,00	92,35	37	173,50					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah tenaga operator dan tenaga kebersihan yang dibayar	orang	28	560,97		112,18		107,90		220,08					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	jenis	3	2,42	1	0,52	1,00	0,70	2	1,22					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	4	142,50	1	24,25	1,00	18,63	2	42,89					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan	orang	27	416,06	6	87,41	6,00	88,57	12	175,97					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	329,24		28,19		52,83		81,02					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		3	90,80	1	27,19	1,00	26,91	2	54,10					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	jenis	10	45,80	0	1,00	3,00	11,74	3	12,74					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	192,64	0	-	0	14,18	0	14,18					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.13	Penataan Organisasi	jumlah dokumen anjab dan ABK yang disusun	dokumen	2	10,70		-		-		0,00					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 1 2.13 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen analisis jabatan (anjab) analisis beban kerja (ABK) yang disusun	dokumen	2	10,70	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PERKEBUNAN		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	30	25,74							
									Predikat kinerja :	R	SR							
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	90	4.115,05		178,98		415,32		594,30					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah sarana dan prasarana perkebunan yang disediakan	jenis	11	3.921,53		175,55		378,43		553,98					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 2 2.01 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan kelapa	Satuan	10	209,93	1	12,37	2,00	31,47	3	43,84					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 2 2.01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana perkebunan/pertanian yang disediakan		11	3.711,61	0	163,18	1	346,96	2	510,14					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah bibit unggul yang disediakan	batang	8000	193,52		3,43		36,89		40,31					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 2 2.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit unggul yang di sediakan	komoditas	3	50,00	0	-	1	22,49	1	22,49					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 2 2.02 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit tanaman sela pada tanaman kelapa yang disediakan	Batang	8000	143,52	191	3,43		14,40	993	17,82					DINAS PERKEBUNAN		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	24	23,01							
									Predikat kinerja :	SR	SR							
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	90	9.357,93		108,44		1.338,25		1446,69					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah dokumen kawasan pembangunan komoditas perkebunan	dokumen	5	1.412,93		18,81		70,19		89,00					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.01 1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas lahan pangan perkebunan yang di remajakan	Ha	4	75,18	0	1,27	0	2,58	0	3,85					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase Pelayanan informasi pasar, potensi, harga komoditas, sentra produksi, fasilitasi dan pembukaan akses pasar produk perkebunan	persen	90	775,00	2	17,54	8	67,60	10	85,14					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.01 4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah masterplan kawasan dan komoditas perkebunan yang di susun	dokumen	5	562,75	0	-	0	-	0	0,00					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah jalan produksi yang dibangun	lokasi	4	7.944,99		89,63		1.268,06		1357,70					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.02 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	panjang tanggul mekanik yang dibangun	KM	152	6.606,81	1	63,37	28	1.190,78	29	1254,14					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.02 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan produksi yang dibangun	lokasi	4	550,00	0	1,15	0	30,21	0	31,35					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.02 6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu air yang dibangun	unit	3	440,33	0	1,86	0	24,51	0	26,37					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 3 2.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian yang disediakan	Unit	3	347,86	0	23,26	0	22,57	0	45,83					DINAS PERKEBUNAN		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	9	8,57							
									Predikat kinerja :	SR	SR							
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	85	1.440,08		61,91		69,81		131,72					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas kebun kelapa/sawit yang diremajakan		20	1.440,08		61,91		69,81		131,72					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 5 2.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT yang ditangani	Ha	700	330,00	32	15,07	66	31,27	98	46,34					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 5 2.01 5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas kebun kelapa yang diremajakan	Ha	30	860,08	2	46,84	1	38,54	3	85,38					DINAS PERKEBUNAN		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	12	11,98							
									Predikat kinerja :	SR	SR							
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Persen	100	250,00		10,37		22,25		32,62					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 6 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi izin nya	perusahaan	26	250,00		10,37		22,25		32,62					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 6 2.01 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	perusahaan	26	250,00	1	10,37	2	22,25	3	32,62					DINAS PERKEBUNAN		
									Rata-rata capaian kinerja (%) :	13	13,05							
									Predikat kinerja :	SR	SR							
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	100	1.775,00		251,06		421,88		672,94					DINAS PERKEBUNAN		
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah bpp yang dihadiri pertemuan bulannya	bpp	8	1.775,00		251,06		421,88		672,94					DINAS PERKEBUNAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K
						8	9	8	9			10 + 9 + 8				
1	2	3	4	7	7	8	9	9	9	10 + 9 + 8	11	12	12	13		
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh perkebunan yang di bayarkan dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	75	1.420,00	12	219,78	20	385,00	32	604,78			DINAS PERKEBUNAN		
3 27 7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Jumlah Kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya	kelompok	3	100,00	0	15,60	0	6,25	1	21,84			DINAS PERKEBUNAN		
3 27 7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang dihadiri pertemuan Bulannya	BPP	8	115,00	0	4,68	1	20,01	2	24,69			DINAS PERKEBUNAN		
3 27 7 2.01 5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan petani yang dilaksanakan	kali	1	140,00	0	11,00	0	10,63	0	21,63			DINAS PERKEBUNAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	25	25,34				
										Predikat kinerja :	SR	SR				
										Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program(%) :	19	17,95				
										Predikat kinerja :	SR	SR				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.512,59									DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Poduktifitas tanaman pangan dan hortikultura	0	0	561,40		22,81		70,33		93,14			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Persen	70	561,40		22,81		70,33		93,14			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 2 2.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah kapasitas simpan cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat di lokasi food estate dan sentra produksi pertanian	Satuan	5	246,00	0	9,19	1	48,66	1	57,85			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 2 2.01 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Alat Pasca Panen yang di adakan	Unit	5	315,40	0	13,62	0	21,67	1	35,29			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	17	17,35				
										Predikat kinerja :	SR	SR				
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen	75	582,19		40,59		68,29		108,88			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang disalurkan	Persen	100	173,19		7,34		19,93		27,27			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Harga Pangan Pokok Berkala yang di Laporkan dan Pembuatan Prognosa Kebutuhan Pangan Pokok (NBM)	Dokumen	2	39,30	0	-	1	10,85	1	10,85			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.01 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lahan hortikultura yang di berdayakan	Hektar	20	62,00	2	7,34	1	1,51	3	8,85			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah LDPM dan PUPM yang di Bina dan di Bantu	Gapoktan	5	71,89	0	-	1	7,57	1	7,57			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Pangan Daerah	Persen	75	103,00		9,44		8,47		17,91			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah lahan Tanaman Pangan yang di berdayakan	Hektar	50	103,00	5	9,44	4	8,47	9	17,91			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	87,4	306,00		23,81		39,89		63,70			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.04 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Kuesioner yang di lakukan pencacahan data	Kuesioner	405	114,00	48	13,49	41	11,54	89	25,02			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 3 2.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguakuragan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Festival Pangan Lokal dan Lokakarya yang di laksanakan	Kali	2	192,00	0	10,32	0	28,35	0	38,67			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	24	18,65				
										Predikat kinerja :	SR	SR				
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	0	0	306,00		5,91		40,49		46,40			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 4 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang di beri bantuan	Kecamatan	2	306,00		5,91		40,49		46,40			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
2 9 4 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan yang di Salurkan	Paket	150	306,00	3	5,91	20	40,49	23	46,40			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
										Rata-rata capaian kinerja (%) :	15	15,16				
										Predikat kinerja :	SR	SR				
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	100	63,00		8,47		15,75		24,23			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9								
1	2	3	4	7												13	
2	9	5	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Monev Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen	90	63,00		8,47		15,75		24,23			DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di Lakukan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Kecamatan	5	63,00	1	8,47	1	15,75	2	24,23		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			20.312,89									DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	16.959,24		2.470,18		3.388,60		5858,78		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	764,16		68,05		82,81		150,86		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	489,86	1	42,23	1	32,67	2	74,90		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	9	274,30	1	25,82	2	50,14	3	75,96		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen	100	14.239,48		2.057,82		2.913,52		4971,34		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	123	14.239,48	18	2.057,82	25	2.913,52	43	4971,34		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	128,00		10,82		32,57		43,39		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	4	128,00	0	10,82	1	32,57	1	43,39		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	778,65		122,20		131,90		254,10		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	12	170,00	3	45,99	2	30,05	5	76,04		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	9	78,00	2	14,40	3	22,04	5	36,44		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	12	19,23	0	0,60	3	5,05	4	5,65		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	1680	11,00	183	1,20	252	1,65	435	2,85		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	207	500,42	25	60,01	30	73,12	55	133,12		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	658,53		159,79		153,08		312,87		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	90 %	90	3,00	90	3,00	0	-	90	3,00		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	14	139,53	3	30,56	3	26,40	6	56,96		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	42	516,00	10	126,23	10	126,68	21	252,91		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	90	331,00		51,50		74,71		126,22		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		2	52,00	1	14,35	0	5,01	1	19,36		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		5	44,00	3	23,79	1	8,13	4	31,92		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		8	200,00	0	-	3	61,57	3	61,57		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	(Rp)	9	(Rp)									
1	2	3	4	7		8	(Rp)	9	(Rp)	10 = 9 : 8	11		12	(Rp)	13			
3 27 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		50	35,00	19	13,37	0		19	13,37					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Ton	100	1.992,71		40,80		88,37		129,18					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Money Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persen	90	279,00		3,66		9,48		13,14					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 2 2.01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Prapanen yang di sediakan	Unit	4	279,00	0	3,66	0	9,48	0	13,14					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembibitan Ternak	Persen	75	147,20		9,45		31,05		40,50					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 2 2.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak yang di IB	Ekor	900	147,20	58	9,45	190	31,05	248	40,50					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 2 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Bibit Ternak	Persen	75	1.566,51		27,69		47,84		75,54					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 2 2.05 1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak besar yang di adakan	Ekor	2375	1.566,51	42	27,69	73	47,84	115	75,54					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen	90	648,00		49,93		159,00		208,93					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Persen	85	277,00		44,92		106,18		151,11					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 3 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah lahan yang di budidayakan	Ha	20	277,00	3	44,92	8	106,18	11	151,11					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun	Persen	85	371,00		5,01		52,82		57,82					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 3 2.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana yang di bangun	Unit	4	371,00	0	5,01	1	52,82	1	57,82					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,atuh dan Halal)	Persen	100	156,00		22,40		87,83		110,22					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 4 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular	Persen	75	75,00		13,08		16,81		29,89					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 4 2.01 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kecamatan yang di Tangani Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Kecamatan	4	75,00	1	13,08	1	16,81	2	29,89					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 4 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Money Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	75	81,00		9,32		12,53		21,84					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 4 2.04 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Penyuluhan ASUH yang di laksanakan	Kali	8	81,00	1	9,32	1	12,53	2	21,84					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	90	82,80		11,24		9,31		20,55					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT	Persen	85	82,80		11,24		9,31		20,55					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 5 2.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Sosialisasi yang di laksanakan	Kali	1	82,80	0	11,24	0	9,31	0	20,55					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	100	474,13		14,78		34,13		48,91					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	90	474,13		14,78		34,13		48,91					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah BPP yang di bantu	Satuan	1	267,18	0	11,33	0	19,27	0	30,60					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3 27 7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang dibangun/direhab	Satuan	1	53,95	0	3,45	0	14,86	0	18,31					DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	(Rp)	9	(Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
								Rata-rata capaian kinerja (%):	23	23,40							
								Predikat kinerja:	SR	SR							
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%):	28	26,09							
								Predikat kinerja:	R	R							
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				10.388,78							DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	6.958,70	1.078,38	1.578,36	2656,73			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
3	30	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	513,17	120,13	203,15	323,28		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	385,46	1	75,51	3	170,52	4	246,03	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6	127,71	2	44,63	2	32,63	4	77,25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	5.013,18	761,80	1.091,06	1852,86			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	4.977,22	50	761,80	50	1.077,16	50	1838,96	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	35,96	0	-	0	13,90	0	13,90	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi		7	39,03	-	-	-	0,00			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	7	39,03	0	0	0	0,00			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	682,94	141,23	193,57	334,80			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	30	25,97	3	2,20	5	3,95	8	6,15	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	3	104,10	0	0,10	3	94,29	3	94,39	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	3	57,20	1	17,80	1	17,83	2	35,63	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	5	25,32	2	7,60	2	12,00	4	19,60	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	120	16,00	6	0,80	20	2,70	26	3,50	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	105	454,34	26	112,73	15	62,79	41	175,52	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	251,80	40,64	48,69	89,33			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100	6,00	28	1,70	8	0,50	37	2,20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	7	150,00	1	21,81	1	22,60	2	44,41	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	10	95,80	2	17,13	3	25,60	4	42,73	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	458,58	14,57	41,89	56,46			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		20	98,60	2	10,80	4	21,91	7	32,70	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	uNIT	30	46,80	1	0,98	9	14,38	10	15,36	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	313,18	0	2,80	0	5,60	0	8,40	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
												Rata-rata capaian kinerja (%):	43	40,59			
												Predikat kinerja:	T	T			
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang difasilitasi	Persen	100	173,75	-	-	35,85	35,85			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	2	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Persen	100	119,90	-	-	0,00			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin yang di berikan	izin	5	119,90	0	0	0	0,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	2	2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Cakupan Penerbitan SKA	Persen	100	53,85	-	-	11,23	11,23			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	2	2.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang di terbitkan	Persan	100	53,85	0	-	21	11,23	21	11,23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
												Rata-rata capaian kinerja (%):	11	10,43			
												Predikat kinerja:	SR	SR			
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen	100	1.292,54	152,23	214,45	366,68			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik	Persen	100	944,28	57,48	76,80	134,28			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah DED dan Pasar yang di bangun	Unit	13	653,17	1	33,51	1	33,11	2	66,62	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	9	10								
1	2	3	4	7		8	9	9	10 = 9 : 8	11		12	13				
3 30 3 2.01 2	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembinaan retribusi yang di laksanakan	Kali	4	291,10	0	23,97	1	43,69	1	67,66			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 3 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	348,26		94,75		137,65		232,40			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 3 2.02 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembinaan ketertiban yang di laksanakan	Kali	6	348,26	2	94,75	2	137,65	4	232,40			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
										38	33,39						
										5	5						
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting lainnya	Persen	100	336,59		48,44		52,00		100,44			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 4 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100	307,49		37,26		52,00		89,25			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 4 2.01 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali	30	307,49	4	37,26	5	52,00	9	89,25			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 4 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Monev Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	100	291,10		11,18		-		11,18			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 4 2.02 2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga yang dilaksanakan	Kecamatan	20	291,10	8	11,18	0	-	8	11,18			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
										34	33,73						
										5	5						
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	409,15	859,73		14,94		53,47		68,41			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 5 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketertarikan Konsumen calon konsumen terhadap hasil Promosi	Persen	100	859,73		14,94		53,47		68,41			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 5 2.01 1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran yang diikuti	Kali	8	859,73	0	14,94	1	53,47	1	68,41			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
										14	7,96						
										SR	SR						
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang		85	505,43		78,74		55,31		134,05			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 6 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan yang dilaksanakan	Cakupan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan yang dilaksanakan	Persen	100	505,43		78,74		55,31		134,05			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 6 2.01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang dilaksanakan		11	243,91	2	47,87	2	49,51	4	97,38			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 6 2.01 2	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan dan Penyuluhan yang di laksanakan	Kali	26	58,58	4	9,74	1	1,45	5	11,19			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 6 2.01 3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan dan Pengembangan SDM yang di lakukan	Kali	5	202,94	1	21,12	0	4,35	1	25,47			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
										24	23,86						
										SR	SR						
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	85	262,05		16,75		12,55		29,30			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 7 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	85	262,05		16,75		12,55		29,30			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 30 7 2.01 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Pembentukan SRG	Persen	100	262,05	6	16,75	5	12,55	11	29,30			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
										11	11,18						
										SR	SR						
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				4.786,44									DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persen	85	4.661,63		31,13		48,59		79,72			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 31 2 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persen	100	4.661,63		31,13		48,59		79,72			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 31 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi yang di lakukan	Kali	10	852,87	0	20,87	0	29,06	1	49,93			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 31 2 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang di dibina	IKM	45	3.808,76	0	10,26	0	19,53	0	29,79			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
										3	3,32						
										SR	SR						
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penerbitan Usaha Industri	Persen	50	70,40		4,91		17,74		22,65			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 31 3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	Persen	100	70,40		4,91		17,74		22,65			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 31 3 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah izin industri yang di berikan rekomendasi	Izin	5	70,40	0	4,91	1	17,74	2	22,65			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
										32	32,17						
										R	R						
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan sistem Inforamasi Industri nasional	Persen	100	54,41		1,73		5,46		7,19			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3 31 4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Informasi Industri yang disediakan untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Persen	100	54,41		1,73		5,46		7,19			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12	13	14	15				
3	4	2.01	1	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Pengolahan Data yang dilakukan	Kali	5	54,41	0	1,73	1	5,46	1	7,19			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													SEKRETARIAT DAERAH	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH				88.824,03									SEKRETARIAT DAERAH	
4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	56.164,50		11.277,40		12.815,31		24092,71			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	858,02		142,93		178,37		321,30			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	234,62	0	40,53	1	61,91	1	102,45		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang dikordinasikan	Dokumen	1	258,59	0	40,07	0	34,97	0	75,04		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikordinasikan	Dokumen	1	78,41	0	-	0	4,40	0	4,40		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dikordinasikan	Dokumen	1	38,06	0	13,65	0	4,66	0	18,31		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dikordinasikan	Dokumen	1	25,92	0	-	0	-	0	0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	2	58,86	1	18,77	0	8,85	1	27,62		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	163,56	0	29,91	1	63,57	1	93,48		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	19.423,81		3.203,84		4.733,10		7936,94			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.02	1	Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	179	17.892,33	179	2.988,95	179	4.422,07	179	7411,02		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	7	417,48	2	89,90	2	106,29	4	196,19		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	4	407,13	0	47,66	1	72,73	1	120,39		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	2	283,56	0	33,52	0	50,35	1	83,87		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Laporan yang disusun	Dokumen	1	67,59	0	12,83	0	5,90	0	18,73		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen	3	284,81	0	30,97	1	58,97	1	89,94		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen	2	70,91	0	-	1	16,79	1	16,79		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	118,62		5,00		30,54		35,54			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Stel	8	45,20	0	-	6	30,54	6	30,54		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Persen	2	73,42	0	5,00	0	-	0	5,00		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	13.855,23		3.924,37		3.526,09		7450,45			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	1	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	2	130,00	1	74,36	1	30,62	2	104,98		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	7	421,94	4	219,57	3	176,53	7	396,09		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	3	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	5	199,50	2	60,19	1	42,20	3	102,38		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	4	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	2	2.728,50	1	1.018,67	1	792,74	2	1811,41		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	5	Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	3	106,42	1	46,53	1	39,27	2	85,80		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Acara Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kali	40	450,00	8	93,93	6	62,00	14	155,93		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	16812	9.709,88	4153	2.398,38	4111	2.374,17	8263	4772,56		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan elektronisasi data yang dikelola	Persen	100	109,00	12	12,74	8	8,57	20	21,31		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Persen	100	3.346,50		651,06		806,84		1457,90			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100	40,00	25	10,00	15	6,00	40	16,00		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	50	1.584,00	10	311,39	10	324,23	20	635,62		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	5	304,00	0	17,05	2	135,26	3	152,31		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	86	1.418,50	19	312,62	21	341,35	40	653,97		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	2.697,25		758,48		570,31		1328,79			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		2	300,00	0	30,46	1	114,35	1	144,81		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		49	1.538,95	16	510,91	10	316,55	26	827,47		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	8	599,70	3	217,11	2	139,40	5	356,51		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	57,26	0	-	0	-	0	0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		4	201,34	0	-	0	-	0	0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	1.018,73		199,65		197,39		397,04			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rincian Objek Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada KDH dan WKDH	Rekening	9	176,07	2	35,65	2	47,39	4	83,04		SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	1	2.11	2	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Bupati/Wakil Bupati yang disediakan	28	163,88	0	-	0	-	0	0,00				SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Bupati dan Wakil Bupati	2	78,77	0	14,00	0	-	0	14,00				SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rincian Objek Dana Penunjang Operasional yang diberikan kepada KDH dan WKDH	Rekening	1	600,00	0	150,00	0	150,00	1	300,00			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah	100	4.946,34	769,65	924,04	1693,69							SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16	3.126,55	3	490,96	3	598,97	6	1089,93				SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kegiatan	12	1.819,80	2	278,69	2	325,07	4	603,76			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah IKM minimal 80	Person	100	750,00	132,87	98,68	231,54						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN, Perda dan Perbup yang ditetapkan	Dokumen	4	259,84	1	38,32	1	40,65	2	78,97			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	Person	85	51,35	15	9,18	16	9,28	31	18,46			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan SOP dan Hasil Monitoring Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkab. Inhil yang diterbitkan	Dokumen	1	185,66	0	44,39	0	21,03	0	65,42			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah yang dicapai.	Nilai	7	253,15	1	40,97	1	27,72	2	68,69			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolalan sesuai standar	Person	100	9.150,00	1.489,55	1.749,97	3239,52						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolalan	Cakupan fasilitas Keprotokolalan yang terlaksana	Person	100	3.037,80	19	591,51	21	635,17	40	1226,68			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan komunikasi pimpinan yang difasilitasi	Person	100	3.049,60	15	448,40	19	566,32	34	1014,72			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Indragiri Hilir		3	3.062,60	0	449,64	1	548,49	1	998,13			SEKRETARIAT DAERAH	
												43	38,42					
													5					
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	Person	100	27.789,52	1.000,78	5.163,57	6164,35						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Person	100	1.850,00	247,73	258,91	506,64						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan yang menerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten Kota terkait Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se Provinsi Riau		20	1.033,30	2	117,37	3	153,56	5	270,93			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang disurvei terkait pendataan dan inventarisasi Namanama Rupabumi Unsur Alami dan Buatan dalam Gasetir Nasional	Kecamatan	20	223,00	4	47,02	4	48,57	9	95,59			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten	Laporan	3	593,70	0	83,34	0	56,77	1	140,12			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan keagamaan	Person	100	24.579,52	419,58	4.500,08	4919,65						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Bantuan Sarana Keagamaan yang disediakan	Jenis	7	9.167,68	0	201,58	1	599,56	1	801,14			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Mahasiswa Tidak Mampu yang diberikan Bantuan Sosial	Orang	305	2.835,94	16	147,00	20	184,95	36	331,95			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Organisasi Sosial Keagamaan yang diberikan bantuan Masyarakat	Organisasi	355	12.575,90	2	71,00	105	3.715,57	107	3786,56			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Pelayanan Produk Hukum dan Bantuan Hukum	Person	100	910,00	179,54	258,21	437,75						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	Rauperda	25	200,00	6	51,47	7	52,33	13	103,81			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum yang diberikan	Perkara	4	510,00	1	101,70	2	178,86	3	280,56			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dapat diakses melalui website jdih	Daerah	25	200,00	3	26,38	3	27,01	7	53,39			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang difasilitasi	Person	100	450,00	153,93	146,37	300,30						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Antar Daerah yang difasilitasi	Kali	3	320,00	1	108,86	1	103,76	2	212,62			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dievaluasi	Laporan	1	130,00	0	45,07	0	42,61	1	87,68			SEKRETARIAT DAERAH	
												40	37,34					
													5					
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Person	100	4.870,00	947,21	1.278,94	2226,16						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi / kebijakan Perekonomian Daerah daerah yang ditindaklanjuti	Person	100	1.050,00	174,20	190,34	364,54						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina, dipantau dan dievaluasi	BUMD	3	550,00	0	63,91	1	70,79	1	134,70			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Stabilitas Perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir	Laporan	1	250,00	0	61,36	0	62,47	0	123,83			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Pengembangan dan Perluasan UKM yang dipantau dan dievaluasi	Laporan	1	250,00	0	48,92	0	57,08	0	106,01			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Fasilitasi Rapat Koordinasi TAPD	Person	100	650,00	244,20	345,54	589,73						SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah asistensi dokumen RKA, DPA dan DPPA yang dilaksanakan	Kali	195	163,41	44	36,54	52	43,18	96	79,72			SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi Penyusunan Program Pembangunan yang difasilitasi	Kali	20	332,29	4	59,41	9	139,68	13	199,09			SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7	8	9	10 = 9 + 8	11	12	13								
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan monitoring pembangunan Daerah yang disusun	Dokumen	1	154,30	1	148,24	1	162,68	2	310,93		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	2.650,00		443,65		606,69		1050,34		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola		130	1.548,70	21	248,59	31	366,17	52	614,76		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Daerah	55	706,70	11	140,84	13	167,36	24	308,20		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sosialisasi/Bimtek/Penyuluhan Pengembangan Akan Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Yang Terstandar dan Profesional yang dilaksanakan		1	394,60	0	54,22	0	73,16	0	127,38		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan potensi sumber daya alam	Persen	100	520,00		85,17		136,38		221,55		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Perikanan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang dibina, dipantau dan dievaluasi	KPM	30938	250,00	7095	57,34	5699	46,05	12794	103,38		SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil evaluasi terkait Penambahan Instalasi Listrik yang sudah atau belum terpasang	Laporan	1	270,00	0	27,84	0	90,33	0	118,17		SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	2				SEKRETARIAT DPRD				101,107,22								SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	58.833,82		9.943,80		12.214,14		22157,94		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai Standar	Persen	90	384,23		75,23		33,97		109,20		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	75	47,46	17	11,02	6	4,00	24	15,02		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	30	336,77	6	64,21	3	29,97	9	94,18		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Persen	100	6.168,87		1.005,27		1.519,68		2524,96		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	65	5.361,01	65	899,14	65	1.330,04	65	2229,18		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	12	339,65	3	73,29	3	82,84	6	156,13		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen	20	468,21	1	32,85	5	106,80	6	139,65		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	1.370,49		303,75		281,36		585,11		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	53	1.370,49	12	303,75	11	281,36	23	585,11		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang berkinerja Baik	Persen	100	1.374,83		-		67,18		67,18		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Stel	555	424,09	0	-	88	67,18	88	67,18		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen	100	10.489,37		812,87		2.082,85		2895,72		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan	Jenis	53	199,49	0	-	25	95,63	25	95,63		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	158	2.379,04	0	-	20	298,68	20	298,68		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	14	834,58	0	-	2	127,29	2	127,29		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	5	654,58	1	127,17	1	162,78	2	289,95		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Jenis	30	636,01	5	106,00	12	253,59	17	359,59		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Eksemplar	255	426,00	9	15,22	33	55,32	42	70,54		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	888	5.359,67	94	564,49	181	1.089,54	275	1654,03		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	1.063,11		-		28,83		28,83		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Unit	4	770,23	0	-	0	28,83	0	28,83		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	100	2.294,04		412,11		428,49		840,61		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	25	1.104,88	5	219,62	5	200,47	10	420,09		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan	Orang	63	1.189,16	10	192,50	12	228,02	22	420,52		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan Baik	Persen	100	2.666,18		191,32		421,50		612,82		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		7	480,90	1	38,34	3	196,91	4	235,25		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		157	602,10	22	85,21	36	138,29	58	223,49		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	150	303,16	15	29,42	12	23,44	27	52,86		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	44	806,18	2	38,02	3	61,69	5	99,71		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3	323,39	0	-	0	-	0	0,00		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		116	150,45	0	0,34	1	1,17	1	1,51		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan DPRD yang diselenggarakan sesuai SOP	Persen	100	25.100,21		5.968,57		5.797,94		11766,50		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Rincian Objek Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD	Rekening	45	24.129,01	11	5.848,61	11	5.561,66	22	11410,27		SEKRETARIAT DPRD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7		8	9	10 = 9 : 8	11	12	13							
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up	Orang	45	971,20	6	119,96	11	236,28	17	356,24		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persen	100	7.922,48		1.174,67		1.552,34		2727,01		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang difasilitasi	Kali	505	4.966,98	72	710,39	69	673,88	141	1384,27		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pemenuhan Logistik Rumah Tangga Pimpinan	Kali	7300	2.955,51	1147	464,28	2170	878,45	3317	1342,74		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitasi	Persen	100	42.273,40		6.826,56		9.823,77		16650,33		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase Rapat-rapat Pembahasan Ranperda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	persen	90	3.660,47		700,90		243,69		944,59		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang di Bahas	Buah	9	3.660,47	2	700,90	1	243,69	3	944,59		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase Rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100	905,18		117,22		266,94		384,16		SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat Paripurna	Kali	36	905,18	5	117,22	11	266,94	16	384,16		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan	90	1.868,27		219,48		157,39		376,87		SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali	2	1.868,27	0		0		0,00		SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	90	4.518,23		564,50		136,07		700,57		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses dan Aspirasi yang diserap	Kali	3	4.518,23	0	564,50	0	136,07	0	700,57		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yang difasilitasi	persen	90	1.597,15		19,52		257,72		277,24		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Risalah Rapat dan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Buah	14	1.597,15	0	19,52	2	257,72	2	277,24		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	persentase Rekomendasi yang dihasilkan dari Kunjungan Kerja DPRD	persen	100	29.724,10		5.204,93		8.761,96		13966,88		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunjungan kerja yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali	2813	25.804,63	530	4.859,16	888	8.149,75	1418	13008,91		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Keprotokolalan	Kali	658	3.919,47	58	345,77	103	612,20	161	957,97		SEKRETARIAT DPRD	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1				PERENCANAAN													
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	7.911,04		1.304,97		1.761,47		3066,44		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	100	191,58		18,46		10,85		29,31		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	5	74,19	1	13,37	1	6,77	2	20,14		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	3	117,38	0	5,08	0	4,09	0	9,17		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan	Orang	49	5.730,18		912,63		1.384,20		2296,83		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	49	5.640,78	49	892,13	49	1.365,84	49	2257,97		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	1	89,40	0	20,49	0	18,36	0	38,86		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa keamanan gedung kantor dibayarkan	orang	4	62,40		15,60		15,63		31,23		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan gedung kantor dibayarkan	Orang	4	62,40	1	15,60	1	15,63	2	31,23		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Yang disediakan	Stel	12	211,67		13,13		-		13,13		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	Stel	12	27,00	2	4,64	0	-	2	4,64		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	14	184,67	1	8,49	0	-	1	8,49		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	9	1.088,10		219,16		167,02		386,18		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	9	50,04	1	3,18	1	3,82	2	6,99		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	34	178,74	3	14,71	5	27,37	8	42,08		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter	2500	120,00	692	33,24	617	29,62	1309	62,86		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Jenis	11	38,84	5	17,86	1	4,74	6	22,60		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Exemplar	17	25,00	2	2,60	6	9,10	8	11,70		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	185	675,48	40	147,57	25	92,38	66	239,95		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Buah	500	289,20		76,87		61,25		138,12		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	(Rp)	9	(Rp)									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	13						
5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Lembar	500	5,00	170	8	1,70	80	0,80	250	2,50			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	6	198,60	1	46,82	1	40,49	3	87,31				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	5	85,60	2	28,35	1	19,96	3	48,31				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset tetap Lainnya yang dipelihara	unit	1	337,90		49,13		122,51		171,63				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizennya		44	129,40	13	38,32	10	28,19	23	66,52				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	24,50	0	0,18	0	4,92	0	5,10				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		15	184,00	1	10,62	7	89,39	8	100,02				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	38	36,72		
														Predikat kinerja :	S	S		
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	1.190,00		123,25		198,74		321,99				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		2	501,94		62,44		83,01		145,45				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	Kali	1	72,27	0	23,49	1	1,50	1	24,99			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana	Kali	1	162,34	0	3,61	1	38,93	1	42,54			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	Dokumen	3	267,33	0	35,34	2	42,59	2	77,92			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi yang di pelihara dan atau dikembangkan	Aplikasi	1	162,81		23,34		30,71		54,06				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan		1	162,81	1	23,34	1	30,71	1	54,06			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	Persen	100	525,25		37,47		85,01		122,48				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	10	446,65	1	34,74	2	83,31	3	118,05			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun	Dokumen	10	78,60	0	2,73	2	1,70	2	4,43			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	61	25,87		
														Predikat kinerja :	S7	SR		
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA)	Persen	100	2.179,78		322,38		316,57		638,95				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	860,00		93,02		140,31		233,33				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen yang disusun	Kali	38	144,96	7	25,41	4	14,99	11	40,40			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	84,12	0	11,30	0	19,09	0	30,39			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	133,61	0	11,83	0	30,42	0	42,25			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	Kali	41	121,67	3	10,17	7	19,07	10	29,24			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	106,01	0	9,38	0	8,48	0	17,86			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait	Dokumen	1	269,63	0	24,93	0	48,26	0	73,19			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen yang disusun, jumlah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait	Dokumen	1	759,78		82,86		97,72		180,58				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	399,78	0	49,46	0	33,64	0	83,10			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	95	360,00	9	33,40	17	64,08	26	97,48			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	kali	33	560,00		146,50		78,54		225,04				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kali	42	368,35	10	87,11	5	40,12	15	127,24			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kali	33	191,65	10	59,39	7	38,41	17	97,80			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	30	29,71		
														Predikat kinerja :	R	R		
5	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.060,00										BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang dikukuhkan dalam IGA	Persen	80	1.060,00		120,24		152,62		272,87				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5	2	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penetapan Peraturan	Jumlah Peraturan Kelitbang yang dihasilkan	Dokumen	1	464,20		42,98		58,28		101,26				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	8	9									
1	2	3	4	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12	13								
5	5	2.01	1	1	114,20	0	8,05	0	15,79	0	23,84					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	5	2.01	12	1	100,00	0	10,64	0	12,36	0	23,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	5	2.01	13	1	250,00	0	24,30	0	30,12	0	54,42					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	5	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bidang teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	1	595,80	77,26	94,35	171,61							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	5	2.04	1	1	123,77	0	33,27	0	38,98	1	72,25					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	5	2.04	3	1	246,23	0	32,63	0	19,45	0	52,08					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	5	2.04	4	3	225,80	0	11,36	1	35,92	1	47,28					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
									Rata-rata capaian kinerja (%):		31	27,68						
									Predikat kinerja:		R	R						
									Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program(%):		40	29,99						
									Predikat kinerja:		T	R						
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-										BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5			KEUANGAN			18.709,48										BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	14.953,60	1.583,48	2.752,93		4336,42					BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	99,87	-		23,39					BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	60,60	0	-	1	14,86	1	14,86		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	39,27	0	-	1	8,54	1	8,54		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	11.509,48	1.172,47		1.689,70		2862,17			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	90	11.509,48	90	1.172,47	90	1.689,70	90	2862,17		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	71,51	-		44,93		44,93			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	45	45,00	0	-	45	44,93	45	44,93		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	26,51	0	-	0	-	0	0,00		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.398,60	115,03		553,50		668,54			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	14	28,08	7	14,37	1	1,50	8	15,87		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56	283,66	4	20,86	38	192,37	42	213,24		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	6	137,16	1	16,28	1	32,43	2	48,71		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	46	225,84	1	2,57	42	207,47	43	210,03		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	51	10,00	4	0,70	9	1,70	13	2,40		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304	713,86	26	60,25	50	118,04	76	178,29		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	48,90	42,93		-		42,93			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	48,90	2	42,93	0	-	2	42,93		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	1.514,91	225,67		318,22		543,90			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100	7,33	14	1,00	14	1,00	28	2,00		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	72	592,54	10	82,16	11	88,43	21	170,59		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	915,03	1	142,51	2	228,79	3	371,30		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	310,33	27,38		123,18		150,56			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perancangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	38	115,00	5	15,55	27	82,31	32	97,86		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45	71,40	7	10,76	5	8,19	12	18,95		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	53,93	0	-	0	-	0	0,00		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	70,00	0	1,07	1	32,68	1	33,75		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
									Rata-rata capaian kinerja (%):		46,67	43,39						
									Predikat kinerja:		ST	T						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10 = 9 + 8	11									
1	2	3	4	7	7	8	9	9	10 = 9 + 8	11	11	12	12	13				
5	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Dokumen	10	463,93	2	109,70	4	181,24	6	290,95			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan		3	207,30	0	-	0	2,46	0	2,46			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3			KEPEGAWAIAN													BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	7.667,13		860,10		1.285,89		2145,99			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90	49,20		2,89		13,34		16,23			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	5	12,00	0	0,80	2	4,95	2	5,75		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	5	37,20	0	2,09	1	8,39	1	10,49		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	5.299,97		726,71		1.029,70		1756,42			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	45	5.299,97	45	726,71	45	1.029,70	45	1756,42		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	50	158,58		12,45		30,40		42,85			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	persen	100	69,06	18	12,45	44	30,40	62	42,85		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan	Kegiatan	55	89,52	0	-	0	-	0	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	1.070,70		76,85		150,93		227,77			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	19	16,50	0	-	4	3,37	4	3,37		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	35	262,37	0	1,81	5	34,96	5	36,76		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	2	60,16	0	10,80	0	8,17	1	18,97		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	12	34,40	1	3,60	4	11,16	5	14,76		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	6456	30,47	534	2,52	0	-	534	2,52		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	140	666,80	12	58,12	20	93,27	32	151,39		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	60,00		-		-		0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	2	60,00	0	-	0	-	0	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	151,13		28,07		23,73		51,80			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	8,00	19	1,50	0	-	19	1,50		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	48	103,60	9	19,69	9	18,57	18	38,26		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	3	39,53	1	6,89	0	5,15	1	12,04		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7		UNSUR KEWILAYAHAN				-											KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	KECAMATAN				8.597,27											KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	8.480,05		1.369,74		2.013,42		3383,16					KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	90	-		-		-		0,00					KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8		-		-		0,00					KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.995,78		1.296,63		1.945,94		3242,57				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.995,78	14	1.296,63	14	1.945,94	14	5242,57				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.03	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	19,20		4,80		4,80		9,60				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Orang	2	19,20	2	4,80	2	4,80	2	9,60				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	287,55		26,51		24,04		50,55				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	10	1,80	10	0,95	10	0,50	10	1,45				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK dan perlengkapan yang disediakan	25	44,68	6	10,00	3	6,00	9	16,00				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan dan minum rapat	24	64,90	4	10,40	2	4,12	5	14,52				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah cetakan dan pengandaan	10000	11,49	1741	2,00	2612	3,00	4353	5,00				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	24	2,40	3	0,30	0	-	3	0,30				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	52	162,28	1	2,86	3	10,42	4	13,28				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	159,72		38,40		36,64		75,04			KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat yang terlayani	lembar	380	1,50	127	0,50	127	0,50	253	1,00			KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran rekening listrik dan wifi	Rekening	2	30,00	0	5,91	0	4,64	1	10,55			KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga honororer pelayanan umum yang terakomodir	orang	14	128,22	14	31,99	14	31,50	14	63,49			KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	17,80		3,40		2,00		5,40			KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	1	17,80	0	3,40	0	2,00	0	5,40			KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	unit	13	-		-		0	0,00				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100	16,58		4,89		4,28		9,17				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persen	100	10,00		4,39		3,60		7,99			KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tembilahan	Persen	100	10,00	44	4,39	36	3,60	80	7,99			KECAMATAN TEMBILAHAN
7	1	2	2.02	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Persen	100	6,58		0,50		0,68		1,18			KECAMATAN TEMBILAHAN
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan yang di terbitkan	rekomendasi	700	6,58	53	0,50	72	0,68	125	1,18			KECAMATAN TEMBILAHAN
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	52,90		60,35		100,40		160,75				KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	5	2.01	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Kecamatan	Persentase Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina dan Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Persen	100	52,90		60,35		100,40		160,75			KECAMATAN TEMBILAHAN
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	kegiatan	1	52,90	1	60,35	1	100,40	1	160,75			KECAMATAN TEMBILAHAN
7	1		UNSUR KEWILAYAHAN			-											KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1		KECAMATAN			159,46											KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	159,46		234,93		654,26		889,19				KECAMATAN TEMBILAHAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	(Rp)	9	(Rp)									
1	2	3	4	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12	13								
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan		100	159,46		234,93		654,26		889,19					KECAMATAN TEMBLAHAN		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan pada Kelurahan Seberang Temblahan Selatan	Persen	30000000	159,46	29354697	15,60	93593378	49,75	122948075	65,35					KECAMATAN TEMBLAHAN		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan pada Kelurahan Seberang Temblahan Barat	Persen		174,95	0	12,10	0	43,20	0	55,31					KECAMATAN TEMBLAHAN		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan pada Kelurahan Temblahan Hilir	Persen	100	345,40	10	34,28	37	128,06	47	162,34					KECAMATAN TEMBLAHAN		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan pada Kelurahan Sungai Beringin	Persen	100	254,60	5	13,10	37	94,95	42	108,05					KECAMATAN TEMBLAHAN		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan pada Kelurahan Sungai Perak	Persen	6	220,60	1	32,91	1	43,17	2	76,08					KECAMATAN TEMBLAHAN		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan pada Kelurahan Pekan Arba	Persen	100	334,50	27	90,64	20	66,49	47	157,13					KECAMATAN TEMBLAHAN		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan pada Kelurahan Seberang Temblahan	Persen	30000000	184,90	27971877	17,24	104308004	64,29	132279881	81,53					KECAMATAN TEMBLAHAN		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan pada Kelurahan Temblahan Kota	Persen	6	452,10	0	19,04	2	164,36	2	183,41					KECAMATAN TEMBLAHAN		
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Temblahan Kota	Persen	100	-													
									Rata-rata capaian kinerja (%):	37,00	41,02							
									Predikat kinerja:	S	T							
									Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%):	47,00	57,91							
									Predikat kinerja:	ST	ST							
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN			-												KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1	KECAMATAN			3.976,58												KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	3.778,47		622,55		1.021,16		1643,71					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	-											KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	3.494,08		549,86		940,58		1490,44					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	34	3.494,08	34	549,86	34	940,58	34	1490,44					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	21,60		7,20		5,40		12,60					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	5	21,60	5	7,20	5	5,40	5	12,60					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	100	5,40		-		5,40		5,40					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Stel	45	5,40	0	0	0	0	0	0,00					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	125,64		37,03		38,29		75,32					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	20	41,37	12	25,38	0	-	12	25,38					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	3	18,00	0	-	3	15,00	3	15,00					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	4	14,63	1	3,49	1	5,20	2	8,69					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	8	4,80	3	1,60	2	1,20	5	2,80					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	56	46,84	8	6,56	20	16,89	28	23,45					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	112,45		28,46		26,69		55,15					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	90	4,40	29	1,40	31	1,50	59	2,90					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	24	29,70	5	6,23	5	6,74	10	12,97					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	7	78,35	7	20,83	7	18,45	7	39,28					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	19,30		-		4,80		4,80					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		10	11,80	0	-	4	4,80	4	4,80					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		6	7,50	0	-	0	0	0	0,00					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
									Rata-rata capaian kinerja (%):	48	47,22							
									Predikat kinerja:	ST	ST							
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100	21,65		7,90		4,97		12,87					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen	100	21,65		7,90		4,97		12,87					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis	5	21,65	2	7,90	1	4,97	3	12,87					KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
									Rata-rata capaian kinerja (%):	60,00	59,46							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 + 8	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	100	6,00										KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	100	6,00										KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/keurahan yang dilaksanakan		4	6,00	0		0		0	0,00				KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	75,20										KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen	100	75,20										KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	5	2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	3	75,20	0		2	39,47	2	39,47				KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	95,26	27,98									KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	100	95,26	27,98									KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	6	2.01	12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok	3	91,41	1	24,18	1	20,72	1	44,90				KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	6	2.01	13 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Usulan	300	3,85	296	3,80	0	-	296	3,80				KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN														KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1			KECAMATAN				199,30										KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	199,30	123,05									KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	100	199,30	123,05									KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Barat	Persen	100	199,30	20	39,52	16	32,06	36	71,58				KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Hulu dan Tembilahan Barat	Persen	100	433,90	19	83,52	15	67,11	35	150,63				KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN														KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1			KECAMATAN				4.806,18										KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	4.636,73	650,44									KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen	90	28,00	15,19									KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2	18,00	1	8,29	1	8,29	2	16,58				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	dokumen	5	10,00	3	6,90	2	3,45	5	10,35				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen	100	4.225,18	580,10									KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	34	4.225,18	34	580,10	34	824,78	34	1404,87				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen	100	141,12	18,95									KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	jenis	8	1,44	5	0,94	3	0,50	8	1,44				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	36	98,43	3	7,73	3	7,00	5	14,73				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	3	5,94	1	1,04	1	2,66	2	3,70				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan yang disediakan	jenis	2	2,41	1	1,01	1	1,00	2	2,01				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	27	28,71	8	8,24	3	3,11	11	11,35				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen	100	204,93	33,70									KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	110,00	17	18,53	26	28,30	43	46,83				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	3	16,31	1	3,07	1	3,04	1	6,11				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	3	78,63	3	12,10	3	17,53	3	29,63				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang MIBik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	persen	100	32,50	2,50									KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		9	7,50	1	1,00	2	1,73	3	2,73				KECAMATAN TEMPULING
7	1	1	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		4	5,00	1	1,50	0	0,40	2	1,90				KECAMATAN TEMPULING

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 + 8	11	12	13					
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	54	55,47							
								Predikat kinerja :	ST	ST							
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100	71,40	10,00		14,30	24,30		KECAMATAN TEMPULING			
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	persen	90	71,40	10,00		14,30	24,30		KECAMATAN TEMPULING			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis	2	71,40	0	10,00	0	14,30	1	24,30	KECAMATAN TEMPULING	
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	34	34,03							
								Predikat kinerja :	S	S							
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	44,90	-		42,90	42,90		KECAMATAN TEMPULING			
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	persen	100	44,90	-		42,90	42,90		KECAMATAN TEMPULING			
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	kegiatan	1	44,90	0	-	1	42,90	1	42,90	KECAMATAN TEMPULING	
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	96	95,55							
								Predikat kinerja :	ST	ST							
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	53,15	10,15		1,50	11,65		KECAMATAN TEMPULING			
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa secara Baik	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	persen	90	53,15	10,15		1,50	11,65		KECAMATAN TEMPULING			
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	kelompok	9	43,00	0	1,00	0	1,50	1	2,50	KECAMATAN TEMPULING	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	usulan	45	10,15	41	9,15	0	-	41	9,15	KECAMATAN TEMPULING	
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	48	47,98							
								Predikat kinerja :	ST	ST							
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN				-						KECAMATAN TEMPULING			
7	1			KECAMATAN				302,10						KECAMATAN TEMPULING			
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	100	302,10	124,13		250,01	374,14		KECAMATAN TEMPULING			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen	90	302,10	124,13		250,01	374,14		KECAMATAN TEMPULING			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Salak	persen	90	302,10	9	29,92	30	100,57	39	130,49	KECAMATAN TEMPULING	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tempuling	persen	90	194,80	16	35,30	22	47,46	38	82,75	KECAMATAN TEMPULING	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pangkalan Tujuh	persen	90	152,10	16	27,81	21	35,64	38	63,45	KECAMATAN TEMPULING	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tanjung Pidada	persen	90	175,50	16	31,11	34	66,34	50	97,45	KECAMATAN TEMPULING	
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	46	45,73							
								Predikat kinerja :	ST	T							
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	56,00	55,75							
								Predikat kinerja :	ST	ST							
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN				-						KECAMATAN BATANG TUAKA			
7	1			KECAMATAN				3.245,67						KECAMATAN BATANG TUAKA			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	2.959,57	360,26		574,19	934,45		KECAMATAN BATANG TUAKA			
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	22	2.583,40	22	341,91		500,22	842,13	KECAMATAN BATANG TUAKA			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	22	2.583,40	22	341,91	22	500,22	22	842,13	KECAMATAN BATANG TUAKA	
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	3	57,60		4,80		19,30	24,10	KECAMATAN BATANG TUAKA			
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dan/atau Pembantu Pengelola Administrasi Kantor yang dibayarkan	Orang	3	28,80	0	2,40	1	9,65	1	12,05	KECAMATAN BATANG TUAKA	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan	Orang	3	28,80	3	2,40	3	9,65	3	12,05	KECAMATAN BATANG TUAKA	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruangan	18	-							KECAMATAN BATANG TUAKA		
7	1	1	2.06		Jumlah bahan barasan yang disediakan	Jenis	100	270,91	10,54		36,27	46,81		KECAMATAN BATANG TUAKA			
					Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	100	-						KECAMATAN BATANG TUAKA			
					Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	100	-						KECAMATAN BATANG TUAKA			
					Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	100	-						KECAMATAN BATANG TUAKA			
					Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Jenis	100	-						KECAMATAN BATANG TUAKA			
					Jumlah rekening yang dibayarkan	Jenis	2	-						KECAMATAN BATANG TUAKA			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	10	0,00	0	-	10000	0,09	10000	0,09	KECAMATAN BATANG TUAKA	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	100	180,00	0	-	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN BATANG TUAKA	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	100	14,41	12	1,79	45	6,44	57	8,24	KECAMATAN BATANG TUAKA	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	100	6,40	6	0,38	41	2,64	47	3,02	KECAMATAN BATANG TUAKA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10 = 9 ÷ 8	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	100	65,00		15,49		-	15,49				KECAMATAN CONGONG	
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kelompok	2	50,00	0	2,20	0	-	0	2,20			KECAMATAN CONGONG	
						Satuan		-									KECAMATAN CONGONG	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	6	15,00	5	13,29	0	-	5	13,29			KECAMATAN CONGONG	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	46	46,49			
													Predikat kinerja	ST	ST			
				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN				200,00									KECAMATAN CONGONG	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	100	200,00	14,43				66,40	80,83			KECAMATAN CONGONG	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen	100	200,00	14,43				66,40	80,83			KECAMATAN CONGONG	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pada Kelurahan Congcong Luar	Persen	95	200,00	7	14,43	32	66,40	38	80,83		KECAMATAN CONGONG	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	40	40,42			
													Predikat kinerja	T	T			
													Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%)	60	59,34			
													Predikat kinerja	ST	ST			
7				UNSUR KEWILAYAHAN				-									KECAMATAN ENOK	
7	1			KECAMATAN				3.629,02									KECAMATAN ENOK	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	3.434,12	575,57				821,59	1397,16			KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	26	3.265,02	516,27				786,20	1302,47			KECAMATAN ENOK	
					Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 %	100	-									KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	26	3.265,02	26	516,27	26	786,20	26	1302,47			KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100	75,01	23,59				14,95	38,53			KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set	1	5,22	0	1,50	0	1,46	1	2,96			KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	liter	342	8,00	152	3,55	99	2,31	251	5,86			KECAMATAN ENOK	
					Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kali	7	-									KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Satuan	3,44	0	1,56	0	0,76	0	2,31				KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar	600	3,00	100	0,50	200	1,00	300	1,50			KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	48	55,35	14	16,48	8	9,42	22	25,90			KECAMATAN ENOK	
					Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	kali	3	-									KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 %	100	94,09	35,71				20,45	56,16			KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Lembar	100	1,80	19	0,35	19	0,35	39	0,70			KECAMATAN ENOK
					Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	10	-									KECAMATAN ENOK	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening yang dibayarkan	Rekening	2	17,52	1	4,94	1	5,15	1	10,09			KECAMATAN ENOK
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	9	74,77	9	30,42	9	14,95	9	45,37			KECAMATAN ENOK
													Rata-rata capaian kinerja (%)	53	54,56			
													Predikat kinerja	ST	ST			
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100	58,73	2,37				1,74	4,11			KECAMATAN ENOK	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Dokumen	100	58,73	2,37				1,74	4,11			KECAMATAN ENOK	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis	100	58,73	4	2,37	3	1,74	7	4,11		KECAMATAN ENOK	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	7	7,00			
													Predikat kinerja	SR	SR			
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	86,90	-				34,45	34,45			KECAMATAN ENOK	
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Kegiatan	2	86,90	-				34,45	34,45			KECAMATAN ENOK	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	86,90	0	-	1	34,45	1	34,45		KECAMATAN ENOK	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	40	39,64			
													Predikat kinerja	T	T			
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	49,27	14,77				2,00	16,77			KECAMATAN ENOK	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok	3	49,27	14,77				2,00	16,77			KECAMATAN ENOK	
					Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	100 %	100	-									KECAMATAN ENOK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	6	2.01	12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok	3	44,50	1	8	10,00	0	2,00	1	12,00	KECAMATAN ENOK	
7	1	6	2.01	13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Usulan	70	4,77	70	4,77	0	-	70	4,77	KECAMATAN ENOK		
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	63	63,48		
														Predikat kinerja :	ST	ST		
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN												KECAMATAN ENOK	
7	1				KECAMATAN				154,50								KECAMATAN ENOK	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	154,50			43,41		287,02		330,44	KECAMATAN ENOK	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan	100 %	100	154,50			43,41		287,02		330,44	KECAMATAN ENOK	
						Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	100 %	100	-								KECAMATAN ENOK	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan	100 %	100	154,50	13	19,66	32	49,67	45	69,33	KECAMATAN ENOK		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pantai Seberang Makmur	100 %	100	205,60	12	23,76	34	69,34	45	93,10	KECAMATAN ENOK		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Enok	100 %	100	230,10	0	-	43	99,58	43	99,58	KECAMATAN ENOK		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pusaran	100 %	100	208,30	0	-	33	68,43	33	68,43	KECAMATAN ENOK		
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	42	41,57		
														Predikat kinerja :	T	T		
														Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	41	41,25		
														Predikat kinerja :	T	T		
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN												KECAMATAN GAUNG	
7	1				KECAMATAN				2.727,86								KECAMATAN GAUNG	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	2.562,13			380,86		510,24		891,10	KECAMATAN GAUNG	
						Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	-								KECAMATAN GAUNG	
						Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	-								KECAMATAN GAUNG	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Tahun	1	2.377,86			335,85		465,67		801,52	KECAMATAN GAUNG	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	2.377,86	25	335,85	25	465,67	50	801,52	KECAMATAN GAUNG		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tahun	1	146,66			35,76		32,42		68,18	KECAMATAN GAUNG	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Disediakan	Jenis	17	10,14	17	10,14	0	-	17	10,14	KECAMATAN GAUNG		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	61,00	25	15,00	41	25,00	66	40,00	KECAMATAN GAUNG		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Cetakan dan Pengandaan	Jenis	4	5,00	1	1,00	1	1,50	2	2,50	KECAMATAN GAUNG		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	Kali	3	65,52	0	9,62	0	5,92	1	15,54	KECAMATAN GAUNG		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	32,60			9,25		8,15		17,40	KECAMATAN GAUNG	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	Lembar	300	2,00	300	2,00	0	-	300	2,00	KECAMATAN GAUNG		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	4	9,00	1	1,80	1	2,70	2	4,50	KECAMATAN GAUNG		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruangan	12	21,60	3	5,45	3	5,45	6	10,90	KECAMATAN GAUNG		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	5,00			-		4,00		4,00	KECAMATAN GAUNG	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipanajang Perizinannya	4	2,00	0	-	2	1,00	2	1,00	KECAMATAN GAUNG			
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	7	3,00	0	-	7	3,00	7	3,00	KECAMATAN GAUNG		
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	64	62,34		
														Predikat kinerja :	ST	ST		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100	22,00			5,70		5,00		10,70	KECAMATAN GAUNG	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen	90	22,00			5,70		5,00		10,70	KECAMATAN GAUNG	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen/ Perizinan Yang Dikeluarkan	47	22,00	12	5,70	11	5,00	23	10,70	KECAMATAN GAUNG			
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	49	48,64		
														Predikat kinerja :	ST	ST		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	28,70			1,82		21,82		23,63	KECAMATAN GAUNG	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen	100	28,70			1,82		21,82		23,63	KECAMATAN GAUNG	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali	2	28,70	0	1,82	2	21,82	2	23,63	KECAMATAN GAUNG		
														Rata-rata capaian kinerja (%) :	82	82,34		
														Predikat kinerja :	ST	ST		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12	13	14	15				
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	55	53,33								
								Predikat kinerja :	ST	ST								
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	45,90			34,60		34,60				KECAMATAN KATEMAN				
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	1	45,90			34,60		34,60				KECAMATAN KATEMAN				
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Persen	100	45,90	0	-	75	34,60	75	34,60			KECAMATAN KATEMAN				
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	75	75,38								
								Predikat kinerja :	ST	ST								
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	82,62		26,54	8,40		34,94				KECAMATAN KATEMAN				
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	100	82,62		26,54	8,40		34,94				KECAMATAN KATEMAN				
7 1 6 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Persen	100	65,62	15	9,54	13	8,40	27	17,94			KECAMATAN KATEMAN				
7 1 6 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Persen	100	17,00	100	17,00	0	-	100	17,00			KECAMATAN KATEMAN				
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	64	63,67								
								Predikat kinerja :	ST	ST								
7	UNSUR KEWILAYAHAN													KECAMATAN KATEMAN				
7 1	KECAMATAN					178,20								KECAMATAN KATEMAN				
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	178,20		78,78	235,67		314,45				KECAMATAN KATEMAN				
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	100	178,20		78,78	235,67		314,45				KECAMATAN KATEMAN				
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen	100	178,20	12	21,07	34	59,82	45	80,89			KECAMATAN KATEMAN				
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen	100	345,10	11	37,76	35	121,58	46	159,34			KECAMATAN KATEMAN				
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen	100	145,10	14	19,96	37	54,27	51	74,23			KECAMATAN KATEMAN				
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	48	47,57								
								Predikat kinerja :	ST	ST								
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	61	59,99								
								Predikat kinerja :	ST	ST								
7	UNSUR KEWILAYAHAN													KECAMATAN KEMPAS				
7 1	KECAMATAN					3.406,35								KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	19	3.304,58		486,31	746,35		1232,66				KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Tahun	1	3.008,35		444,39	680,55		1124,95				KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	19	3.008,35	19	444,39	19	680,55	19	1124,95			KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	152,22		27,51	33,99		61,50				KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	3	44,32	0	5,51	0	3,01	1	8,52			KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	1	11,48	1	6,01	0	5,47	1	11,48			KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	4	1,20	1	0,20	1	0,40	2	0,60			KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	69	95,23	11	15,80	18	25,11	30	40,91			KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100	133,20		14,40		31,81		46,21			KECAMATAN KEMPAS				
								Jumlah Rekening yang dibayarkan	Tahun	1	-			KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	90	4,00	23	1,00	28	1,25	51	2,25			KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	3	13,80	1	2,30	1	2,70	1	5,00			KECAMATAN KEMPAS				
								Satuan		-				KECAMATAN KEMPAS				
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	4	115,40	4	11,10	4	27,86	4	38,96			KECAMATAN KEMPAS				
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	51	46,98								
								Predikat kinerja :	ST	ST								
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	52,13			35,13		35,13				KECAMATAN KEMPAS				
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	1	52,13			35,13		35,13				KECAMATAN KEMPAS				
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	3	52,13	0	-	2	35,13	2	35,13			KECAMATAN KEMPAS				
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	67	67,39								
								Predikat kinerja :	ST	ST								
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	49,65		16,15	8,40		24,55				KECAMATAN KEMPAS				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)		
						K	(Rp)	K	(Rp)								K	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	100	49,65			16,15	8,40	24,55					KECAMATAN KEMPAS
7	1	6	2.01	12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok	2	39,25	0	5,75	0	8,40	14,15					KECAMATAN KEMPAS
7	1	6	2.01	13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	usulan	800	10,40	800	10,40	0	-	10,40					KECAMATAN KEMPAS
													68	68,02				
													ST	ST				
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN														KECAMATAN KEMPAS
7	1			KECAMATAN				367,00										KECAMATAN KEMPAS
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEULAHARAAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keulahaaran	Persen	100	367,00	68,11		150,16		218,27					KECAMATAN KEMPAS
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen	100	367,00	68,11		150,16		218,27					KECAMATAN KEMPAS
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kempas Jaya	Persen	90	367,00	17	68,11	25	103,57	42	171,68				KECAMATAN KEMPAS
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Harapan Tani	Persen	100	249,30	0	-	19	46,60	19	46,60				KECAMATAN KEMPAS
													33	32,73				
													S	R				
													55	53,78				
													ST	ST				
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN														KECAMATAN KEMUNING
7	1			KECAMATAN				2.801,10										KECAMATAN KEMUNING
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	2.554,92	397,64		610,44		1008,08					KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	2.432,97	382,76		585,73		968,49					KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	20	2.432,97	20	382,76	20	585,73	20	968,49				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Non Program RPJMD	100 %	100	0,00		0,50			0,50					KECAMATAN KEMUNING
					Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	-										KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.03	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Jasa Kesmanan Gedung Kantor dibayarkan	orang	2	0,00	2	0,50	2	-	2	0,50				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana yang di Butuhkan	Jenis	25	98,39	8,88		21,54		30,42					KECAMATAN KEMUNING
					Dana yang di Butuhkan	set	2	-										KECAMATAN KEMUNING
					Dana yang di Butuhkan	Liter	728	-										KECAMATAN KEMUNING
					Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	-										KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	7	21,52	0	1,12	1	2,16	1	3,28				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	2	6,46	0	0,46	0	1,54	1	2,00				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	2	6,48	0	0,50	0	1,21	1	1,71				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	44	63,92	5	6,80	11	16,63	16	23,44				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	90	12,06	4,50		2,17		6,67					KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	85	5,93	13	0,90	20	1,40	33	2,30				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	2	2,90	1	1,38	0	-	1	1,38				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	10	3,23	10	2,23	10	0,77	10	2,99				KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	11,00	1,00		1,00		2,00					KECAMATAN KEMUNING
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		11	11,00	1	1,00	1	1,00	2	2,00				KECAMATAN KEMUNING
													36	44,60				
													S	T				
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100 %	100	67,35	4,35				4,35					KECAMATAN KEMUNING
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana yang di Butuhkan	100 %	100	62,73	-				0,00					KECAMATAN KEMUNING
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100 %	100	-										KECAMATAN KEMUNING
7	1	2	2.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis	2	62,73	0	-	0	-	0	0,00				KECAMATAN KEMUNING
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dana yang diButuhkan	Rekomendasi	2	4,62		4,35			4,35					KECAMATAN KEMUNING
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rekomendasi	2	-										KECAMATAN KEMUNING
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis	2	4,62	2	4,35	0	-	2	4,35				KECAMATAN KEMUNING
													94	94,16				
													ST	ST				
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Kali	1	97,06		-		67,06	67,06					KECAMATAN KEMUNING

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)		K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10 = 9 : 8	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	2	-										KECAMATAN KEMUNING		
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Yang Dibutuhkan	Kali	1	97,06	-	67,06		67,06			KECAMATAN KEMUNING		
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	3	97,06	0	-	2	67,06	2	67,06	KECAMATAN KEMUNING	
												Rata-rata capaian kinerja (%) :	69	69,09			
												Predikat kinerja :	ST	ST			
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	81,77	14,71	-	-	14,71			KECAMATAN KEMUNING		
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 %	100	81,77	14,71			-	14,71		KECAMATAN KEMUNING		
															KECAMATAN KEMUNING		
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	kelompok	9	67,06	0	-	0	-	0	0,00	KECAMATAN KEMUNING	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	usulan	2	14,71	2	14,71	0	-	2	14,71	KECAMATAN KEMUNING	
												Rata-rata capaian kinerja (%) :	100	100,00			
												Predikat kinerja :	ST	ST			
7				UNSUR KEWILAYAHAN											KECAMATAN KEMUNING		
7	1			KECAMATAN											KECAMATAN KEMUNING		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	172,46						0,00	KECAMATAN KEMUNING		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100	172,46						0,00	KECAMATAN KEMUNING		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Selesren	Persen	100	30,50	0	-	0	-	0	0,00	KECAMATAN KEMUNING	
												Rata-rata capaian kinerja (%) :	0	0,00			
												Predikat kinerja :	SR	SR			
												Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :	60	62			
												Predikat kinerja :	ST	ST			
7				UNSUR KEWILAYAHAN											KECAMATAN KERITANG		
7	1			KECAMATAN											KECAMATAN KERITANG		
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	3.108,07	504,58		723,53		1228,11		KECAMATAN KERITANG		
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	2.826,14	465,96		680,27		1146,23		KECAMATAN KERITANG		
															KECAMATAN KERITANG		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	-						KECAMATAN KERITANG		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	27	2.826,14	27	465,96	27	680,27	27	1146,23	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	9,80	-		9,80		9,80		KECAMATAN KERITANG		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya disediakan	Stel	28	9,80	0	-	28	9,80	28	9,80	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	142,74	19,33		21,26		40,58		KECAMATAN KERITANG		
															KECAMATAN KERITANG		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	2	2,35	1	0,63	0	-	1	0,63	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	8	41,71	1	3,17	0	1,20	1	4,37	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	2	13,40	0	1,83	0	2,13	1	3,96	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Jenis	4	1,60	0	0,15	3	1,08	3	1,23	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	12	1,20	3	0,30	2	0,20	5	0,50	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	116	82,48	19	13,25	23	16,66	42	29,90	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Roda 2	Unit	1	21,00	-		-		0,00		KECAMATAN KERITANG		
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	unit	1	21,00	0	-	0	-	0	0,00	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	88,20	19,30		12,20		31,50		KECAMATAN KERITANG		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100	3,00	33	1,00	0	-	33	1,00	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	2	15,60	0	1,50	0	1,00	0	2,50	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	8	69,60	2	16,80	1	11,20	3	28,00	KECAMATAN KERITANG	
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	20,19	-		-		0,00		KECAMATAN KERITANG		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		2	16,00	0	-	0	-	0	0,00	KECAMATAN KERITANG	
												Rata-rata capaian kinerja (%) :	38	37,62			
												Predikat kinerja :	S	S			
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100	10,50	-		1,65		1,65		KECAMATAN KERITANG		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						8	9	10 = 9 + 8	11									
1	2	3	4	7	7	8	9	9	10 = 9 + 8	11	11	12	12	13				
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persen	100	10,50			1,65		1,65			KECAMATAN KERITANG		
					Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100	-								KECAMATAN KERITANG		
7	1	2	2.01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persen	100	10,50	0	-	16	1,65	16	1,65		KECAMATAN KERITANG		
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	47,20			35,23		35,23			KECAMATAN KERITANG		
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	47,20			35,23		35,23			KECAMATAN KERITANG		
7	1	5	2.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Seni dan Budaya yang di Laksanakan	kegiatan	1	47,20	0	-	1	35,23	1	35,23		KECAMATAN KERITANG		
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	47,20		6,02	-		6,02			KECAMATAN KERITANG		
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	100	47,20		6,02	-		6,02			KECAMATAN KERITANG		
7	1	6	2.01	12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi /Kebudayaan dan Masyarakat yang dibina		2	42,20	0	3,10	0		3,10			KECAMATAN KERITANG		
7	1	6	2.01	13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah rekomendasi usulan kecamatan pada musrenbang kecamatan	usulan	850	5,00	496	2,92	0		496	2,92		KECAMATAN KERITANG		
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN														
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	308,20				77,91	77,91			KECAMATAN KERITANG		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	308,20				77,91	77,91			KECAMATAN KERITANG		
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kotabaru Reterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan	Persen	100	308,20	0	-	25	77,91	25	77,91		KECAMATAN KERITANG		
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN														
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	2.353,63		380,40		505,58	885,98			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	17	2.155,68		347,49		479,98	827,47			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	17	2.155,68	17	347,49	17	479,98	17	827,47		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	166	113,25		21,48		19,70	41,18			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	23	8,75	7	2,80	5	1,83	12	4,63		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	2	16,68	1	4,65	0	2,68	1	7,33		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar	4576	2,14	3033	1,42	47	0,02	3080	1,44		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	166	85,68	24	12,62	29	15,16	54	27,78		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	43,70		9,85		5,90	15,75			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
					Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	2	-										
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	1,50	87	1,30	13	0,20	100	1,50		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	2	3,00	0	-	0	-	0	0,00		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	5	39,20	5	8,55	5	5,70	5	14,25		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		5	41,00		1,58		-	1,58			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Operasional/Lapangan yang dipelihara		6	25,00	0	1,58	0	-	0	1,58		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	15,00	0	-	0	-	0	0,00		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		
7	1	1	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		5	1,00	0	-	0	-	0	0,00		KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	8				10 = 9 + 8		11		12		13		
						Rata-rata capaian kinerja (%) :				50	41,96							
						Predikat kinerja :				ST	T							
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100	4,35									KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis	1	4,35									KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis	1	4,35	0		0		0	0,00			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
						Rata-rata capaian kinerja (%) :				0	0,00							
						Predikat kinerja :				SR	SR							
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	46,00				43,59		43,59			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	kegiatan	1	46,00				43,59		43,59			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	5	2.01	4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	kegiatan	1	46,00	0		1	43,59	1	43,59			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
						Rata-rata capaian kinerja (%) :				95	94,75							
						Predikat kinerja :				ST	ST							
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	94,70		8,59			0,80	9,39			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	6	2.01	2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	kelompok	2	94,70		8,59			0,80	9,39			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	6	2.01	12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	kelompok	2	87,70	0	3,40	0	0,80	0	4,20			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	6	2.01	13 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	usulan	400	7,00	297	5,19	0		297	5,19			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
						Rata-rata capaian kinerja (%) :				39	39,48							
						Predikat kinerja :				T	T							
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN													KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1			KECAMATAN				218,60									KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	218,60				60,53		60,53			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	3	2.02	2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	persen	100	218,60				60,53		60,53			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan di kelurahan sapat		1	218,60	0		0	60,53	0	60,53			KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
						Rata-rata capaian kinerja (%) :				28	27,69							
						Predikat kinerja :				R	R							
						Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :				53	50,97							
						Predikat kinerja :				ST	ST							
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN													KECAMATAN MANDAH	
7	1			KECAMATAN				2.704,43									KECAMATAN MANDAH	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	2.538,34		376,46		587,93		964,39			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.02	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90	-									KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.02	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	2.329,43		359,67		550,53		910,20			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.02	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	-									KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	20	2.329,43	20	359,67	20	550,53	20	910,20			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.03	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	16,80		1,40		7,00		8,40			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.03	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	2	16,80	2	1,40	2	7,00	2	8,40			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.05	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	persen	100	12,80		-		-		0,00			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Stel	27	12,80	0		0		0	0,00			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.06	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	156,92		13,30		20,40		33,70			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	9	60,06	0	1,62	0	1,28	0	2,90			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	2	13,58	0	-	0	0,40	0	0,40			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	1	1,28	0	-	1	0,85	1	0,85			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	24	2,40	2	0,20	10	1,00	12	1,20			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	46	79,61	7	11,48	10	16,87	16	28,35			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.08	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	22,39		2,09		10,00		12,09			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	90	2,40	11	0,30	38	1,00	49	1,30			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	12	2,40	0	-	10	2,00	10	2,00			KECAMATAN MANDAH	
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	2	17,59	2	1,79	2	7,00	2	8,79			KECAMATAN MANDAH	
						Rata-rata capaian kinerja (%) :				41	39,66							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 + 8	11	12	13	14	15	16	17		
								Rata-rata capaian kinerja (%):	61	61,02								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100	84,73			84,73		84,73						KECAMATAN RETEH		
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen	100	84,73			84,73		84,73						KECAMATAN RETEH		
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	1	84,73	0	-	1	84,73	1	84,73					KECAMATAN RETEH		
								Rata-rata capaian kinerja (%):	100	100,00								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	27,13		18,91		1,04		19,95					KECAMATAN RETEH		
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	100	27,13		18,91		1,04		19,95					KECAMATAN RETEH		
7 1 6 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok	3	16,42	2	11,64	0	-	2	11,64					KECAMATAN RETEH		
7 1 6 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Usulan	70	10,71	48	7,27	7	1,04	54	8,31					KECAMATAN RETEH		
								Rata-rata capaian kinerja (%):	74	74,25								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN															KECAMATAN RETEH		
7 1	KECAMATAN					383,90										KECAMATAN RETEH		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	383,90		139,68		206,79		346,46					KECAMATAN RETEH		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	90	383,90		139,68		206,79		346,46					KECAMATAN RETEH		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Pulau Kijang	Persen	90	383,90	17	71,34	26	109,67	42	181,01					KECAMATAN RETEH		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Madani	Persen	90	165,00	21	37,73	30	54,18	50	91,91					KECAMATAN RETEH		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan metro	Persen	90	171,00	16	30,61	23	42,94	39	73,55					KECAMATAN RETEH		
								Rata-rata capaian kinerja (%):	49	48,62								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%):	66	65,48								
								Predikat kinerja:	ST	ST								
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN															KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1	KECAMATAN					2.494,51										KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	2.359,21		408,83		569,46		978,29					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	2.060,51		345,16		532,67		877,83					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	18	2.060,51	18	345,16	18	532,67	18	877,83					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	14,40		3,60		3,60		7,20					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	2	14,40	2	3,60	2	3,60	2	7,20					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	197,69		41,02		16,85		57,87					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	4	0,00	1961	0,41	0	-	1961	0,41					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	47	55,82	4	5,18	0	-	4	5,18					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	3	28,80	1	10,05	0	-	1	10,05					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Jenis	3	6,26	1	2,05	1	2,52	2	4,57					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
			Satuan													KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	68	105,98	15	23,34	9	14,33	24	37,66					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	75,10		19,04		16,25		35,39					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	95	1,00	40	0,42	12	0,13	52	0,55					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	3	11,70	1	3,02	0	0,62	1	3,64					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	6	62,40	6	15,60	6	15,60	6	31,20					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
								Rata-rata capaian kinerja (%):	39	38,14								
								Predikat kinerja:	T	S								
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jenis	2	18,55		3,60		3,60		7,20					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jenis	2	18,55		3,60		3,60		7,20					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis	2	18,55	0	3,60	0	3,60	1	7,20					KECAMATAN SUNGAI BATANG		
								Rata-rata capaian kinerja (%):	39	38,81								

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah terdiri dari rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

2.2.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan yang diuraikan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan yang memiliki nilai prioritas dan berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di tahun rencana serta prioritas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dan Nasional

1. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

2. Pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penanganan yang lebih baik lagi. Hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal, luas perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia, namun belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang cenderung rendah. Kondisi - kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 menambah berat pertumbuhan ekonomi karena untuk memutus mata rantai penyebaran, kita dipaksa untuk membatasi kegiatan, sehingga roda perekonomian berjalan sangat lambat, walaupun dapat tumbuh secara positif dengan nilai yang sangat kecil yaitu 0,34%. Diperlukan adanya sebuah terobosan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi.

4. Kemiskinan dan Pengangguran.

Akses pelayanan sosial dasar bagi PPKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi - kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PPKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada tahun 2020 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang

belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non - fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah perdesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumber daya alam dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit bunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari. Namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek - objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke

depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi - institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Pembangunan ekonomi perdesaan

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh *Stakeholder* untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi lokal Desa sehingga memiliki nilai ekonomis. Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan urusan dasar dan tugas / fungsi tiap perangkat daerah.

2.2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir trennya menurun 4,68% pada tahun 2016 dan 3,59% pada tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan menjadi 4,19% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 0,34%. Terus menurunnya pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir selain disebabkan oleh kelembaban ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19 dan juga belum berkembangnya sektor - sektor lainnya diluar sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar serta konstruksi.
- PDRB per kapita Indragiri Hilir meski memiliki tren meningkat yaitu dari Rp 55,76 juta/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi Rp 68,60 juta/kapita/tahun pada tahun 2020, namun relatif rendah dibanding PDRB tetangga dengan kinerja untuk peningkatan PDRB per kapita yang cenderung terus meningkat.
- Jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir (44,29 ribu) lebih tinggi dibanding kabupaten tetangga (Indragiri Hulu sebesar 26,66 ribu) pada tahun 2020, namun masih lebih rendah dibanding Kabupaten Pelalawan (45,88 ribu) dengan kinerja penurunan jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan yaitu dari 85,73% tahun 2018 menjadi 120,48% pada tahun 2020.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

- Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indragiri Hilir sebesar 66,54 adalah yang terendah dibanding IPM kabupaten Indragiri Hulu (69,83) dan Pelalawan (71,56) serta Provinsi Riau (72,71), masih jauh dari capaian IPM minimal dunia (80). Selama periode 2016 - 2020, meski perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hilir cenderung mengalami peningkatan namun kinerja indikator IPM trennya menurun dan dibawah target RPJMD.
- Pada tahun 2020, Harapan lama sekolah (HLS) sebesar 11,91 tahun adalah terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri

Hulu (12,36 tahun) dan Pelalawan (12,24 tahun). Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator harapan lama sekolah trennya mengalami peningkatan tetapi masih dibawah target RPJMD.

- Pada tahun 2020, rata - rata lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,23 tahun adalah yang terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (8,38 tahun) dan Pelalawan (8,50 tahun). Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator rata - rata lama sekolah trendnya mengalami peningkatan namun masih dibawah target RPJMD.
- APK SD/MI Indragiri Hilir sebesar 104,31%, terendah dibandingkan APK SD/MI kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (115,35%) dan Pelalawan (110,74%) pada tahun 2018. Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator APK SD/MI trennya berfluktuatif meningkat.
- APK SMP/MTs Indragiri Hilir sebesar 98,33%, tertinggi dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (88,28%) dan Pelalawan (87,87%) pada tahun 2018, namun capaian APK ini masih dibawah target RPJMD. Namun, pada tahun 2020 APK SMP/MTs telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kinerja sebesar 100,72%.
- Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,85 tahun adalah yang terendah dibanding angka harapan hidup kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (70,25 tahun) dan Pelalawan (71,16 tahun). Selama periode 2016 - 2020, realisasi kinerja indikator ini trennya berfluktuatif mengalami peningkatan.
- Prevalensi balita gizi sebesar 4,30% (Tahun 2017), lebih tinggi dibanding prevalensi Provinsi Riau yang sebesar 1,64%. Namun, untuk tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 0,03 dengan kinerja 196,67%.

- Pada tahun 2020, Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,35%. Capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 ini lebih baik dibanding capaian Kabupaten tetangga Indragiri Hulu (4,91%), Pelalawan (5,99%) dan Provinsi Riau (6,32%). Selama periode 2016 - 2020, realisasi kinerja indikator pengangguran terbuka trennya berfluktuatif menurun, dalam artian jumlah pengangguran terbuka semakin mengalami peningkatan.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

- Relatif stagnannya cakupan fasilitas seni yang sekaligus menggambarkan masih lemahnya pembinaan dan pengelolaan grup kesenian.
- Semakin berkurangnya perhatian generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam grup-grup kesenian.
- Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub - klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

2.2.2.2. Aspek Pelayanan Umum

a. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

- Selama periode 2016 - 2020, APM SD/MI Indragiri Hilir berkisar antara 94,62% - 96,20% yang berarti ada sekitar 3,80% - 5,38% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian ADM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2019 lebih rendah dibanding capaian APM Indragiri Hulu (98,44%) dan Provinsi Riau (97,32%).
- Selama periode 2016 - 2020, APM SMP/MTs Indragiri Hilir berkisar antara 79,96% - 82,39%, yang berarti ada sekitar 17,61% - 20,04% penduduk usia 13 - 15 yang belum sekolah.

- Selama periode 2016 - 2020, APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 98,43% pada tahun 2016 menjadi 99,75% pada tahun 2020, yang berarti sebesar 0,25% - 1,57% penduduk umur 7 - 12 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan di SD/MI.
- APS 13 - 15 tahun Indragiri Hilir selama periode 2016 - 2020 berkisar antara 90,77% - 92,13%, yang menggambarkan bahwa penduduk umur 13 - 15 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs sebesar 7,87% - 9,23%.
- Persentase bangunan SD/MI dengan kondisi baik hanya sebesar 24,61%. Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik hanya sebesar 23,53%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (28,40%), Pelalawan (34,00%) dan Provinsi Riau 29%).
- Persentase bangunan SMP/MTs di Indragiri Hilir dengan kondisi baik hanya sebesar 19,70%. Bangunan SMP/MTS dengan kondisi baik di Indragiri Hilir hanya 20,15%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (25,15%), Pelalawan (39,76%) dan Provinsi Riau (28,54%).
- Masih terdapat sekitar 28,18% guru yang belum berkualifikasi S1/D.IV sehingga yang bersangkutan belum tersertifikasi sebagai guru.

2. Kesehatan

- Rasio ideal daya tampung rumah sakit adalah setiap 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2020, Indragiri Hilir kekurangan sekitar 398 tempat tidur lagi.
- Rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,032 (norma 0,15) pada tahun 2020, lebih rendah dibandingkan capaian rasio dokter Indragiri Hulu tahun

2020 yang sebesar 0,041. Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 52 dokter spesialis sehingga rasionya ideal.

- Rasio dokter umum per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,064 (norma 0,40). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan tambahan dokter umum sebanyak 205 orang dokter umum.
- Rasio dokter gigi per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu 0,032 (norma 0,11). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan 48 orang dokter gigi.
- Rasio perawat per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,97 (norma 1,1), Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan perawat sekitar 200 orang lagi.
- Rasio Bidan per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,59 (norma 1,0). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 693 orang Bidan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi Baik (4,52%) dan Mantap (57,84%), masih dibawah target dan standar Nasional (80%).
- Proporsi jembatan dengan kondisi Baik (58,32%) dan Mantap (43,36%), masih dibawah standar Nasional.
- Proporsi irigasi dalam kondisi baik sebesar 30%, masih dibawah target yang ditetapkan (32%)
- Rendahnya kualitas insfrastruktur yang dibangun dan kondisi lahan gambut dan rawa pasang surut mengakibatkan tingginya frekuensi pemeliharaan terhadap insfrastruktur tersebut.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2019 hanya sebesar 21,49% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Masih terbatasnya pembangunan rumah layak huni di Indragiri Hilir yaitu berkisar antara 20 unit - 162 unit per tahun selama periode 2009 - 2017. Disisi lain, jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 16.868 unit rumah.
- Masih adanya permukiman kumuh di perkotaan yaitu sebesar 22%.
- Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dasar di wilayah permukiman.
- Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Permendagri 20 % dari Luas Perkotaan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Rasio rumah ber IMB baru 2,30% dari total rumah yang ada di Indragiri Hilir.
- Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk masih rendah yaitu 0,04 sehingga penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kurang optimal.
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat masih rendah dengan kinerja 10% sebagai konsekuensi kurangnya tenaga Satpol PP.
- Belum tersedianya data Daerah Rawan Bencana dimasing-masing Kecamatan secara menyeluruh di Kabupaten indragiri Hilir sebagai acuan identifikasi bencana.
- Dukungan anggaran pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana masih rendah.
- Pengalokasian dana siap pakai tidak berada di BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sehingga sulit diakses ketika terjadi bencana dalam rangka penanggulangan bencana.
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah terdampak bencana belum terlaksana dengan baik karena terbentuk anggaran.

- Kurangnya keterlibatan multi pihak dalam penanggulangan bencana dan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

6. Sosial

- Belum optimalnya pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui sistem layanan dan rujukan terpadu dan SINK-NG menuju penyediaan Basis Data Terpadu (BDT).
- Belum optimalnya penanganan bencana alam dan bencana sosial karena kekurangan penyediaan logistik bencana dan biaya operasional.
- Belum optimal penanganan anak bermasalah sosial.

b. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding Kabupaten sekitar dan Provinsi Riau dengan capaian kinerja yang terus menurun.
- Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir sebesar 3,89%.
- Kegiatan pemberian pelatihan kewirausahaan kepada tenaga kerja pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran akibat di *recofussing* untuk penanganan COVID-19.
- Tidak berjalannya peranan dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dibentuk di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks pembangunan gender (IPG) Indragiri Hilir sebesar 82,34% adalah yang terendah dibandingkan IPG kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indragiri Hilir yaitu sebesar 61,05% juga termasuk yang terendah dibanding kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
- Masih lemahnya kelembagaan/institusi yang mendukung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, kurangnya pemahaman tentang kota layak anak serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam menuju kota layak anak.

3. Pangan

- Selama periode 2016 - 2020, belum tersedia regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Pertanahan

- Persentase luas tanah yang bersertifikat baru sebesar 41,39%.
- Belum memadainya SDM dalam bidang Sistem Pendaftaran Tanah.
- Masih terdapatnya aset kekayaan daerah yang belum memiliki bukti autentik, sehingga rawan terjadi penyerobotan.

5. Lingkungan Hidup

- Belum memiliki laboratorium lingkungan dan perlengkapannya guna memberikan hasil sampel yang cepat untuk disampaikan dalam waktu dan tempat tertentu
- Belum adanya pejabat Fungsional PPLHD DAN PPNS Lingkungan dalam upaya melakukan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan lingkungan.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
- Masing tingginya pencemaran lingkungan hidup.

- Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan DAS, degradasi kawasan pesisir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan.
- Persentase penanganan sampah masih belum optimal, baru sekitar 81,49%.
- Tingginya alih fungsi hutan dan lahan.
- Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai standar (*Sanitary landfill/controll landfill*).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Cakupan penerbitan kartu keluarga mencapai 226%
- Kepemilikan KTP (e-KTP) hanya 99% dari total penduduk Indragiri Hilir yang harus ber KTP.
- Kepemilikan akte kelahiran hanya sebanyak 556 per 1.000 penduduk Indragiri Hilir. Masih ada 456 penduduk dari 1.000 penduduk yang belum ada akta kelahiran.
- Keterbatasan peralatan untuk mendukung kegiatan administrasi kependudukan.
- Tidak sinkronnya data penduduk baik jumlah penduduk ataupun LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang) karena tidak dilaporkan secara berkala dari Kecamatan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program DMIJ telah berhasil meningkatkan ketersediaan infrastruktur desa namun belum mendorong secara signifikan ekonomi masyarakat desa.
- Capaian desa maju masih sangat rendah yaitu hanya 79 desa, nihil desa dengan status desa Mandiri dan masih ada sebanyak 17 desa dengan status Sangat Tertinggal.

- Masih sangat lemahnya kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa memananeg kegiatan - kegiatan desa.
- Masih rendahnya pengelolaan admisnistrasi keuangan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Cakupan peserta KB aktif masih 64,10%.
- Cakupan PUS peserta KB masih 77,82%.
- Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh anak, remaja dan bina lansia.
- Belum optimalnya peran masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKB/PK) serta pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
- Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
- Masih kurangnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- Masih kurangnya tenaga (petugas lapangan), sarana dan prasarana.

9. Perhubungan

- Kurangnya SDM Teknis Perhubungan baik Kualitas Maupun Kuantitas dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Kurangnya Ketersediaaan Produk Hukum baik peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
- Kurangnya sarana Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Belum beroperasi secara maksimal UPT pengujian kendaraan bermotor , terminal dan perpakiran pada Dinas Perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.

- Kurangnya Pemeliharaan dan atau peningkatan Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Masih rendahnya pemenuhan standar layanan angkutan di kabupaten Indragiri Hilir.

10. Komunikasi dan Informatika

- Masih lemahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- Sebagian besar penduduk Indragiri Hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Koperasi aktif di Indragiri Hilir sebesar 67,00%.
- Usaha mikro dan kecil persentasenya sebesar 72,00%.
- Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi.
- Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah.
- Sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah relatif rendah kualitas.
- Kebanyakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan UKM, Kebanyakan hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal dan sedikit yang melakukan ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

12. Penanaman Modal

- Realisasi PMDN masih rendah yaitu Rp 449 milyar, dibawah target Rp 11.112 milyar tahun 2020.

- Realisasi PMA jauh masih rendah yaitu USD 274,38 juta, dibawah target USD 108 juta.
- Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal (pemantauan pembinaan dan pengawasan).
- Terbatasnya kompetensi SDM dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan BP2MPD.
- Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi kecamatan dan kelurahan dalam pengurusan perijinan penanaman modal.
- Masih kurangnya upaya promosi daerah melalui kegiatan berskala regional, nasional maupun internasional.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Masih rendah persentase wirausaha muda.
- Masih rendah cakupan pembinaan olahraga.
- Masih rendah cakupan pelatih yang bersertifikat.
- Masih rendah cakupan pembinaan atlet muda.
- Pembinaan olahraga belum beroreantasi prestasi.

14. Statistik

- Data-data untuk pengukuran indikator kinerja pada RPJMD banyak yang tidak tersedia di Indragiri Hilir Dalam Angka, kecamatan dalam Angka, PDRB, Statistik Daerah dan Indikator kesejahteraan serta terbitan lainnya.
- Koordinasi dan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten khususnya SKPD dengan BPS Kabupaten Indragiri Hilir masih lemah.

15. Persandiaan

- Urusan persandian ini belum mendapat perhatian cukup oleh pemerintah daerah.

16. Kebudayaan

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih terbatas.

- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih terbatas kuantitas dan kualitasnya.
- Mulai ditinggalkannya nilai - nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat.
- Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan bangunan bersejarah.

17. Perpustakaan

- Jumlah perpustakaan yang masih terbatas yaitu sebanyak 4.972 orang.
- Koleksi buku perpustakaan yang masih terbatas dengan pelayanan yang belum baik.

18. Kearsipan

- Masih relatif rendahnya pengelolaan arsip secara baku yaitu sebesar 30,36%.
- Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas untuk pengelola kearsipan yaitu sebanyak 3 orang.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

- Pandemi COVID-19 memaksa semua orang untuk mengurangi interaksi guna mencegah penyebaran sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 22.047 wisatawan pada tahun 2020.
- Belum memadai sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang ada.

2. Pertanian

- Produksi beras Indragiri Hilir belum mencukupi konsumsi penduduk Indragiri Hilir.
- Produktivitas kelapa masih rendah yaitu 1,217 ton kopra/hektar .

- Produktivitas kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 2,515 ton CPO/hektar, diibawah produktivitas perkebunan besar Indragiri Hilir (4,24 ton CPO/hektar).
- Pembangunan infrastruktur kebun terutama pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran yang masih jauh dibawah kebutuhan.
- Kegiatan rehabilitasi/peremajaan kebun kelapa belum dapat menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Harga kelapa petani PIR maupun petani non PIR berfluktuatif dan cenderung rendah.

3. Perdagangan

- Nilai ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir yang cenderung terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mencapai USD 409,15 juta.
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

4. Perindustrian

- Nilai produksi usaha menengah kecil masih rendah dibawah target yang telah ditetapkan.
- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB relatif masih rendah yaitu 24,05%.
- Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah dan kewirausahaan masyarakat.
- Masih rendahnya jumlah industri pengolahan, bahkan industri pengolahan kelapa terus menurun jumlahnya.
- Rendahnya daya saing industri kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Transmigrasi

- Kegiatan-kegiatan ketransmigrasian secara terbatas pada transmigrasi lokal.

6. Kelautan dan Perikanan

- Produksi perikanan Indragiri Hilir masih mengandalkan perikanan tangkap dan sangat terbatas pada perikanan budidaya.
- Konsumsi ikan penduduk Indragiri Hilir yang rata - ratanya sebesar 39,69 ton/kapita perlu didorong meningkat menjadi 50,80 ton/kapita/tahun.
- Masih terdapatnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan alat terlarang.
- Terjadinya konflik antara sesama nelayan dalam hal menentukan lokasi penangkapan.
- Rendahnya kemampuan petani pembudidaya tambak dalam hal merevitalisasi tambaknya.

d. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

- Terbatasnya Sumber daya kuantitas (fungsional) dan kualitas perencana pembangunan.
- Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
- Terbatasnya sumber data yang lengkap dan akurat, yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

2. Keuangan

- Realisasi Pendapatan daerah yang kurang tercapai.
- Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
- Masih kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dibidang pemeriksaan pajak daerah.

- Pemerintah Indragiri Hilir belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan

- Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
- Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis.
- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai oleh sebagian pejabat struktural kepada PNS bawahannya yang indisipliner, sementara peraturan disiplin PNS telah memberikan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatannya.

4. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurang kewajiban pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuasa kepentingan kelompok atau golongan, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum dan terjadinya demonstrasi yang memprotes pemerintah.
- Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dikarenakan Hetrogenitas dan Multikultural yang terjadi perkembangan dinamika kehidupan masyarakat juga arus globalisasi khususnya dibidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi

memunculkan akses - akses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusakan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional.

- Meningkatnya Penyakit Masyarakat seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan, berupa kasus pecandu narkoba yang semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

- Masih sedikit pemanfaatan hasil penelitian untuk pembangunan di Indragiri Hilir.
- Penelitian yang dilakukan spasial dan tidak komprehensif sehingga sukar diterapkan.

6. Pengawasan

- Masih banyak temuan APIP yang belum ditindak lanjuti. Persentase APIP yang ditindaklanjuti sebesar 70,96%.
- Masih terbatas jumlah personel APIP yang hanya 12 orang dan idealnya sebanyak 45 orang.
- Lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga kejadian serupa berulang kembali.

7. Sekretariat Dewan

- Rasio pembahasan prolegda yang semakin meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 98,31% menjadi 100% tahun 2020.

2.2.2.3. Aspek Daya Saing

- Pengeluaran Per Kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 10.382 ribu, lebih rendah dibanding pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hulu (Rp 10.738 ribu), Pelalawan (Rp 12.149) dan Provinsi Riau (Rp 11.255) tahun 2019.

- Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Indragiri Hilir telah berada pada angka 130,34 yang berarti petani di Indragiri Hilir tidak lagi mengalami defisit artinya kenaikan harga produksi relatif lebih besar dibanding dengan kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani naik, lebih besar dari pengeluarannya.
- Rumah tangga yang menggunakan listrik masih 51,50% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir. Realisasi kinerja indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik menurun dari 98,59% pada tahun 2015 menjadi 93,64% pada tahun 2019.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah terdiri dari dua bagian utama yaitu perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah. Perubahan arah kebijakan ekonomi daerah diperlukan sebagai langkah penyesuaian atas asumsi atau proyeksi ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya karena jika tidak dilakukan perubahan atau penyesuaian maka tujuan pembangunan daerah dan target indikator makro ekonomi daerah tidak akan dapat dicapai. Pasca Pandemi COVID-19 dilakukan penyesuaian terkait indikator pencapaian perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Dihadapkan pada situasi ini pemerintah harus segera melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi terkini.

Perubahan arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang perubahan kebijakan khususnya terkait hasil audit BPK RI terhadap SILPA Tahun 2021 yang ternyata jauh dari asumsi/perkiraan yang telah ditetapkan dan implikasinya terhadap kebijakan keuangan tahun anggaran 2022. Hasil audit dimaksud mengharuskan pemerintah

daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah.

Perekonomian domestik sepanjang semester I tahun 2022 mampu menunjukkan tren positif di tengah perkembangan pandemi *Covid-19* dan dinamika perekonomian global. Pemulihan ekonomi berlanjut seiring keberhasilan Pemerintah dalam menekan kasus harian *Covid-19* dan kontinuitas pelaksanaan program vaksinasi *Covid-19*. Pada triwulan I tahun 2022, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), yang ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Kondisi fundamental ekonomi lainnya di Indonesia juga relatif sehat yang terpantau dari relatif stabilnya pergerakan nilai tukar dan kinerja bursa (IHSG) yang terjaga. Namun demikian, Pemerintah tetap mencermati berbagai risiko yang muncul antara lain dampak kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, batubara, dan CPO terhadap pelaksanaan APBN, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Kebijakan APBN diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesehatan masyarakat dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk itu, pelaksanaan APBN pada semester II tahun 2022 diarahkan untuk tetap fleksibel dalam meredam risiko perkembangan pandemi maupun perekonomian global.

Perekonomian Indonesia terus melanjutkan tren pemulihan hingga triwulan I tahun 2022. Meskipun varian Omicron sempat melonjak tajam

di bulan Februari 2022, perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy). Respons kebijakan Pemerintah yang lebih baik dan lebih siap serta daya adaptasi masyarakat dan dunia bisnis dalam menghadapi gelombang pandemi berhasil meminimalisir dampak negatif dari gelombang varian Omicron tersebut. Selain itu, program vaksinasi serta keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut memegang peranan krusial dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berbagai program yang digulirkan oleh Pemerintah berhasil mengakselerasi performa ekonomi di triwulan I tahun 2022, baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi.

Sasaran Ekonomi Makro Nasional tahun 2023 mempunyai tema “Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Sasaran ekonomi makro yang hendak dicapai pada tingkat kemiskinan 7,5-8,5, dengan Tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0. Untuk rasio gini 0,375-0,378, IPM 73,31-73,49., secara lebih rinci digambarkan pada table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2023

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (yoy)	3,69	5,4 - 6,0	4,9	5,3 - 5,9

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Laju inflasi, IHK (yoy): Akhir Periode	1,87	2,0 - 4,0	2,7	2,0 - 4,0
Target Pembangunan				
Tingkat Kemiskinan ()	9,71	8,5 - 9,0	5,25	7,5 - 8,5
Tingkat Pengangguran Terbuka ()	6,49	5,5 - 6,2	5,20	5,3 - 6,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376 - 0,378	0,360 - 0,374	0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,29	73,44 - 73,48	75,54	73,31 - 73,49

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 mengacu kepada kondisi perekonomian daerah terkini dan perubahan arah kebijakan ekonomi Provinsi Riau yang bersumber dari dokumen Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022.

Tahun 2022 ini masih dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi akibat ketidak pastian ekonomi global dan dampak wabah COVID-19. Upaya pemulihan ekonomi dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, Kejadian COVID-19 mempengaruhi perekonomian daerah, kegiatan-kegiatan ekonomi dihadapkan kepada ketidakpastian, berkurangnya lapangan usaha, terjadi pengurangan tenaga kerja, serta ancaman gangguan aktivitas ekonomi masyarakat akibat krisis kesehatan yang terjadi. Melihat kondisi perekonomian diatas pemerintah daerah

perlu menyiapkan langkah-langkah konkrit sebagai antisipasi perubahan ekonomi.

Sasaran dan Target pada Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, tidak terlepas dari capaian-capaian tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan indikator makro yang menjadi sasaran dan target yang harus dicapai pada RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Target RKPD 2022	Target Perubahan RKPD 2022
			2020	2021		
1.	Pertumbuhan Ekonomi		0,34	4,44	3,61-4,9	4,9
2.	Tingkat Kemiskinan		5,93	6,18	5,56-4,97	5,56
3.	IPM	Indeks	66,54	66,63	70,29-70,69	70,29
4.	Gini Ratio	Indeks	0,310	0,297	0,32	0,32
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,35	2,66	3,84	3,84

Sumber : BPS, Bappeda, 2022 .

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat.

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan RKPD tahun 2022, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.917.16.228.586 naik sebesar Rp. 340.782.120.799 atau sebesar 21,62 dari target Pendapatan pada RKPD Murni sebesar Rp. 1.576.380.107.786, mengalami kenaikan pada Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 193.789.108.026 naik sebesar Rp. 11.266.406.262 atau sebesar 6,17% dari target sebesar Rp. 182.522.701.764 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.723.373.120.559 naik sebesar Rp. 401.234.114.537 atau sebesar 30,35 dari target sebesar Rp. 1.322.139.006.022, sedangkan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah tidak ditargetkan pada tahun 2022, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3.
Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD Murni 2022	APBD Murni 2022	Perubahan RKPD 2022	Bertambah/ (Berkurang)	
4	PENDAPATAN DAERAH					
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.522.701.764	199.123.679.389	193.789.108.026	11.266.406.262	6,17%
04.01.01	Pajak Daerah	44.372.729.622	45.375.457.247	45.650.457.247	1.277.727.625	2,88%
04.01.02	Retribusi Daerah	4.240.022.500	4.993.272.500	4.632.522.500	392.500.000	9,26%
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.925.469.840	11.925.469.840	14.107.167.794	2.181.697.954	18,29%
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.984.479.802	136.829.479.802	129.398.960.485	7.414.480.683	6,08%
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.322.139.006.022	1.563.796.483.172	1.723.373.120.559	401.234.114.537	30,35%
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.221.202.388.000	1.462.859.865.150	1.589.723.415.269	368.521.027.269	30,18%
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.936.618.022	100.936.618.022	133.649.705.290	32.713.087.268	32,41%
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.718.400.000	-	0	-	0,00%
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.718.400.000	-	0	-	0,00%
	Jumlah Pendapatan	1.576.380.107.786	1.762.920.162.561	1.917.162.228.585	340.782.120.799	21,62%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 (diolah) dan Hasil Proyeksi

Proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. Adanya trend positif terhadap tingkat pertumbuhan pembayaran pajak daerah pada beberapa bulan terakhir, sehingga potensi penerimaan diperkirakan naik hingga akhir tahun, khususnya pada pajak penerangan jalan, pajak reklame dan bphtb;
2. Tingkat kesadaran pembayaran pajak, baik pembayaran tahun berjalan maupun pembayaran tunggakan juga mengalami trend kenaikan hingga akhir tahun;
3. Nilai positif terhadap adanya peralihan dan peningkatan hak atas tanah hingga akhir tahun juga berbanding lurus dengan pembayaran BPHTB;
4. Masih terdapat objek-objek pajak daerah lainnya yang terus dioptimalkan sebagai potensi penerimaan daerah hingga akhir tahun.
5. Terhadap beberapa jenis retribusi yang mengalami kenaikan positif hingga triwulan kedua tahun berjalan sehingga perlu dioptimalkan hingga akhir tahun.
6. Bentuk penyertaan modal pada bank daerah perlu dioptimalkan semaksimal mungkin sebagai bentuk komitmen dalam optimalisasi penerimaan daerah.
7. Terdapat penambahan atas penerimaan BLUD Rumah Sakit yang diperkirakan hingga akhir tahun akan terus meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada perubahan RKPD Tahun 2022.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan sebesar Rp. 2.132.118.564.351 naik sebesar Rp. 231.731.031.034 atau sebesar 12% dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 1.629.176.645.101 naik sebesar Rp.196.859.869.228 atau naik sebesar

14% dari target Rp.1.432.316.775.873, Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp. 206.060.174.380 naik sebesar Rp. 65.920.438.573 atau sebesar 47% dari target sebesar Rp.140.139.735.807, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 17.727.375.195 turun sebesar Rp. 25.272.624.805 atau sebesar (59%) dari target sebesar Rp.43.000.000.000, sedangkan Belanja Transfer ditargetkan sebesar Rp.279.154.369.675 turun sebesar Rp. 5.776.651.962 atau sebesar (2%) dari target sebesar Rp.284.931.021.637.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, terdapat Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.17.028.000.000,-

Proyeksi belanja untuk perubahan RKPD Tahun 2022, memperhatikan dengan seksama proyeksi pendapatan untuk tahun berkenaan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD Murni 2022	APBD Murni 2022	Perubahan RKPD 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	BELANJA					
05.01	BELANJA OPERASI	1.432.316.775.873	1.526.004.557.864	1.629.176.645.101	196.859.869.228	14%
05.01.01	Belanja Pegawai	759.346.953.393	851.657.929.685	819.501.330.602	60.154.377.209	8%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	616.464.369.350	628.158.875.049	749.325.074.796	132.860.705.446	22%
05.01.05	Belanja Hibah	54.173.573.130	44.381.873.130	58.584.148.603	4.410.575.473	8%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.331.880.000	1.805.880.000	1.782.091.100	(549.788.900)	-24%
05.02	BELANJA MODAL	140.139.735.807	144.464.629.098	207.583.363.595	67.443.627.788	48%
05.02.01	Belanja Modal Tanah	450.000.000	450.000.000	-	-	0%
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.951.893.307	40.036.972.053	67.173.925.754	36.222.032.447	117%
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.934.508.500	28.210.816.500	56.391.915.313	19.457.406.813	53%
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.403.624.000	68.552.493.800	78.647.977.378	13.244.353.378	20%
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.849.710.000	5.699.346.745	5.360.045.150	510.335.150	11%
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.550.000.000	1.515.000.000	9.500.000	(1.540.500.000)	-99%
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	43.000.000.000	23.296.605.924	16.188.185.980	(26.811.814.020)	-62%
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	43.000.000.000	23.296.605.924	16.188.185.980	(26.811.814.020)	-62%
05.04	BELANJA TRANSFER	284.931.021.637	279.154.369.675	279.154.369.675	(5.776.651.962)	-2%
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.660.017.137	5.036.872.975	5.036.872.975	376.855.838	8%
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.271.004.500	274.117.496.700	274.117.496.700	(6.153.507.800)	-2%
	Jumlah Belanja	1.900.387.533.317	1.972.920.162.561	2.132.118.564.351	231.731.031.034	12%
	Total Surplus/(Defisit)	(324.007.425.531)	(210.000.000.000)	(214.956.335.766)	109.051.089.765	-34%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 (diolah) dan Hasil Proyeksi

3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Dari Tabel 3.5. pada perubahan RKPD Tahun 2022, diproyeksi Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp. 214.956.335.766, turun sebesar Rp. 109.051.089.765 atau sebesar 34 dari proyeksi sebesar Rp.324.007.425.531 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak dialokasikan karena Perda Penyertaan Modal sudah berakhir.

Tabel 3.5.

Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD Murni 2022	APBD Murni 2022	Perubahan RKPD 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
6	PEMBIAYAAN					
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	324.007.425.531	210.000.000.000	214.956.335.766	(109.051.089.765)	(34)
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	324.007.425.531	210.000.000.000	214.956.335.766	(109.051.089.765)	(34)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	324.007.425.531	210.000.000.000	214.956.335.766	(109.051.089.765)	(34)
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	324.007.425.531	210.000.000.000	214.956.335.766	(109.051.089.765)	(34)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 (diolah) dan Hasil Proyeksi

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah;

“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun

negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.

- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

- Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum.
- Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4 : Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.
- Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2022.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 di samping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, juga mengacu pada tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dan RKP Nasional Tahun 2022. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hilir yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun tujuan dan sasaran tahun keempat (2022) dapat kami sajikan pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum						
1.1	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	Predikat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran , Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Meningkatkan kualitas Pengawasan Daerah Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
			Nilai LPPD	Nilai		
			Opini BPK atas LKPD	Predikat		
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Peningkatan penerapan standar pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan Peningkatan integritas, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Aparatur 		
Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah						
1.1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar		Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	Persentase		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan insfrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih (%)	Persentase	Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	Persentase	Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat
		Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Penyediaan Infrastruktur (%)	Persentase	Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar masyarakat
		Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%)	Persentase	Peningkatan pergerakan orang/barang	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan pergerakan orang/barang melalui terminal dan dermaga
Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat						
1.1	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam		Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)	Persentase		
		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan
1.2	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Persentase		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Udara b. Indeks Kualitas Air c. Indeks Kualitas Tutupan lahan	Indeks	Menjamin keberlangsungan pembangunan dengan tetap menjaga indeks kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara • Meningkatkan kualitas tutupan lahan
Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa						
1.1	Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Indeks)		
		Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >25 tahun Harapan Lama Sekolah	Tahun	Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan • Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak • Pencegahan dan penanganan penyakit menular • Standarisasi pelayanan Kesehatan • Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	(Ribu Rupiah)	Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka Peluang usaha • Meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
						menengah, dan (usaha) besar • Peningkatan Bantuan sosial
Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan						
1.1	Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah		Indeks Partisipasi Sosial	Indeks		
		Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat (%)	Persen	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat	• Peningkatan partisipasi sosial kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah
1.2	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		Status Indeks Desa Membangun			
		Meningkatnya keikutsertakan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	Indeks	Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam membangun Desa	• Menjamin tingkat keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dalam rangka program DMIJ Plus Terintegrasi
		Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Menciptakan Ruang Perempuan dalam Pembangunan	• Kebijakan Responsif Gender dalam Pembangunan • Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan
Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial						
1.1	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial		Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)			
		Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat	Indeks Rasa Aman	(indeks)	• Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat • Mengurangi Risiko Bencana	• Menjamin rasa aman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari • Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
						kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender Pemenuhan hak anak dan perempuan secara berkesinambungan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran						
1.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		PDRB per kapita (Rp)	Rp		
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	(%)	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19 Peningkatan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin terdampak COVID-19
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja membuka lapangan kerja sektor unggulan daerah
Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah						
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya		Laju Pertumbuhan Ekonomi			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	saing daerah	Meningkatnya produksi sektor potensial	PDRB Perkapita	(Juta Rupiah)	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing dan produktivitas industri unggulan • Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata
		Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi PMDN	(Milyar Rupiah)	Meningkatkan Daya tarik investasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan angka nilai investasi didaerah
		Meningkatnya nilai ekspor daerah	Nilai ekspor bersih perdagangan	(Milyar Rupiah)	Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
		Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks		

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural”** melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 - 6,0;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9,0 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,5 - 6,2 persen;
4. Rasio Gini pada angka 0,376 - 0,378 (Nilai);
5. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,44 - 73,48;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8 0 27,1 persen;
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102 - 104 ; dan
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102 -105.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki *link and match* dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan Tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 di samping mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, juga mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2022, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2022 sesuai dengan tema yaitu **“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian Dan Pariwisata Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima”**.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Sejalan dengan Tema RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, maka Tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Menuju Pemantapan Kemajuan Martabat dan Marwah Indragiri Hilir”**. Sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2022 antara lain ; pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,9%, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 4,97%, IPM diproyeksikan sebesar 67,92, Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,32 dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 3,84%.

Isu strategis di Kabupaten Indragiri Hilir dengan permasalahan pembangunan yang paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional, sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terus ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik akan terus ditingkatkan.

2. Pemantapan pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penanganan yang lebih baik lagi. Hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal, luas perkebunan kelapa

di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia, namun belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang cenderung rendah. Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.

4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal Seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah

perdesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit berbunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari. namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu

meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi-institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi lokal Desa sehingga memiliki nilai ekonomis .

Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka kebijakan terkait penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 untuk tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2022 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
3. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
4. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
5. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
6. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri dan penguatan kesehatan masyarakat;
7. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
8. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi Covid-19;

9. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan.

Adapun Arah Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi

- a. Pembangunan infrastruktur, aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
- b. Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja;
- c. Perbaikan sistem pelayanan investasi daerah.

2. Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah

- a. Pemanfaatan creative financing, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
- b. Pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar Daerah.
- c. Dukungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (KDD) untuk pelaksanaan creative financing melalui skema pendanaan terintegrasi (integrated funding).

3. Peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah

	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

	Manusia Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pemantapan pemerataan pembangunan.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Pengelolaan Pelayaran
Mewujudkan kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Bencana
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi	Program Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan Umkm
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dalam rangka mengatasi permasalahan di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang diperoleh dari hasil reses para anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dibagi pada beberapa Urusan, sebagaimana tabel 4.3. berikut :

Tabel : 4.3.

Urusan Pemerintahan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kabupaten Indragiri Hilir

URUSAN	PERMASALAHAN
1. PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan

URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan • Terbatasnya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk pendidikan S1 • Kurangnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan
2. KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan • Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance untuk Evakuasi Warga yang Sakit • Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu • Perlunya Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran Pola Hidup Sehat bagi Masyarakat • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan Imunisasi dasar dan lanjutan bagi masyarakat
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Kurang dan Rusak • Rendahnya Ketersediaan Air Bersih • Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan • Kurangnya Infrastruktur Drainase yang Memadai • Perlunya Penanggulangan Longsoran Tanah di Sekitar Jalan, Tebing dan Sungai • Terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan Badan Sungai • Perlunya Peningkatan Akses Jalan di Daerah Rawa/Sungai • Perlunya Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni • Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman yang Kurang Memadai dan Rusak
5. LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan • Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup

URUSAN	PERMASALAHAN
6. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan SDM untuk Trantibum.
7. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal
8. SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan • Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional • Meningkatnya Permasalahan Sosial di Lingkungan Masyarakat • Kurangnya Sarana dan Prasarana Panti
9. KETENAGAKERJAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Tingkat Pengangguran • Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja
10. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan.
11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa terhadap Pengelolaan BUMDes dan Pengelolaan Keuangan Desa
12. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender • Perlunya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
13. PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan
14. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik
15. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya Bantuan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat • Minimnya Pengembangan UMKM
16. PERPUSTAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Membaca
17. KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Arsip
18. KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Rendahnya Produksi Perikanan • Kurangnya Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Kurangnya Sarana dan Prasarana Perikanan • Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan • Kurangnya Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu Hasil Perikanan • Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

URUSAN	PERMASALAHAN
19. PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kepariwisataan • Kurangnya Event Kepariwisataan Penunjang Promosi Wisata Daerah • Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Industri Pariwisata
20. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga • Perlunya Pelaksanaan Event Olahraga • Kurangnya Pengembangan Pemuda dalam kewirausahaan • Perlunya pemupukan semangat kepemudaan
21. KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-nilai Budaya • Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
22. PERTANIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Rendahnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Penumbuhkembangkan Usaha Tani • Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen • Kurangnya Penyediaan Bibit dan Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan dan Perkebunan untuk Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Belum tersedia pengaturan air di lahan pertanian dan perkebunan • Kurangnya Sarana Prasarana Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Minimnya Sarana Prasarana Perbenihan Pertanian • Kurangnya Penyediaan Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pangan
23. PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
24. PERINDUSTRIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Usaha Industri Kecil dan Menengah / Home Industries
25. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional
26. PENANGGULANGAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
27. KEPALA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya Penyediaan dan Peningkatan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah yang Memadai <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
28. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Dewan
29. KECAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya SDM Kecamatan

Tabel : 4.4

Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kabupaten Indragiri Hilir

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERMASALAHAN POKOK-POKOK FIKIRAN
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Dewan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah yang Memadai
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan SDM untuk Trantibum.
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya SDM Kecamatan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Permasalahan Sosial di Lingkungan Masyarakat
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sarana dan Prasarana Panti
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman yang Kurang

	Memadai dan Rusak
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	· Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Membaca
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	· Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Arsip
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Masih Rendahnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Penumbuhkembangkan Usaha Tani
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Penyediaan Bibit dan Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan dan Perkebunan untuk Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Masih Rendahnya Produksi Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Sarana dan Prasarana Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	· Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Kurangnya Usaha Industri Kecil dan Menengah / Home Industries
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	· Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	· Perlunya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	· Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	· Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	· Terbatasnya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk pendidikan S1
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	· Kurangnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	· Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Kurang dan Rusak
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	· Rendahnya Ketersediaan Air Bersih
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	· Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	· Kurangnya Infrastruktur Drainase yang Memadai
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	· Perlunya Penanggulangan Longsor Tanah di Sekitar Jalan, Tebing dan Sungai
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	· Terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan Badan Sungai
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	· Perlunya Peningkatan Akses Jalan di Daerah Rawa/Sungai
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	· Perlunya Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kepariwisataaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Kurangnya Event Kepariwisataaan Penunjang Promosi Wisata Daerah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Industri Pariwisata
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Perlunya Pelaksanaan Event Olahraga

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Kurangnya Pengembangan Pemuda dalam kewirausahaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Perlunya pemupukan semangat kepemudaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-nilai Budaya
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	· Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	· Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	· Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	· Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	· Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	· Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance untuk Evakuasi Warga yang Sakit
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	· Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	· Perlunya Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran Pola Hidup Sehat bagi Masyarakat
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	· Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan Imunisasi dasar dan lanjutan bagi masyarakat
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	· Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan.
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	· Terbatasnya Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut :

Tabel 4.5.

Sandingan Antara Sasaran/Indikator Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	RPJMD 2022		RANHIR PERUBAHAN RKPD 2022		
				TARGET	PAGU RPJMD 2022 (JUTA RUPIAH)			
	Misi 1 :							
	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeajaan hukum							
	1.1. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		3,29				
	1.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP (Predikat)		BB				
		Nilai LPPD (Nilai)		Sangat Tinggi				
		Opini BPK atas LKPD (predikat)		WTP				
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3				
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	1.190,00	1.446,0610
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD,RENSTRA RKPD dan RENJA)	Persen	100	2.179,78	1.593,5198

5	5	2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	80	1.060,00	781,8056
5	2	2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	331.856,65	-
5	2	3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	100	3.029,98	1.570,2565
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	9,5	3.755,89	3.650,4556
6	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti pada tahun berkenaan	Persen	100	2.548,46	1.966,4020
6	1	3				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	75	386,40	278,4115
2	1	6	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persen	81,48	7.075,33	7.934,6710
2	1	6	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Diskominfoopers Kab.Inhil	Persen	58,82	892,23	990,4048
							Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen			
2	2	0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase documen data statistik sektoral daerah yang tepat waktu	Persen	59,7	100,00	-
2	2	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	Persen	53	100,00	-

				1.1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		89,22		
2	1 2	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	92,50	402,79	448,9500
2	1 2	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	92	69,98	
2	1 2	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen	70	289,84	629,2500
2	1 8	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	Angka	3.70	345,00	139,1095
2	1 8	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen	70	180,00	367,9163
2	1 8	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	2.80	113,47	
2	2 4	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	24	107,50	96,0996
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persen	100	27.789,52	28.199,6736
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	100	4.870,00	4.544,6096
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitasi	Persen	100	42.273,40	35.910,8451
5	3	2			PROGRAM	Persentase Pelayanan ASN yg	Persen	100		

					KEPEGAWAIAN DAERAH	Terselesaikan			3.998,22	2.294,0549
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	50	2.712,55	2.766,6873
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	90	16,58	1.244,1688
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	21,65	350,3040
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	71,40	610,5710
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	33,37	165,5735
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	-	127,7490
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	58,73	702,1430
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	22,00	178,7332
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	24,45	409,3830
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	-	414,3863

						PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	0	-	235,7900
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	67,35	258,9900
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	10,50	111,1420
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	4,35	135,8120
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	36,80	139,6375
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	25,50	91,2560
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	0,72	14,5300
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	21,64	390,0252
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	18,55	197,4685

7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	18,55	206,0255
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	55,85	54,8000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	2.126,51	16,0250
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	639,20	30,0000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	824,50	1,8500
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	207,90	42,5000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	200,00	5,0000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	798,50	34,5315
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	196,30	9,7000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	734,70	2,2500

					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	dikecamatan				
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	668,40	12,5000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	616,30	58,4000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	172,46	45,6220
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	52,90	58,9500
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	75,20	-
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	0	44,90	-
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	-	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	130,00	127,4944
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	86,90	49,3025

7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	28,70	113,9760
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	92,89	119,5800
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	45,90	59,8290
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	52,13	65,4560
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	97,06	102,2300
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	47,20	-
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	46,00	86,1145
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	86,99	-
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	75,85	78,0860
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	80,32	-

					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	yang di selesaikan							
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	84,73	67,0750			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	85,96				
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	114,00				
					Misi 2 :								
					Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah								
					2.1.	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar				Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	54,71		
					2.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan insfrastruktur permukiman				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih (%)	52		
										Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	65,56		
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	Persen	0,79	1.875,00	2.418,38			
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	1,14	1.083,13	4.192,88			
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Persen	1,14	537,24	9.780,00			
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan Kualitas PSU di Lingkungan Perumahan	Persen	5,18	33.075,19	34.477,57			

				2.1.2.	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Penyediaan Infrastruktur (%)		70,1		
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	2	27.386,24	17.439,03
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Persen	12	10.587,87	6.511,05
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan	Persen	90	16.027,65	1.454,60
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	56	53.817,54	33.943,44
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	Persen	90	440,56	220,62
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Persen	70	1.800,00	1.600,00
				2.1.3.	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%)		100		
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen	85,1	4.663,59	1.901,96
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	81,84	4.090,35	5.546,27
				Misi 3 :						
					Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat					
				3.1.	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam	Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam (%)		65,54		

				3.1.1.	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)		49,61		
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan inprastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang tersedia	Persen	65,71	561,40	1.416,68
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen	73,32	582,19	1.207,26
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan pangan Utama	Persen	33,33	306,00	120,00
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	80	63,00	390,00
3	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton	81000	2.842,49	4.773,95
3	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5000	2.312,10	2.124,82
3	2	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Perkapita Tahun	Kg/Kapita/Th	40,1	275,00	248,03
3	2	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	42,5	4.115,05	1.344,89
3	2	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen			1.344,89
3	2	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	35,75	9.357,93	9.820,20

3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen			9.820,20
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	Persen	95,23	156,00	175,00
3	2 7	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	40	1.440,08	1.001,14
3	2 7	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen			1.001,14
3	2 7	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan evaluasi	Persen	80	250,00	265,05
3	2 7	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	56,42	1.775,00	1.777,02
3	2 7	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen			
				3.1.2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup		60,05		
						Indeks Kualitas Udara		93,98		
						Indeks Kualitas Air		53,78		
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan		52,22		
2	1 1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	2	499,12	500,87
2	1 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Indeks Kualitas Air	Indeks	92,29	787,30	230,83

						LINGKUNGAN HIDUP					
2	1	4				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	65	264,77	-
2	1	5				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persen	85	76,86	56,93
2	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	202,07	148,76
2	1	8				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0	-	60,85
2	1	9				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	63,41	97,06
2	1	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	35,85	
2	1	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persen	90	9.124,79	7.898,44

					4.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan		68,05	
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	95	45.729,75	145.651,00
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	Persen	95		
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	95		
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	95		
1	2	3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDM_K) Yang Kompeten	Persen	95	580,60	3.248,34
1	2	4				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard	Persen	100	251,09	516,10
1	2	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis	Persen	95	704,04	1.264,56
							Masyarakat (UKBM) Aktif				

1	2	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	95		
2	1 4	2				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk terhadap Program KKBPK	Persen	17,5	158,93	48,46
2	1 4	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	26,75	460,00	5.282,72
2	1 4	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	60	290,00	1.171,11
				4.1.3.	Meningkatnya daya beli masyarakat		Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)			11604,12	
2	1 7	2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan rekomendasi teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	Persen	23	98,50	83,43
2	1 7	3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	36,31	125,00	80,32
2	1 7	4				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Unit	50	138,75	63,26
2	1 7	5				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan koperasi yang memiliki Kompetensi berdaya saing	Persen	70,68	247,00	66,99
2	1 7	6				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Produksi yang diberdayakan	Unit	-		
2	1 7	7				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi	Persen	71	1.717,47	1.503,49

						MIKRO (UMKM)							
2	1 7	8				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Skala UMKM yang meningkat	Unit	1402	1.155,81	203,34		
			Misi 5 :										
			Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan										
			5.1.	Meningkatkan Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan daerah				Indeks partisipasi sosial		49			
			5.1.1.	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan				Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat (%)		28			
2	1 3	3				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	Persen					
2	1 3	4				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	Persen	100,00	14.702,98	16.727,02		
2	1 3	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	80,00	2.492,90	1.086,88		
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	47,74	-		
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	95,26	179		
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	53,15	-		
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	44,84	197		
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	65,00	255		

						PEMERINTAHAN DESA					
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	49,27	344
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100,74	174
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	71,39	170
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	82,62	289
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	49,65	-
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	81,77	261
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	47,20	-
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	94,70	172
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	42,30	255
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	79,25	-
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	68,52	365
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	27,13	

7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	30,80		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	188,75		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	95,94		
			5.2.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan			Status Indeks Desa Membangun	Status	Maju		
			5.2.1	Meningkatnya keikutsertakan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat			Tingkat Keberdayaan Masyarakat	Persen	80		
2	1	3	2		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	25,38	4.816,08	74,60	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	2.126,51		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	639,20		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	824,50		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	207,90		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	200,00		

7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	798,50	
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	196,30	
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	734,70	
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	Persen	100	668,40	
				5.2.2	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	Indeks	85		
2	8	2				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	Persen	1,81	785,00	396,05
2	8	4				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kuallitas keluarga	Persen	40,00	240,00	78,67
					Misi 6 :						
					Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial						
				6.1.	Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentraman sosial		Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)		61,62		
				6.1.1.	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat		Indeks Rasa Aman		100		

1	5	2				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	Persen	100	2.464,27	2.790,83
1	5	3				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100,00	4.407,45	3.293,02
1	5	3				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	Persen	100,00	4.407,45	3.293,02
1	5	4				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warganegara yg memperoleh pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100,00	147,74	569,53
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	

						KETERTIBAN UMUM	ketertiban umum				
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	

7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	-	
8	1	2				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	900,00	438,36
8	1	3				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	100	1.605,37	1.264,36
8	1	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	100	645,00	226,61
8	1	5				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Persen	100	275,00	132,41
8	1	6				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Persen	100	312,00	370,17
				6.1.2.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)		100		
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak	Persen	67	332,00	167,38

					PEREMPUAN	Kekerasan						
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	50	91,75			
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen	75	400,00	156,70		
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan dn Perlindungan Anak	Persen	60	340,00	694,13		
					Misi 7 :							
					Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran							
				7.1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB per kapita (Rp)		92,35				
				7.1.1.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (%)		5				
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen	100	3.649,71	2.206,45		
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial	Persen	100	116,43	192,42		
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	100	1.640,93	1.315,59		
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	100	266,63	2.550,07		
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	288,47	545,44		
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	Persen	100	75,49	45,59		
				7.1.2.	Menurunnya tingkat	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,05				

					pengangguran		(TPT) (%)					
2	7	3				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	36,96	165,00	223,77	
2	7	4				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja Yang ditempatkan	Persen	7	600,00	554,92	
2	7	5				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	39	150,00	-	
3	3	3				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi	Persen	100	133,40	-	
3	3	4				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	Persen	100	66,60	63,84	
					Misi 8 :							
					Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah							
					8.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		Laju pertumbuhan ekonomi (%)		4,66		
					8.1.1.	Meningkatnya produksi sektor potensial		PDRB (Milyar Rupiah)		28,71		
2	2	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang	Jenis	4	1.198,82	1.192,75	
2	2	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang	Persen	30	75,00	75,00	
2	2	5				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Cagar Budaya	4	61,18		
3	2	2				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkat	Persen	40	1.192,69	800,64	

						PARIWISATA					
3	2	3				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	45	1.046,00	610,00
3	2	5				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang	Persen	35	200,00	70,00
				8.1.2.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)		68521		
2	1	2				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	Persen	0	-	
2	1	3				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	93	640,00	111,60
				8.1.3.	Meningkatnya nilai ekspor daerah		Nilai ekspor (Milyar Rupiah)		415,35		
3	3	2				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan	Persen	100	173,75	30,00
3	3	3				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen	100	1.292,54	3.177,72
3	3	4				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kecamatan yang Dipantau	Persen	100	336,59	188,91
3	3	5				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	US Dolar	507	859,73	790,83
3	3	6				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	75	505,43	310,73
3	3	7				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	90	262,05	246,15

					DALAM NEGERI					
3	3 1	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	Persen	78	4.661,63	2.085,75
3	3 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	Persen			
3	3 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	54,41	40,00

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2022 akan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, meliputi :

Tabel 4.6.

Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2022

Prioritas Kabupaten	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.	- Pengembangan Pertanian	- Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.	- Pengembangan Industri	- Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.	- Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.	- Pengembangan Pariwisata	- Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
- Pemantapan pemerataan pembangunan.	- Pembangunan Infrastruktur	- Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
- Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi		
- Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan.	- Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang prima	- Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.		- Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban.		

Tabel 4.7.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2022 dengan PN RKP 2022

Prioritas Nasional	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Perangkat Daerah
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	100 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	106,2 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMP	104,1 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	100 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SMP	100 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Sesuai Standar	99 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum Sesuai Standar	70 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumberdaya Kesehatan (Sdm_K) Yang Kompeten	98 Persen	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan Dan Alat Kesehatan Sesuai Standard	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	97 Persen	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya	100 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan

	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	100 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Pengelolaan Sda Dalam Kondisi Baik	1 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Pedesaan	14,29 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Yang Memiliki Izin Pbg Per Satuan Bangunan	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	57 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sdm Jasa Konstruksi Yang Terlatih	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	80 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Pengembangan Perumahan	0,79 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	1,02 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	1,02 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas Psu Di Lingkungan Perumahan	5,18 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Dan Perkada / Kebijakan KDH	100 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warganegara Yg Memperoleh Pelayanan Kebakaran Dan Non Kebakaran	100 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/ Penanganan Kebencanaan	0,011 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Menerima Bantuan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkelola	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan	36.96 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	6,87 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	39 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan	1,81 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	69 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Pembinaan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Upaya Peningkatan Kuallitas Keluarga	60 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Bahan Informasi Terkait Gender Dan Anak Serta Perlindungan Dan Pemenuhan Anak	70 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	85 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan

				Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Dn Perlindungan Anak	70 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK	20,5 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	36,92 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	75 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Infrastruktur Dan Seluruh Kemandirian Pangan Yang Tersedia	75,71 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga	83,29 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan

				Peternakan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	66,67 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	85 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	92,5 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	35 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pemenuhan Rth Yang Memenuhi Standar	35 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Dari Izin Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Penghargaan Lingkungan	Cakupan Penerima Penghargaan	100 Persen	Dinas Lingkungan

	Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup		Hidup Dan Kebersihan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani	90 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	93 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	92,5 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah Yang Menggunakan Data Kependudukan	90 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik	50,76 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan Secara Akuntabel	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat	100 Persen	Dinas Pemberdayaan

	Masyarakat Hukum Adat	Dan Masyarakat Dalam Membangun Desa		Masyarakat Dan Desa
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Llaj Yang Sesuai Standar	70 Persen	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	70 Persen	Dinas Perhubungan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah Yang Jaringan Aplikasinya Diawasi Oleh Diskominfoops Kab.Inhil	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis TIK	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah Yang Tepat Waktu	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase PD Yang Menggunakan Sistem Persandian	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diterbitkan	33 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	53,65 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	65 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan

				Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Cakupan Koperasi Yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing	78,53 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Produksi Yang Diberdayakan	5 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Usaha Mikro Yang Didata Dan Difasilitasi	72 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Skala UMKM Yang Meningkatkan	1407 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	60 Persen	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berminat Melakukan Investasi	93 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Penanaman Modal	3.80 Angka	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Oleh Pelaku Usaha	80 Persen	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.00 Nilai	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Meningkat	50 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	50 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkembang	40 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Berdaya Saing	55 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Atlit Berprestasi Yang Meningkat	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya Yang Berkembang	4 Jenis	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Yang Berkembang	40 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	4 Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

				Olahraga, Dan Kebudayaan
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	45 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	43 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	83000 Ton	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	5500 Ton	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	40,2 Kg/Kapita/Th	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan	45,75 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	45,22 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	42,5 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Yang Di Terbitkan Dan Evaluasi	90 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	65 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	90,95 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	75,56 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan Produk Pangan Asal Hewan Yang Asuh(Aman,Sehat,Utuh Dan Halal)	100 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan

				Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	70 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	73,04 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Direkomendasikan	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Representatif	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Harga Barang Pokok Dan Barang Penting Lainnya Di Kecamatan Yang Dipantau	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	522,3 Us Dolar	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Standar Tera/Tera Ulang	93,65 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	95 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Industri Kecil Dan Menengah Yang Dibina	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Bina Transmigrasi	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Bina Transmigrasi Dan Penempatan Transmigrasi Lokal	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Di Fasilitasi	100 Persen	Sekretariat DPRD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD Dan RENJA)	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	90 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD Yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	10,02 Persen	Badan Pendapatan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan ASN Yg terselesaikan	100 Persen	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya

				Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Asn Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	52 Persen	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Temuan Apip Yang Ditindak Lanjuti Pada Tahun Berkenaan	100 Persen	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	80 Nilai	Inspektorat Daerah
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan Sosial Dan Budaya	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	90 Persen	Kecamatan Tembilahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Tembilahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi	0 Persen	Kecamatan

	Ketertiban Umum	Ketentaraman Dan Ketertiban Umum		Tembilahan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Tembilahan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Tempuling
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Tempuling
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Tempuling
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Tempuling
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Batang Tuaka
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Batang Tuaka
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Batang Tuaka
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Batang Tuaka
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	0 Persen	Kecamatan Concong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Concong
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Concong

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Concong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Enok
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Enok
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Enok
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Enok
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Gaung
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Gaung
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Gaung
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Gaung
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	0 Persen	Kecamatan Kateman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Kateman
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Kateman
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Kateman

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	0 Persen	Kecamatan Kempas
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Kempas
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Kempas
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Kempas
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Kemuning
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Kemuning
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Kemuning
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Kemuning
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Keritang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Keritang
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Keritang
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Keritang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Kuala Indragiri
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Kuala Indragiri
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Kuala Indragiri
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Kuala Indragiri
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Mandah

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Mandah
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Mandah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Mandah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Pelangiran
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Pelangiran
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Pelangiran
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Pelangiran
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Pulau Burung
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Pulau Burung
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Pulau Burung
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Pulau Burung
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Reteh
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Reteh
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Reteh
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Reteh
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Sungai Batang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Sungai Batang

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Sungai Batang
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Sungai Batang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Tanah Merah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Tanah Merah
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Tanah Merah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Tanah Merah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Teluk Belengkong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Teluk Belengkong
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentaraman Dan Ketertiban Umum	0 Persen	Kecamatan Teluk Belengkong
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Teluk Belengkong

Tabel 4.8.

**Konsistensi Prioritas Dan Sasaran Pembangunan pada RKPD tahun 2022 dengan
Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi 2022**

Prioritas Propinsi	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Perangkat Daerah
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	100 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	106,2 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMP	104,1 Persen	Dinas Pendidikan

	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	100 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SMP	100 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	99 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	70 Persen	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDM_K) Yang Kompeten	98 Persen	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan sesuai Standard	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	97 Persen	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	100 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik	1 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	14,29 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	57 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM jasa Konstruksi yang	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata

		terlatih		Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	80 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	0,79 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	1,02 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	1,02 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase peningkatan Kualitas PSU di Lingkungan Perumahan	5,18 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	100 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warganegara yg memperoleh pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran	100 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/ Penanganan Kebencanaan	0,011 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 Persen	Dinas Sosial
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	36.96 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja Yang ditempatkan	6,87 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	39 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	1,81 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	69 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kualitas keluarga	60 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	70 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	85 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan dan Perlindungan Anak	70 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk terhadap Program KKBPK	20,5 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	36,92 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	75 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan

				Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pengembangan Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan inprastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang tersedia	75,71 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	83,29 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan pangan Utama	66,67 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	85 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pembangunan Infrastruktur	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	92,5 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	35 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	35 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
0	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	90 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	93 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Yang Prima				
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	92,5 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	90 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	50,76 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	90,17 Persen	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	92,47 Persen	Dinas Perhubungan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Diskominfoopers Kab.Inhil	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase dokumen data statistik sektoral daerah yang tepat waktu	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan rekomendasi teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	33 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	53,65 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	65 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Cakupan koperasi yang memiliki Kompetensi berdaya saing	78,53 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Produksi yang diberdayakan	5 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi	72 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Skala UMKM yang meningkat	1407 Unit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat Pengembangan Penanaman Modal	60 Persen	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	93 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Penanaman Modal	3.80 Angka	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	80 Persen	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.00 Nilai	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengembangan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan	50 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	50 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang	40 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	55 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Atlet Berprestasi yang Meningkatkan	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan Kepramukaan	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya yang Berkembang	4 Jenis	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional yang Berkembang	40 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan

	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	4 Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	45 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	43 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Pengembangan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	83000 ton	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	5500 Ton	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Tahunan	40,2 Kg/Kapita/Th	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	45,75 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	45,22 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	42,5 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan evaluasi	90 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	65 Persen	Dinas Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	90,95 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	75,56 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	100 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	70 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	73,04 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengembangan Industri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representative	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kecamatan yang Dipantau	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	522,3 US Dolar	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	93,65 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	95 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitas	100 Persen	Sekretariat Dprd
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD dan RENJA)	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	90 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	10,02 Persen	Badan Pendapatan Daerah
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan	100 Persen	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	52 Persen	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti pada tahun berkenaan	100 Persen	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	80 Nilai	Inspektorat Daerah
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	90 Persen	Kecamatan Tembilahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Tembilahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Tembilahan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Tembilahan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Tembilahan Hulu

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Tempuling
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Tempuling
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Tempuling
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Tempuling
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Batang Tuaka
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Batang Tuaka
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Batang Tuaka
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Batang Tuaka
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	0 Persen	Kecamatan Concong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Concong
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Concong
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Concong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Enok
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Enok
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Enok
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Enok

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Gaung
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Gaung
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Gaung
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Gaung
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	0 Persen	Kecamatan Kateman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Kateman
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Kateman
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Kateman
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	0 Persen	Kecamatan Kempas
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Kempas
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Kempas
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Kempas
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Kemuning
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Kemuning
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Kemuning

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Kemuning
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Keritang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Keritang
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Keritang
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Keritang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Kuala Indragiri
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Kuala Indragiri
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Kuala Indragiri
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Kuala Indragiri
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Mandah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Mandah
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Mandah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Mandah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Pelangiran
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Pelangiran
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Pelangiran
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Pelangiran
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Pulau Burung
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Pulau Burung

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Pulau Burung
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Pulau Burung
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Reteh
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Reteh
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Reteh
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Reteh
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Sungai Batang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Sungai Batang
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Sungai Batang
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Sungai Batang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Tanah Merah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Tanah Merah
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Tanah Merah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Tanah Merah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 Persen	Kecamatan Teluk Belengkong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 Persen	Kecamatan Teluk Belengkong
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum	0 Persen	Kecamatan Teluk Belengkong
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Kecamatan Teluk Belengkong

Tabel 4.9

Keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas pada RKPD Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir

Prioritas Propinsi	Prioritas Kabupaten	Program	Perangkat Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada Tembilahan, RSUD Tengku Sulung, RSUD Raja Musa
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Program Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan

	lingkungan		
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

	lingkungan		
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Daya Saing Daerah	Pemantapan pemerataan pem-bangunan.	Program Pengelolaan Pelayanan	Dinas Perhubungan
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan

Daerah	daya saing daerah	Koperasi	Menengah
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan

Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan

Daya Saing Daerah	Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan

Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Indragiri Hilir berasal dari hasil rumusan dari berbagai forum pembahasan terhadap usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD yang disinergikan dengan rencana kerja perangkat daerah.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 disajikan dalam dua tabel yaitu Tabel 5.1 yang menyajikan rekapitulasi pagu menurut perangkat daerah dan Tabel 5.2 yang menyajikan program, kegiatan dan pagu dari setiap Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Pagu Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD MURNI (Rp)	PAGU APBD MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN RKPD (Rp.)
1	2	3	4
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	975.870.730.698	1.084.173.935.632	1.256.608.480.969
Dinas Pendidikan	467.197.987.250	585.157.878.650	601.187.756.901
Dinas Kesehatan	171.763.073.065	180.007.282.016	241.340.539.782
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	90.781.795.142	101.706.501.543	152.916.086.489
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	8.407.707.764	9.161.950.584	9.289.045.327
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	18.461.791.153	15.476.088.871	19.881.284.420
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	122.728.165.929	85.017.009.807	130.665.754.188
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	44.030.151.878	59.296.683.712	49.127.771.273
Satuan Polisi Pamong Praja	19.479.312.812	16.692.233.416	21.336.881.066
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.852.934.520	10.357.144.920	11.239.156.446
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.798.091.840	7.072.802.416	8.142.340.839
Dinas Sosial	13.369.719.345	14.228.359.697	11.481.864.238
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	152.777.574.003	149.120.002.446	153.818.898.168
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	6.689.591.838	7.173.416.984	6.602.409.706
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.671.591.838	7.554.776.838	15.964.917.172
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	17.629.432.118	17.120.453.420	14.999.203.569
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.592.108.390	12.123.973.692	10.168.639.179
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	27.816.073.987	25.947.033.400	22.166.023.977

Dinas Perhubungan	18.416.165.459	19.457.786.206	13.508.366.687
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	15.238.131.162	15.838.354.462	16.297.900.164
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	10.443.340.363	8.229.523.665	9.948.676.980
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.521.221.264	6.230.607.817	11.594.030.054
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	19.451.852.658	25.069.955.734	24.354.504.454
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	4.308.064.926	4.374.120.228	5.156.254.926
Urusan Pemerintahan Pilihan	76.511.576.169	78.446.913.699	72.233.424.106
Dinas Perikanan	11.882.184.727	15.794.037.542	13.338.210.173
Dinas Perkebunan	27.628.691.683	24.679.827.495	24.101.522.182
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	21.825.480.328	23.266.680.328	26.248.132.075
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	15.175.219.431	14.706.368.334	11.603.530.976
Unsur Pendukung	189.931.245.164	192.467.955.220	194.432.031.709
Sekretariat Daerah	88.824.025.124	94.493.024.387	83.332.380.220
Sekretariat Dprd	101.107.220.040	97.974.930.833	111.099.651.489
Unsur Penunjang	401.963.215.210	382.104.747.814	350.952.511.084
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.340.825.165	11.181.428.981	11.064.505.491
Badan Pendapatan Daerah	18.709.484.172	19.869.182.406	15.735.179.173
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	356.535.005.632	337.089.329.582	313.535.859.774
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	14.377.900.241	13.964.806.845	10.616.966.646
Unsur Pengawas	10.809.636.007	11.568.693.609	11.549.900.122
Inspektorat Daerah	10.809.636.007	11.568.693.609	11.549.900.122
Unsur Kewilayahan	76.893.093.953	96.830.335.296	75.915.625.455
Kecamatan Tembilahan	10.723.776.820	13.810.904.820	10.400.019.897
Kecamatan Tembilahan Hulu	4.609.779.530	5.470.156.154	4.753.854.166
Kecamatan Tempuling	5.630.676.644	7.622.084.644	5.115.007.209

Kecamatan Batang Tuaka	3.245.673.857	3.830.426.499	3.458.953.678
Kecamatan Concong	2.458.849.791	3.062.349.791	2.424.159.991
Kecamatan Enok	4.427.521.417	6.820.257.617	4.174.755.475
Kecamatan Gaung	2.909.863.537	3.850.422.587	3.047.371.737
Kecamatan Gaung Anak Serka	4.191.558.633	5.704.568.633	4.350.136.133
Kecamatan Kateman	3.715.686.089	5.115.658.189	3.664.973.641
Kecamatan Kempas	4.022.653.778	4.812.500.478	3.781.063.507
Kecamatan Kemuning	2.973.556.975	3.850.640.462	2.947.304.128
Kecamatan Keritang	3.521.173.844	3.879.216.634	3.438.102.035
Kecamatan Kuala Indragiri	2.717.276.169	3.463.779.169	2.594.177.970
Kecamatan Mandah	3.114.825.828	3.617.367.828	2.881.594.026
Kecamatan Pelangiran	3.170.885.008	3.811.251.508	3.306.763.159
Kecamatan Pulau Burung	2.695.357.046	3.041.672.559	2.768.408.455
Kecamatan Reteh	4.503.283.064	5.893.903.763	4.475.915.864
Kecamatan Sungai Batang	2.742.912.300	3.318.081.800	2.702.047.713
Kecamatan Tanah Merah	3.132.218.677	3.463.899.297	3.042.965.947
Kecamatan Teluk Belengkong	2.385.564.946	2.391.192.864	2.588.050.724
Unsur Pemerintahan Umum	15.630.462.113	11.350.913.313	16.607.692.739
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15.630.462.113	11.350.913.313	16.607.692.739
TOTAL	1.900.387.533.317	2.006.063.497.029	2.132.118.564.352

Selanjutnya untuk rencana program, kegiatan dan pagu per kegiatan dari setiap perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.2 berikut.

TABEL 5.2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pemendanaan										Kelompok Saranan	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APRO 2022			Nasional	Daerah									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Petapasan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	32 Nilai	467.197.987.250	583.509.302.775	601.167.756.901					22 Nilai	727.691.750.000						
1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	persen	persen	90 persen	90 persen	333.313.000	368.237.200	319.037.200				90 persen	450.000.000						
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			5 Dokumen	5 Dokumen	333.313.000	368.237.200	319.037.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	5 Dokumen	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di berikan Gaji dan Tunjangan	Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	337.580.587.250	460.204.391.250	443.623.196.376				1 Tahun	550.000.000.000					
1	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji-ANS			1 Tahun	1 Tahun	337.580.587.250	460.204.391.250	443.623.196.376	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	1 Tahun	550.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	24.000.000	24.129.600	24.129.600				1 Tahun	35.000.000					
1	1	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor Dibayarkan			1 Tahun	1 Tahun	24.000.000	24.129.600	24.129.600	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	1 Tahun	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang didata dan dilatih	Orang	Orang	100 Orang	100 Orang	212.266.825	335.636.825	425.343.325				100 Orang	300.000.000					
1	1	1	1	2.05	3	Pelatihan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang didata dan dilatih			100 orang	100 orang	212.266.825	335.636.825	425.343.325	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	100 orang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.387.354.775	2.269.148.775	1.881.508.175				100 Persen	2.948.000.000					
1	1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penangan yang disediakan			10 jenis	10 jenis	14.220.000	14.220.000	14.220.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	10 jenis	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			3 jenis	3 jenis	444.732.125	390.311.125	390.311.125	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	3 jenis	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			4 jenis	4 jenis	128.418.850	116.322.850	116.322.850	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	4 jenis	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			11 jenis	11 jenis	45.250.000	45.250.000	45.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	11 jenis	55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			134 kali	148 kali	337.349.000	365.968.000	448.096.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	148 kali	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.06	10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Jumlah Sekolah yang akan dilakukan inventarisasi			35 sekolah	35 sekolah	500.000.000	387.744.400	299.638.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	35 sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan elektronisasi data yang dikelola			100 persen	100 persen	547.584.800	581.332.400	567.676.300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	100 persen	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen	persen	100 persen	100 persen	774.000.000	808.645.600	808.645.600								
1	1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			3 rekening	3 rekening	187.200.000	208.800.000	208.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	3 rekening	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			46 orang	46 orang	586.800.000	599.845.600	599.845.600	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	46 orang	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	unit	unit	3 unit	3 unit	3.112.800.000	1.112.114.800	1.114.154.800								
1	1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertoran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen				Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	3 unit	85.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			4 jenis	4 jenis	36.400.000	36.400.000	36.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	4 jenis	45.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	3.000.000.000	1.000.000.000	1.002.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	1 Unit	3.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2																				
1	1	2	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS SD	Persen	Persen	115,6 Persen	115,6 Persen	122.095.520.840	117.727.412.120	152.532.078.220				115,6 Persen	168.291.750.000					
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	Persen	115,6 Persen	115,6 Persen	80.832.430.880	82.185.166.360	99.368.321.460				115,6 Persen	106.972.500.000					
1	1	2	2.01	2	Pembinaan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas SD/MI yang dibangun			24 Ruang	24 Ruang	5.195.000.000	3.563.700.150	3.563.700.150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	24 Ruang	10.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	PEMBANGUNAN RUANG GURU BISERITA PERABOTNYA			1 Sekolah				233.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Cusung, Cusung Dalam	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	1 Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	PEMBANGUNAN RUANG UKS BISERITA PERABOTNYA			4 Sekolah				432.970.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SIM yang berorientasi dan berdaya saing	0	4 Sekolah	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
														Kab. Indragiri Hilir, Kotiang, Kota Baru Reteh								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2022		RPKPD 2022		APBD 2022						RPKPD 2022 Perubahan	RPKPD 2022 Perubahan		RPKPD 2022 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RPKPD 2022	APBD 2022	RPKPD 2022 Perubahan	RPKPD 2022 Perubahan										
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Paud yang mengelola dana BOP			268 Satuan Pendidik	-	-	5.665.203.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP/PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang berimam dan berdaya saing	0	268 Satuan Pendidik	5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	pesen		pesen	100 pesen	100 pesen	340.510.000						100 pesen	3.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	2.04	15	Pengembangan kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga Pendidik Non Formal yang mengikuti pelatihan			70 Peserta	70 Peserta	135.000.000	99.327.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang berimam dan berdaya saing	Pendidikan Non	70 Peserta	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Visitasi dan Monitoring Lembaga Nonformal			102 Kali	102 Kali	185.510.000	109.715.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang berimam dan berdaya saing	Pendidikan Non	102 Kali	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP			18 satuan pendidik	-	-	1.603.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang berimam dan berdaya saing	Pendidikan Non	18 satuan pendidik	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Pesen		Pesen	50 Pesen	50 Pesen	680.494.560						50 Pesen	1.050.000.000		
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah SD yang Menetapkan Pendidikan Muatan Lokal	Sekolah		Sekolah	550 Sekolah	550 Sekolah	271.352.560	172.987.205						550 Sekolah	500.000.000	
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar			120 Orang	120 Orang	271.352.560	172.987.205	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang berimam dan berdaya saing	0	120 Orang	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Menetapkan Pendidikan Muatan Lokal	Sekolah		Sekolah	450 Sekolah	450 Sekolah	409.542.000	286.679.400						450 Sekolah	550.000.000	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum Paud			120 Orang	120 Orang	409.542.000	286.679.400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang berimam dan berdaya saing	Pendidikan An	120 Orang	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	22 Nilai	135.269.929.608	145.712.263.321						22 Nilai	160.500.000.000	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Pesen		Pesen	90 Pesen	90 Pesen	460.031.027	268.679.400						90 Pesen	500.000.000	
						Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	Pesen		Pesen	90 Pesen	90 Pesen								90 Pesen		
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			9 Dokumen	9 Dokumen	221.855.800	160.515.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	9 Dokumen	250.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			3 Laporan	3 Laporan	238.175.227	108.139.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 Laporan	250.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Pesen		Pesen	100 Pesen	100 Pesen	75.495.587.771	75.495.587.771						100 Pesen	75.560.000.000	
						Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Pesen		Pesen	100 Pesen	100 Pesen								100 Pesen		
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah Caji ASN			1 Tahun	1 Tahun	75.437.008.871	75.437.008.871							1 Tahun	75.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun			1 Dukumen	1 Dukumen	38.578.900	38.578.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dukumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Pesen		Pesen	100 Pesen	100 Pesen	123.370.000	92.816.700						100 Pesen	150.000.000	
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata			8 Unit	8 Unit	123.370.000	92.816.700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	8 Unit	150.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Pesen		Pesen	90 Pesen	94 Pesen	279.999.200	876.477.800						90 Pesen	330.000.000	
1	2	1	2.05	3	Pelatihan dan Pengabdian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelatihan dan Pengabdian Administrasi Kepegawaian			1 Data	3 Data	100.000.000	43.591.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Data	130.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan			1 Diklat	3 Diklat	179.999.200	832.886.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Diklat	200.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Pesen		Pesen	100 Pesen	100 Pesen	594.319.400	269.226.600						100 Pesen	740.000.000	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			15 Set	22 Set	243.945.400	95.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	22 Set	270.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			10 jenis	12 jenis	140.175.000	83.004.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 jenis	170.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Jenis	4 Jenis	14.750.000	14.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Jenis	50.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			36 Eksemplar	36 Eksemplar	12.000.000	12.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	36 Eksemplar	50.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi K Daerah yang dilaksanakan			40 Kali	52 Kali	185.449.000	64.472.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	52 Kali	200.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Pesen		Pesen	90 Pesen	92 Pesen	148.350.000	142.800.000						92 Pesen	170.000.000	
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan			4 Unit	6 Unit	148.350.000	142.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Unit	170.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Pesen		Pesen	90 Pesen	92 Pesen	10.728.589.400	11.027.324.400						92 Pesen	10.840.000.000	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sisa Menyurat	Jumlah Sisa menyurat yang melayani			1500 Lembar	1500 Lembar	15.000.000	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1500 Lembar	20.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			7 Rekening	7 Rekening	525.600.000	595.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Rekening	550.000.000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional			Daerah							
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan			37 Jenis	37 Jenis	54.984.000	44.984.000	44.984.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	37 Jenis	70.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya			30 Ruang	32 Ruang	10.133.005.400	10.371.740.400	10.631.240.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	32 Ruang	10.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Bazar Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persen	90 Persen	92 Persen	174.200.000	190.200.000	354.200.000						92 Persen	270.000.000	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinannya			15 Unit	15 Unit	92.200.000	82.200.000	82.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pdbhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	15 Unit	130.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service			223 Unit	225 Unit	60.000.000	489.000.000	230.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pdbhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	225 Unit	90.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara			9 Ruang	9 Ruang	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pdbhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	9 Ruang	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen	45.729.548.360	54.648.577.100	108.054.122.398						95 Persen	70.230.000.000	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Fasilitas sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	95 Persen	9.110.724.410	7.096.161.600	30.705.843.349						95 Persen	19.490.000.000	
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun			1 Unit	2 Unit	241.000.000	107.601.500	2.351.149.699	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryoga saing	0	2 Unit	270.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes			1 Kali	2 Kali	1.326.140.000	210.854.000	371.390.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	2 Kali	1.350.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas BLUD dan Penantapannya			30 Puskesmas	30 Puskesmas	128.800.700	40.617.700	290.417.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	30 Puskesmas	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	2.875.000.000	197.400.000	192.939.950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	2 Unit	2.900.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarpras Pustu yang di sediakan			1 Unit	4 Unit	225.000.000	865.000.000	4.265.320.054	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryoga saing	0	4 Unit	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya			10 Unit	22 Unit	1.342.638.110	83.905.850	11.642.041.798	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	22 Unit	11.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat Yang Disediakan			1 Paket				5.447.473.019			Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	0	1 Paket		DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Puskesmas dan jaringannya			1 Jenis	2 Jenis	2.218.569.300	4.828.615.000	5.339.544.001	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	2 Jenis	2.240.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas yang Hasil dilakukan pemeliharaan			1 Puskesmas	1 Puskesmas	177.825.500	282.326.600	283.006.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Puskesmas	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Sarana Prasarana Pustu yang Dilakukan			1 Kali	1 Kali	474.817.800	398.840.900	306.004.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Kali	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Obat, BMHP dan Vaksin ke Puskesmas se Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemantauan sistem Elektronik logistik obat dan BMHP di UPDID PK Kab. Inhil			30 Puskesmas	30 Puskesmas	101.000.000	81.000.000	416.536.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	30 Puskesmas	130.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Fasilitas sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	95 Persen	34.449.230.100	45.130.798.850	74.971.956.449						95 Persen	46.430.000.000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Program KIA			30 Puskesmas	30 Puskesmas	150.000.000	64.961.800	1.030.802.149	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	180.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			12335 Orang				2.048.991.950	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	0	12335 Orang		DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Balita yang diberikan Imunisasi			10 Balita	16 Balita	120.000.150	44.139.150	144.139.150	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	16 Balita	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Kegiatan Penanggungjawab Kasus Gizi dan Balita Stunting			1 Kali	3 kali	100.000.000	21.765.000	1.542.091.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Kali	130.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pemda										Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2023	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BIAS di kabupaten Indragiri Hilir			30 Puskesmas	30 Puskesmas	59.999.900	34.425.200	633.525.700	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	80.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			36899 Orang		-	-	66.204.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			0	36899 Orang	-	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas yang telah di evaluasi program lansia			30 Puskesmas	30 Puskesmas	50.000.100	40.544.100	508.029.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	80.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hipertensi Yang Terlayani			12367 Orang		-	-	242.044.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			0	12367 Orang	500.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus Yang Terlayani Sesuai Standar			13452 orang		-	-	214.814.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			0	13452 orang	500.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilayani sesuai standar			80 Persen		-	-	730.265.200		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			0	80 Persen	2.000.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan			130 Orang	180 Orang	514.826.400	365.695.400	660.045.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	180 Orang	550.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan pelayanan kesehatan			13916 Orang	14016 Orang	701.963.950	547.277.950	849.180.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14016 Orang	730.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Komorbid Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kejadian Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar yang dilayani sesuai standar			90 Persen		-	-	1.043.321.270	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			0	90 Persen	-	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian keluarga sadar gizi			30 Puskesmas	30 Puskesmas	150.000.100	50.193.100	3.138.036.581	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	180.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Kelompok Masyarakat yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga			90 Persen		-	-	372.135.900	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			0	90 Persen	-	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan limbah dan sampah layakank			30 Puskesmas	30 Puskesmas	203.798.800	55.276.800	779.302.600	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	230.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengembangan media promosi			30 Puskesmas	30 Puskesmas	845.955.400	653.081.400	3.235.511.900	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	870.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi pelayanan kesehatan tradisional			30 Puskesmas	30 Puskesmas	150.000.000	78.000.000	84.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	180.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang dilaksanakan			47 Kali	52 Kali	99.999.000	37.939.000	1.400.350.548	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	52 Kali	130.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan			30 Puskesmas	30 Puskesmas	300.000.000	102.205.000	102.205.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	330.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan NAPZA			30 Puskesmas	30 Puskesmas	250.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Puskesmas	280.000.000	DDNAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan			100 Orang	168 Orang	148.439.700	74.218.900	224.218.800	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	168 Orang	170.000.000	DDNAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendaman						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional			
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kegiatan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	10 Kali	30 Kali	349.998.900	64.126.000	1.028.718.750	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	30 Kali	370.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Peserta terlayani bagi peserta	100 Persen	100 Persen	27.707.640.000	37.031.675.500	37.226.010.250	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	100 Persen	27.730.000.000	DINAS KESEHATAN
						Persentase Tertanggunya Biaya Pelayanan Kesehatan dan Rujukan	90 Persen	90 Persen							90 Persen		
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah peserta yang mengikuti pembedayaan untuk Peningkatan peran serta masyarakat demi terwujudnya kesehatan	20 Orang	20 Orang	343.520.300	213.254.300	213.254.300	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	20 Orang	370.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Laboratorium yang dikelola dan dipelihara	1 Laboratorium	1 Laboratorium	324.941.500	456.788.400	406.788.400	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laboratorium	350.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Keliling yang disediakan	1 Unit	4 Unit	884.860.000	10.000.000	2.923.351.300	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4 Unit	910.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian	30 Sarana	30 Sarana	423.265.700	264.560.300	264.560.300	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	30 Sarana	450.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dinilai berprestasi	15 Puskesmas	16 Puskesmas	430.000.200	143.850.500	339.706.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	16 Puskesmas	480.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Fogging Fokus DBD	11 Kali	21 Kali	120.000.000	4.676.803.000	10.431.111.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	21 Kali	10.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	1 Unit	-	-	230.000.000			0	1 Unit	-	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	90 Persen	-	-	2.314.131.000			0	90 Persen	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan	Persen	Persen	1.401.104.950	1.713.715.300	2.175.256.600			0	100 Persen	1.550.000.000	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen profil kesehatan yang dirangkum dari data-data diknes & Ran	1 Dukumen	1 Dukumen	216.268.300	175.103.500	149.983.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dukumen	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase terbentuknya sistem pengelolaan dan penyimpanan data terpadu	90 Persen	92 Persen	376.130.100	446.486.300	1.133.147.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	92 Persen	680.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Akses Jaringan di wilayah kerja puskesmas yang ditingkatkan internet	30 Puskesmas	30 Puskesmas	668.686.500	892.125.500	892.125.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	30 Puskesmas	700.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Ijin Fasilitas Kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	708.688.900	707.901.300	201.066.000		100 Persen	760.000.000	
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sarana	83 Sarana	83 Sarana	201.853.600	201.066.000	201.066.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	83 Sarana	230.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	Persen	Persen	60 Persen	60 Persen	580.596.950	306.982.150	4.588.278.750		60 Persen	660.000.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Persen	Persen	90 Persen	98 Persen	349.987.150	143.302.800	4.375.100.850		98 Persen	480.000.000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Ketersediaan tenaga kesehatan	100 Orang	280 Orang	149.987.300	100.000.000	4.331.798.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	280 Orang	170.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Manajemen Puskesmas/loka Karya Mini Tribunal	30 Puskesmas	30 Puskesmas	199.999.850	43.302.850	43.302.850	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	30 Puskesmas	230.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Persen	Persen	90 Persen	91 Persen	230.609.800	163.679.300	213.177.900		91 Persen	260.000.000	
						Persentase SUM Kesehatan yang berkompetensi	Persen	Persen	90 Persen	91 Persen					91 Persen		
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan, jenis, dan kualitas tenaga kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan (sesuai standar)	10 Desa	11 Desa	230.609.800	163.679.300	213.177.900	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	11 Desa	260.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek dan Keamanan Pangan yang Beredar Sesuai Standar	100 Persen	0 Persen	100 Persen	251.092.900	97.379.250	449.205.200		100 Persen	270.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Tahun 2022			Tahun 2023				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional								Daerah	
1	2	4	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRI sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRI sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persen	Persen	90 Persen	-	-	178.208.000					90 Persen	-			
1	2	4	2.03.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRI sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRI sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1 Dokumen	-	-	178.208.000		Dana Transfer Khusus - Dana Akkasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang betiman dan bendaya saing	Produksi Pangan	1 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN		
1	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	153.135.800	60.877.600	60.877.600				100 Persen	170.000.000			
1	2	4	2.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan terhadap sarana TLU/TPM dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			30 Puskesmas	30 Puskesmas	153.135.800	60.877.600	60.877.600	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	30 Puskesmas	170.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	4	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	97.957.100	36.501.600	105.211.600				100 Persen	100.000.000			
1	2	4	2.05.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya			2 Kali	6 Kali	97.957.100	36.501.600	105.211.600	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	6 Kali	100.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persen	Persen	90 Persen	-	-	104.908.000					90 Persen	-			
1	2	4	2.06.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan Alat Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			10 Unit	-	-	104.908.000		Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Akkasi Khusus Non Fisik	Revisi Mental dan Pengembangan Kebudayaan	Produk Makanan	10 Unit	-	DINAS KESEHATAN	
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemertase Rumah Tangga PHBS	Persen	Persen	85 Persen	85 Persen	704.044.600	1.893.216.000	1.644.401.200				85 Persen	780.000.000			
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemlitran, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemlitran dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	239.514.600	50.543.600	665.039.800				100 Persen	260.000.000			
1	2	5	2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemlitran dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan advokasi, kemlitran dan pemberdayaan masyarakat			30 Puskesmas	30 Puskesmas	239.514.600	50.543.600	665.039.800	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	30 Puskesmas	260.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	114.530.000	32.841.450	32.841.450				100 Persen	140.000.000			
1	2	5	2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promosi, sosialisasi, pembinaan dan gerakan hidup bersih dan sehat			30 Puskesmas	30 Puskesmas	114.530.000	32.841.450	32.841.450	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	30 Puskesmas	140.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM)	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	350.000.000	1.809.520.000	946.520.000				100 Persen	380.000.000			
1	2	5	2.03.1	Bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang di beri pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar			30 Puskesmas	30 Puskesmas	350.000.000	1.809.520.000	946.520.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Akkasi Khusus Non Fisik	Revisi Mental dan Pengembangan Kebudayaan		0	30 Puskesmas	380.000.000	DINAS KESEHATAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.928.706.480	1.928.706.480	1.928.706.480				100 Persen	1.950.000.000			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.928.706.480	1.928.706.480	1.928.706.480				100 Persen	1.950.000.000			
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.928.706.480	1.928.706.480	1.928.706.480				100 Persen	1.950.000.000			
1	2	1	2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran			100 Persen	100 Persen	1.928.706.480	1.928.706.480	1.928.706.480	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Pendapatan dari BLUD		0	100 Persen	1.950.000.000	DINAS KESEHATAN	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.524.972.074	1.524.972.074	1.524.972.074				100 Persen	1.550.000.000			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.524.972.074	1.524.972.074	1.524.972.074				100 Persen	1.550.000.000			
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.524.972.074	1.524.972.074	1.524.972.074				100 Persen	1.550.000.000			
1	2	1	2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran			100 Persen	100 Persen	1.524.972.074	1.524.972.074	1.524.972.074	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	100 Persen	1.550.000.000	DINAS KESEHATAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.202.096.688	3.202.096.688	3.202.096.688				100 Persen	3.250.000.000			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.202.096.688	3.202.096.688	3.202.096.688				100 Persen	3.250.000.000			
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.202.096.688	3.202.096.688	3.202.096.688				100 Persen	3.250.000.000			
1	2	1	2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran			100 Persen	100 Persen	3.202.096.688	3.202.096.688	3.202.096.688	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Pendapatan dari BLUD		0	100 Persen	3.250.000.000	DINAS KESEHATAN	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.212.807.774	2.212.807.774	2.212.807.774				100 Persen	2.250.000.000			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.212.807.774	2.212.807.774	2.212.807.774				100 Persen	2.250.000.000			
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.212.807.774	2.212.807.774	2.212.807.774				100 Persen	2.250.000.000			
1	2	1	2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran			100 Persen	100 Persen	2.212.807.774	2.212.807.774	2.212.807.774	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Pendapatan dari BLUD		0	100 Persen	2.250.000.000	DINAS KESEHATAN	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.760.100.492	2.760.100.492	2.760.100.492				100 Persen	2.800.000.000			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.760.100.492	2.760.100.492	2.760.100.492				100 Persen	2.800.000.000			
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.760.100.492	2.760.100.492	2.760.100.492				100 Persen	2.800.000.000			
1	2	1	2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran			100 Persen	100 Persen	2.760.100.492	2.760.100.492	2.760.100.492	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Pendapatan dari BLUD		0	100 Persen	2.800.000.000	DINAS KESEHATAN	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.722.468.095	1.722.468.095	1.722.468.095				100 Persen	1.800.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022			Pagu Indikatif						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional						Daerah			
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.722.465.095	1.722.465.095	1.722.465.095				100 Persen	1.800.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.722.465.095	1.722.465.095	1.722.465.095				100 Persen	1.800.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.722.465.095	1.722.465.095	1.722.465.095	Kab. Indragiri Hilir, Rutang Tuaka, Sunggijering	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.208.360.885	1.208.360.885	1.208.360.885					1.300.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.208.360.885	1.208.360.885	1.208.360.885				100 Persen	1.300.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.208.360.885	1.208.360.885	1.208.360.885				100 Persen	1.300.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.208.360.885	1.208.360.885	1.208.360.885	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.738.672.800	1.738.672.800	1.738.672.800					-					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.738.672.800	1.738.672.800	1.738.672.800				100 Persen	-					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.738.672.800	1.738.672.800	1.738.672.800				100 Persen	-					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.738.672.800	1.738.672.800	1.738.672.800	Kab. Indragiri Hilir, Gunung Kuala Labang, Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	0	100 Persen	-	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.034.700.893	1.034.700.893	1.034.700.893					1.100.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.034.700.893	1.034.700.893	1.034.700.893				100 Persen	1.100.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.034.700.893	1.034.700.893	1.034.700.893				100 Persen	1.100.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.034.700.893	1.034.700.893	1.034.700.893	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.127.741.595	1.127.741.595	1.127.741.595					1.300.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.127.741.595	1.127.741.595	1.127.741.595				100 Persen	1.300.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.127.741.595	1.127.741.595	1.127.741.595				100 Persen	1.300.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.127.741.595	1.127.741.595	1.127.741.595	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Concong Luar	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.584.883.161	1.584.883.161	1.584.883.161					1.600.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.584.883.161	1.584.883.161	1.584.883.161				100 Persen	1.600.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.584.883.161	1.584.883.161	1.584.883.161				100 Persen	1.600.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.584.883.161	1.584.883.161	1.584.883.161	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	1.600.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							770.460.241	770.460.241	770.460.241					800.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	770.460.241	770.460.241	770.460.241				100 Persen	800.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	770.460.241	770.460.241	770.460.241				100 Persen	800.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	770.460.241	770.460.241	770.460.241	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	800.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.563.280.419	2.563.280.419	2.563.280.419					2.700.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.563.280.419	2.563.280.419	2.563.280.419				100 Persen	2.700.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.563.280.419	2.563.280.419	2.563.280.419				100 Persen	2.700.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.563.280.419	2.563.280.419	2.563.280.419	Kab. Indragiri Hilir, Kertang, Kota Baru Seberida	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	2.700.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.088.191.690	1.088.191.690	1.088.191.690					1.200.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.088.191.690	1.088.191.690	1.088.191.690				100 Persen	1.200.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.088.191.690	1.088.191.690	1.088.191.690				100 Persen	1.200.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.088.191.690	1.088.191.690	1.088.191.690	Kab. Indragiri Hilir, Kertang, Jonggibhan	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							738.202.889	738.202.889	738.202.889					800.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	738.202.889	738.202.889	738.202.889				100 Persen	800.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	738.202.889	738.202.889	738.202.889				100 Persen	800.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	738.202.889	738.202.889	738.202.889	Kab. Indragiri Hilir, Inok, Inok	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	800.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.286.840.000	1.286.840.000	1.286.840.000					1.300.000.000					
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.286.840.000	1.286.840.000	1.286.840.000				100 Persen	1.300.000.000					
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.286.840.000	1.286.840.000	1.286.840.000				100 Persen	1.300.000.000					
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.286.840.000	1.286.840.000	1.286.840.000	Kab. Indragiri Hilir, Inok, Pengalihan	Pendapatan dari BLUD	0	100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.207.600.000	2.207.600.000	2.207.600.000					2.230.000.000					

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKMD Tahun 2020	Praktikan Target RPKMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Targel 2022			Pagu Indikatir							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatir	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023										
1	2	1	2.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan			59 Kali	65 Kali	190.440.000	187.350.000	321.672.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	65 Kali	350.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	6.823.400.000	7.002.579.760	7.303.686.302					100 Persen	7.500.000.000		
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			120 Rekening	120 Rekening	1.871.000.000	2.035.150.000	2.338.256.742	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	120 Rekening	2.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung Pelayanan dan Manajemen yang terjeruga keberesannya			2 Gedung	2 Gedung	4.992.400.000	4.967.429.760	4.967.429.760	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	2 Gedung	5.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan			192 Orang	192 Orang	55.055.000.000	66.000.000.000	96.891.090.000					192 Orang	60.000.000.000		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan			100 Persen	100 Persen	55.055.000.000	66.000.000.000	96.891.090.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan / Pen	100 Persen	60.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.970.986.000	8.608.076.240	20.260.404.575					100 Persen	31.515.000.000		
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Berwawasan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.949.706.000	1.795.110.240	16.772.438.375						100 Persen	21.500.000.000	
1	2	2	2.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Ruang Perawatan yang Standar			1 Unit	-	-	-	14.570.831.212	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	1 Unit	10.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Ruang Perawatan yang Standar			1 Unit	-	-	-	406.496.923	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	1 Unit	5.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia			1 Paket	1 Paket	529.586.000	801.310.240	801.310.240	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	1 Paket	2.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat Rumah Sakit yang di adakan			45 Jenis	45 Jenis	1.420.120.000	993.800.000	993.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	45 Jenis	4.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	21.280.000	6.812.966.000	3.487.966.000					100 Persen	10.015.000.000		
1	2	2	2.02	12	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertentu HIV	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi HIV			60 Orang	60 Orang	14.080.000	14.030.000	14.030.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	60 Orang	15.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Operasional Pelayanan Penyakit menular dan tidak menular yang tersedia			1 Paket	1 Paket	7.200.000	6.798.936.000	3.473.936.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	1 Paket	10.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	75.000.000	425.000.000	425.000.000					100 Persen	45.000.000		
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemlitran, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebijakan PHBS dan berwawasan kesehatan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	50.000.000	300.000.000	300.000.000					100 Persen	25.000.000		
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemlitran dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Orang yang di lakukan promes di Rumah Sakit			30 Orang	30 Orang	50.000.000	300.000.000	300.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan / Pen	30 Orang	25.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promoti Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	25.000.000	125.000.000	125.000.000					100 Persen	20.000.000		
1	2	5	2.02	1	Penyenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pemberton Materi Promosi Kesehatan yang di laksanakan			50 Kali	50 Kali	25.000.000	125.000.000	125.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Karyawan/Pen	50 Kali	20.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBLAHAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						8.407.707.764	8.797.736.814	9.289.043.327								
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	8.407.707.764	8.407.736.814	8.428.543.327						100 Persen	8.879.507.764	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyewdanaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.916.707.764	3.916.707.764	3.683.135.977						100 Persen	3.916.707.764	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji ASN			52 Orang	52 Orang	3.916.707.764	3.916.707.764	3.638.135.977	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Insentif Daerah				32 Orang	3.916.707.764	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	199.140.000	178.017.850	145.128.150						90 Persen	302.000.000	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				100 Persen	30.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan dan Urusan Pemerintah			90 Persen	90 Persen	95.801.300	84.699.150	99.829.450	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				90 Persen	125.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			90 Persen	90 Persen	30.655.700	20.655.700	20.655.700	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				90 Persen	50.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			90 Persen	90 Persen	12.203.000	12.203.000	19.603.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				90 Persen	17.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Makan dan Minum Pasien dan Petugas Ramadhan			90 Persen	90 Persen	50.000.000	50.000.000	55.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				90 Persen	80.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.957.640.000	1.958.901.200	1.786.201.200						100 Persen	3.140.000.000	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sanaat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Sanaat Menyurat			100 Persen	100 Persen	8.240.000	8.240.000	6.740.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				100 Persen	12.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik			100 Persen	100 Persen	80.000.000	80.000.000	133.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				100 Persen	100.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Kantor			100 Persen	100 Persen	1.869.600.000	1.870.741.200	1.395.841.200	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				100 Persen	3.028.800.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	8.000.000	8.000.000	13.000.000						90 Persen	20.000.000	
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya			90 Persen	90 Persen	8.000.000	8.000.000	13.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Insentif Daerah				90 Persen	20.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Totalkannya Kegiatan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.000.000.000	2.400.000.000	3.100.000.000						100 Persen	2.500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi						Nasional	Daerah					
1.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				90 Jenis	90 Jenis	268.171.750	268.171.750		413.216.130	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan pr	90 Jenis	268.380.338	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				8 Jenis	8 Jenis	170.000.000	122.088.532		149.612.532	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan pr	8 Jenis	178.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				10 Jenis	10 Jenis	72.538.925	72.538.925		72.794.313	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan pr	10 Jenis	76.386.871	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				40 Eksemplar	40 Eksemplar	3.600.000	3.600.000		3.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan pr	40 Eksemplar	3.780.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.06.9	Pembelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				168 Kali	514 Kali	1.200.480.000	1.406.615.000		1.471.225.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan pr	514 Kali	1.260.504.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1.669.593.000	1.674.453.000		1.714.143.000						100 Persen	1.753.072.680	
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Susut Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	90 Persen	11.500.000	11.500.000		11.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ketersediaan ja	90 Persen	12.075.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				10 Rekening	10 Rekening	272.303.000	272.303.000		312.083.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ketersediaan ja	10 Rekening	286.021.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				86 Orang	86 Orang	1.385.700.000	1.390.560.000		1.390.560.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ketersediaan ja	86 Orang	1.454.985.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	526.253.025	574.799.850		594.799.850						100 Persen	552.565.676	
1.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pesongon Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				9 Unit	9 Unit	55.000.000	105.510.000		90.510.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan B	9 Unit	57.750.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				32 Unit	32 Unit	108.000.000	113.789.000		148.799.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan B	32 Unit	113.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				201 Unit	201 Unit	25.000.000	40.000.000		40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan B	201 Unit	26.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				89 Unit	89 Unit	338.253.025	315.490.800		315.490.800	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan B	89 Unit	358.165.676	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi baik	Persen		Persen	17 Persen	27.386.243.855	21.311.147.400		23.247.440.448							17 Persen	28.755.356.049	
1.3.2.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pongaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	21.344.200.405	14.676.986.400		16.189.472.448						60 Persen	22.411.410.426	
1.3.2.2.01.4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan				6 Dokumen	7 Dokumen	1.170.552.600	1.025.075.600		741.214.600	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelolaan SD	7 Dokumen	1.229.880.230	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.2.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah panjang turap/taud/betonong di wilayah sungai yang di bangun				86 Meter	32 Meter	925.499.950	954.999.950		1.726.244.300	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelolaan SD	32 Meter	971.774.948	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
		Jumlah pembangunan turap/taud/betonong di wilayah sungai yang dikendalikan				20 Kecamatan	20 Kecamatan										20 Kecamatan		
1.3.2.2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah panjang sungai/ kali yang dinormalisasi				112 Km	194 Km	19.136.451.955	12.626.079.950		13.670.347.646	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelolaan SD	194 Km	20.091.274.553	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
		Jumlah pelaksanaan Pembersihan dan Pengukuran Sungai/Kali yang di monitoring dan dievaluasi				20 Kecamatan	20 Kecamatan										20 Kecamatan		
1.3.2.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemantauan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi pengelolaan air baku / air permukaan yang dikeluarkan				15 izin	9 izin	111.695.900	70.830.900		51.665.900	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelolaan SD	9 izin	117.280.695	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.2.2.02	Pengembangan dan Pengolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	6.042.043.450	6.634.161.000		7.057.968.000						60 Persen	6.344.145.623	
1.3.2.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Rawa				12 KM	21.775 KM	1.832.828.800	2.580.101.350		2.629.861.350	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Pengembangan	21.775 KM	1.924.470.240	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.2.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang di monitoring dan dievaluasi				20 Kecamatan	20 Kecamatan	4.209.214.650	4.054.059.650		4.428.106.650	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengembangan	20 Kecamatan	4.419.675.383	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
		Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				12 KM	71000 KM										71000 KM		
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	Unit		Unit	31 Unit	31 Unit	10.587.870.000	8.588.860.000		9.073.591.973						11 Unit	11.117.268.500	
		Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	SR		SR	15625 SR	15625 SR										15625 SR		
1.3.3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SR SPAM Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	70 Persen	12 Persen	10.587.870.000	8.588.860.000		9.073.591.973						12 Persen	11.117.268.500	
1.3.3.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen DED Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin yang di susun				12 Dokumen	11 Dokumen	1.691.750.500	1.251.250.500		1.180.223.500	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rumah tangga	11 Dokumen	1.776.338.025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.3.2.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang jaringan perpipaan dan sambungan rumah yang dibangun				1500 SR	1500 SR	7.423.079.000	6.587.139.000		6.633.270.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rumah tangga	1500 SR	7.794.252.950	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.3.2.01.4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan perpipaan dan sambungan rumah yang dibangun				1500 SR	100 SR	1.043.040.500	750.470.500		752.000.500	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rumah tangga	100 SR	1.095.192.525	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.3.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pencapaian Sub Kegiatan				100 Persen	100 Persen	430.000.000	-		508.097.973	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rumah tangga	100 Persen	451.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FATA RUANG
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan/gedung dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	16.027.447.500	16.418.777.500		17.067.143.500						90 Persen	16.829.029.875	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pemanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagi Indikator			Lokasi		Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagi Indikator				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional	Daerah	Nasional	Daerah								
1	3	8	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laks Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah dalam kondisi baik	Persen	Persen	90 Persen	86 Persen	16.027.647.500	16.418.777.500	17.087.143.300						56 Persen	16.829.029.875			
1	3	8	2.01	2	Pencapaian, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring pada Kegiatan Pendaftaran dan Pengawasan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			87 Kali	96 Kali	15.969.095.800	16.372.125.800	17.020.491.800	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bangunan/Ged	96 Kali	96 Kali	16.767.550.500		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	8	2.01	9	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Monitoring Survey dan Pemetaan RTI, dan IMB yang dilaksanakan			90 Kali	37 Kali	38.551.700	46.651.700	46.651.700	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bangunan/Ged	37 Kali	37 Kali	61.479.285		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	10		PROGRAM PENYELINGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	53.817.536.400	58.807.790.200	67.671.395.540						75 Persen	56.508.413.220			
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kelembagaan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Pencapaian Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	Persen	74 Persen	86 Persen	53.817.536.400	58.807.790.200	67.671.395.540						86 Persen	56.508.413.220		
1	3	10	2.01	1		Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun			100 Persen	25 Dokumen	3.148.500.000	2.500.221.800	2.583.843.800	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rehabilitasi/Re	25 Dokumen	25 Dokumen	3.305.925.000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	10	2.01	3	Pengabdian Leger Jalan	Jumlah Dokumen Sektoral yang disusun			20 Persen	8 Dokumen	987.546.100	971.782.100	970.372.100	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rehabilitasi/Re	8 Dokumen	8 Dokumen	1.036.923.405		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Jumlah jalan yang dibangun				5 Paket Pekerjaan	-	-	8.799.176.500	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rehabilitasi/Re	5 Paket Pekerjaan	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di Rekonstruksi			6,09 Km	6,5 Km	15.203.990.000	20.871.994.000	21.375.470.840	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rehabilitasi/Re	6,5 Km	15.964.189.500		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi			1 Km	10 Km	10.179.780.000	10.179.516.000	10.246.004.000	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rehabilitasi/Re	10 km	10.688.769.000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan Wilayah III yang dibangun				6	17.895.096.500	17.522.332.500	16.838.868.500	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rehabilitasi/Re	6	18.799.851.325		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
						Jumlah jembatan Wilayah II yang dibangun				3								3				
						Jumlah jembatan Wilayah I yang dibangun				30 Unit								3 Unit				
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Di Rehabilitasi			10 Unit	23 Unit	5.709.119.800	6.238.855.800	6.234.255.800	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rehabilitasi/Re	23 Unit	5.996.575.700		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
						Jumlah jembatan Yang Di Rehabilitasi Secara Swakelola				25 Unit								25 Unit				
1	3	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan yang dilaksanakan			21 Dokumen	2 Dokumen	693.504.000	723.088.000	693.402.000	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rehabilitasi/Re	2 Dokumen	728.179.200		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa konstruksi yang terlatih	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	440.562.200	489.916.250	489.916.250						90 Persen	462.990.311			
1	3	11	2.02	1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	211.539.480	148.373.480						100 Persen	222.114.423		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	11	2.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Keterseediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data ASBU yang di update			1 Dokumen	1 Dokumen	211.539.480	148.373.480	148.373.480	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sistem Informas	1 Dokumen	222.114.423		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	11	2.04	3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan Monev Jasa Konstruksi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	103.834.800	41.542.800	41.542.800	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	109.026.540		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Kompeten dibidangnya			33 Rekomendasi	33 Rekomendasi	103.834.800	41.542.800	41.542.800	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pengawasan Te	33 Rekomendasi	109.026.540		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12		PROGRAM PENYELINGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.800.000.000	1.228.796.000	1.478.796.000						100 Persen	1.890.000.000			
1	3	12	2.01	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RRTU	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	603.686.600	508.992.600	508.992.600					2 Dokumen	633.870.950		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	12	2.01	4	Sevaluasi Kegiatan dan Penetapan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Berita Acara yang ada			1 Dokumen	1 Dokumen	603.686.600	508.992.600	508.992.600	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RTRW dan RRTU	1 Dokumen	633.870.950		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	12	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Ruang yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan	Persen	Persen	1 Persen	1 Persen	219.637.500	164.947.500	364.947.500					1 Persen	230.619.375		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTU yang tersedia			1 Dokumen	2 Dokumen	219.637.500	164.947.500	364.947.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koordinasi dan	2 Dokumen	230.619.375		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Lama Waktu Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Hari	Hari	4 Hari	4 Hari	404.737.700	258.462.700	308.462.700					4 Hari	424.974.585		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Inventaris Pemanfaatan dan pengembangan lahan terkait investasi dan pembangunan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	404.737.700	258.462.700	308.462.700	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koordinasi dan	1 Dokumen	424.974.585		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	571.938.200	296.393.200	296.393.200					100 Persen	600.533.110		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
1	3	12	2.04	3	Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pegawai Pegawai Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Berita Acara Laporan			20 Laporan	20 Laporan	278.449.100	240.139.100	240.139.100	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koordinasi dan	20 Laporan	292.371.555		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Berkas Informasi Tata Ruang			100 Berkas	100 Berkas	293.489.100	56.234.100	56.234.100	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koordinasi dan	100 Berkas	308.163.555		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1	4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	7.439.588.228	7.437.299.728	7.062.311.623						22 Nilai	7.515.648.832			
1	4	1	2.01	1	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	-	-	77.963.800					100 Persen	186.600.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hibstar Realisasi Kinerja SRPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hibstar Realisasi Kinerja SRPD yang disusun			1 Laporan	1 Laporan	-	-	77.963.800	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	1 Laporan	186.600.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	4	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.647.214.928	5.658.214.928	4.716.771.023					3 Dokumen	5.590.925.532		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah Caji ASN			1 Tahun	1 Tahun	5.437.464.928	5.437.464.928	4.510.369.173	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	1 Tahun	5.391.179.532		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022								RKPD 2022 Perubahan	Nasional	Daerah		
1	4	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun			3 Laporan	3 Laporan	159.750.000	167.750.000	176.401.850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	3 Laporan	159.750.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	121.200.000	139.783.200	139.783.200					100 Persen	121.200.000		
1	4	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan			8 Orang	8 Orang	121.200.000	139.783.200	139.783.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan kerukunan ketertarikan dan ketertiban	0	8 Orang	121.200.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	483.989.500	426.361.000	680.663.000					100 Persen	473.189.500		
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelelistrikan yang disediakan			6 Jenis	6 Jenis	17.422.500	17.422.500	17.422.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan pemertanian pembangunan	0	6 Jenis	17.422.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jaman makan minum rapat yang tersedia			15 Kali	15 Kali	77.095.000	87.100.000	99.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	15 Kali	77.095.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Jumlah logistik yang disediakan			8 Jenis	8 Jenis									8 Jenis		
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan yang disediakan			26 La	26 La	36.000.000	31.318.500	31.318.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	26 La	36.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Jumlah Penggandaan yang disediakan			4000 Lembar	4000 Lembar									4000 Lembar		
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peranan Penunjang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			14 Media	14 Media	33.600.000	33.600.000	42.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryaya saing	0	14 Media	33.600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan			69 Kali	69 Kali	319.872.000	256.920.000	490.122.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryaya saing	0	69 Kali	302.472.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	975.233.800	951.890.600	1.126.930.600						100 Persen	995.633.800	
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Susut Menyurat	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran			2500 Buah	2500 Buah	12.900.000	12.900.000	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	2500 Buah	12.900.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan			5 Rekening	5 Rekening	295.260.000	229.260.000	229.260.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	5 Rekening	295.260.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan			26 Jenis	26 Jenis	93.473.800	93.473.800	284.413.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	26 Jenis	93.473.800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga supir yang dibayarkan			1 Orang	1 Orang	375.600.000	376.236.800	368.236.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	1 Orang	394.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan			4 Orang	4 Orang									4 Orang		
						Jumlah tenaga jasa administrasi/ Teknis yang dibayarkan			37 Orang	37 Orang									37 Orang		
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik, Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	204.450.000	284.050.000	320.200.000						100 Persen	160.600.000	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara			25 Unit	25 Unit	25.000.000	50.000.000	71.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	25 Unit	45.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara			5 Unit	5 Unit									5 Unit		
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinannya			20 Unit	20 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	20 Unit	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/Service			4 Jenis	4 Jenis	20.000.000	20.000.000	32.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	4 Jenis	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara			10 Ruang	10 Ruang	126.450.000	181.050.000	178.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	10 Ruang	62.100.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara			2 Jenis	2 Jenis	13.000.000	13.000.000	19.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	2 Jenis	13.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	Persen	45 Persen	45 Persen	1.875.000.000	1.774.999.900	5.174.999.750						45 Persen	2.036.751.200	
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dilaksanakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.517.658.950	1.515.658.200	4.776.610.400						100 Persen	1.681.860.300	
1	4	2	2.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Site plan dan DED bagi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			7 Dokumen	7 Dokumen	681.860.300	375.483.100	372.955.200	Kab. Indragiri Hilir, Roteh, Semau Kolombang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemertanian pembangunan	0	7 Dokumen	681.860.300	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
														Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Semau Kelurahan							
														Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan							
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang dibangun			10 Unit	60 Unit	835.798.600	940.175.100	4.201.615.200	Kab. Indragiri Hilir, Itok, Rantau Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemertanian pembangunan	0	60 Unit	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
														Kab. Indragiri Hilir, Buntan Kecamatan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi							
														Kab. Indragiri Hilir, Katoran, Kuala Selat							
														Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Tanjungbaru							
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	52.551.750	46.551.750	154.147.750						100 Persen	50.101.600	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional			
1 4 2 2.05 2	Penataan/Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Pemantauan Rumah Susun dan atau Rumah Khusus				1 Laporan	1 Laporan	52.551.750	46.551.750	154.147.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantauan pemertan pembangunan	0	1 Laporan	50.101.600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 4 2 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan yang layak	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	304.789.300	212.789.950	244.241.600				100 Persen	304.789.300		
1 4 2 2.06 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah yang Kerfren Rencana yang di Monitoring				10 unit	10 unit	304.789.300	212.789.950	244.241.600	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Pemantauan pemertan pembangunan	0	10 unit	304.789.300	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar	Hektar	75 Hektar	75 Hektar	1.083.133.500	996.783.300	912.601.950					75 Hektar	1.078.833.500		
1 4 3 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Rawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase Kawasan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak	BKM	BKM	2 BKM	2 BKM	857.329.300	770.979.100	633.303.750					2 BKM	853.129.300		
1 4 3 2.02 2	Penyusunan Rencana Pengolahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DED				7 Dokumen	7 Dokumen	433.627.700	429.427.700	506.927.700	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	0	7 Dokumen	429.427.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 4 3 2.02 3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Penerima				1 BKM	1 BKM	423.701.600	341.551.400	126.376.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	0	1 BKM	423.701.600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 4 3 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Rawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase Kawasan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	225.804.200	225.804.200	279.298.200					100 Persen	225.804.200		
1 4 3 2.03 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki				5 Unit	5 Unit	225.804.200	225.804.200	279.298.200	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryaya saing	0	5 Unit	225.804.200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEMHI	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar	Hektar	75 Hektar	75 Hektar	537.237.950	348.187.950	1.732.369.100					75 Hektar	3.094.000.000		
1 4 4 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengolahan terhadap Tumbuh dan Berkenbangnya Permukiman Kumuh	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	537.237.950	348.187.950	1.732.369.100					100 Persen	3.094.000.000		
1 4 4 2.01 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengolah terhadap Tumbuh dan Berkenbangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Rawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Runtan Stimulan Rumah Layak Huni (BSRLH) yang diberikan				7 Unit	7 Unit	537.237.950	348.187.950	1.732.369.100	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Pemantauan pemertan pembangunan	0	7 Unit	3.094.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (bankeu)					20 unit							20 unit			
1 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase peningkatan PSU	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	33.075.192.200	31.946.270.250	34.245.488.850					75 Persen	1.988.000.000		
1 4 5 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	cakupan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	33.075.192.200	31.946.270.250	34.245.488.850					75 Persen	1.988.000.000		
1 4 5 2.01 1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen DED Perencanaan Prasarana Perumahan dan Jalan Jernabah Di Kabupaten Indragiri Hilir				12 Dokumen	12 Dokumen	2.026.832.750	1.729.906.000	1.369.306.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		20 Kecamatan	12 Dokumen	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 4 5 2.01 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Jumlah Santasi yang dibangun					10 unit	30.098.128.700	29.409.408.700	31.988.586.100	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Pemantauan pemertan pembangunan	20 Kecamatan	10 unit	988.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Jumlah Kawasan Permukiman Yang Dikembangkan				20 Kawasan	20 Kawasan				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus-Fask			20 Kawasan			
		Jumlah Lokasi Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Di Kabupaten Indragiri Hilir				1 Lokasi	1 Lokasi							1 Lokasi			
		Jumlah Perbaikan Yang Dibangun/Rehab				75 Unit	75 Unit							75 Unit			
		Jumlah Sarana Prasarana TPU Yang Dibangun				2 Unit	2 Unit							2 Unit			
		Luas Tanah Untuk Pemukiman Yang Disediakan				0 Hektar	0 Hektar							0 Hektar			
		Panjang Jalan Yang Dibangun Pada Kegiatan Jalan Lingkungan Wilayah L IIIH				26,4 KM	26,4 KM							26,4 KM			
		Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Dibangun				1,4 KM	1,4 KM							1,4 KM			
1 4 5 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	DATA EVALUASI DAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR				20 Kecamatan	20 Kecamatan	990.230.750	812.955.550	807.596.750	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan		20 Kecamatan	20 Kecamatan	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan jalan lingkungan permukiman yang dilaksanakan				197 Kali	197 Kali							197 kali			
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							19.479.312.812	19.798.748.812	21.336.881.004					23.508.612.812		
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	17.015.042.662	17.184.480.462	17.454.090.716					22 Nilai	19.058.612.812		
1 5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	24.000.000	24.000.000	24.000.000					14 Dokumen	30.000.000		
1 5 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				14 Dokumen	14 Dokumen	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	14 Dokumen	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	Orang	167 Orang	167 Orang	12.333.612.812	12.333.612.812	12.166.745.066					167 Orang	12.333.612.812		
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				167 Orang	167 Orang	12.333.612.812	12.333.612.812	12.166.745.066	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	167 Orang	12.333.612.812	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 5 1 2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang berkemampuan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	395.000.000	395.000.000	584.033.000					100 Persen	900.000.000		
		Presentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen								95 Persen			
1 5 1 2.05 2	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atributnya yang disediakan	Jumlah Pakuan Dinas Beserta Atributnya yang disediakan				400 Stel	10 Stel	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	10 Stel	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 5 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				7 Diklat	7 Diklat	350.000.000	390.000.000	579.633.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	7 Diklat	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.398.139.850	1.416.625.850	1.698.169.850					100 Persen	1.645.000.000		
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penangan yang disediakan				16 Jenis	16 Jenis	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	16 Jenis	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah								
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			55 Jenis	13 Jenis	404.400.850	329.690.850	352.423.850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	13 Jenis	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			7 Jenis	7 Jenis	30.730.000	30.730.000	30.730.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	7 Jenis	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			7 Jenis	7 Jenis	25.000.000	25.000.000	18.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	7 Jenis	35.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan baku yang disediakan			2000 Eksemplar	2200 Eksemplar	156.000.000	506.000.000	542.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	2200 Eksemplar	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.06	9	Pembelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			246 Kali	227 Kali	777.009.000	520.205.000	750.016.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	227 Kali	900.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen	292.500.000	277.130.000	277.130.000						95 Persen	750.000.000		
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan			34 Unit	34 Unit	277.500.000	277.130.000	277.130.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	34 Unit	300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen	2.437.790.000	2.476.810.000	2.336.090.000						95 Persen	3.310.000.000		
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian ketersediaan kebutuhan surat menyurat			97 Persen	97 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	97 Persen	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			36 Rekening	36 Rekening	79.590.000	81.227.600	83.372.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	36 Rekening	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			191 Orang	176 Orang	2.353.200.000	2.390.382.400	2.247.717.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	176 Orang	3.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen	174.000.000	261.301.800	367.322.800						95 Persen	270.000.000		
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			45 Unit	46 Unit	64.000.000	101.301.800	135.301.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	46 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			100 Unit	100 Unit	10.000.000	10.000.000	12.021.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	100 Unit	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	100.000.000	130.000.000	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	1 Unit	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian pensegakan PERDA dan PERKADA/Kebijakan KDH	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.464.270.150	2.614.268.350	3.882.790.350						100 Persen	4.450.000.000		
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen	1.718.198.150	1.868.196.350	3.064.658.350						95 Persen	3.300.000.000		
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang dilaksanakan			885 Kali	1171 Kali	999.530.300	1.149.318.500	1.667.806.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	1171 Kali	2.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2	2.01	2	Pemindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Urgak Rana dan Kesusahan Masa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Frantribum			120 Kali	362 Kali	24.950.000	24.950.000	277.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	362 Kali	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlinggungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum/Perlinggungan Masyarakat yang dilaksanakan			3 Kali	3 Kali	104.580.000	104.580.000	113.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	3 Kali	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlinggungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelatikan/Pengukuhan Satlinmas yang dilaksanakan			612 Orang	612 Orang	135.419.850	135.419.850	144.989.850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	612 Orang	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Tolak Pengedaran dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang dilaksanakan			30 Kali	24 Kali	433.928.000	433.928.000	860.812.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	24 Kali	700.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen	543.800.000	543.800.000	595.820.000						95 Persen	900.000.000		
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengamatan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota			336 Kali	336 Kali	205.810.000	205.810.000	205.810.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	336 Kali	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2	2.02	3	Pengawasan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Pelanggaran Perda/Perbup			12 Kali	44 Kali	337.990.000	337.990.000	390.010.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	44 Kali	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Berkompeten dibidangnya	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen	202.272.000	202.272.000	222.312.000						95 Persen	250.000.000		
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS Satpol PP yang dikembangkan kapasitasnya			9 orang	9 orang	202.272.000	202.272.000	222.312.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	9 orang	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINGGUNGAN MASYARAKAT						10.852.934.520	10.747.934.520	11.299.136.444							13.538.000.000		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	6.297.748.020	6.291.680.720	6.320.979.644							22 Nilai	5.435.000.000	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen laporan capaian kinerja	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	85.400.000	85.400.000	85.400.000							100 Persen	250.000.000	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun			6 Dokumen	6 Dokumen	85.400.000	85.400.000	85.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen dan		6 Dokumen	250.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	Orang	47 Orang	50 Orang	4.331.444.920	4.331.444.920	4.543.866.844							50 Orang	2.000.000.000	
						Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Orang	Orang	47 Orang	50 Orang										50 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022								Nasional
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan				47 orang	50 orang	4.331.644.900	4.331.644.900	4.843.866.846	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 orang	2.000.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1.356.083.100	1.316.976.600	883.936.400				100 Persen	1.625.000.000		
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik dan Penerangan yang disediakan				15 jenis	15 jenis	2.400.000	2.400.000	4.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 jenis	25.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				68 Jenis	68 Jenis	376.021.550	215.121.550	216.846.600	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 Jenis	500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan				2 Jenis	2 Jenis	204.686.550	89.760.250	101.785.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	400.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				5 jenis	7 jenis	15.000.000	15.000.000	36.260.000				7 jenis	150.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				1080 Esemplar	270 Esemplar	542.250.000	805.550.000	351.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		270 Esemplar	50.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.06 9	Pemengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan				63 kali	84 kali	215.725.000	191.144.800	273.394.800	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84 kali	500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	persen		persen	100 persen	100 persen	403.620.000	426.639.200	382.976.400				100 persen	760.000.000		
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	100 Persen	2.000.000	2.000.000	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	60.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	4 Rekening	58.100.000	74.400.000	64.167.200	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Rekening	230.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan				76 Orang	18 Orang	343.520.000	302.259.200	315.809.200	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewajibkan kermakan ketentraman dan ketertiban	18 Orang	470.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	121.000.000	131.000.000	124.800.000				100 Persen	800.000.000		
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/Lapangan yang dipelihara Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/Lapangan yang dipelihara				15 Unit	15 Unit	96.000.000	96.000.000	84.800.000				15 Unit	300.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				7 Unit	7 Unit	5.000.000	5.000.000	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	150.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / dipablisitasi				1 unit	1 unit	20.000.000	30.000.000	30.000.000				1 unit	350.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4.407.448.700	4.218.378.000	4.598.276.000				100 Persen	6.000.000.000		
1 5 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4.375.847.000	4.218.378.000	4.598.276.000				100 Persen	5.500.000.000		
1 5 3 2.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan yang disediakan				5 Jenis	7 Jenis	3.311.750.000	3.084.181.000	3.468.641.000	Sema Kab/Kota, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihabiskan Dana Transformasi Pelayanan Publik.	7 Jenis	4.000.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 3 2.02 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SIM yang beresertifikasi sebagai pengelola penanganan kebakaran				3 Orang	3 Orang	1.062.197.000	1.134.197.000	1.129.035.000	Sema Kab/Kota, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihabiskan Dana Transformasi Pelayanan Publik.	3 Orang	1.500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	147.737.800	237.875.800	319.800.800				100 Persen	2.100.000.000		
1 5 4 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase efektifitas pencegahan, pengendalian pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	41.781.800	124.829.800	174.829.800				100 Persen	1.500.000.000		
1 5 4 2.01 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah sarana prasarana evakuasi dan penanganan korban yang dilakukan				15 Jenis	16 Jenis	41.781.800	124.829.800	174.829.800	Sema Kab/Kota, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		bahan berbahaya	16 Jenis	1.500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya inspeksi dan proteksi kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	64.470.000	64.470.000	77.865.000				100 Persen	250.000.000		
1 5 4 2.02 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pelatir Proteksi kebakaran yang didata				450 Unit	450 Unit	64.470.000	64.470.000	77.865.000	Sema Kab/Kota, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengguna APA	450 Unit	250.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	hasil Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	41.486.000	48.576.000	67.206.000				100 Persen	350.000.000		
1 5 4 2.03 1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	41.486.000	48.576.000	67.206.000	Sema Kab/Kota, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kejadian Kebak	8 Kejadian	350.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							8.798.091.840	8.110.091.840	8.142.340.839					8.470.708.439		
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	5.671.571.840	5.162.977.440	5.243.226.439				90 Persen	5.391.888.439		
1 5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	161.187.900	161.243.500	146.838.500				90 Persen	139.487.900		
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen							90 Persen			
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				9 Dokumen	5 Dokumen	28.044.900	28.044.900	6.344.900	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen peng	5 Dokumen	6.344.900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				25 Dokumen	25 Dokumen	133.143.000	133.200.600	140.493.600	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kesamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen peng	25 Dokumen	133.143.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3.829.179.840	3.829.309.440	3.861.556.439				100 Persen	3.925.664.439		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pemetaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tertarget 2022			Pagi Indikator				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagi Indikator
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional							
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				35 Orang	37 Orang	3.765.091.840	3.765.091.840	3.797.340.839	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaporan Keuangan	37 Orang	3.861.558.439	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	64.088.000	64.217.600	64.217.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaporan Keuangan	9 Dokumen	64.088.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Staf		Staf	98 Staf	98 Staf	131.180.000	131.180.000	131.180.000					98 Staf	131.180.000		
1 5 1 2.05 2	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				98 Stel	98 Stel	131.180.000	131.180.000	131.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pakaian Dinas	98 Stel	131.180.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	643.373.000	569.413.000	582.913.000					100 Persen	643.373.000		
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				10 Jenis	10 Jenis	6.115.000	6.115.000	6.115.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kelancaran adm	10 Jenis	6.115.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	110.460.000	90.460.000	85.460.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kelancaran adm	5 Jenis	110.460.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	238.308.000	188.308.000	188.308.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kelancaran adm	4 Jenis	238.308.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	7.017.000	7.017.000	7.017.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kelancaran adm	3 Jenis	7.017.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Binaan dan Peratun Perundang-undangan	Jumlah Bahan binaan yang disediakan				816 Exemplar	816 Exemplar	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kelancaran adm	816 Exemplar	8.600.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				70 Kali	70 Kali	272.673.000	268.913.000	267.413.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kelancaran adm	70 Kali	272.673.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	390.830.000	1.640.000	36.680.000					90 Persen	36.680.000		
1 5 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				10 Unit	1 Unit	390.830.000	1.640.000	36.680.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Unit	36.680.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	113.641.100	113.779.300	126.646.300					90 Persen	113.641.100		
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Sinar Menyarai	Cakupan ketersediaan kebutuhan sinar menyarai				100 Persen	100 Persen	2.700.000	2.700.000	3.885.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi ps	100 Persen	2.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	4 Rekening	62.500.000	62.500.000	74.217.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi ps	4 Rekening	62.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				4 Orang	4 Orang	48.441.100	48.579.500	48.579.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi ps	4 Orang	48.441.100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	402.180.000	336.410.000	357.410.000					100 Persen	402.180.000		
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				33 Unit	33 Unit	329.000.000	283.230.000	283.230.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	33 Unit	329.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				25 Unit	25 Unit	7.000.000	7.000.000	8.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	25 Unit	7.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	66.180.000	66.180.000	66.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Unit	66.180.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Pengangan Kebencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3.126.720.000	2.947.114.400	2.899.114.400					100 Persen	3.078.720.000		
1 5 3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyebaran informasi tentang daerah rawan bencana	Laporan		Laporan	100 Laporan	100 Laporan	60.000.000	60.129.600	60.129.600					100 Laporan	60.000.000		
1 5 3 2.01 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Risiko Bencana yang disusun				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000	60.129.600	60.129.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	54 OPD	4 Laporan	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	786.800.000	677.099.200	629.099.200					100 Orang	786.800.000		
1 5 3 2.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang peduli Bencana dilaksanakan rawan bencana				80 Orang	80 Orang	60.000.000	60.129.600	60.129.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Pangkalan Tujuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah Terdam	80 Orang	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang tersedia				66 unit	64 unit	321.800.000	321.800.000	273.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah Terdam	64 unit	273.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2.02 5	Pengabdian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang terkoordinasi pasca bencana				6 Kali	6 Kali	100.000.000	100.064.800	100.064.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah Terdam	6 Kali	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2.02 7	Pengangan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang terkoordinasi pasca bencana				3 Kali	3 Kali	250.000.000	170.064.800	170.064.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah Terdam	3 Kali	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Praktikan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Target				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Target			Pagu Indikatif	
								Nasional		Daerah									
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TRC yang Terlatih	55 Orang	55 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Semau Kelurahan	Dana Transfer Pemda-Dana Akabasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik/Dukungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah Terdat	55 Orang	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil terlaksana	Kegiatan	Kegiatan	100 Kejadian	100 Kejadian	2.309.920.000	2.309.920.600	2.309.920.600	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akabasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik/Dukungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	100 Kejadian	2.309.920.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana yang ditanggulangi	45 Kejadian	45 Kejadian	2.114.920.000	2.114.920.000	2.114.920.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akabasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik/Dukungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	34 OPD	45 Kejadian	2.114.920.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Korban Bencana yang disediakan	200 Paket	200 Paket	195.000.000	195.000.000	195.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Akabasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik/Dukungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	34 OPD	200 Paket	195.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	13.569.719.345	11.055.392.445	11.481.864.258	6.572.156.595	6.580.751.258	22 Nilai	13.577.702.940		
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	persen	persen	100 persen	100 persen	36.000.000	36.000.000			49.800.000	100 persen	41.000.000		
					Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	persen	persen	100 persen	100 persen							100 persen			
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	6 dokumen	7 dokumen	36.000.000	36.000.000	49.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik/Dukungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Dokumen Kenc	7 dokumen	41.000.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen	persen	100 persen	100 persen	3.638.719.345	3.638.719.345	4.127.491.138			100 persen	4.222.591.000		
					Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen	persen	100 persen	100 persen							100 persen			
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	37 orang	37 orang	3.838.719.345	3.838.719.345	4.127.491.138	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Akabasi Umum			Aparatur Sipil P	37 orang	4.222.591.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	persen	persen	90 persen	90 persen	151.815.000	149.565.000	149.565.000			90 persen	174.587.000		
1	6	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipinjam Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	151.815.000	149.565.000	149.565.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	3 kali	174.587.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen	persen	100 persen	100 persen	1.680.795.150	1.554.178.600	1.498.380.000			100 persen	1.868.132.500		
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	5.350.000	5.350.000	5.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	6 jenis	6.152.500	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	53 jenis	37 jenis	168.010.900	157.009.800	66.509.800	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	37 jenis	191.212.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	11 jenis	10 jenis	224.550.000	203.208.600	102.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	10 jenis	258.232.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 jenis	14 jenis	74.360.250	74.360.250	74.360.250	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	14 jenis	85.514.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	66 Eksemplar	66 Eksemplar	677.800.000	747.800.000	747.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	66 Eksemplar	711.490.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	211 kali	240 kali	530.724.000	566.450.000	502.260.000	Semua Kab/Kota, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	240 kali	610.332.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen	persen	100 persen	100 persen	620.600.000	544.688.800	544.688.800			100 persen	713.480.000		
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sisa Menyerat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyerat dan materi	100 Persen	100 Persen	11.200.000	11.200.000		Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	100 Persen	12.880.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	11 rekening	11 rekening	225.400.000	147.480.000	147.480.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	11 rekening	259.000.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan	31 Orang	31 Orang	384.000.000	386.008.800	386.008.800	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	31 Orang	441.600.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	persen	persen	100 persen	100 persen	1.004.140.000	449.004.800	210.826.250			100 persen	1.154.761.000		
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Rencanara Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	6 unit	23 unit	219.000.000	132.164.800	131.836.250	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	23 unit	251.850.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	36 unit	36 unit	25.200.000	25.200.000	19.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	36 unit	28.980.000	DDNAS SOSIAL
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	1 unit	739.940.000	271.640.000	39.380.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil P	1 unit	873.551.000	DDNAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																			
1	6	2	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	orang	orang	27 orang	27 orang	2.014.925.000	1.672.825.500	1.489.575.500			27 orang	2.317.163.000		
1	6	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	357 orang	317 orang	2.014.925.000	1.672.825.500	1.489.575.500	Semua Kab/Kota, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memajukan tingkat kesejahteraan dan pengangguran	Komunitas Adat	317 orang	2.317.163.000	DDNAS SOSIAL
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PKSS)	persen	persen	100 persen	100 persen	1.634.781.000	1.627.226.400	1.508.358.800			100 persen	1.879.997.000		
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Pahlawan, Veteran Pejuang maupun Penderita Kemedekaan yang diberi Tali Ash	154 orang	67 orang	268.586.000	263.750.800	261.556.000	Semua Kab/Kota, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang M	67 orang	308.643.000	DDNAS SOSIAL
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah PKMS dan Kelompok Masyarakat yang di bantu	120 orang	120 orang	402.500.000	467.894.800	492.839.800	Semua Kab/Kota, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang M	120 orang	462.875.000	DDNAS SOSIAL
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM Keluarga dan kelompok masyarakat yang di layani dan dibantu	341 orang	321 orang	963.895.000	895.582.800	753.963.000	Semua Kab/Kota, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang M	321 orang	1.108.479.000	DDNAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKMD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional			
1 6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEBERASAN	Persentase korban Tindak Kekeerasan yang menerima bantuan sosial	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	116.430.000	79.602.300	69.537.500					100 Persen	133.894.000		
1 6 3 2.01	Pemulangan Warga Negara Korban Tindak Kekeerasan dari Tindak Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Cakupan Pemulangan orang terlanjar	persen	persen	100 persen	100 persen	116.430.000	79.602.300	69.537.500					100 persen	133.894.000		
1 6 3 2.01 1	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekeerasan dari Tindak Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah orang terlanjar yang di tangani			30 orang	40 orang	116.430.000	79.602.300	69.537.500	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pribudhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Orang Terlanjar	40 orang	133.894.000	DINAS SOSIAL	
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.640.930.100	1.339.691.450	1.309.302.900					100 Persen	1.950.000.000		
1 6 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Datar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang dihabilitasi	persen	persen	100 persen	100 persen	86.064.000	78.466.100	68.536.600					100 persen	100.000.000		
1 6 4 2.01 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas yang di bantu dan dilayani			8 orang	9 orang	86.064.000	78.466.100	68.536.600	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang Di	9 orang	100.000.000	DINAS SOSIAL	
1 6 4 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang dihabilitasi	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang dihabilitasi	persen	persen	100 persen	100 persen	1.554.666.100	1.261.225.350	1.240.966.300					100 persen	1.850.000.000		
1 6 4 2.02 1	Pemberian Layanan Data dan Pengadaan	Jumlah pendamping PKH di tingkatan SD/nya			84 orang	82 orang	629.800.150	597.086.950	597.086.950	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang M	82 orang	750.000.000	DINAS SOSIAL	
1 6 4 2.02 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eki Penyandang Penyakit Sosial yang di layani			40 orang	20 orang	85.063.950	79.131.300	69.066.700	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang M	20 orang	100.000.000	DINAS SOSIAL	
1 6 4 2.02 13	Pemberian Layanan Rutukan	Jumlah anak dan lanjut usia yang di layani			340 orang	323 orang	840.000.000	585.006.900	574.812.650	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang M	323 orang	1.000.000.000	DINAS SOSIAL	
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	266.628.250	314.436.650	254.391.550					100 Persen	306.550.000		
1 6 5 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Fakir Miskin	persen	persen	100 persen	100 persen	266.628.250	314.436.650	254.391.550					100 Persen	306.550.000		
1 6 5 2.02 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KPM yang di tangani			7052 KPM	7052 KPM	136.243.000	171.574.600	136.474.500	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang M	7052 KPM	156.600.000	DINAS SOSIAL	
1 6 5 2.02 4	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS dan Kelompok Masyarakat yang di bantu			260 orang	260 orang	130.383.250	142.862.050	117.917.050	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyandang M	260 orang	149.950.000	DINAS SOSIAL	
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	288.466.000	261.752.800	251.688.000					100 Persen	331.735.000		
1 6 6 2.02	Penyenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	Persen	20 Kecamatan	100 Persen	288.466.000	261.752.800	251.688.000					100 Persen	331.735.000		
1 6 6 2.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taurus Stupa bencana	Jumlah kepanitia bencana alam yang di tangani			20 kecamatan	20 kecamatan	288.466.000	261.752.800	251.688.000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat yan	20 kecamatan	331.735.000	DINAS SOSIAL	
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM FAHLAWAN	Persentase Taman Makam Fahlawan yang terkelola	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	75.489.500	67.498.700	48.288.700					100 Persen	86.812.000		
1 6 7 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Fahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman makam Fahlawan yang terpelihara	Persen	Persen	1 TMP	100 Persen	75.489.500	67.498.700	48.288.700					100 Persen	86.812.000		
1 6 7 2.01 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara			1 TMP	1 TMP	75.489.500	67.498.700	48.288.700	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Hulu, Temblahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan tata kelola pemertintahan yang bersih dan baik	Taman Makam	1 TMP	86.812.000	DINAS SOSIAL	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.489.591.838	6.529.017.838	6.275.574.706						7.347.773.839		
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batas-batas nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	5.574.591.838	5.421.226.838	4.998.763.706					22 Nilai	5.928.091.839		
2 7 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	persen	persen	100 persen	100 persen	88.350.000	46.415.000	46.415.000					100 persen	100.000.000		
2 7 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			7 dokumen	7 dokumen	31.930.000	23.255.000	23.255.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor Disnaker	7 dokumen	35.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun			5 dokumen	16 Laporan	26.430.000	23.160.000	23.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor Disnaker	16 Laporan	45.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen	persen	100 persen	100 persen	4.469.591.838	4.469.591.838	3.822.148.706					100 persen	4.469.591.839		
2 7 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen	persen	100 persen	100 persen								100 persen			
2 7 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			32 orang	32 orang	4.469.591.838	4.469.591.838	3.822.148.706	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN di Disnaker	32 orang	4.469.591.839	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	perse	perse	100 perse	100 perse	370.735.000	352.945.000	459.890.600					100 perse	492.500.000		
2 7 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan			6 jenis	6 jenis	5.306.000	14.306.000	9.306.100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor Disnaker	6 jenis	7.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			2 jenis	2 jenis	13.550.000	13.550.000	13.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor Disnaker	2 jenis	35.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			8 jenis	8 jenis	43.000.000	47.000.000	47.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor Disnaker	8 jenis	65.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			2 jenis	2 jenis	16.304.000	22.659.000	29.930.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor Disnaker	2 jenis	25.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perlatan Penyandang-sandang	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			50 exemplar	40 exemplar	80.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kantor Disnaker	40 exemplar	30.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Tahun 2022			Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional								Daerah			
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan																
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	persen	persen	100 persen	100 persen	576.700.000	470.060.000	508.114.400						658.000.000			
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sanaat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			100 persen	100 persen	215.960.000	230.960.000	244.960.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 persen	250.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			3 rekening	3 rekening	139.440.000	30.080.000	36.080.000						3 rekening	150.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			13 orang	13 orang	221.400.000	199.160.000	207.214.400	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 orang	238.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	persen	persen	100 persen	100 persen	99.215.000	82.215.000	162.215.000						100 persen	208.000.000		
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			27 unit	27 unit	19.000.000	19.000.000	35.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27 unit	25.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			14 unit	14 unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 unit	15.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			53 unit	53 unit	15.965.000	23.965.000	57.965.000						53 unit	18.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			2 unit	2 unit	54.250.000	29.250.000	59.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 unit	150.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	165.000.000	291.170.000	391.170.000						100 Persen	374.684.000		
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	persen	persen	100 persen	100 persen	165.000.000	291.170.000	391.170.000						100 persen	374.684.000		
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kelempangan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi			5 orang	10 orang	124.684.000	274.684.000	274.684.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Insentif Daerah			0	10 orang	274.684.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyelenggaraan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kerjasama antar lembaga/ sektor swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja			6 kali	6 kali	40.316.000	16.486.000	116.486.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 kali	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan/persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	persen	persen	85 persen	85 persen	600.000.000	698.001.000	717.001.000						85 persen	710.000.000		
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Informasi Pasar kerja	persen	persen	100 persen	100 persen	600.000.000	698.001.000	717.001.000						100 persen	710.000.000		
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Cakupan Penyelesaian Perjanjian DTA	persen	persen	100 persen	100 persen	40.000.000	31.880.000	31.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 persen	150.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kompetensi Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terampil dalam Bentuk Kelompok Kerja			300 orang	300 orang	40.000.000	31.880.000	31.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 orang	150.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kompetensi Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terampil dalam Bentuk Kelompok Kerja			180 orang	210 orang	560.000.000	666.121.000	685.121.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				210 orang	560.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	150.000.000	118.620.000	168.620.000						100 Persen	335.000.000		
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	persen	persen	90 persen	90 persen	150.000.000	118.620.000	168.620.000						90 persen	335.000.000		
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ketetapan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir			10 kasus	10 kasus	40.000.000	32.880.000	52.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Perusahaan di I	10 kasus	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey KHL yang dilakukan			10 kali	2 kali	70.000.000	56.310.000	86.310.000	Semau Kab/ Kota, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Perusahaan di I	2 kali	135.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Jamsostek			100 persen	35485 orang	40.000.000	29.430.000	29.430.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Perusahaan di I	35485 orang	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						200.000.000	326.855.000	326.855.000						100 persen	300.000.000		
3	32				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi	persen	persen	100 persen	100 persen	133.400.000	278.215.000	278.215.000						100 persen	200.000.000		
3	32				Penataan Persebaran Penduduk yang Bersifat dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penempatan transmigrasi	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	133.400.000	278.215.000	278.215.000						1 dokumen	200.000.000		
3	32				1) Penyajian Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Secepat dan Transmigrasi	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi			1 laporan	1 laporan	32.845.000	23.260.000	23.260.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu					Warga Transmigrasi	1 laporan	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32				2) Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang Bersifat dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola			1 lokasi	1 lokasi	33.155.000	163.110.000	163.110.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Warga Transmigrasi	1 lokasi	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32				3) Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan			1 lokasi	1 lokasi	34.000.000	65.785.000	65.785.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Warga Transmigrasi	1 lokasi	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32				4) Penyediaan Lingkungan Baru Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina			225 orang	225 orang	33.400.000	26.060.000	26.060.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Warga Transmigrasi	225 orang	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	persen	persen	100 persen	100 persen	66.600.000	48.620.000	48.620.000						100 persen	100.000.000		
3	32				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	lokasi	lokasi	1 lokasi	1 lokasi	66.600.000	48.620.000	48.620.000						1 lokasi	100.000.000		
3	32				Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahannya			225 orang	225 orang	33.300.000	24.510.000	24.510.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Warga Transmigrasi	225 orang	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pemda										Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Tahun 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi						Nasional	Daerah											
3	32	4	2.01	2	Pengantar Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Remidiasi Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi				225 orang	225 orang	33.300.000	24.110.000	24.110.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Warga Transmigrasi	225 orang	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							8.762.663.838	8.891.828.372	8.891.828.372									9.361.353.430		
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen			100 Persen	100 Persen	6.579.916.238	6.529.898.918	6.557.446.452							100 Persen		6.850.171.430		
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persen			90 Persen	90 Persen	320.666.500	148.946.500	148.946.500							90 Persen		350.000.000		
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen			90 Persen	90 Persen				Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	SAKIP SKPD	11 Laporan	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen			100 Persen	100 Persen	4.451.591.838	4.451.591.838	4.570.594.372							100 Persen		4.674.171.430		
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang	38 Orang	4.451.591.838	4.451.591.838	4.570.594.372	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Sipil	38 Orang	4.674.171.430	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen			100 Persen	100 Persen	1.053.855.400	1.131.466.000	1.452.366.000								100 Persen		1.069.000.000	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5 Paket	2.824.200	2.824.200	2.824.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	DP2KBP/PA Kal	5 Paket	3.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peselatan dan Perleengkapan Kantor	Jumlah Paket Peselatan dan Perleengkapan Kantor yang Disediakan				7 Jenis	1 Paket	177.160.000	104.060.000	104.060.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	DP2KBP/PA Kal	1 Paket	180.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Jenis	1 Paket	37.629.000	31.637.680	31.637.680	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	DP2KBP/PA Kal	1 Paket	39.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				20 Jenis	1 Paket	38.207.200	38.207.200	42.027.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	DP2KBP/PA Kal	1 Paket	40.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				720 Eksemplar	1 Dokumen	136.000.000	496.000.000	777.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	DP2KBP/PA Kal	1 Dokumen	157.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104 Kali	104 Laporan	662.035.000	460.739.000	495.919.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	DP2KBP/PA Kal	104 Laporan	670.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen			100 Persen	100 Persen	403.325.500	394.952.500	394.952.500								100 Persen		405.000.000	
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surtal Menyurat	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen			100 Persen	100 Persen											100 Persen		5.000.000	
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9 Rekening	6 Laporan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	DP2KBP/PA Kal	6 Laporan	90.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Orang	12 Laporan	309.232.500	310.852.500	310.852.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	DP2KBP/PA Kal	12 Laporan	310.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	2.09		Penyelenggaraan Bazar Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen			100 Persen	100 Persen	344.470.000	200.940.000	190.940.000								100 Persen		352.000.000	
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34 Unit	34 Unit	90.400.000	55.400.000	70.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						DP2KBP/PA Kal	34 Unit	92.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.09	6	Penyelenggaraan Peselatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peselatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	20 Unit	45.000.000	45.000.000	20.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						DP2KBP/PA Kal	20 Unit	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.09	9	Penyelenggaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				2 Unit	3 Unit	209.070.000	100.540.000	100.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						DP2KBP/PA Kal	3 Unit	210.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Persen			50 Persen	50 Persen	705.000.000	705.000.000	780.000.000								50 Persen		824.250.000	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG dengan kategori baik	Persen			10 Persen	10 Persen	190.000.000	190.000.000	190.000.000								10 Persen		199.500.000	
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				380 CPD	380 Dokumen	190.000.000	190.000.000	190.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						OPD	380 Dokumen	199.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPLOUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen			68 Persen	68 Persen	135.000.000	135.000.000	135.000.000								68 Persen		141.750.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional					Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi												
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi PeningkatanPartisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40 Orang	1 Do	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan perubahan iklim dan daya saing daerah	OPD dan Mitra	1 Do	141.750.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	2	2.03		Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100 Persen	100 Persen	460.000.000	380.000.000	435.000.000				100 Persen	483.000.000			
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Lembaga	50 Orang	460.000.000	380.000.000	435.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SIM yang berminat dan berdaya saing	OPD dan Mitra	50 Orang	483.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevelesi Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	5 Persen	5 Persen	332.000.000	290.230.000	402.578.500				5 Persen	416.600.000			
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan Upaya Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	100 Persen	100 Persen	292.000.000	232.230.000	328.705.000				100 Persen	306.600.000			
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang	1 Orang	292.000.000	232.230.000	328.705.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SIM yang berminat dan berdaya saing	Perempuan Kev	1 Orang	306.600.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengidangan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 Persen	100 Persen	40.000.000	18.000.000	73.673.500				100 Persen	110.000.000			
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	6 Kasus	15 Orang	40.000.000	18.000.000	18.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan kerkonikan ketertarikan dan ketertiban	Perempuan Kev	15 Orang	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	10 Laporan		-	-	35.673.500				10 Laporan	60.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kualitas keluarga	100 Persen	100 Persen	240.000.000	161.968.000	161.968.000				100 Persen	252.000.000			
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pendampingan dalam peningkatan Kualitas Keluarga	100 Persen	100 Persen	90.000.000	47.800.000	47.800.000				100 Persen	94.500.000			
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengembangan Kualitas Keluarga	75 Persen	75 Persen	50.000.000	23.422.000	23.422.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD dan Mitra	1 Dokumen	32.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Kebijakan	1 Dokumen	40.000.000	24.468.000	24.468.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD dan Mitra	1 Dokumen	42.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	4	2.02		Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	100 Persen	100 Persen	150.000.000	114.078.000	114.078.000				100 Persen	157.500.000			
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan PeningkatanKualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Orang	3 Orang	150.000.000	114.078.000	114.078.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD dan Mitra	5 Orang	157.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	100 Persen	100 Persen	91.745.600	64.221.930	64.221.930				100 Persen	96.332.000			
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Dukungan Penyajian Data Gender dan Anak	100 Persen	100 Persen	91.745.600	64.221.930	64.221.930				100 Persen	96.332.000			
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pengolahan Data Gender dan Anak	100 Persen	100 Persen	91.745.600	64.221.930	64.221.930	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD dan Mitra	1 Dokumen	96.332.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHIA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	100 Persen	100 Persen	480.000.000	332.592.000	332.592.000				100 Persen	420.000.000			
2	8	6	2.02		Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 Persen	100 Persen	400.000.000	332.592.000	332.592.000				100 Persen	420.000.000			
2	8	6	2.02	4	Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengutan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Klaster	2 Dokumen	400.000.000	332.592.000	332.592.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Piblahkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Peningkatan kualitas SIM yang berminat dan berdaya saing	OPD dan Mitra	2 Dokumen	420.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSIS ANAK	Cakupan Pemenuhan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	100 Persen	100 Persen	340.000.000	247.770.000	592.421.500				100 Persen	502.000.000			
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	61.475.000	-	61.475.000				100 Persen	65.000.000			
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		-	-	61.475.000				1 Dokumen	65.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 Persen	100 Persen	340.000.000	247.770.000	454.140.500				100 Persen	557.000.000			
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Kasus	15 Orang	50.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Anak yang men	15 Orang	52.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	180 Orang	25 Layanan	290.000.000	222.770.000	429.140.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SIM yang berminat dan berdaya saing	Anak yang men	25 Layanan	304.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPTMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022										
2	8	7	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	Persen	100 Persen	-	-	76.806.000					100 Persen	80.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7	2.03	2	Kewilnasan dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota		2 Dokumen	-	-	76.806.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang berliman dan berdaya saing	Stakholder dan	2 Dokumen	80.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				908.930.000	608.441.000	7.073.888.800						5.632.376.000		
2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kebijakan	Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	138.930.000	124.671.000	275.046.000				1 Kebijakan	324.876.000	
2	14	2	2.01	Pesnaaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Mitra dalam Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Program KKRPK	Mitra	Mitra	2 Mitra	2 Mitra	158.930.000	124.671.000	124.671.000				2 Mitra	166.876.000	
2	14	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKRPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan/Pengembangan Daerah Kabupaten/ Kota Program Berbagi Rencana (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1 Kebijakan	1 Dokumen	118.930.000	98.247.500	98.247.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD dan Mitra	1 Dokumen	124.876.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	2	2.01	6	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal		5 Sekolah	1 Dokumen	40.000.000	26.425.500	26.425.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD dan Mitra	1 Dokumen	42.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	2	2.02	Pemetaan Pekerjaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Data Pengendalian Penduduk	Persen	Persen	100 Persen	-	-	150.375.000					100 Persen	158.000.000	
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah bahan data dan Informasi Keluarga		4635 Eksemplar	-	-	23.175.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang berliman dan berdaya saing	OPD dan Mitra	4635 Eksemplar	30.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		60 Dokumen	-	-	127.200.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang berliman dan berdaya saing	OPD dan Mitra	60 Dokumen	128.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persen	Persen	50 Persen	460.000.000	310.770.000	3.447.727.800					50 Persen	1.805.500.000	
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Persen	Persen	100 Persen	-	1.014.640.000						480.000.000	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKRPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan yang mendapatkan Advokasi Program Berbagi Rencana kepada Stakeholder dan Mitra Kerja		1 Organisasi	-	-	20.640.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Masyarakat, CP	1 Organisasi	25.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKRPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Berbagi Rencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		1 Dokumen	-	-	25.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang berliman dan berdaya saing	Masyarakat, CP	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKRPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi KIE Program Berbagi Rencana melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		2 Dokumen	-	-	50.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang berliman dan berdaya saing	Masyarakat, CP	2 Dokumen	55.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKRPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakoeram), Rapat Koordinasi Desa (Rakodes), dan Mini Lokakarya (Minslok)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKRPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakoeram), Rapat Koordinasi Desa (Rakodes), dan Mini Lokakarya (Minslok)		60 Laporan	-	-	312.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang berliman dan berdaya saing	Masyarakat, CP	60 Laporan	320.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKRPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Berbagi Rencana		300 Laporan	-	-	567.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang berliman dan berdaya saing	Masyarakat, CP	300 Laporan	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKRPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKRPK		2 Laporan	-	-	40.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan kualitas SDM yang berliman dan berdaya saing	Masyarakat, CP	2 Laporan	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pendayagunaan bagi Tenaga Lini Lapangan	Persen	Persen	100 Persen	150.000.000	111.090.000	1.248.265.000					100 Persen	110.000.000	
2	14	3	2.02	4	Pengangkatan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Pengangkatan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		50 Orang	235 Orang	150.000.000	111.090.000	1.248.265.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Petugas Lapangan	235 Orang	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Faskes KB)	fasilitas Kesehatan	fasilitas Kesehatan	fasilitas Kesehatan	210.000.000	120.680.000	760.822.800					38 Fasilitas Kesehatan	785.500.000	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		114 Laporan	-	-	17.100.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PUS, WUS dan	114 Laporan	20.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		3 Lokasi	100 Orang	70.000.000	42.000.000	179.643.800	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PUS, WUS dan	100 Orang	73.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		19 Unit	-	-	470.999.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	PUS, WUS dan	19 Unit	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPKMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKP2022	APBD 2022	RKP2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	Nasional	Daerah														
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60 Laporan	-	-	14.400.000			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			PUS, WUS dan	60 Laporan	18.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	5 Sekolah	20 Orang	50.000.000	26.680.000			26.680.000	Kab. Indragiri Hilir, Summa Kecamatan, Summa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PUS, WUS dan	20 Orang	32.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	50 Orang	1 Laporan	90.000.000	30.000.000	30.000.000			Kab. Indragiri Hilir, Summa Kecamatan, Summa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PUS, WUS dan	1 Laporan	94.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Per	50 Per	50 Per	100.000.000	79.000.000	424.000.000							50 Per	460.000.000			
2	14	3	2.04	1	Penggiatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penggiatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	3 Organisasi	2 Organisasi	100.000.000	79.000.000	79.000.000			Kab. Indragiri Hilir, Summa Kecamatan, Summa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryaya saing	Stakholder dan	2 Organisasi	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3	2.04	3	Polaksanaan dan Pengelolaan Program KKRPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Butang Rencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	14 Laporan	-	-	345.000.000				Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryaya saing	Stakholder dan	14 Laporan	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (PS)	Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	65 Persen	290.000.000	173.000.000	5.351.115.000									65 Persen	3.502.000.000		
2	14	4	2.01		Polaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pembinaan Anggota Kelompok Kegiatan	Persen	100 Persen	170.000.000	100.000.000	3.287.115.000									100 Persen	3.376.000.000		
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok, Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BK, BK, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan	20 Unit	-	-	330.000.000				Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				Kader dan Ang	20 Unit	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BK, BK, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis/elaksana/Kader ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BK, BK, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Orang	40 Orang	170.000.000	109.000.000	82.335.000			Kab. Indragiri Hilir, Summa Kecamatan, Summa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryaya saing	Kader dan Ang	40 Orang	126.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BK, BK, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Operasional Tenaga Pendamping Kelompok Kegiatan	34040 Kali	-	-	2.874.760.000				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Kader dan Ang	34040 Kali	2.900.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	4	2.02		Polaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	63,46 Persen	63,46 Persen	120.000.000	64.000.000	64.000.000								63,46 Persen	126.000.000		
2	14	4	2.02	3	Polaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BK, BK, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BK, BK, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	2 Organisasi	120.000.000	64.000.000	64.000.000			Kab. Indragiri Hilir, Summa Kecamatan, Summa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubkarsam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan beryaya saing	Kader dan Kolo	2 Organisasi	126.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.629.432.118	15.226.657.463	14.999.203.569									17.401.483.719		
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	6.575.264.543	6.426.991.678	5.844.538.094							22 Nilai	6.617.288.118		
2	11	1	2.01		Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90 Persen	90 Persen	89.101.300	88.101.300	99.737.300			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				OPD	11 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	89.101.300	88.101.300	99.737.300			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				OPD	11 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100 Persen	100 Persen	4.914.088.118	4.914.088.118	4.246.558.218			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN Kantor D1	38 Orang	4.914.088.118	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	40 Orang	38 Orang	4.914.088.118	4.914.088.118	4.246.558.218			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN Kantor D1	38 Orang	4.914.088.118	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100 Persen	100 Persen	229.200.000	230.042.400	230.042.400			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Persen	229.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	13 Orang	13 Orang	229.200.000	230.042.400	230.042.400			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Barang Milik D	13 Orang	229.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen	100 Persen	100 Persen	775.572.950	643.108.285	658.473.401			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Persen	774.000.000		
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	5 Jenis	3 Jenis	15.000.000	15.000.000				Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Sarana dan Pra	5 Jenis	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	150.839.450	123.942.783	130.942.901			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Sarana dan Pra	9 Jenis	160.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	60.000.000	60.000.000	70.000.000			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Sarana dan Pra	4 Jenis	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaian yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	21.312.500	21.312.500	22.312.500			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Sarana dan Pra	6 Jenis	22.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peranuran Petandang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	7 Eksemplar	7 Eksemplar	61.160.000	61.160.000	11.160.000			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Sarana dan Pra	7 Eksemplar	12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	118 Kali	84 Kali	467.261.000	361.693.000	419.058.000			Summa Kaly/Kota, Summa Kecamatan, Summa Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Sarana dan Pra	84 Kali	495.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	446.167.000	446.516.600	450.661.600			Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Persen	455.000.000		
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surtir Menyurat	Cakupan Keteselesaian Kebutuhan Surat Menyurat	100 Persen	100 Persen	7.000.000	7.000.000				Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				OPD DLIR	100 Persen	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional					Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi												
2	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	820.000.000	70.000.000	70.000.000	Semas Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Sa	2 Kali	111.671.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di TPA/TPS/SP/A Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang disediakan/dipelihara	30 Jenis	30 Jenis	2.431.683.600	2.175.115.600	2.700.115.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perencanaan Sa	30 Jenis	2.552.479.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			10.592.108.390	10.007.796.390	10.168.639.179							10.811.828.390			
2	12	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	9.829.499.000	9.239.988.000	9.420.840.879				22 Nilai	10.070.712.390			
2	12	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	90 Persen	90 Persen	80.880.000	20.880.000	18.480.000				90 Persen	85.000.000			
2	12	1	2.01	Keefektifan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	80.880.000	20.880.000	18.480.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Laporan Kinerja	7 Dokumen	80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji ASN	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6.236.108.390	6.236.108.390	5.869.131.950				1 Tahun	6.236.108.390			
2	12	1	2.02	1	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen				
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	45 Orang	45 Orang	6.236.108.390	6.236.108.390	5.869.131.950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Disduk, dan	45 Orang	6.236.108.390	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100 Persen	100 Persen	1.392.699.700	1.343.240.700	1.873.469.929				100 Persen	1.462.904.000			
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpelihara dengan baik	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	9.826.750	9.826.750	9.826.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Disduk dan Per	5 Jenis	10.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	11 Jenis	743.900.000	863.511.000	1.091.641.229	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Disduk dan Per	11 Jenis	781.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	65.480.000	63.640.000	63.640.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Disduk dan Per	4 Jenis	68.754.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	22.999.000	22.981.000	72.981.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Disduk dan Per	2 Jenis	24.150.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratun Penunjang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	24 Eksemplar	24 Eksemplar	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Disduk dan Per	24 Eksemplar	3.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	99 Kali	110 Kali	546.854.000	379.682.000	631.782.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Disduk dan Per	110 Kali	574.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketertarikan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	90 Persen	90 Persen	1.428.591.000	1.596.759.000	1.596.759.000				90 Persen	1.582.100.000		
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Jasa Sani Menyurat	Cakupan ketertarikan kebersihan surat menyurat	90 Persen	90 Persen	6.000.000	6.000.000	8.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Disduk dan Per	90 Persen	6.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Rekening	4 Rekening	129.080.000	124.080.000	127.680.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Disduk dan Per	4 Rekening	138.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	93 Orang	93 Orang	1.294.511.000	1.465.679.000	1.460.039.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Disduk dan Per	93 Orang	1.360.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	90 Persen	90 Persen	394.380.000	64.000.000	64.000.000				90 Persen	414.200.000		
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai, dan Perawatan Kearsnaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara	22 Unit	22 Unit	34.000.000	34.000.000	34.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sarana dan Prs	22 Unit	35.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sarana dan Prs	50 Unit	31.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,75 Rasio	0,75 Rasio	402.790.000	432.420.000	432.420.000				0,75 Rasio	422.950.000			
2	12	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terlayani Sesuai SOP	Persen	90 Persen	90 Persen	188.750.000	238.380.000	238.380.000				90 Persen	198.188.000			
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan yang di terbitkan dokumen kependudukan	75 Jiwa	75 Jiwa	49.800.000	60.500.000	60.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kab	75 Jiwa	52.290.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak yang di terbitkan	3400 Kepping	3400 Kepping	89.300.000	117.180.000	117.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kab	3400 Kepping	93.760.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	2800 Lembar	2800 Lembar	2800 Kepping	2800 Kepping	2800 Kepping					2800 Kepping			
2	12	2	2.01	6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah SKP/SKD WNI yang di terbitkan	2400 Berkas	2400 Berkas	49.650.000	60.700.000	60.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kab	2400 Berkas	52.133.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.02		Pematan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	90 Persen	90 Persen	214.040.000	214.040.000	214.040.000				90 Persen	224.742.000		
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko KIA yang diadakan	3600 Kepping	3600 Kepping	214.040.000	214.040.000	214.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungailireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kab	3600 Kepping	224.742.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	90 Persen	90 Persen	69.975.000	89.385.000	89.385.000				90 Persen	73.473.000			
2	12	3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Aktif Kelahiran	Lembar	400 Lembar	400 Lembar	69.975.000	89.385.000	89.385.000				400 Lembar	73.473.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2022			Tahun 2023				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2.12.3.2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	4000 Dokumen	4000 Dokumen	69.975.000	89.385.000	89.385.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kab.	4000 Dokumen	73.473.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.4	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	289.844.300	205.993.300	205.993.300				90 Persen	304.713.000			
2.12.4.2.01	2	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemantauan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan	PKS	PKS	7 PKS	7 PKS	14.000.000	14.000.000	14.000.000				7 PKS	15.000.000			
2.12.4.2.01	2	Kerjasama Pemantauan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemantauan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan			7 PKS	7 PKS	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD di Kabupa	7 PKS	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.4.2.02	2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jenis pelayanan kependudukan yang menggunakan IT	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	96.570.000	60.115.000	60.115.000				100 Persen	101.400.000			
2.12.4.2.02	1	Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi tentang administrasi kependudukan			20 Kecamatan	20 Kecamatan	96.570.000	60.115.000	60.115.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Kota		Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	20 Kecamatan d	20 Kecamatan	101.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.4.2.03	2	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	179.274.300	131.878.300	131.878.300				90 Persen	188.313.000			
2.12.4.2.03	4	Penyenggaraan Pemantauan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang memantapkan data kependudukan			5 OPD	5 OPD	26.828.300	26.828.300	26.828.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD dan Perda	5 OPD	38.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.4.2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pendahul yang mendapatkan informasi administrasi kependudukan			3000 jiwa	3000 jiwa	39.250.000	21.250.000	21.250.000				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD dan Perda	3000 jiwa	41.213.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.4.2.03	8	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah buku mengenai data kependudukan yang dipublikasikan			110 Buku	110 Buku	103.800.000	83.800.000	83.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD dan Perda	110 Buku	109.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA				27.816.073.987	21.166.287.737	22.166.023.977								21.676.679.307		
2.13.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	5.606.587.507	4.968.229.307	4.991.033.597				100 Persen	5.111.241.207			
			Rencana nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP/Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai								22 Nilai			
2.13.1.2.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	65.750.000	59.900.000	70.043.000				90 Persen	50.000.000			
			Persentase Pemecanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen							90 Persen				
2.13.1.2.01	1	Penyusunan Dokumen Pemecanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemecanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	8 Dokumen	65.750.000	59.900.000	70.043.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	8 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.530.146.307	3.530.146.307	3.485.882.597				100 Persen	3.530.146.307			
2.13.1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			29 Orang	31 Orang	3.530.146.307	3.530.146.307	3.485.882.597	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	31 Orang	3.530.146.307	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.228.995.200	603.176.200	716.301.200				100 Persen	854.344.467			
2.13.1.2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan			6 Jenis	6 Jenis	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	6 Jenis	10.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			7 Jenis	7 Jenis	91.821.200	91.821.200	91.821.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	7 Jenis	101.250.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			4 Jenis	4 Jenis	44.375.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	4 Jenis	7.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			8 Jenis	8 Jenis	18.960.000	17.910.000	24.910.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	8 Jenis	50.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peranun Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan			240 Eksemplar	260 Eksemplar	429.800.000	91.560.000	139.560.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	260 Eksemplar	15.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			205 Kali	241 Kali	634.239.000	567.285.000	425.410.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	241 Kali	670.944.467	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.08	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	602.486.000	626.226.800	592.026.800				100 Persen	401.850.433			
2.13.1.2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat			100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	100 Persen	5.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			48 Rekening	48 Rekening	95.540.000	78.300.000	78.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	48 Rekening	96.850.433	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan			41 Orang	37 Orang	503.946.000	542.926.800	508.726.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	37 Orang	300.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.09	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	148.780.000	148.780.000	126.780.000				100 Persen	225.000.000			
2.13.1.2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pesewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			8 Unit	8 Unit	101.200.000	101.200.000	109.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	8 Unit	100.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.1.2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6 Unit	6 Unit	47.580.000	47.580.000	17.580.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	6 Unit	25.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.2		PROGRAM PENATAAN DESA																
2.13.2.2.01	2.01	Penyenggaraan Pemantauan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	4.816.082.580	4.590.089.580	4.590.089.530				90 Persen	1.100.000.000			
2.13.2.2.01	2	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Validasi Data Basis Desa			50 Desa	50 Desa	3.338.612.580	3.213.904.580	3.213.904.530	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		197 Desa	50 Desa	1.000.000.000	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional			Daerah					
2	13	2	2.01	6	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Lokasi Kegiatan Pelaksanaan TMMD	2 Desa	2 Desa	1.477.470.000	1.376.185.000	1.376.185.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197 Desa	2 Desa	1.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	14.702.983.750	10.307.283.600			75 Persen	13.266.483.000			
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi Baik	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	14.702.983.750	10.307.283.600			75 Persen	13.266.483.000			
2	13	4	2.01	1	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Jumlah Perangkat Desa yang Mendapatkan Pembinaan	50 Orang	50 Orang	502.466.500	99.980.000	99.980.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197 Desa	50 Orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	4	2.01	4	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Teridentifikasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis-Sistem Informatasi	73 Orang	73 Orang	443.830.000	278.910.000	278.910.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197 Desa	73 Orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang Mendapatkan Pembinaan	25 Orang	25 Orang	350.000.000	179.000.000	179.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197 Desa	25 Orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	4	2.01	6	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Kecamatan yang Dilakui	20 Kecamatan	0 Kecamatan	66.920.000	49.193.500	4.723.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197 Desa	0 Kecamatan	71.185.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa	36 Desa	36 Desa	17.870.000	17.870.000	17.870.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197 Desa	36 Desa	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang Aktif membangun Desa	48 BUMDes	48 BUMDes	1.222.038.750	429.343.900	429.343.900	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197 Desa	48 BUMDes	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	4	2.01	11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang telah Melakukan Pendataan dan Penyediaan Profil Desa/Kelurahan	58 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	342.895.430	80.740.000	80.740.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	197 Desa	58 Desa/Kelurahan	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	4	2.01	12	Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pemandangan Program Desa Maja Inhil Jaya Plus Terintegrasi	230 Orang	230 Orang	11.048.649.000	9.163.746.250	10.197.048.250	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197 Desa	230 Orang	10.728.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	2.492.902.500	1.299.185.200			90 Persen	2.000.000.000			
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berbagi di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Terluasnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	2.492.902.500	1.299.185.200			90 Persen	2.000.000.000			
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan yang dibina	8 Lembaga	8 Lembaga	1.075.197.000	994.533.250	583.633.250	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 LAD	8 Lembaga	750.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
						Jumlah Lembaga Adat dan Sosial Budaya yang dibina	30 LAD	30 LAD							30 LAD				
						Jumlah PKK yang dibina dan berjalannya 10 Program Pokok PKK	55 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan							55 Desa/Kelurahan				
2	13	5	2.01	5	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomis Masyarakat dan Pementah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang memiliki Produk Hasil Desa dalam Menunjang PAD	55 Desa	55 Desa	290.050.300	134.444.950	134.444.950	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 LAD	55 Desa	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	2.01	6	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemantauan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat yang ditampikan dalam Gelar TTG	7 Alat	7 Alat	218.000.000	104.208.000	104.208.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 LAD	7 Alat	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	2.01	9	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang dibina dan berjalannya 10 Program Pokok PKK	55 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	909.635.000	675.999.000	675.999.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 LAD	55 Desa/Kelurahan	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	18.416.165.459	14.151.077.109			22 Nilai	41.011.925.459			
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	152.304.750	105.935.000			90 Persen	352.068.750			
						Presentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen					90 Persen				
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	152.304.750	105.935.000	96.205.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Hulu, Temblahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Pelaj	8 Laporan	352.068.750	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	6.070.423.559	6.070.423.559			100 Persen	13.079.423.559			
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	60 Orang	60 Orang	6.082.544.599	6.082.544.599	5.642.714.157	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Hulu, Temblahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gaji dan Tunjangan	60 Orang	13.082.544.599	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	7.879.000	7.879.000	19.679.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Hulu, Temblahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gaji dan Tunjangan	1 Laporan	15.879.000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	141.320.000	98.850.000			100 Persen	341.320.000			
2	15	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata	2929 Unit	1600 Unit	141.320.000	98.850.000	40.795.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penataan Manu	1600 Unit	341.320.000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.088.941.100	793.961.250			100 Persen	2.593.941.100			
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	45 Jenis	6 Jenis	212.463.100	135.773.350	152.703.350	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Hulu, Temblahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana prasarana	6 Jenis	512.463.100	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	6 Jenis	113.576.000	80.804.900	108.490.100	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Hulu, Temblahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana prasarana	6 Jenis	313.576.000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	26 Jenis	25 Jenis	127.430.000	92.960.000	97.485.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Hulu, Temblahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana prasarana	25 Jenis	327.430.000	DINAS PERHUBUNGAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Praktikan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelempok Sasaran			Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				Target	Pagu Indikatif	
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan			2 Diklat	2 Diklat	13.316.000		14.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD Diskominfo	2 Diklat	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan	Jenis	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	590.639.550	670.852.460	748.523.460					3 Jenis	789.895.000	
					Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Person	Person	100 Person	100 Person									100 Person		
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan			3 Jenis	3 Jenis	6.265.300	4.385.710	4.385.710	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Diskominfo	3 Jenis	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			27 Jenis	27 Jenis	184.981.250	208.512.250	203.102.250	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Diskominfo	27 Jenis	110.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
					Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				35 Jenis	35 Jenis								35 Jenis		
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1 Jenis	1 Jenis	74.471.000	88.211.000	60.101.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Diskominfo	1 Jenis	39.880.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
					Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis								3 Jenis		
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			6 jenis	6 jenis	20.015.000	18.015.500	18.015.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Diskominfo	6 jenis	20.015.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perantun Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan			350 Eksemplar	350 Eksemplar	35.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Diskominfo	350 Eksemplar	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			100 Kali	100 Kali	269.907.000	356.728.000	437.919.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Diskominfo	100 Kali	580.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	Person	Person	20 Person	20 Person	1.900.833.450	2.276.020.250	2.128.067.877					20 Person	2.424.393.450	
					Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Person	Person	100 Person	100 Person									100 Person		
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			20 Person	20 Person	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	OPD Diskominfo	20 Person	2.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			4 Rekening	2 Rekening	476.440.000	896.130.000	745.177.627	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	OPD Diskominfo	2 Rekening	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			4 Orang	4 Orang	1.421.893.450	1.377.390.250	1.377.390.250	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	OPD Diskominfo	4 Orang	1.421.893.450	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
					Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				84 Orang	84 Orang								84 Orang		
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/dinhabilitasi	Unit	Unit	3 Unit	3 Unit	87.100.000	68.514.800	69.467.173					3 Unit	46.600.000	
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jmlh Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			3 Unit	3 Unit	31.600.000	29.664.800	29.664.800	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Diskominfo	3 Unit	31.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
					Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				3 Unit	3 Unit								3 Unit		
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/dinhabilitasi			100 Unit	100 Unit	55.500.000	38.850.000	39.802.373	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Diskominfo	100 Unit	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Person	Person	65 Person	65 Person	7.075.334.000	6.663.224.000	8.238.844.000					65 Person	7.922.149.000	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan	Person	Person	100 Person	100 Person	7.075.334.000	6.663.224.000	8.238.844.000					100 Person	7.922.149.000	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat, Profil Desa dan Talkshow yang dipublikasikan			34 Publikasi	43 Publikasi	99.990.000	30.790.000	20.790.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Jurnal - Mas	43 Publikasi	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama yang dikelola Melalui Media Cetak, Online dan TV			80 Kontrak Kerjasama	Kontrak Kerjasama	6.277.610.000	6.169.700.000	7.392.320.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Jurnal - Mas	83 Kontrak Kerjasama	7.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Penyediaan Informasi Publik yang dikelola dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik			20 Plyn InformasiPub	Plyn InformasiPub	70.585.000	70.585.000	70.585.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Jurnal - Mas	20 Plyn InformasiPub	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komitmen Komunitas	Jumlah Saluran Informasi Pemerintah yang dikelola berupa TV, Radio, Website dan Facebook, Aplikasi Iltas			5 JnsSaluraninform	Saluraninform	622.149.000	372.149.000	372.149.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Jurnal - Mas	5 JnsSaluraninform	622.149.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terpenuhiya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Person	Person	90 Person	90 Person	892.230.000	867.320.000	1.067.320.000					90 Person	1.309.220.000	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Diletakkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah Sub Domain lingkup penda yang dikelola	Person	Person	90 Person	90 Person	133.000.000	115.510.000	115.510.000					90 Person	250.000.000	
2	16	3	2.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama/Sub Domain yang didaftarkan			30 OPD/Perangkat D	30/Perangkat D	70.000.000	36.550.000	256.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 OPD	30/Perangkat D	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	3	2.01	2	Pemutakhiran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang ditatahsaskan dan diawasi Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			30 Perangkat Dae	Perangkat Dae	63.000.000	38.960.000	38.960.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 OPD	30 Perangkat Dae	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi	Person	Person	90 Person	90 Person	799.230.000	791.810.000	791.810.000					90 Person	1.099.220.000	
2	16	3	2.02	1	Pemutakhiran dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Memerapkan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			9 Perangkat Dae	Perangkat Dae	132.000.000	223.000.000	223.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	34 OPD	9 Perangkat Dae	132.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola			11 Unit	11 Unit	63.666.000	51.666.000	51.666.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	34 OPD	11 Unit	130.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Arus Bisnis yang dikembangkan			2 Aplikasi	2 Aplikasi	277.220.000	227.220.000	227.220.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	34 OPD	2 Aplikasi	277.220.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Infrastruktur TIK-nya dikembangkan dan dikelola			34 Perangkat Dae	Perangkat Dae	86.344.000	49.924.000	49.924.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	34 OPD	34 Perangkat Dae	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022			RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah		
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah SIM yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek TIK	4 Orang	4 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Perekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	54 OPD	4 Orang	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			100.000.000	95.000.000	295.000.000						200.000.000			
2	20	2			PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dan statistik yang terintegrasi	Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000	95.000.000					100 Persen	200.000.000		
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000	95.000.000					100 Persen	200.000.000		
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan		55 Data	55 Data	100.000.000	95.000.000	295.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 OPD	55 Data	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100.000.000	90.000.000	90.000.000						200.000.000			
2	21	2			PROGRAM PENYELANGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	Persen	30 Persen	30 Persen	100.000.000	90.000.000	90.000.000				30 Persen	200.000.000		
2	21	2	2.01		Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem persandian	Persen	30 Persen	30 Persen	100.000.000	90.000.000	90.000.000				30 Persen	200.000.000		
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Informasi yang diamankan		2 Sistem Informa	2 Sistem Informa	100.000.000	90.000.000	90.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Perekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 OPD	2 Sistem Informasi	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				10.443.340.363	9.533.585.313	9.948.676.900						12.302.705.893		
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	Persen	100 Persen	100 Persen	6.960.807.813	7.062.182.063	7.738.437.063				100 Persen	7.227.517.093		
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen	100 Persen	100 Persen	5.122.740.363	5.122.740.363	4.983.545.363				100 Persen	5.122.740.363		
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen	30 Orang	27 Orang	5.122.740.363	5.122.740.363	4.983.545.363	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	30 ASN	27 Orang	5.122.740.363	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelikara	Persen	100 Persen	100 Persen	48.000.000	48.000.000	48.000.000				100 Persen	57.600.000		
2	17	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan		4 Orang	4 Orang	48.000.000	48.259.200	48.259.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD	4 Orang	57.600.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100 persen	100 persen	1.288.061.450	1.470.486.900	2.290.636.900				100 persen	1.451.520.490		
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		50 Jenis	50 Jenis	92.999.550	14.059.000	23.189.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD	50 Jenis	153.080.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		2 Jenis	2 Jenis	67.691.650	64.291.650	64.291.650	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD	2 Jenis	92.754.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		8 Jenis	8 Jenis	115.333.250	115.333.250	120.603.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD	8 Jenis	120.333.250	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Media Online yang disediakan		12 Eksemplar	12 Eksemplar	482.080.000	886.980.000	1.676.080.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD	12 Eksemplar	490.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bahan bacaan dan Media Online yang disediakan		17 Media Online									17 Media Online		
2	17	1	2.06	9	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			348 Kali	348 Kali	529.957.000	389.823.000	406.473.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD	348 Kali	595.353.240	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	100 Persen	100 Persen	358.800.000	360.225.600	355.725.600				100 Persen	411.803.200		
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan kebutuhan Surat Menyurat		100 Persen	100 Persen	2.540.000	2.540.000	2.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	100 Persen	2.743.200	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		3 Rekening	3 Rekening	91.540.000	91.540.000	99.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	3 Rekening	91.540.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan		22 Orang	22 Orang	264.720.000	266.145.600	254.145.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	22 Orang	317.520.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Bazang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	60.470.000	60.470.000	60.470.000				100 Persen	94.853.040		
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan/Operasional/ Lapangan yang dipelihara yang dipelihara dan dipanjang perizinanya (Roda 4 dan Roda 2)		28 Unit	28 Unit	41.120.000	41.120.000	41.120.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Sarana dan Pr	28 Unit	45.569.500	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		37 Unit	37 Unit	10.600.000	10.600.000	10.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Sarana dan Pr	37 Unit	19.421.540	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		17 Unit	17 Unit	8.750.000	8.750.000	8.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Sarana dan Pr	17 Unit	29.862.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase kopersi aktif	Persen	90 Persen	90 Persen	125.000.000	57.400.000	57.400.000				90 Persen	444.000.000		
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Di Move	Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	125.000.000	57.400.000	57.400.000				40 Koperasi	444.000.000		
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Keputahan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Keewangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi		30 Koperasi	30 Koperasi	65.000.000	57.400.000	57.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Koperasi	30 Koperasi	215.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP kopersi Sehat	Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	138.750.000	117.747.200	117.747.200				40 Koperasi	419.850.000		
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Dilakukan Penilaian	Persen	90 Persen	90 Persen	138.750.000	117.747.200	117.747.200				90 Persen	419.850.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir RPKMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Praktikan Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah		
2.17.4.2.01.1	Pelaksanaan Pemilahan Kesehatan KSP/USP Kopresi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kopresi Simpan Pinjam yang dimulai				60 Kopresi	60 Kopresi	70.500.000	54.106.200		54.106.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Kopresi	60 Kopresi	238.140.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.4.2.01.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Kopresi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kopresi yang mendapat penghargaan melalui pelaksanaan RAT tepat waktu				10 Kopresi	10 Kopresi	68.250.000	63.641.000		63.641.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Kopresi	10 Kopresi	181.710.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.5	PROGRAM PENYIANG DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Kopresi Yang Berdaya Saing	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	247.800.000	89.807.000	89.807.000	89.807.000						90 Kopresi	90 Kopresi	480.500.000		
2.17.5.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kopresi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kopresi yang Memiliki Kompetensi	Kopresi	Kopresi	90 Kopresi	90 Kopresi	247.800.000	89.807.000	89.807.000	89.807.000						90 Kopresi	90 Kopresi	480.500.000		
2.17.5.2.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Kopresi	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Perkoperasian				30 Orang	30 Orang	247.000.000	89.807.000		89.807.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90 Kopresi	30 Orang	480.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM aktif	Kali, Kelompok	Kali, Kelompok	90 Kali, Kelompok	90 Kali, Kelompok	1.717.471.550	1.417.408.050	1.201.444.717							90 Kali, Kelompok	90 Kali, Kelompok	2.261.458.800		
2.17.7.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemahiran, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Wirasaha Baru Yang Mandiri	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	1.717.471.550	1.417.408.050	1.201.444.717							90 Persen	90 Persen	2.261.458.800		
2.17.7.2.01.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem OOS				500 Usaha Mikro	500 Usaha Mikro	140.593.050	125.642.050		25.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			7500 UMKM	500 Usaha Mikro	408.100.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.7.2.01.2	Pemberdayaan melalui Kemahiran Usaha Mikro	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemodal melalui KUR dan Jumlah Usaha Mikro yang bermitra				30 Orang	30 Orang	36.000.000	27.403.500		27.403.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			7500 UMKM	30 Orang	170.660.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.7.2.01.3	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi P-IRI dan Halal				60 Orang	60 Orang	133.513.500	107.130.500		107.130.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			7500 UMKM	60 Orang	154.102.800	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.7.2.01.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dan Kelompok UMKM yang di Fasilitas				14 UMKM	14 UMKM	1.252.639.000	1.098.459.000		975.459.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			7500 UMKM	14 UMKM	1.352.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Dokumen Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dan Kelompok UMKM yang di Fasilitas				50 Dokumen	40 Dokumen										40 Dokumen			
2.17.7.2.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan				10 Dokumen	10 Dokumen	154.726.000	86.973.000		66.051.717	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			7500 UMKM	10 Dokumen	176.596.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset UMKM	Persen	Persen	2 Persen	2 Persen	1.155.811.000	788.641.000	743.641.000							2 Persen	2 Persen	1.255.000.000		
2.17.8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen	Persen	1 Persen	1 Persen	1.155.811.000	788.641.000	743.641.000							1 Persen	1 Persen	1.255.000.000		
2.17.8.2.01.1	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, Pemasaran, SEM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok Usaha Mikro yang di fasilitas				19 kelompok UKM	13 kelompok UKM	1.155.811.000	788.641.000		743.641.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5315 Usaha Mikro	13 kelompok UKM	1.255.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.18.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
2.18.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AKIP Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	12.521.231.264	12.089.981.724	11.594.030.004								22 Nilai	22 Nilai	12.327.986.264	
2.18.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	40.775.750	37.850.000			97.150.000					100 Persen	100 Persen	40.775.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				71 Dokumen	10 Dokumen	40.775.750	37.850.000		97.150.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	10 Dokumen	40.775.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	4.655.924.264	4.692.052.866			5.034.643.267					100 Persen	100 Persen	4.655.924.264		
2.18.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				35 Orang	35 Orang	4.655.924.264	4.692.052.866		5.034.643.267	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	35 Orang	4.655.924.264	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	16.500.000	11.000.000			27.126.000					100 Persen	100 Persen	16.500.000		
2.18.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				2 Diklat	2 Diklat	16.500.000	11.000.000		27.126.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	2 Diklat	16.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	5.894.584.093	5.125.891.900			4.072.602.829					100 Persen	100 Persen	5.894.584.093		
2.18.1.2.06.2	Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				47 jenis	48 jenis	5.170.099.193	4.679.390.500		5.329.646.700	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	48 jenis	5.170.099.193	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				10 jenis	10 jenis	56.455.000	45.327.500		77.951.728	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	10 jenis	56.455.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan				5 jenis	5 jenis	16.650.000	12.000.000		12.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	5 jenis	16.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				121 Kali	162 Kali	651.179.900	589.173.900		653.004.480	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	162 Kali	651.179.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	556.900.000	576.409.001			562.209.001					100 Persen	100 Persen	556.900.000		
2.18.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	100 Persen	4.500.000	3.600.000		3.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	100 Persen	4.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				9 Rekening	9 Rekening	54.600.000	69.049.801		69.049.801	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	9 Rekening	54.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah branggo pelaksana yang dibayarkan				37 Orang	37 Orang	497.800.000	503.759.200		489.559.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman	37 Orang	497.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihata dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	78.266.007	78.266.007			99.266.007					100 Persen	100 Persen	78.266.007		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Tahun 2022			Tahun 2023				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Daerah										
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penanganan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			14 Unit	16 Unit	56.666.007	56.666.007	77.666.007	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		Dinas Penan	16 Unit	56.666.007	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			30 Unit	30 Unit	21.600.000	21.600.000	21.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		Dinas Penan	30 Unit	21.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah sektor yang berhasil di promosikan	Sektor		1 Sektor	1 Sektor	640.000.200	597.257.000	597.257.000				1 Sektor		640.000.200		
2	18	3	2.01	2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kali		1 Kali	1 Kali	640.000.200	597.257.000	597.257.000				1 Kali		640.000.200		
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan Kabupaten/Kota			1 Kali	2 Kali	640.000.200	597.257.000	597.257.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	Investor Dalam		2 Kali	640.000.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan penanaman modal	Persen		100 Persen	100 Persen	545.000.000	258.683.550	226.133.550					100 Persen	150.977.000		
2	18	4	2.01	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani	Dokumen		575 Dokumen	575 Dokumen	545.000.000	258.683.550	226.133.550					575 Dokumen	150.977.000		
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (SIMPATI)	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang terdapat melalui sistem OSS dan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (SIMPATI)	Dokumen		575 Dokumen	575 Dokumen	225.000.000	132.422.000	148.012.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	0	575 Dokumen	30.977.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Unit Perizinan tertentu yang di monitoring			20 Unit	20 Unit	80.000.000	55.010.000	49.870.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	0	20 Unit	80.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan			20 Orang	20 Orang	40.000.000	28.251.500	28.251.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	0	20 Orang	40.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen		100 Persen	100 Persen	179.999.700	126.161.400	546.732.400					100 Persen	179.999.700		
2	18	5	2.01	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	179.999.700	126.161.400	546.732.400					3 Kegiatan	179.999.700		
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pemantauan			3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	72.715.000	68.054.500	65.054.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	0	3 Pelaku Usaha	72.715.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan			295 Pelaku Usaha		48.167.800	-	269.428.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Abkasi Khusus Non Fisik	0	295 Pelaku Usaha	48.167.800		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan			3 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	99.116.900	98.108.900	212.249.150	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	0	35 Pelaku Usaha	99.116.900		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf		A Huruf	A Huruf	113.471.250	529.410.000	530.910.000					A Huruf	113.471.250		
2	18	6	2.01	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	113.471.250	529.410.000	530.910.000					1 Kegiatan	113.471.250		
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengolahan data dan informasi penanaman modal yang terlaksana			1 Kegiatan	1 Kegiatan	113.471.250	529.410.000	530.910.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	0	1 Kegiatan	113.471.250		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA						15.678.162.658	19.309.364.408	20.647.329.484						16.255.000.000		
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		22 Nilai	22 Nilai	7.378.162.658	7.504.839.408	7.363.502.954					22 Nilai	7.645.000.000		
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		90 Persen	90 Persen	576.016.000	410.531.000	505.724.500					90 Persen	610.000.000		
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun			4 Dokumen	4 Dokumen	359.900.000	212.210.000	328.090.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Aparatur Sipil	4 Dokumen	380.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SRPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SRPD yang disusun			5 Dokumen	5 Dokumen	216.116.000	198.321.000	177.633.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	5 Dokumen	230.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		100 Persen	100 Persen	4.902.992.658	4.902.992.658	4.302.307.704					100 Persen	4.900.000.000		
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Caji dan Tanggapan ASN	Jumlah Caji ASN			35 Orang	35 Orang	4.878.242.658	4.878.242.658	4.277.357.704	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	35 Orang	4.880.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun			11 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	1 Dokumen	25.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	14.750.000	14.750.000	14.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	1 Dokumen	25.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		50 Persen	50 Persen	10.120.000	10.120.000	10.120.000					50 Persen	25.000.000		
2	19	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan			2 Diklat	2 Diklat	10.120.000	10.120.000	10.120.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	2 Diklat	25.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		100 Persen	100 Persen	966.591.750	1.242.736.750	1.398.876.750					100 Persen	1.070.000.000		
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan			15 Jenis	15 Jenis	20.060.000	20.060.000	40.060.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	15 Jenis	30.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			10 Jenis	10 Jenis	124.131.750	430.131.750	386.131.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	10 Jenis	140.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi														
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			5 Jenis	4 Jenis	75.000.000	57.000.000	93.170.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil	4 Jenis	95.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan yang disediakan			3 Jenis	3 Jenis	135.000.000	203.000.000	213.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil	3 Jenis	150.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			1 Eksemplarr	1 Eksemplarr	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil	1 Eksemplarr	15.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			40 Kali	90 Kali	407.600.000	348.230.000	478.108.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil	90 Kali	420.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.06	10	Pematausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Usulan Hibah dan bansos yang diventikasi			60 Proposal	30 Proposal	200.000.000	129.525.000	133.607.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Aparatur Sipil	30 Proposal	220.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen		100 Persen	100 Persen	706.139.000	791.139.000	668.456.500						100 Persen	810.000.000	
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Susut Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen		33 Persen	33 Persen	5.000.000	5.000.000	7.877.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Sipil	33 Persen	20.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			3 Rekening	3 Rekening	165.000.000	175.000.000	267.720.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil	3 Rekening	180.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			63 Orang	63 Orang	596.139.000	611.139.000	599.859.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil	63 Orang	610.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Bazarng Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		10 Persen	10 Persen	135.000.000	147.320.000	278.017.500						10 Persen	190.000.000	
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			4 Unit	2 Unit	65.000.000	47.320.000	73.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Sipil	2 Unit	80.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			2 Unit	4 Unit	30.000.000	45.000.000	118.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemertanian pembangunan	Aparatur Sipil	4 Unit	50.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			5 Unit	4 Unit	40.000.000	55.000.000	85.817.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil	4 Unit	60.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDIADAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen		70 Persen	70 Persen	1.070.000.000	795.000.000	923.429.000						70 Persen	1.175.000.000	
2	19	2	2.01		Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan	Persen		90 Persen	90 Persen	920.000.000	680.000.000	809.825.000						90 Persen	980.000.000	
						Cakupan Pemuda dan Kepemudaan yang dibina	Persen		90 Persen	90 Persen									90 Persen		
						Jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera dan Pembinaan siswa/i Berprestasi dalam Pemilihan Calon Anggota Pribi yang dibina	Orang		46 Orang	46 Orang									46 Orang		
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti bintak Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			50 Orang	32 Orang	200.000.000	180.000.000	180.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SIM yang berliman dan berdaya saing	Masyarakat Kal	32 Orang	220.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah tahapan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			3 Kali	3 Kali	600.000.000	500.000.000	629.829.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SIM yang berliman dan berdaya saing	Masyarakat Kal	3 Kali	620.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan	Persen		90 Persen	90 Persen	150.000.000	115.000.000	113.600.000						90 Persen	195.000.000	
2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Sosialisasi kewirausahaan yang Dilaksanakan			5 Kali	1 Kali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kal	1 Kali	75.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang diberikan bantuan			1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000	65.000.000	65.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SIM yang berliman dan berdaya saing	Masyarakat Kal	1 Organisasi	120.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	Persen		100 Persen	100 Persen	6.380.000.000	10.459.525.000	11.811.397.500						100 Persen	6.545.000.000	
2	19	3	2.01		Pembinan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Olahraga Pendidikan yang didibina dan dikembangkan	Persen		80 Persen	80 Persen	2.375.000.000	1.885.000.000	1.795.900.000						80 Persen	2.500.000.000	
						Cakupan Olahraga Pendidikan yang didibina dan dikembangkan	Persen		80 Persen	80 Persen									80 Persen		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit		30 Unit	30 Unit									30 Unit		
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disediakan			30 Unit	14 Unit	2.575.000.000	1.885.000.000	1.795.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kal	14 Unit	2.500.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan/dikuti	Persen		100 Persen	100 Persen	1.495.000.000	5.770.000.000	7.233.362.500						100 Persen	1.570.000.000	
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan			7 Event	7 Event	795.000.000	1.545.000.000	1.457.780.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kal	7 Event	850.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dikuti			5 Cabang	25 Cabang	700.000.000	4.425.000.000	5.775.582.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kal	25 Cabang	720.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	3	2.03		Pembinan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Olahraga Prestasi yang dibina dan dikembangkan	Persen		80 Persen	80 Persen	630.000.000	1.034.525.000	995.725.000						80 Persen	665.000.000	
						Jumlah Atlet Yang Dibina	Orang		10 Orang	10 Orang									10 Orang		
						Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknis Olahraga Yang Dikirim Untuk Pelatihan	Orang		10 Orang	10 Orang									10 Orang		
						Pelaksanaan Seleksi Atlet Olahraga Inhil	Orang		10 Orang	10 Orang									10 Orang		
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Yang Dibina			10 Orang	54 Orang	50.000.000	294.525.000	304.725.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kal	54 Orang	65.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	3	2.03	2	Pemetaan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknis Olahraga Yang Dikirim Untuk Pelatihan			6 Orang	3 Orang	580.000.000	710.000.000	691.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kal	3 Orang	600.000.000	DDAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	19	3	2.04		Pembinan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan	Persen		80 Persen	80 Persen	1.740.000.000	1.690.000.000	1.688.200.000						80 Persen	1.680.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKKPD 2022	APBD 2022	RKKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	Nasional	Daerah														
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Kolahragan	Tercapainya Hibah Uang kepada Organisasi ke Olahraga					100 Persen	100 Persen	1.740.000.000	1.690.000.000	1.688.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SDM yang bertrim dan berwlaya saing	Masyarakat Kal	100 Persen	1.650.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN	
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	Persen	Persen	80 Persen	80 Persen	140.000.000	110.000.000	98.210.000							80 Persen	160.000.000		
					Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kali	Kali	2 Kali	2 Kali											2 Kali			
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Yang Dilaksanakan			2 Kali	2 Kali	140.000.000	110.000.000	98.210.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kal	2 Kali	160.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN	
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPYRAMUKAAN	Cakupan pembinaan Kepiramukaan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	850.000.000	550.000.000	549.200.000							100 Persen	890.000.000		
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepiramukaan	Cakupan Organisasi Kepiramukaan yang dibina dan dikembangkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	850.000.000	550.000.000	549.200.000							100 Persen	890.000.000		
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepiramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepiramukaan yang diberikan bantuan			1 Organisasi	1 Organisasi	650.000.000	450.000.000	450.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan pemerataan pembangunan	Masyarakat Kal	1 Organisasi	670.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2	19	4	2.01	7	Pencaraman, Pengalasan, Pemantapan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasana dan Sarana Kepiramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasana kepramukaan yang Diusulkan/dipelihara			1 Unit	1 Unit	200.000.000	100.000.000	99.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan pemerataan pembangunan	Masyarakat Kal	1 Unit	220.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1.555.000.000	795.565.000	889.065.000								
2	22				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Keragaman budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	1.198.820.000	676.385.000	675.285.000								2 Cagar Budaya	1.415.000.000	
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	460.000.000	297.565.000	296.215.000							90 Persen	480.000.000		
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Postur dan Kontribusinya dalam Pejuangan Kebudayaan	Jumlah kelompok Kebudayaan yang diberikan bantuan			35 Kelompok	35 Kelompok	460.000.000	297.565.000	296.215.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SDM yang bertrim dan berwlaya saing	Masyarakat Kal	35 Kelompok	480.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Pengamitnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Adat yang dibina	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	378.820.000	378.820.000	377.070.000							90 Persen	770.000.000		
2	22	2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Adat yang dilaksanakan			2 kali	1 Kali	588.820.000	378.820.000	377.070.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SDM yang bertrim dan berwlaya saing	Masyarakat Kal	1 Kali	600.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival Kesenian Tradisional	Jampil Kesenian	Tampil Kesenian	Tampil Kesenian	Tampil Kesenian	75.000.000	70.000.000	168.000.000							1 Tampil Kesenian	90.000.000		
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	75.000.000	70.000.000	168.000.000							90 Persen	90.000.000		
					Cakupan Tampan kesenian yang dibina	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen											90 Persen			
2	22	3	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Frukuensi Tampan Kesenian dalam dan ke Luar Daerah			3 3 Kali	14 Kali	75.000.000	70.000.000	168.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kal	14 Kali	90.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN		
2	22	3			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang Dilestarikan	Cagar Budaya	Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	61.180.000	49.180.000	47.780.000							4 Cagar Budaya	75.000.000		
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	61.180.000	49.180.000	47.780.000							90 Persen	75.000.000		
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikembangkan			2 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya	61.180.000	49.180.000	47.780.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kal	1 Cagar Budaya	75.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								2.438.690.000	3.051.080.000	2.817.910.000							2.430.000.000	
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Prasarana Pariwisata yang terpenuhi	Persen	Persen	70 Persen	70 Persen	1.192.690.000	1.910.080.000	1.478.110.000							70 Persen	1.250.000.000		
3	26	2	2.01		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	482.610.000	250.000.000	382.580.000							90 Persen	500.000.000		
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dilaksanakan			3 Event	2 Event	482.610.000	250.000.000	382.580.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Masyarakat Kal	2 Event	500.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN	
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Pariwisata yang Memenuhi Standar	Persen	Persen	80 Persen	80 Persen	650.000.000	1.600.000.000	1.236.500.000							80 Persen	670.000.000		
3	26	2	2.03	4	Pengalasan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Wisata Yang direhab/ Dibangun			1 Unit	2 Unit	650.000.000	1.600.000.000	1.236.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan pemerataan pembangunan	Masyarakat Kal	2 Unit	670.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN		
3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang terlayani	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	60.080.000	60.080.000	59.030.000							100 Persen	80.000.000		
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi lin Usaha Pariwisata yang diterbitkan			35 Rekomendasi	3 Rekomendasi	60.080.000	60.080.000	59.030.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Masyarakat Kal	3 Rekomendasi	80.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN	
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	Persen	35 Persen	35 Persen	1.046.000.000	1.011.000.000	1.287.800.000							35 Persen	1.060.000.000		
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan atau Promosi pariwisata	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.046.000.000	1.011.000.000	1.287.800.000							100 Persen	1.060.000.000		
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi pariwisata yang Dilaksanakan			5 Jenis	5 Jenis	1.046.000.000	1.011.000.000	1.287.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kal	5 Jenis	1.060.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN		
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	200.000.000	130.000.000	82.000.000							100 Persen	120.000.000		
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persen	Persen	80 Persen	80 Persen	200.000.000	130.000.000	82.000.000							80 Persen	120.000.000		
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiripan Pariwisata	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Kompeten dibidangnya	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	200.000.000	130.000.000	82.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Masyarakat Kal	100 Persen	120.000.000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								4.205.565.626	5.340.241.629	4.999.461.629							4.758.000.000	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	4.041.680.626	4.420.526.626	4.997.426.626							22 Nilai	5.983.000.000		
2	23	1	2.01		Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Minder	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	55.106.000	55.106.000	55.106.000							100 Persen	65.000.000		
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun			3 Dokumen	3 Dokumen	55.106.000	55.106.000	55.106.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pelaporan Kine	3 Dokumen	65.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.608.064.926	2.608.064.926	2.608.064.926							100 Persen	2.800.000.000		
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			26 Orang	26 Orang	2.608.064.926	2.608.064.926	2.608.064.926	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				ASN Dinas Per	26 Orang	2.800.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	729.573.700	628.419.700	705.319.700							100 Persen	400.000.000		
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan			11 Jenis	11 Jenis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Administrasi Pa	11 Jenis	3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2022			Tahun 2023				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan	Nasional							
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	7 Jenis	31.177.000	89.177.000	36.077.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi P	7 Jenis	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	27.990.450	39.990.450	39.990.450	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi P	3 Jenis	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	61.370.250	61.370.250	61.370.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi P	8 Jenis	62.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perantun Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2500 Eksemplar	3500 Eksemplar	507.430.000	239.600.000	369.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi P	3500 Eksemplar	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.06	9	Pembelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	41 Kali	41 Kali	100.116.000	196.792.000	196.792.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi P	41 Kali	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	100 Persen	604.936.000	1.084.936.000	1.084.936.000				100 Persen	1.403.000.000		
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surti Menyurat	Capaian ketersediaan kebutuhan surat menyurat	100 Persen	100 Persen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58 Non ASN	100 Persen	3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	4 Rekening	4 Rekening	112.536.000	344.536.000	344.536.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58 Non ASN	4 Rekening	850.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	58 Orang	58 Orang	490.400.000	538.400.000	538.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58 Non ASN	58 Orang	550.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Bazarng Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100 Persen	44.000.000	44.000.000	44.000.000				100 Persen	1.115.000.000		
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kendaraan Dns	14 Unit	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kendaraan Dns	15 Unit	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah bahan bacaan perpustakaan	Persen	70 Persen	158.885.000	919.715.000	502.035.000				70 Persen	775.000.000		
						Persentase Tenaga pengolahan perpustakaan Pendidikan dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen				70 Persen			
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kelengkapan bahan bacaan perpustakaan	Persen	70 Persen	135.585.000	916.415.000	496.735.000				70 Persen	400.000.000		
						Persentase Tenaga Pengelola Perpustakaan Pendidikan Dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen				70 Persen			
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Pendidikan Dasar yang dibina	40 Sekolah/Madrasah	40 Sekolah/Madrasah	135.000.000	135.000.000	85.142.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perpustakaan S	40 Sekolah/Madrasah	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina	7 Perpustakaan khusus	7 Perpustakaan khusus	7.585.000	1.885.000	1.885.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perpustakaan S	7 Perpustakaan khusus	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pungutan Perpustakaan yang dilayani	6500 Orang	6500 Orang	5.700.000	772.230.000	404.418.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perpustakaan S	6500 Orang	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi buku Perpustakaan yang disediakan	1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	7.300.000	7.300.000	7.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perpustakaan S	1000 Eksemplar	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Baca dan Literasi yang dilaksanakan	Persen	100 Persen	3.300.000	3.300.000	3.300.000				100 Persen	375.000.000		
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta Dalik yang dilaksanakan	60 Orang	60 Orang	3.300.000	3.300.000	3.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stwa, Mahasiswa	60 Orang	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIFAN	Persentase anisip daerah yang disiplin dan dilestarikan pada LKD	Persen	100 Persen	107.499.300	156.793.300	156.793.300				100 Persen	300.000.000		
2	24				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase anisip daerah yang disiplin dan dilestarikan pada LKD	Persen	100 Persen	107.499.300	156.793.300	156.793.300				100 Persen	300.000.000		
						Persentase pengelolaan Anisip secara baku	Persen	90 Persen	90 Persen						90 Persen			
2	24	2	2.01		Pengelolaan Anisip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anisip Dinamis yang terpelihara	Persentase	100 Persentase	107.499.300	156.793.300	156.793.300				100 Persentase	300.000.000		
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Anisip Dinamis	Jumlah SEM Pengelola Anisip yang dilatih	25 OPD	25 OPD	34.999.750	84.291.750	84.291.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51 OPD	25 OPD	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusunan Anisip Dinamis	Jumlah anisip daerah yang dipelihara	500 Dokumen	500 Dokumen	19.999.550	19.999.550	19.999.550	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51 OPD	500 Dokumen	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Anisip Dinamis Kesewangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang diaudit dan dibina	55 OPD	55 OPD	52.500.000	52.500.000	52.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51 OPD	55 OPD	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.882.184.727	9.487.435.952	13.338.210.173					17.115.000.000		
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	Persen	100 Persen	6.452.596.527	6.087.765.022	5.713.066.243				100 Persen	8.265.000.000		
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100 Persen	196.506.975	133.341.079	382.472.079				100 Persen	165.000.000		
						Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen			
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	133.120.475	87.324.570	236.557.950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	5 Dokumen	90.000.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	63.386.500	46.016.500	145.914.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	4 Dokumen	75.000.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen	100 Persen	4.630.184.727	4.630.184.727	4.275.485.948				100 Persen	6.000.000.000		
						Persentase Pelaporan liabilitas yang disusun sesuai standar	Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen			
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	39 orang	33 orang	4.630.184.727	4.630.184.727	4.275.485.948	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	33 orang	6.000.000.000	DINAS PERIKANAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKMD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah							
3	25	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	993.105.000	769.989.000	594.534.000					100 Persen	1.088.000.000			
				Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan perenerangan yang disediakan			10 Jenis	10 Jenis	20.000.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	10 Jenis	80.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Penyelesaian Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perawatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan			8 Jenis	8 Jenis	102.500.000	72.250.000	16.097.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	8 Jenis	150.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			3 Jenis	3 Jenis	112.000.000	92.000.000	92.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	3 Jenis	160.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Penyelesaian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			4 Jenis	4 Jenis	18.750.000	13.125.000	13.127.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	4 Jenis	25.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Penyelesaian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			1776 Eksemplar	1776 Eksemplar	153.920.000	153.920.000	153.920.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	1776 Eksemplar	20.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			190 kali	119 kali	585.935.000	424.694.000	325.589.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	119 kali	650.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	336.167.825	337.334.225	337.574.225					100 Persen	365.000.000			
				Penyediaan Jasa Surot Menyurat	Capaian ketersediaan kebutuhan surat menyurat			100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	100 persen	5.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			4 Rekening	4 Rekening	99.380.000	99.380.000	99.620.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	4 Rekening	110.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			18 orang	18 orang	233.787.825	234.954.225	234.954.225	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	18 orang	250.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	188.000.000	123.000.000	123.000.000					100 Persen	300.000.000			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			6 Unit	6 Unit	93.000.000	73.000.000	73.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	6 Unit	150.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	45.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	1 Unit	75.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			60 Unit	60 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas	60 Unit	75.000.000	DINAS PERKANTORAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Ton	81000 Ton	81000 Ton	2.842.491.100	2.216.230.480	5.005.683.480					81000 Ton	5.575.000.000			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KUB/Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Saprasi Penangkapan Ikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.565.371.900	2.326.958.650	1.660.958.650					100 Persen	5.100.000.000			
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah jenis data perikanan tangkap yang dihasilkan			3 Jenis	3 Jenis	100.000.000	64.228.300	64.228.300	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengabdian potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha P	3 Jenis	100.000.000	DINAS PERKANTORAN
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap yang diberikan kepada KUB/Kelompok			8 Unit	27 Unit	-	170.000.000	170.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pelaku Usaha P	27 Unit	2.000.000.000	DINAS PERKANTORAN
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB/Kelompok Nelayan yang di bantu			37 Kelompok	23 Kelompok	2.465.171.900	1.892.730.330	1.426.730.330	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Memajukan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Pelaku Usaha P	23 Kelompok	3.000.000.000	DINAS PERKANTORAN
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	124.999.900	-	3.355.433.000						100 Persen	180.000.000		
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah KUB/Kelompok Nelayan Binaan yang mampu Meningkatkan Pendapatan Nelayan			10 Kelompok	14 Kelompok	124.999.900	-	3.355.433.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus-Fiskal			Memajukan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Pelaku Usaha P	14 Kelompok	150.000.000	DINAS PERKANTORAN
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	352.519.300	89.271.850	89.271.850						100 Persen	325.000.000		
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang di Kelola			3 Unit	3 Unit	152.519.300	89.271.850	89.271.850	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaku Usaha P	3 Unit	175.000.000	DINAS PERKANTORAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Ton	5000 Ton	5000 Ton	2.312.097.250	997.875.000	2.353.195.000						5000 Ton	2.775.000.000		
				Perubahan Irigasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki irigasi usaha budidaya perikanan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	70.875.500	40.930.400	40.930.400						100 Persen	75.000.000		
				Perencanaan Penyusunan dan Prosedur Perombaan Irigasi Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Unit Budidaya yang dapat dikembangkan sistem usahanya			5 Usaha	3 Usaha	70.875.500	40.930.400	40.930.400	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengabdian potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha P	3 Usaha	75.000.000	DINAS PERKANTORAN
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Capaian sapras Pembudidayaan ikan yang tersedia	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.151.023.800	956.244.600	2.312.264.600						100 Persen	2.450.000.000		
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data Perikanan Budidaya			3 Jenis	3 Jenis	170.357.000	79.682.500	79.682.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Peningkatan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pelaku Usaha P	3 Jenis	170.000.000	DINAS PERKANTORAN
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan perikanan			8 Unit	7 Unit	200.000.000	206.756.400	1.491.126.400	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Peningkatan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pelaku Usaha P	7 Unit	300.000.000	DINAS PERKANTORAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target SKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi						Nasional	Daerah					
3	25	4	2.04	3	Pengamanan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan Yang Dibantu	20 Pokdakan	7 Pokdakan	1.354.166.800	474.997.100	439.017.100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Pelaku Usaha P	7 Pokdakan	1.500.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Budidaya yang dapat dikendalikan kesehatan ikan dan lingkungannya	3 Lokasi	3 Lokasi	112.000.000	74.562.500	103.772.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha P	3 Lokasi	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Lokasi Pembudidayaan yang dipantau	6 Lokasi	6 Lokasi	84.500.000	52.486.500	81.696.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha P	6 Lokasi	100.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kajian Pengembangan Lahan Budidaya Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000	67.739.500	96.969.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha P	1 Dokumen	230.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASAKAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Perkapita Tahunan	Kg/Kapita/Th	Kg/Kapita/Th	488 Kg/Kapita/Th	468 Kg/Kapita/Th	274.999.850	206.265.450	206.265.450				44,68 Kg/Kapita/Th	500.000.000	
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan diolah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	125.000.000	63.253.000	63.253.000				100 Persen	150.000.000	
						Persentase pembudidayaan ikan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen		
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Perikanan yang dipromosikan dan dipamerkan	25 jenis	25 jenis	125.000.000	63.253.000	63.253.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha P	25 jenis	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyulaman Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan diolah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	149.999.850	143.012.450	143.012.450				100 Persen	350.000.000	
						Persentase pembudidayaan ikan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen		
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Menu Serba Ikan yang dikonsumsi dan diolah	67 menu	67 menu	149.999.850	143.012.450	143.012.450	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pelaku Usaha P	67 menu	200.000.000	DINAS PERIKANAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKRP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	27.628.691,683	23.732.211,878	24.101.522,182				22 Nilai	10.689.007,079	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	dokumen	14 dokumen	14 dokumen	681.109.470	538.174.301	508.174.301				14 dokumen	681.109.470	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	531.292.870	445.232.701	395.232.701	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Dinas Perkerbu	6 dokumen	531.292.870	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	4 laporan	4 laporan	28.286.600	28.286.600	28.286.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkerbu	4 laporan	28.286.600	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	121.530.000	84.655.000	84.655.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkerbu	4 dokumen	121.530.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	7.046.285.779	7.046.285.779	5.616.409.148				100 Persen	7.046.285.779	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN	1 tahun	1 tahun	7.039.835.779	7.039.835.779	5.611.159.148	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	1 tahun	7.039.835.779	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	6.450.000	6.450.000	5.220.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	1 laporan	6.450.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	252.600.000	161.474.400	161.474.400				100 Persen	285.000.000	
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan gedung kantor yang dibayar	4 orang	4 orang	57.600.000	57.974.400	57.974.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	4 orang	60.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.03	6	Pemertanahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset barang milik daerah pada dinas perkebunan yang dilata	5 jenis	5 jenis	225.000.000	103.500.000	103.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	5 jenis	225.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.752.730.330	1.356.028.330	1.031.154.365				100 Persen	1.777.024.330	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	14.473.000	14.473.000	14.473.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	3 jenis	14.473.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 jenis	20 jenis	253.000.000	96.450.000	251.521.035	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	20 jenis	253.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	2 jenis	2 jenis	126.760.000	96.760.000	156.617.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	2 jenis	126.760.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	10.337.330	10.337.330	19.737.330	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Aparatur Peran	12 bulan	10.337.330	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21 media	21 media	620.000.000	720.000.000	29.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	21 media	620.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.06	9	Pembelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	156 kali	124 kali	728.140.000	418.088.000	579.256.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	124 kali	752.454.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga operator dan tenaga kebersihan yang dibayar	orang	orang	28 orang	28 orang	560.974.500	563.688.900	438.143.900				28 orang	560.974.500	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	3 jenis	3 jenis	2.418.500	2.418.500	3.368.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan karya	3 jenis	2.418.500	DINAS PERKERUBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKM	Realisasi Capaian RPKM Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKM Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		RPKD 2022		APBD 2022		RKPD 2022 Perubahan		Lokasi			Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Sumber Dana	Nasional	Daerah									
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			4 Rekening	39 bulan	142.500.000	142.500.000	44.805.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan karya	39 bulan	142.500.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan			27 orang	27 orang	416.056.000	418.770.400	389.970.400	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan karya	27 orang	416.056.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	1	2.09	2	Pemeliharaan Bazarung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Bazarung Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelikara					100 Persen	100 Persen	329.240.000	313.424.000	401.920.000				100 Persen	297.913.000		
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			3 jenis	3 jenis	90.800.000	74.984.000	164.080.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	3 jenis	90.800.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	jumlah perlatan dan mesin yang disediakan			10 jenis	10 jenis	45.800.000	45.800.000	45.800.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	10 jenis	14.473.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit	1 unit	192.640.000	192.640.000	192.040.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Peran	1 unit	192.640.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	1	2.13		Pestaikan Organisasi	jumlah dokumen arsip dan ABK yang disusun	dokumen	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10.700.000	10.700.000	10.700.000						2 dokumen	10.700.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	1	2.13	1	Pengadaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah Dokumen analisis jabatan (arjab) analisis beban kerja (ABK) yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	10.700.000	10.700.000	10.700.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas per	2 dokumen	10.700.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	4.115.047.000	1.902.521.200	4.562.841.200						90 Persen	8.462.425.000		
3	27	2	2.01		Pengembangan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah sarana dan prasarana perkebunan yang disediakan	jenis komoditas	jenis komoditas	11 jenis	11 jenis	3.921.530.000	1.709.004.200	4.562.324.200						11 jenis	7.962.425.000		
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spasial Lokasi	jumlah sarana dan prasarana pengolahan kelapa				7 unit	209.925.000	117.597.000	2.888.097.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani dan kelo	7 unit	2.962.425.000	DINAS PERKERUBUNAN	
						jumlah Varietas bibit unggul lokal, Blok Penghasil tinggi dan pohon induk yang di tetapkan			3 komoditas	3 komoditas									3 komoditas			
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah sarana dan prasarana perkebunan/pertanian yang disediakan			11 jenis	8 jenis	3.711.600.000	1.591.407.200	1.474.227.200	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani dan kelo	8 jenis	5.000.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah bibit unggul yang disediakan	batang	batang	8000 batang	8000 batang	193.517.000	193.517.000	200.517.000						8000 batang	500.000.000		
						luas lahan pangan yang diremajakan	Ha	Ha	4 Ha	4 Ha									4 Ha			
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	jumlah bibit unggul yang di sediakan			3 komoditas	3 komoditas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelomp	3 komoditas	200.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	jumlah bibit tanaman sela pada tanaman kelapa yang disediakan			8000 Batang	8000 batang	143.517.000	143.517.000	130.517.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelomp	8000 Batang	300.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	9.337.929.604	9.248.595.568	9.030.595.468						90 Persen	15.175.000.000		
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah dokumen kawasan pembangunan komoditas perkebunan	dokumen	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.412.934.700	1.123.897.700	1.123.897.700						5 dokumen	1.675.000.000		
						jumlah lahan pangan perkebunan yang dibangun	ha	ha	10 ha	10 ha									10 ha			
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC2PB	Luas lahan pangan perkebunan yang di re:majakan			4 Ha	4 Ha	75.184.700	74.194.700	74.194.700	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani dan kelo	4 Ha	200.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	3	2.01	3	Kecerdasan dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase Pelayanan informasi pasar, potensi, harga komoditas, sentra produksi, fasilitasi dan pembukaan akses pasar produk perkebunan			90 persen	90 persen	775.000.000	486.913.000	486.913.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	petani dan kelo	90 persen	775.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	jumlah masterplan kawasan dan komoditas perkebunan yang di susun			5 dokumen	5 dokumen	562.790.000	562.790.000	562.790.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	petani dan kelo	5 dokumen	700.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah jalan produksi yang dibangun	lokasi	lokasi	4 lokasi	4 lokasi	7.944.994.904	8.124.737.868	7.906.737.768						4 lokasi	13.500.000.000		
						jumlah pintu air yang dibangun	unit	unit	3 unit	3 unit									3 unit			
						jumlah prasarana pertanian yang disediakan	lokasi	lokasi	4 lokasi	4 lokasi									4 lokasi			
						panjang tanggul yang dibangun	km	km	152,4 km	152,4 km									152,4 km			
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	panjang tanggul oswarkan yang dibangun			152,4 km	152,4 km	6.606.808.904	6.919.538.118	6.851.538.118	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Belaya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Petani dan kelo	152,4 km	10.000.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan produksi yang dibangun			4 lokasi	3 lokasi	350.000.000	343.780.800	393.780.700	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Belaya Saing	Petani dan kelo	3 lokasi	2.000.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	jumlah Pintu air yang dibangun			3 unit	3 unit	440.330.000	439.297.700	439.297.700	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Belaya Saing	Petani dan kelo	3 unit	1.000.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah Prasarana pertanian yang disediakan			3 Unit	2 Unit	347.856.000	222.121.200	222.121.200					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Belaya Saing	Petani dan kelo	2 Unit	500.000.000	DINAS PERKERUBUNAN
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen	Persen	85 Persen	85 Persen	1.440.075.000	826.207.400	592.947.400						85 Persen	1.400.000.000		
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas kebun kelapa/awit yang diremajakan	kecamatan	kecamatan	20 kecamatan	20 kecamatan	1.440.075.000	826.207.400	592.947.400						20 kecamatan	1.400.000.000		
						Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen			
						menyediakan data perubahan iklim bagi petani	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen			
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	luas pengendalian OPT yang dibangun			700 Ha	700 Ha	330.000.000	225.000.000	225.000.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Belaya Saing	petani dan kelo	700 Ha	400.000.000	DINAS PERKERUBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana				Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022						RKPD 2022 Perubahan	Nasional		
3 27 5 2.01 5	Peningkatan Pasca Rencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas kebun kelapa/kelapa sawit yang ditanam				30 Ha	10 Ha	860.075.000	601.207.400	367.947.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	petani dan kole	10 Ha	700.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Persen	Persen	300 Persen	300 Persen	250.000.000	197.940.000	197.940.000						100 Persen	250.000.000		
3 27 6 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi izin nya	perusahaan	perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	250.000.000	197.940.000	197.940.000						20 perusahaan	250.000.000		
3 27 6 2.01 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin perusahaannya			20 perusahaan	20 perusahaan	250.000.000	197.940.000	197.940.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perusahaan	6 perusahaan	250.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.775.000.000	1.547.172.000	1.529.222.000						100 Persen	2.100.000.000		
3 27 7 2.01	Palaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah bpp yang dihadiri pertemuan bulannya	bpp	bpp	8 bpp	8 bpp	1.775.000.000	1.547.172.000	1.529.222.000						8 bpp	2.100.000.000		
		Jumlah kelompok tani yang dittingkatkan kelas kemampuannya	kelompok	kelompok	3 kelompok	3 kelompok									3 kelompok			
		Jumlah pelatihan petani yang dilaksanakan	kali	kali	1 kali	1 kali									1 kali			
		Jumlah penyuluh perkebunan yang dibayarkan dan dittingkatkan kapasitasnya	orang	orang	75 orang	75 orang									75 orang			
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh perkebunan yang dibayarkan dan dittingkatkan kapasitasnya			75 orang	70 orang	1.420.000.000	1.283.735.000	1.283.735.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petani, kelompok	70 orang	1.500.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3 27 7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Jumlah Kelompok tani yang dittingkatkan kelas kemampuannya			3 kelompok	3 kelompok	100.000.000	70.005.000	52.055.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelompok	3 kelompok	200.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3 27 7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang dihadiri pertemuan bulannya			8 BPP	8 BPP	115.000.000	95.500.000	95.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelompok	8 BPP	200.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
3 27 7 2.01 5	Distribusi dan Penyeleenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan petani yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	140.000.000	97.912.000	97.912.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelompok	1 kali	200.000.000	DINAS PERKERUBUNAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.512.592.000	1.207.725.800	6.202.716.300						0	2.411.910.400		
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEMAMPUAN DAN KEMAMBIHAN PANGAN	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura			0	0	561.400.000	490.640.000	5.429.285.500						0	846.080.000		
2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Persen	Persen	70 Persen	70 Persen	561.400.000	490.640.000	5.429.285.500						70 Persen	846.080.000		
2 9 2 2.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah kapasitas simpan cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat di lokasi food estate dan sentra produksi pertanian			500 Ton	246.000.000	215.760.000	3.040.760.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Urtuk, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tani	500 Ton	228.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
		Jumlah Lumbung Pangan yang di Bangun			2 Unit	2 Unit									2 Unit			
2 9 2 2.01 2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur			5 Unit			500.000.000							5 Unit	500.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
2 9 2 2.01 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Alat Pasca Panen yang di adakan			5 Unit	3 Unit	915.400.000	274.880.000	1.888.525.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Urtuk, Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tani	3 Unit	118.080.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
		Tersedianya Infrastruktur Kemandirian Pangan Lainnya			10 Unit										10 Unit			
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Kelarga	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	582.192.000	502.796.600	599.141.600						75 Persen	1.133.830.400		
2 9 3 2.01	Penyediaan dan Panyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang disalurkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	173.192.000	199.559.000	109.559.000						100 Persen	204.230.400		
2 9 3 2.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	39.300.000	39.200.000	39.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER				90 Persen	47.160.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
2 9 3 2.01 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lahan hortikultura yang di berdayakan			20 Hektar	0 Hektar	62.000.000	132.755.000	42.755.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER				0 Hektar	74.400.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
2 9 3 2.01 3	Kecerdasan, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah LDPM dan PUPM yang di Bina dan di Bantu			5 Capoktan	5 Capoktan	71.892.000	37.604.000	37.604.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER				5 Capoktan	82.670.400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
2 9 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Pangan Daerah	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	103.000.000	84.005.000	81.005.000						75 Persen	620.000.000		
2 9 3 2.02 1	Kecerdasan dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah lahan Tanaman Pangan yang di berdayakan			50 Hektar	50 Hektar	103.000.000	84.005.000	81.005.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER				50 Hektar	120.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
2 9 3 2.04	Palaksanaan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	Persen	87,4 Persen	87,4 Persen	306.000.000	219.232.600	368.577.600						87,4 Persen	309.600.000		
2 9 3 2.04 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per kapita per Tahun	Jumlah Kuesioner yang di lakukan pencahan data			405 Kuesioner	405 Kuesioner	114.000.000	81.592.600	73.937.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER				405 Kuesioner	129.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
2 9 3 2.04 2	Distribusi Masyarakat dalam Pengangkutan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Festival Pangan Lokal dan Lokakarya yang di laksanakan			2 Kali	2 Kali	192.000.000	137.640.000	294.640.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER				2 Kali	180.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
		Jumlah KWT yang melaksanakan pemantauan lahan perkartangan			5 KWT	5 KWT									5 KWT			
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengangkutan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			2 KWT										2 KWT			
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah ketahanan pangan warga per Tahun			0	0	306.000.000	157.930.000	157.930.000						0	360.000.000		
2 9 4 2.02	Pengangan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang di beri bantuan	Kecamatan	Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	306.000.000	157.930.000	157.930.000						2 Kecamatan	360.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi												Nasional	Daerah
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan yang di Salurkan		150 Paket	150 Paket	306.000.000	157.930.000	157.930.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat di	150 Paket	360.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Person	Person	100 Person	100 Person	63.000.000	56.359.200					100 Person	72.000.000		
2	9	5	2.01	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Monev Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Person	Person	90 Person	90 Person	63.000.000	56.359.200					90 Person	72.000.000		
2	9	5	2.01	1	Pengaturan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di Lakukan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar			5 Kecamatan	5 Kecamatan	63.000.000	56.359.200	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Kelompok Tan	5 Kecamatan	72.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
3	27	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	20.312.888.328	18.796.743.128	20.048.445.775				22 Nilai	22.178.493.144		
3	27	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Person	Person	90 Person	90 Person	764.155.000	523.265.000					90 Person	632.584.000		
						Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	Person	Person	90 Person	90 Person							90 Person			
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			6 Dokumen	8 Dokumen	489.855.000	248.165.000	417.194.500	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN DAN NCP	8 Dokumen	303.426.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			9 Dokumen	9 Dokumen	274.300.000	275.100.000	264.590.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN DAN NCP	9 Dokumen	329.360.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Person	Person	100 Person	100 Person	14.239.480.328	14.239.480.328	11.608.003.675				100 Person	14.951.454.344		
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Person	Person	100 Person	100 Person							100 Person			
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan			123 Orang	123 Orang	14.239.480.328	14.239.480.328	11.608.003.675	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		ASN DAN PPP	123 Orang	14.951.454.344	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Person	Person	100 Person	100 Person	128.000.000	102.819.200	112.089.200				100 Person	153.600.000		
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan			4 Orang	4 Orang	128.000.000	102.819.200	112.089.200	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aset BMD pada	4 Orang	153.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
						Pelaksanaan Inventarisasi Aset SKPD			10 Kecamatan	10 Kecamatan							10 Kecamatan			
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Person	Person	100 Person	100 Person	778.449.000	566.816.500	564.126.500				100 Person	934.378.800		
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			12 Jenis	12 Jenis	170.000.000	76.049.700	76.049.700	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		ASN DAN NCP	12 Jenis	204.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			9 Jenis	9 Jenis	78.600.000	70.600.000	70.600.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		ASN DAN NCP	9 Jenis	93.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			12 Jenis	12 Jenis	19.234.000	13.463.800	13.463.800	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		ASN DAN NCP	12 Jenis	23.080.800	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penunjang Penunjang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			1680 Eksampul	1680 Eksampul	11.000.000	7.700.000	7.700.000				ASN DAN NCP	1680 Eksampul	13.200.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			207 Kali	207 Kali	500.415.000	399.003.000	396.313.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		ASN DAN NCP	207 Kali	600.498.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Person	Person	100 Person	100 Person	658.530.000	646.270.800	637.000.600				100 Person	771.054.000		
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			90 %	90 %	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		ASN DAN NCP	90 %	3.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			14 Rekening	14 Rekening	139.530.000	136.349.200	127.279.000				ASN DAN NCP	14 Rekening	167.436.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			42 Orang	42 Orang	516.000.000	506.721.600	506.721.600	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		ASN DAN NCP	42 Orang	600.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Person	Person	90 Person	90 Person	331.000.000	213.380.000	213.380.000				90 Person	385.200.000		
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			2 Unit	2 Unit	52.000.000	44.000.000	44.000.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aset BMD pada	2 Unit	62.400.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			5 Unit	5 Unit	44.000.000	73.000.000	73.000.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aset BMD pada	5 Unit	40.800.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			8 Unit	8 Unit	200.000.000	71.830.000	71.830.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aset BMD pada	8 Unit	240.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			50 Unit	50 Unit	35.000.000	24.500.000	24.500.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aset BMD pada	50 Unit	42.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Ton	Ton	100 Ton	100 Ton	1.992.712.000	1.477.000.700	3.174.340.700				100 Ton	2.530.000.000		
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Monev Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Person	Person	90 Person	90 Person	279.000.000	91.562.000	2.042.477.000				90 Person	2.500.000.000		
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Penunran Sunit Batac			7 Person				1.978.915.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus-Fisk	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tan	7 Person	2.000.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
						Tersedianya Abit Pasca Panen			5 Unit								5 Unit			
3	27	2	2.01	2	Pemlampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Prapaten yang di sediakan			4 Unit	2 Unit	279.000.000	91.562.000	63.562.000	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Kelompok Tan	2 Unit	200.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keunggulan Kabupaten/Kota	Persentase Pembibitan Ternak	Person	Person	75 Person	75 Person	147.200.000	98.764.800	98.764.800				75 Person	210.000.000		
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak yang di IB			900 Ekor	900 Ekor	147.200.000	98.764.800	98.764.800	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Saji Ternak-MI	900 Ekor	210.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMID	Realisasi Capaian RPKMID Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKMID Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		RPKD 2022	APBD 2022					RPKD 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RPKD 2022	APBD 2022												
3	27	2	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Bibit Temak	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	1.566.512.000	1.286.673.900	1.033.098.900					75 Persen	120.000.000			
3	27	2	2.05	1	Penjagaan Peredaran Benih/Bibit Temak	Jumlah temak besar yang di adakan		2375 Ekor	131 Ekor	1.566.512.000	1.286.673.900	1.033.098.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani	131 Ekor	120.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
						Jumlah temak unggas yang di adakan		8815 Ekor										8815 Ekor			
3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	648.000.000	558.434.000	1.644.614.000						90 Persen	806.000.000		
3	27	3	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Persen	Persen	85 Persen	85 Persen	277.000.000	289.809.200	289.809.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani	85 Persen	350.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah lahan yang di budidayakan		20 Ha	20 Ha	277.000.000	289.809.200	289.809.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani	20 Ha	350.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun	Persen	Persen	85 Persen	85 Persen	371.000.000	268.624.800	1.354.804.800						85 Persen	456.000.000		
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Peningkatan luas lahan pertanian yang terair di lokasi Food Estate dan seotra lokasi pertanian			350 Ha	-	-	1.088.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fiskal			Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tani	350 Ha	-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana yang di bangun		4 Unit	4 Unit	371.000.000	268.624.800	266.804.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani	4 Unit	456.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,laluh dan Halal)	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	156.000.000	114.793.150	371.793.150						100 Persen	190.000.000		
3	27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemutusan dan Pembukan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	75.000.000	53.337.600	218.337.600						75 Persen	100.000.000		
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kecamatan yang di Tangani Penanggulangan Penyakit Menular Temak		4 Kecamatan	6 Kecamatan	75.000.000	53.337.600	218.337.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tani	6 Kecamatan	100.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persen	Persen		20 Persen	-	-	100.000.000						20 Persen	-		
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			158 Kali	-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Keratang, Kota Baru Seberida	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kualitas Rencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Jasa Medik Vete	158 Kali	-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
3	27	4	2.04	Pemeripan dan Pengawasan Peryaratn Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Money Peryaratn Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	Persen	75 Persen	75 Persen	81.000.000	59.455.500	53.455.500						75 Persen	90.000.000		
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Penyuluhan ASUH yang di laksanakan		8 Kali	8 Kali	81.000.000	59.455.500	53.455.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani	8 Kali	90.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Seangsan OPT	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	82.800.000	87.790.000	87.790.000						90 Persen	99.360.000		
3	27	5	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT	Persen	Persen	85 Persen	85 Persen	82.800.000	87.790.000	87.790.000						85 Persen	99.360.000		
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Sosialisasi yang di laksanakan		1 Kali	1 kali	82.800.000	87.790.000	87.790.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani	1 Kali	99.360.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bisa kelompok petani	Kelompok	Kelompok	100 Kelompok	100 Kelompok	474.132.000	298.743.450	980.543.450						100 Kelompok	650.000.000		
3	27	7	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bisa Kelompok Tani	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	474.132.000	298.743.450	980.543.450						90 Persen	650.000.000		
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelomgagan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah BPP yang di bantu		8 BPP		267.183.500	254.079.500	310.879.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tani	8 BPP	350.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
					Jumlah Penyuluh yang menerima UKB (Lang Kerja Bimbingan)			110 Orang	110 Orang				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal					110 Orang			
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang dibangun/dibah		1 BPP		53.948.500	44.663.900	669.663.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tani	1 BPP	100.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
					Jumlah Pertemuan Penyuluhan yang di laksanakan			2 Kali	2 Kali				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fiskal					2 Kali			
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						10.388.779.181	10.128.848.661	10.382.877.666							13.427.219.431		
3	30	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	6.958.096.281	7.142.398.081	7.102.956.998						22 Nilai	7.777.219.431		
3	30	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	513.146.900	706.219.100	667.599.100						90 Persen	668.000.000		
					Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen										90 Persen		
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		6 Dokumen	6 Dokumen	385.460.900	579.684.900	552.924.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	6 Dokumen	490.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun		6 Dokumen	6 Dokumen	127.705.000	126.534.200	134.634.200	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	6 Dokumen	175.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	5.013.179.431	5.013.179.431	4.526.430.856						100 Persen	5.037.219.431		
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		50 Orang	38 Orang	4.977.219.431	4.977.219.431	4.466.070.856	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	38 Orang	4.977.219.431	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di dan pen-papaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/urusan		1 Laporan	2 Laporan	35.960.000	35.960.000	60.360.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	2 Laporan	60.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Diklat	Diklat	7 Diklat	1 Diklat	39.034.000	-	12.534.000						1 Diklat	150.000.000		
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		7 Diklat	1 Diklat	39.034.000	-	12.534.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beretnis dan berdaya saing	ASN	1 Diklat	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	682.936.900	666.647.500	881.041.500						100 Persen	1.175.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022			RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah				
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan			30 Jenis	30 Jenis	25.972.500	25.972.500	25.843.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	30 Jenis	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			3 Jenis	7 Jenis	104.100.900	194.615.500	235.474.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	7 Jenis	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			3 Jenis	4 Jenis	37.200.000	84.200.000	119.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	4 Jenis	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			5 Jenis	6 Jenis	25.519.500	25.519.500	47.519.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	6 Jenis	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perantaraan Penunjang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			120 Eksemplar	120 Eksemplar	16.000.000	16.000.000	16.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	120 Eksemplar	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			105 Kali	85 Kali	454.344.000	520.540.000	438.042.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD	85 Kali	650.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	251.800.000	252.383.200	203.983.200						100 Persen	305.000.000	
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	100 Persen	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			7 Rekening	5 Rekening	150.000.000	150.000.000	101.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	5 Rekening	170.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			10 Orang	10 Orang	95.800.000	96.383.200	96.383.200	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	10 Orang	125.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	438.580.050	503.968.850	790.608.300						100 Persen	445.000.000	
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kewilayahan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kewilayahan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			20 Unit	20 Unit	98.600.000	143.859.200	134.859.200	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD	20 Unit	175.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			30 uNIT	55 uNIT	46.800.000	46.800.000	71.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD	55 uNIT	70.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Unit	3 Unit	313.180.000	313.309.600	383.949.100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD	3 Unit	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang difasilitasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	173.751.000	122.150.750	122.150.750						100 Persen	500.000.000	
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengolahan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Lini Usaha Toko Swalayan	Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	119.904.000	82.083.750	82.083.750						100 Persen	250.000.000	
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang di berikan			5 izin	5 izin	119.904.000	82.083.750	82.083.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	5 izin	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	2	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Cakupan Penerbitan SKA	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	53.847.000	40.067.000	40.067.000						100 Persen	250.000.000	
3	30	2	2.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang di terbitkan			100 Persan	100 Persan	53.847.000	40.067.000	40.067.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	100 Persan	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.292.535.000	1.520.004.600	1.519.992.900						100 Persen	2.200.000.000	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	944.278.000	1.021.156.600	1.021.144.900						100 Persen	1.500.000.000	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah DED dan Pasar yang di bangun			13 Unit	13 Unit	653.174.000	739.344.000	739.344.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Penerimaan		Masyarakat	13 Unit	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembinaan retribusi yang di laksanakan			4 Kali	4 Kali	291.101.000	281.812.600	281.800.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Penerimaan		Masyarakat	4 Kali	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kertajaya	Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	348.260.000	498.848.000	498.848.000						100 Persen	700.000.000	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembinaan ketertihan yang di laksanakan			6 Kali	6 Kali	348.260.000	498.848.000	498.848.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	6 Kali	700.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting lainnya	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	336.589.900	267.177.100	313.597.100						100 Persen	500.000.000	
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	307.489.900	238.077.100	234.497.100						100 Persen	300.000.000	
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengawasan yang dilakukan			30 Kali	30 Kali	307.489.900	238.077.100	234.497.100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah			Distributor / P/	30 Kali	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Monev Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	29.100.000	29.100.000	29.100.000						100 Persen	200.000.000	
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga yang dilaksanakan			20 Kecamatan	20 Kecamatan	29.100.000	29.100.000	29.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Distributor / P/	20 Kecamatan	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	3			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar Rupiah	Milyar Rupiah	15 Milyar Rup	15 Milyar Rup	899.725.000	578.473.000	738.606.000						409,15 Milyar Rupiah	1.000.000.000	
3	30	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlarian Konsumen calon konsumen terhadap hasil Promosi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	899.725.000	578.473.000	738.606.000						100 Persen	1.000.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPJ 2022	APBD 2022					RKPJ 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi														
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran yang diikuti	8 Kali	3 Kali	899.225.000	578.473.000	738.608.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	OPD	3 Kali	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	6			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	Persen	85 Persen	85 Persen	505.434.000	341.623.400	341.497.400			85 Persen	950.000.000				
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berspa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan yang dilaksanakan	Cakupan Metrologi Legal, Berspa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	505.434.000	341.623.400	341.497.400			100 Persen	950.000.000				
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berspa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang dilaksanakan	11 Kali	11 Kali	243.907.000	181.021.800	180.969.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengguna Alat	11 Kali	400.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan dan Penyuluhan yang di laksanakan	26 Kali	26 Kali	98.583.000	95.521.000	95.521.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengguna Alat	26 Kali	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan dan Pengembangan SDM yang di lakukan	5 Kali	5 Kali	202.944.000	105.280.600	105.208.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengguna Alat	5 Kali	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	Persen	85 Persen	85 Persen	262.048.000	157.021.750	214.076.500			85 Persen	500.000.000				
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Parten	Parten	85 Parten	85 Parten	262.048.000	157.021.750	214.076.500			85 Parten	500.000.000				
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Pembentukan SRG	100 Persen	100 Persen	262.048.000	157.021.750	214.076.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	100 Persen	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						4.786.440.250	2.322.630.670	1.250.643.370				5.000.000.000				
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persen	Persen	85 Persen	85 Persen	4.661.631.250	2.134.390.670	1.162.523.370			85 Persen	5.000.000.000				
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	4.661.631.250	2.134.390.670	1.162.523.370			100 Persen	5.000.000.000				
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi yang di lakukan	10 Kali	3 Kali	832.871.250	741.662.300	389.795.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	IKM	3 Kali	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembinaan Industri dan Pemertan Masyarakat	Jumlah IKM yang di bina	45 IKM	24 IKM	3.808.760.000	1.392.728.300	772.728.300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	IKM	24 IKM	4.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penerbitan Usaha Industri	Persen	Persen	50 Persen	50 Persen	70.395.000	49.428.000	49.428.000			50 Persen	250.000.000				
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	70.395.000	49.428.000	49.428.000			100 Persen	250.000.000				
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah izin industri yang di berikan rekomendasi	5 Izin	5 Izin	70.395.000	49.428.000	49.428.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	5 Izin	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan sistem Informasi Industri nasional	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	54.414.000	38.702.000	38.702.000			100 Persen	250.000.000				
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Informasi Industri yang disediakan untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	54.414.000	38.702.000	38.702.000			100 Persen	250.000.000				
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Pengolahan Data yang di lakukan	5 Kali	5 Kali	54.414.000	38.702.000	38.702.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	5 Kali	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						88.824.025.124	82.958.611.569	83.332.380.220				98.312.681.000				
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	56.164.501.724	53.684.868.824	53.985.897.475			22 Nilai	62.353.843.500				
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	858.023.175	519.638.975	569.968.914			90 Persen	1.025.000.000				
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	234.619.150	199.683.600	179.591.811	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bagian di Lit	3 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	258.591.975	117.389.475	126.938.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bagian di Lit	1 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	78.410.000	34.073.800	34.073.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bagian di Lit	1 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.056.150	20.025.500	30.133.705	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bagian di Lit	1 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.923.150	17.899.050	17.899.050	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bagian di Lit	1 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	58.838.750	41.764.500	41.764.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bagian di Lit	2 Dokumen	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	163.364.000	128.843.000	139.587.250	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bagian di Lit	2 Dokumen	180.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	19.423.805.929	18.994.173.179	18.294.871.809			100 Persen	21.382.000.000				
4	1	1	2.02	1	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	179.000.000	179.000.000	17.093.357.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	19.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	2.02	1	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	179 Orang	179 Orang	17.892.328.284	17.892.328.419	17.093.357.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bagian di Lit	179 Orang	19.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target SKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2022			Tahun 2023			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan	Nasional			Daerah								
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			7 Orang	7 Orang	417.481.000	349.137.800	384.913.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	7 Orang	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			4 Orang	4 Orang	407.125.920	303.999.710	330.414.594	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	4 Orang	450.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	283.507.775	186.037.500	186.397.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	2 Dokumen	278.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	6	Pengabdian dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Laporan yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	67.591.225	45.498.500	70.618.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	1 Dokumen	74.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun			3 Dokumen	3 Dokumen	284.809.425	182.981.150	182.981.150	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	3 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	70.912.300	34.190.000	34.190.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	2 Dokumen	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.05		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	118.624.000	84.718.000	63.600.000							100 Persen	131.000.000	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan			8 Set	8 Set	45.200.000	30.600.000	30.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkup	8 Set	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan			2 Diklat	3 Diklat	73.424.000	54.118.000	33.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkup	3 Diklat	81.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	13.855.233.000	13.175.516.000	14.866.450.000							100 Persen	15.566.700.000	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	130.000.000	130.000.000	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	2 Jenis	143.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			7 Jenis	8 Jenis	421.937.000	418.937.000	727.276.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	8 Jenis	470.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			5 Jenis	3 Jenis	199.500.000	199.500.000	231.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	3 Jenis	219.450.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	2.728.500.000	2.728.500.000	3.423.460.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	2 Jenis	3.001.350.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			3 Jenis	3 Jenis	106.417.000	106.417.000	106.417.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	3 Jenis	118.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Acara Kunjungan Tamu yang difasilitasi			40 Kali	40 Kali	450.000.000	425.000.000	390.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	40 Kali	495.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			16812 Kali	2951 Kali	9.709.879.000	9.056.162.000	9.766.797.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	2951 kali	11.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan elektronisasi data yang dikelola			100 Persen	100 Persen	109.000.000	109.000.000	71.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	100 Persen	119.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.346.500.000	3.326.808.000	3.336.596.200							100 Persen	3.681.150.000	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			100 Persen	100 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	100 Persen	44.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			30 Rekening	30 Rekening	1.584.000.000	1.584.000.000	1.633.019.800	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	30 Rekening	1.742.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara			5 Jenis	5 Jenis	304.000.000	304.000.000	344.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	5 Jenis	334.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			86 Orang	83 Orang	1.418.500.000	1.398.838.000	1.319.578.400	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	83 Orang	1.560.350.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.697.250.000	2.647.379.600	2.815.179.600							100 Persen	2.966.975.000	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			2 Unit	2 Unit	320.000.000	320.000.000	325.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	2 Unit	330.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			49 Unit	49 Unit	1.538.950.000	1.488.950.000	1.688.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	49 Unit	1.692.845.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			8 Unit	8 Unit	599.700.000	599.829.600	669.829.600	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	8 Unit	659.670.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	57.260.000	57.260.000	57.260.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	1 Unit	62.986.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			4 Unit	1 Unit	203.340.000	203.340.000	74.140.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11	Bagian di Lit	1 Unit	221.474.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan pelayanan kependidikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.018.725.620	1.010.325.620	989.392.620							100 Persen	1.120.918.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendaman										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah							
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan WKDH	Jumlah Rincian Olok Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada KDH dan WKDH				9 Rekening	9 Rekening	176.072.620	176.072.620	176.072.620	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah	9 Rekening	194.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Bupati/Wakil Bupati yang disediakan				28 Stel	28 Stel	163.880.000	155.480.000	155.480.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah	28 Stel	180.268.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Bupati dan Wakil Bupati				2 Kali	2 Kali	78.775.000	78.775.000	57.840.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah	2 Kali	86.650.500	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Pemangut Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rincian Olok Dana Pemangut Operasional yang diberikan kepada KDH dan WKDH				1 Rekening	1 Rekening	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah	1 Rekening	660.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kenunabnggangan Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Kenunabnggangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	4.946.340.000	4.735.102.400	3.856.626.200					100 Persen	5.600.000.000		
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				16 Kegiatan	10 Kegiatan	3.126.545.000	2.972.694.600	2.395.215.400	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah	10 Kegiatan	3.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 Kegiatan	7 Kegiatan	1.819.795.000	1.762.407.800	1.461.413.800	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah	7 Kegiatan	2.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan IKM minimal 80	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	790.000.000	600.707.050	600.707.050					100 Persen	815.100.000		
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN, Perda dan Perbup yang ditetapkan				4 Dokumen	4 Dokumen	259.843.150	201.337.150	201.337.150	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD	4 Dokumen	285.827.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi				85 Persen	85 Persen	51.349.600	49.706.700	49.706.700	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD	85 Persen	56.485.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Fatah Lakasana	Jumlah Dokumen Laporan SOP dan Hasil Monitoring Pelayanan Publik di Lingkungan Pemah. lebih yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	185.660.750	133.117.100	133.117.100	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD	1 Dokumen	205.327.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah yang dicapai.				7 Nilai	7 Nilai	253.146.500	196.526.100	196.526.100	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD	7 Nilai	267.461.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	9.150.000.000	8.592.500.000	8.592.500.000					100 Persen	10.065.000.000		
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan fasilitas Keprotokolan yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	3.037.800.000	2.885.910.000	2.885.910.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	FORKOPIMDA	100 Persen	3.341.380.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan komunikasi pimpinan yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	3.049.600.000	2.797.120.000	2.797.120.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	FORKOPIMDA	100 Persen	3.354.560.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Hasil Laporan Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Indragiri Hilir				3 Jenis	3 Jenis	3.062.600.000	2.909.470.000	2.909.470.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	FORKOPIMDA	3 Jenis	3.368.860.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	27.789.523.400	24.571.543.695	24.094.283.695					100 Persen	30.660.479.000		
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100 Persen	100 Persen	1.850.000.000	1.425.750.000	1.764.900.000					100 Persen	2.112.000.000	
4	1	2	2.01	1	Pemetaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan yang mereminta Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten/ Kota terkait Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se Provinsi Riau				0 Kecamatan	0 Kecamatan	1.033.300.000	656.590.000	828.730.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	FORKOPIMDA	0 Kecamatan	1.213.630.000	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah pelaksanaan evaluasi terkait Pengukuran Tingkat dan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				20 Kecamatan	20 Kecamatan								20 Kecamatan		
						Jumlah Rapat Koordinasi Penda Se Kab. lebih yang difasilitasi				15 Kali	15 Kali								15 Kali		
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kecamatan yang disurvei terkait pendataan dan inventarisasi Namanama Rupabumi Urur Alam dan Buatan dalam Gasetr Nasional				0 Kecamatan	0 Kecamatan	223.000.000	192.850.000	359.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	FORKOPIMDA	0 Kecamatan	245.300.000	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Kelurahan yang di Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan DAU Tambahan (APRN) dan Dana Pendampingan (APBD Kabupaten)				0 Kelurahan	0 Kelurahan								0 Kelurahan		
						Jumlah Pembuatan Peta berskala Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan				1 Kecamatan	1 Kecamatan								1 Kecamatan		
						Jumlah Penyusunan Administrasi Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Indragiri Selatan dan Indragiri Hilir Utara yang dilaksanakan				0 Penyusunan	0 Penyusunan								0 Penyusunan		
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten				3 Laporan	3 Laporan	593.700.000	576.310.000	576.310.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	FORKOPIMDA	3 Laporan	653.070.000	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan								4 Kegiatan		
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan Pembiinan dan Fasilitasi kegiatan keagamaan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	24.579.523.750	21.423.294.045	20.531.894.045						100 Persen	26.993.476.000	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Bantuan Sarana Keagamaan yang disediakan				7 Jenis	7 Jenis	9.167.477.413	7.508.767.723	7.067.517.723	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Keag	7 Jenis	10.084.445.000	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi				15 Kali	15 Kali								15 Kali		
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Mahasiswa Tidak Mampu yang diberikan Bantuan				305 Orang	305 Orang	2.835.941.940	2.120.461.955	2.116.571.955	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Keag	305 Orang	3.119.556.000	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Pembinaan Terhadap Organisasi Sosial Keagamaan yang dilaksanakan				10 Kali	10 Kali								10 Kali		
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Organisasi Sosial Keagamaan yang diberikan bantuan				355 Organisasi	355 Organisasi	12.575.904.400	11.794.064.350	11.347.814.350	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Keag	355 Organisasi	13.789.495.000	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah pembinaan dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat				10 Jenis	10 Jenis								10 Jenis		
						Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Identifikasi Bakat				200 Orang	200 Orang								200 Orang		
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Pelayanan Produk Hukum dan Bantuan Hukum	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	909.999.850	836.499.850	1.036.499.850						100 Persen	1.001.000.000	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi				25 Rancangan	25 Rancangan	200.000.000	211.780.000	231.520.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyusunan Pro	20 Produk Hukum Daerah	220.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelempok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		APBD 2022		RKPD 2022 Perubahan						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan											
4	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	10.489.368.050	10.563.560.600	12.163.741.350					100 Persen	11.018.836.448	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan			53 Jenis	53 Jenis	199.480.950	199.480.950	199.480.950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	53 Jenis	209.465.498	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			138 Jenis	145 Jenis	2.379.040.000	2.034.190.000	2.005.890.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	143 Jenis	2.497.992.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			14 Jenis	12 Jenis	834.580.000	617.990.000	576.990.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	12 Jenis	876.309.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			5 Jenis	6 Jenis	654.580.000	684.180.000	832.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	6 Jenis	687.309.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			30 Jenis	32 Jenis	636.08.150	661.08.150	738.726.150	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	32 Jenis	667.808.550	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan			255 Eksemplar	205 Eksemplar	426.000.000	426.000.000	360.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	205 Eksemplar	447.300.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			888 Kali	1028 Kali	5.359.668.950	5.940.701.500	7.529.742.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	1028 Kali	5.627.652.400	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.063.112.000	638.230.000	608.230.000					100 Persen	1.116.267.600	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun			4 Unit	3 Unit	770.230.000	638.230.000	608.230.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	3 Unit	808.741.500	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.294.035.650	2.314.225.200	2.321.025.200					100 Persen	2.408.737.800	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			25 Rekening	25 Rekening	1.104.880.000	1.104.880.000	1.104.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	25 Rekening	1.160.124.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan			63 Orang	59 Orang	1.189.155.650	1.209.343.200	1.016.143.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	59 Orang	1.248.613.400	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.666.180.000	3.073.384.400	5.315.089.400					100 Persen	2.799.489.000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			7 Unit	7 Unit	480.900.000	480.900.000	800.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	7 Unit	504.945.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			157 Unit	157 Unit	602.100.000	636.655.200	643.655.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	157 Unit	632.205.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			150 Unit	150 Unit	303.160.000	303.419.200	288.419.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	150 Unit	318.318.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara			44 Unit	44 Unit	806.180.000	1.272.090.000	1.252.090.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	44 Unit	846.489.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			3 Unit	2 Unit	323.390.000	227.870.000	180.375.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	2 Unit	339.559.500	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			116 Unit	116 Unit	150.450.000	150.450.000	150.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	116 Unit	157.972.500	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan DPRD yang diselenggarakan sesuai SOP	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	25.100.214.592	25.419.688.792	25.419.688.792					100 Persen	26.358.225.200	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Binaan Objek Caji dan Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD			48 Rekening	48 Rekening	24.129.013.992	24.129.013.992	24.129.013.992	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	48 Rekening	25.331.664.600	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up			45 Orang	45 Orang	971.200.600	1.290.644.800	1.290.644.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPR	45 Orang	1.079.760.630	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	7.922.484.250	7.990.745.150	7.978.098.450					100 Persen	8.318.608.425	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	1	2.16	3	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang difasilitasi			505 Kali	485 Kali	4.966.978.350	4.938.239.050	4.767.872.350	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	485 Kali	5.215.327.250	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pemenuhan Logistik Rumah Tangga Pimpinan			7900 Kali	7900 Kali	2.955.505.900	3.052.506.100	3.210.226.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	7900 Kali	3.101.281.195	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di fasilitasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	42.275.400.100	48.741.502.760	51.475.788.710					100 Persen	44.282.070.005	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase Rapat-rapat Pembahasan Rancangan dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	persen	persen	90 persen	90 persen	3.660.475.000	3.851.346.250	3.852.820.250					90 persen	3.843.496.600	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang di Bahas			9 Buah	9 Buah	3.660.475.000	3.851.346.250	3.852.820.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	9 Buah	3.843.496.600	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase Rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi			100	100	905.175.000	1.347.375.000	1.447.345.000					100	950.433.750	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat Partisupa			36 Kali	40 Kali	905.175.000	1.347.375.000	1.447.345.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	40 Kali	950.433.750	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan	persen	persen	90 persen	90 persen	1.868.274.050	1.124.128.000	1.224.128.000					90 persen	1.961.687.753	SEKRETARIAT DPRD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		APBD 2022		RKPJ 2022 Perubahan						Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPJ 2022	APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan										
4	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	1.868.274.050	1.124.128.000	1.224.128.000	1.224.128.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	2 Kali	1.961.687.753	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2.05	2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Acptansi Masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	persen	90 persen	90 persen	4.518.225.500	2.877.911.500	2.899.911.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	90 persen	4.744.136.828	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.05	3	Pelaksanaan Renc	Jumlah Renc dan Aspirasi yang ditrap	3 Kali	3 Kali	4.518.225.500	2.877.911.500	2.899.911.500	2.899.911.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	3 Kali	4.744.136.828	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2.07	2	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yang difasilitasi	persen	persen	90 persen	90 persen	1.597.149.000	1.591.137.000	1.480.517.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	90 persen	1.677.006.400	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Risalah Rapat dan Bahan Komunikasi dan Publikasi	14 Buah	12 Buah	1.597.149.000	1.591.137.000	1.480.517.000	1.480.517.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	12 Buah	1.677.006.400	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2.08	2	fasilitasi Tugas DPRD	persentase Rekomendasi yang dihasilkan dari Kunjungan Kerja DPRD	persen	persen	100 persen	100 persen	29.724.103.500	37.949.604.910	40.571.066.360	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	100 persen	31.105.308.075	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunjungan kerja yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD	2813 Kali	3017 Kali	25.804.633.500	34.234.176.910	36.480.681.000	36.480.681.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	3017 Kali	36.989.865.175	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Keprotokolan	658 Kali	783 Kali	3.919.470.000	3.715.428.000	4.090.385.800	4.090.385.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan /	783 Kali	4.115.443.500	SEKRETARIAT DPRD	
5				UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	1			PERENCANAAN						11.280.825.165	9.597.026.962	10.138.579.491						12.580.033.000		
5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batas-batas nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	7.911.041.064	7.392.861.944	7.336.634.608						22 Nilai	8.588.500.000	
5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	191.577.725	143.820.050	55.845.550						100 Persen	200.000.000	
5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	74.109.500	56.212.500	37.208.000	37.208.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Badan Perenc	5 Dokumen	80.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	117.384.225	87.587.500	18.587.500	18.587.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Perenc	3 Dokumen	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan	Orang	Orang	49 Orang	49 Orang	5.730.184.759	5.722.472.484	5.543.373.283						49 Orang	5.768.000.000	
5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	Orang	49 orang	44 orang	5.640.784.759	5.640.788.294	5.460.013.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	44 orang	5.675.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	89.400.000	81.684.200	83.360.200	83.360.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	1 Dokumen	90.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa keamanan gedung kantor dibayarkan	orang	orang	4 orang	4 orang	62.400.000	62.659.200	62.659.200						4 orang	50.000.000	
5	1	2.03	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan gedung kantor dibayarkan	Orang	Orang	4 Orang	4 Orang	62.400.000	62.659.200	62.659.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	4 Orang	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang disediakan	Sel	Sel	12 Sel	12 Sel	211.675.550	109.415.550	75.683.550						12 Sel	230.000.000	
5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah bengkel Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	Diklat	Diklat	5 Diklat	5 Diklat	27.000.000	5.000.000	19.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN Bappeda	5 Diklat	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Diklat	Diklat	5 Diklat	5 Diklat	194.675.500	104.415.500	54.683.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN Bappeda	8 Diklat	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.088.101.850	838.234.850	1.055.982.300						9 Jenis	1.700.000.000	
5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	Eksemplar	17 Eksemplar	17 Eksemplar									17 Eksemplar		
5	1	2.06	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	3 Jenis	3 Jenis									3 Jenis		
5	1	2.06	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	Jenis	9 Jenis	9 Jenis									9 Jenis		
5	1	2.06	1	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	Jenis	31 Jenis	31 Jenis									31 Jenis		
5	1	2.06	1	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali	Kali	164 Kali	164 Kali									164 Kali		
5	1	2.06	1	Penyediaan sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	Jenis	9 Jenis	9 Jenis	50.041.800	13.220.000	13.337.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	9 Jenis	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.06	2	Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlalatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	34 Jenis	34 Jenis	178.736.050	80.200.850	80.200.850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	34 Jenis	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	Liter	Liter	2500 Liter	2500 Liter	120.000.000	126.700.000	124.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	2500 Liter	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.06	1	Penyediaan makanan dan minuman yang disediakan untuk Jamuan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk Jamuan Tamu	LS	LS	40 LS	40 LS									40 LS		
5	1	2.06	5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat	LS	LS	50 LS	50 LS									50 LS		
5	1	2.06	5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Jenis	Jenis	11 Jenis	11 Jenis	38.840.000	34.186.000	35.686.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	11 Jenis	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exemplar	Exemplar	17 Exemplar	17 Exemplar	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	17 Exemplar	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	Kali	185 Kali	229 Kali	675.484.000	508.928.000	777.028.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabup	229 Kali	1.000.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Buah	Buah	500 Buah	500 Buah	289.203.200	288.795.000	296.655.875						500 Buah	105.500.000	
5	1	2.08	1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah rekening yang dibayarkan	Rekening	Rekening	6 Rekening	6 Rekening									6 Rekening		
5	1	2.08	1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	Orang	5 Orang	5 Orang									5 Orang		
5	1	2.08	1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Buah / Lembar	Buah / Lembar	500 Buah / Lembar	500 Buah / Lembar	5.000.000	3.500.000	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jas	500 Buah / Lembar	5.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendaman										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		RKPJ 2022		RPJMD 2022		RKPJ 2022 Perubahan		Lokasi				Sumber Dana		Prioritas		Kelempok Sasaran	
						Semula	Menjadi	RKPJ 2022	RPJMD 2022	RKPJ 2022	RKPJ 2022 Perubahan	Semula	Menjadi	Nasional	Daerah			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			6 Rekening	6 Rekening	198.600.000	198.600.000	204.854.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jas	6 Rekening	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			5 orang	5 orang	85.603.200	86.695.000	88.801.875	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jas	5 orang	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Bazarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset tetap Lainnya yang dipelihara	unit	unit	1 unit	1 unit	337.900.000	227.464.800	246.464.800						1 unit	500.000.000			
						Jumlah kendaraan Dinas/jabatan/operasional/Lapangan yang dipelihara	unit	unit	44 unit	44 unit									44 unit				
						Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung kantor Atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	unit	15 unit	15 unit									15 unit				
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinasnya			44 Unit	44 Unit	129.400.000	90.464.800	113.464.800	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan B	44 Unit	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara			1 Unit	1 Unit	24.500.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan B	1 Unit	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			15 Unit	15 Unit	184.000.000	131.000.000	127.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan B	15 Unit	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPJ	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.189.999.800	767.114.375	1.162.274.250						100 Persen	1.357.533.000			
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pemanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan PERD/PERKADA	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	501.955.050	359.207.550	685.347.500						2 Dokumen	650.000.000			
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Litnas SKPD	Jumlah pertemuan Forum Penyangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana			1 Kali	1 Kali	72.273.000	40.913.000		Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	54 OPD	1 Kali		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana			1 Kali	1 Kali	162.337.000	65.547.000	43.087.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	54 OPD	1 Kali	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Peretapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun			3 Dokumen	3 Dokumen	267.325.000	232.747.500	613.347.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	3 Dokumen	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi yang di pelihara dan atau dikembangkan	Aplikasi	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	162.811.500	107.621.700	107.621.700						1 Aplikasi	175.000.000			
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan			1 Aplikasi	1 Aplikasi	162.811.500	107.621.700		Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembinaan dan	1 Aplikasi	175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75% - 100%)	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	525.252.250	300.285.123	369.305.000						100 Persen	532.533.000			
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat daerah terkait			10 Kali	10 kali	446.650.500	274.664.500	345.966.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	10 kali	450.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun			10 Dokumen	10 Dokumen	78.602.750	25.623.625	23.338.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	54 OPD	10 Dokumen	82.533.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENCANA KETA, dan RENCANA)	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.179.794.301	1.437.050.633	1.639.670.633						100 Persen	2.650.000.000			
5	1	3	2.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya			38 Kali	38 Kali	144.955.250	77.148.600	83.431.600	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		tes	38 Kali	175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	84.124.800	48.947.300	62.821.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		tes	1 Dokumen	275.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang disusun			1 Dokumen	2 Dokumen	133.612.600	90.038.750	103.438.750	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		tes	2 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait			41 Kali	41 Kali	121.620.750	75.899.500	83.189.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		tes	41 Kali	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen yang disusun			1 Dokumen	2 Dokumen	106.005.000	64.933.300	105.703.300	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		tes	2 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait			1 Dokumen	1 Dokumen	269.631.600	175.266.900	155.540.130	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		tes	1 Dokumen	275.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
						Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait			30 Kali	30 kali									30 kali				
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen yang disusun, jumlah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	799.794.301	467.809.433	527.809.433						1 Dokumen	875.000.000			
						Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait	kali	kali	42 kali	42 kali										42 kali			
						Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan, jumlah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pembangunan daerah bidang kewilayahan	kali	kali	45 kali	45 kali									45 kali				
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen yang disusun			1 Dokumen	2 Dokumen	399.794.301	229.201.683	264.201.683	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan B	2 Dokumen	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
						Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait			80 kali	85 Kali									85 Kali				
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait			90 kali	103 Kali	360.000.000	238.607.730	263.607.730	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan B	103 kali	375.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	kali	kali	33 kali	33 kali	560.000.000	437.006.600	537.716.600						33 kali	600.000.000			
						Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	kali	kali	37 kali	37 kali									37 kali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target SKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelempok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2022			Tahun 2023							Pagu Indikatif	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD 2023										RKPD 2023 Perubahan
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			42 Kali	56 Kali	368.350.000	291.131.800	313.453.600	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantauan pemertaman pembangunan	perencanaan bs	56 Kali	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			33 Kali	53 Kali	191.650.000	145.874.800	202.261.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		perencanaan bs	53 Kali	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
8	8				PENELIHAN DAN PENGEMBANGAN																
8	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang dikaitkan dalam IGA	Persen	Persen	80 Persen	80 Persen	1.060.000.000	726.976.000	925.936.000					80 Persen	1.111.509.265		
						Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	Persen	Persen	40 Persen	40 Persen	1.060.000.000	726.976.000	925.936.000					40 Persen	1.111.509.265		
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Peraturan Kelibangan yang dihasilkan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	464.199.500	272.013.300	423.461.300					1 Dokumen	486.509.265		
5	5	2	2.01	1	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Pengukuran Indikator Kinerja Daerah			2 Laporan	2 Laporan	114.199.500	81.269.500	246.559.500	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perencanaan Bs	2 Laporan	119.059.265	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Potensi Daerah yang difasilitasi			1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen			
5	5	2	2.01	12	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	40.534.000	60.564.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Perencanaan Bs	1 Dokumen	105.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5	2	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Peningkatan Peraturan Baru yang/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah peraturan kelibangan yang dihasilkan			1 Perbup	1 Perbup	250.000.000	150.210.000	116.338.500	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perencanaan Bs	1 Perbup	262.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bidang teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	995.800.700	454.862.700	502.464.200					1 Dokumen	625.000.000		
					Jumlah surat/buletin/Majalah ilmiah yang diterbitkan				3 Terbitan	3 Terbitan								3 Terbitan			
					Jumlah Topik yang diseminasikan				1 Topik	1 Topik								1 Topik			
					Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				100 Persen	100 Persen								100 Persen			
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan			1 Dokumen	1 Dokumen	123.766.900	143.747.900	143.190.900	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	54 OPD	1 Dokumen	125.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Pemecur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah topik yang diseminasikan			1 Topik	1 Topik	246.233.100	183.756.100	203.368.600	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	54 OPD	1 Topik	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelibangan	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah ilmiah yang diterbitkan			3 Terbitan	3 Terbitan	225.800.700	127.438.700	135.904.700	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	54 OPD	3 Terbitan	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
8					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
8					KELUANGAN																
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	18.709.484.172	16.462.308.172	15.783.179.273					22 Nilai	23.401.544.260		
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	99.872.400	99.872.400	99.872.400					22 Nilai	128.418.311		
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah			21 Dokumen	2 Dokumen	60.600.000	60.600.000	60.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Badan P	2 Dokumen	94.860.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ihtisar Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ihtisar Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Dokumen	7 Dokumen	39.272.400	39.272.400	39.272.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Badan P	7 Dokumen	33.558.311	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	11.509.484.172	8.909.484.172	7.976.035.409					100 Persen	12.040.039.386		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN			90 orang	63 Orang/bulan	11.509.484.172	8.909.484.172	7.976.035.409	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	63 Orang/bulan	12.040.039.386	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
8	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkemampuan baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	71.506.000	71.506.000	84.634.000					90 Persen	116.055.450		
						Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	Persen	50 Persen	50 Persen									50 Persen		
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya			45 Setel	45 Paket	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN badan Per	45 Paket	84.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Diklat	2 orang	26.508.000	26.508.000	39.634.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN badan Per	2 orang	31.555.450	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.398.599.400	1.383.439.400	1.562.851.400					100 Persen	1.566.081.000		
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			14 jenis	1 Paket	28.081.000	28.081.000	28.081.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Baperd	1 Paket	28.081.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			56 jenis	11 Paket	283.682.400	283.682.400	424.982.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Baperd	11 Paket	425.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan			6 jenis	2 Paket	137.160.000	137.160.000	137.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Baperd	2 Paket	150.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan			46 jenis	3 Paket	225.840.000	225.840.000	225.840.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Baperd	3 Paket	230.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.06	6	Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			51 eksemplar	6 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Baperd	6 Dokumen	18.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			304 Kali	316 Laporan	713.856.000	698.696.000	736.808.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Baperd	316 Laporan	715.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	48.900.000	48.900.000	73.380.000					100 Persen	1.366.750.000		
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			2 Unit	3 Unit	48.900.000	48.900.000	73.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kantor Ba	3 Unit	1.366.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.514.908.500	1.518.796.500	1.497.056.914					100 Persen	1.552.400.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target SKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022			Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional								Daerah		
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			100 Person	1 Laporan	7.334.000	7.334.000	7.334.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Badan Per	1 Laporan	7.400.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan			72 rekening	12 Laporan	592.540.000	592.540.000	570.800.414	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Badan Per	12 Laporan	595.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			6 Unit	1 Laporan	915.034.500	918.922.500	918.922.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Badan Per	1 Laporan	950.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Bazang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Keteresediaan administrasi dan Satana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	310.325.000	308.325.000	384.400.000					100 Persen	435.000.000		
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penanganan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			38 Unit	38 Unit	115.000.000	115.000.000	130.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Badan Per	38 Unit	115.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			45 Unit	45 Unit	71.400.000	71.400.000	76.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Badan Per	45 Unit	75.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			2 Unit	3 Unit	53.925.000	51.925.000	103.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Badan Per	3 Unit	150.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	70.000.000	70.000.000	75.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Badan Per	3 Unit	95.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	Persen	10 Persen	10 Persen	3.755.888.700	4.121.981.700	4.056.979.000					10 Persen	6.196.800.113		
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	Persen	10 Persen	10 Persen	3.755.888.700	4.121.981.700	4.056.979.000					10 Persen	6.196.800.113		
5	2	4	2.01	2	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta tolok ukurannya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah			6 Dokumen	6 Dokumen	107.414.400	107.414.400	504.224.400	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	6 Dokumen	170.017.548	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyelebaran Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyelebaran kebijakan pajak daerah			2 Jenis	2 Laporan	47.992.000	47.992.000	47.992.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	2 Laporan	219.914.288	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah			2 Jenis	1 Unit	251.239.500	251.239.500	251.239.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	1 Unit	287.438.580	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah			3990 WP	12 Laporan	269.928.500	269.928.500	295.768.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	12 Laporan	1.043.867.994	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Penjualan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHHT)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya			5120 WP	4550 Objek Pajak	676.947.400	664.405.400	612.705.400	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	4550 Objek Pajak	1.100.387.540	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah			20225 WP	14300 Dokumen	719.075.000	719.075.000	719.074.950	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	14300 Dokumen	850.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah			3000 WP	3070 Layanan	334.346.700	332.971.700	375.363.700	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	3070 Layanan	356.083.640	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi			12 Laporan	12 Dokumen	153.036.300	153.036.300	153.221.400	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	12 Dokumen	258.911.567	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah			18150 WP	35400 Dokumen	763.578.000	737.998.000	737.998.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	35400 Dokumen	832.214.926	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah			510 WP	1500 Dokumen	105.706.900	105.706.900	214.961.900	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	1500 Dokumen	120.928.694	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah			200 WP	195 Dokumen	222.757.000	215.777.000	106.522.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	195 Dokumen	239.990.436	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah			3 Jenis	2 Laporan	61.597.300	58.507.300	58.507.300	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkrahankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11 (Sembel) Jen	2 Laporan	192.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4			UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	2	4			KEUANGAN						386.535.065.632	321.127.894.494	313.535.899.774						387.913.768.437		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	21.448.383.725	13.240.532.445	12.037.116.249					22 Nilai	22.275.500.000		
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dikren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	17.972.000	17.972.000	33.272.000						10 Dokumen	22.000.000	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	9.726.000	9.726.000	17.376.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BKAD KAB IN	2 Dokumen	12.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.01	6	Kecerdasan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun			72 Dokumen	72 Dokumen	8.246.000	8.246.000	15.896.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BKAD KAB IN	72 Dokumen	10.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	15.996.236.995	9.881.236.995	8.406.721.799					100 Persen	16.156.500.000		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			64 Orang	100 Persen	15.990.583.995	9.875.583.995	8.391.968.799	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BKAD KAB IN	100 Persen	16.150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pemanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2022			Tahun 2023				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan	Nasional							
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	60 Dokumen	60 Dokumen	5.653.000	5.653.000	14.753.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	60 Dokumen	6.500.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	311.888.180	69.682.300	69.682.300		100 Persen	350.000.000		
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	117.724.600	69.682.300	69.682.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	4 Kegiatan	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.149.546.050	1.753.577.050	1.894.206.050		100 Persen	2.230.000.000		
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	36.646.000	36.646.000	36.646.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	11 Jenis	40.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	150.463.800	130.463.800	130.463.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	6 Jenis	160.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 Jenis	17 Jenis	5.650.000	5.650.000	5.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	17 Jenis	10.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	206.176.000	176.396.000	204.571.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	6 Jenis	220.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	72.425.250	72.425.250	72.425.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	11 Jenis	80.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bagan yang disediakan	3200 Eksemplar	3200 Eksemplar	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	3200 Eksemplar	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	400 Kali	100 Persen	1.660.185.000	1.313.996.000	1.426.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	100 Persen	1.700.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	519.200.000	520.366.400	529.146.400		100 Persen	555.000.000		
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian ketersediaan kebutuhan surat menyurat	100 Persen	100 Persen	8.000.000	8.000.000	16.780.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	100 Persen	10.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	163.200.000	163.200.000	163.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	3 Rekening	185.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	19 Orang	19 Orang	349.166.400	349.166.400	349.166.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	19 Orang	360.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Bazarng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.621.740.500	997.697.700	1.104.127.700		100 Persen	2.900.000.000		
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizaman Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	42 Unit	42 Unit	438.140.500	438.270.100	556.450.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	42 Unit	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	75 Unit	75 Unit	457.200.000	457.977.600	438.577.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	75 Unit	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/dinhabilitasi	257 Unit	2 Jenis	81.450.000	81.450.000	109.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD KAB. IN	2 Jenis	100.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	331.856.643.737	305.977.348.899	299.667.469.955		100 Persen	332.265.263.437		
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun tepat waktu	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.554.986.700	1.349.626.000	1.697.160.000		100 Persen	1.760.889.600		
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Nota Kesepakatan KUA/PPAS yang diterbitkan	2 Dokumen	2 Dokumen	74.539.000	74.539.000	79.539.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	2 Dokumen	100.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Nota Kesepakatan KUA/PPAS yang diterbitkan	2 Dokumen	2 Dokumen	65.915.000	65.915.000	70.915.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	2 Dokumen	100.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	825.639.750	751.957.200	961.957.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	8 Dokumen	900.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	448.003.400	391.770.300	439.120.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	2 Dokumen	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	140.889.600	65.444.500	145.628.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	5 Kali	163.889.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian layanan perbendaharaan daerah sesuai SOP	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	889.645.300	786.802.300	989.809.300		100 Persen	1.000.000.000		
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dilaksanakan	29 Kali	29 Kali	131.050.000	112.488.000	112.488.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	29 Kali	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	380.560.000	347.209.000	435.762.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	24 Dokumen	400.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	128.550.000	88.830.000	136.470.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	2 Kali	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penetasuhan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penetasuhan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	249.485.100	240.275.100	305.089.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	1 Dokumen	300.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	919.744.100	886.294.000	1.136.294.000		100 Persen	990.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2022			Tahun 2023			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan	Nasional							
5	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	103.481.000	103.373.000	124.150.770	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	4 Dokumen	120.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	2	2.03	4	Kontribusi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	392.910.100	377.748.000	553.022.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	2 Dokumen	400.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	295.491.000	292.001.000	328.507.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	4 Dokumen	320.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	127.862.000	113.172.000	130.614.250	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 OPD	1 Dokumen	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	327.931.021.637	302.450.975.599	295.342.555.655		100 Persen	327.931.021.637			
5	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah persentase anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	100 Persen	280.271.004.500	274.117.496.700	274.117.496.700	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	54 OPD	100 Persen	280.271.004.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2.04	9	Pengalokasian Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah persentase anggaran Dana Darurat dan Mendesak terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	100 Persen	43.000.000.000	23.296.605.924	16.188.185.980	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	54 OPD	100 Persen	43.000.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2.04	10	Pengalokasian Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah persentase anggaran Dana Bagi Hasil terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	100 Persen	4.660.017.137	5.036.872.975	5.036.872.975	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	54 OPD	100 Persen	4.660.017.137	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pemanfaatan SIPD	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	561.248.200	501.651.200	501.651.200		100 Persen	580.354.200			
5	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang diimplementasikan dan terpelihara	2 Aplikasi	2 Aplikasi	561.248.200	501.651.200	501.651.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 OPD	2 Aplikasi	580.354.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	3.029.976.170	1.910.013.570	1.831.233.570		90 Persen	3.370.000.000			
5	2	3.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset dan Barang Daerah yang dimanfaatkan dengan tepat sesuai aturan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.029.976.170	1.910.013.570	1.831.233.570		100 Persen	3.370.000.000			
5	2	3.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Keperluan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Keperluan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	845.218.800	375.348.400	289.916.400	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 OPD	2 Dokumen	950.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	3.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	10 Dokumen	10 Dokumen	48.602.200	48.602.200	48.602.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 OPD	10 Dokumen	60.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	3.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Unit	4 Unit	1.231.482.670	664.866.670	542.356.670	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 OPD	4 Unit	1.350.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	3.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dioptimalisasikan	2 Jenis	2 Jenis	233.443.500	233.443.500	337.170.500	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 OPD	2 Jenis	260.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	3.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	463.973.000	461.671.800	507.691.800	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 OPD	10 Dokumen	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	3.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	3 Kali	3 kali	207.296.000	126.121.000	105.596.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 OPD	3 Kali	250.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3			KEPEGAWAIAN														
5	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/OTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	11.665.311.241	9.771.890.241	8.900.481.146		22 Nilai	11.779.270.345			
5	3	1.201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	49.200.000	49.200.000	196.608.000		90 Persen	36.000.000			
5	3	1.201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	90 Persen	90 Persen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	0	5 dokumen	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	3	1.201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 dokumen	6 dokumen	37.200.000	37.200.000	186.608.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	0	6 dokumen	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	3	1.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100 Persen	100 Persen	5.299.966.241	5.299.966.241	3.972.673.646		100 Persen	5.203.176.845				
5	3	1.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	45 orang	40 orang	5.299.966.241	5.299.966.241	3.972.673.646	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingkup	40 orang	5.203.176.845	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	3	1.205		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Persen	50 Persen	50 Persen	158.580.500	158.520.500	218.550.500		50 Persen	190.360.000			
5	3	1.205	7	Pemulanaan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi	40 Persen	40 Persen							40 Persen				
5	3	1.205	7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemulanaan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	100 persen	100 persen	69.061.000	69.061.000	117.661.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	100 persen	125.360.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	3	1.205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan	55 Kegiatan	55 Kegiatan	89.519.500	89.259.500	100.889.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	55 Kegiatan	65.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	3	1.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1.070.700.960	758.244.000	634.395.500		100 Persen	1.433.850.000			
5	3	1.206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan penerangan yang disediakan	19 jenis	10 jenis	16.500.000	16.500.000	5.159.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingkup	10 jenis	16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
5	3	1.206	2	Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 jenis	37 jenis	262.366.960	30.000.000	145.916.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingkup	37 jenis	585.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tertentu		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah	
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	60.160.000	60.160.000	53.440.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	2 Jenis	64.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			12 Jenis	11 Jenis	34.400.000	34.400.000	29.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	11 Jenis	35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			6456 Eksemplar	130 Eksemplar	30.474.000	30.474.000	13.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	130 Eksemplar	33.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			140 kali	135 kali	666.800.000	563.710.000	587.630.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	135 kali	700.350.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	60.000.000	37.800.000	37.800.000			100 Persen	60.000.000	
5	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			2 unit	1 unit	60.000.000	37.000.000	37.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	1 unit	60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	151.128.500	151.323.900	151.323.900			100 Persen	151.000.000	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sunat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			100 persen	100 persen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	100 persen	20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			48 rekening	48 rekening	103.602.000	103.602.000	103.602.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	48 rekening	98.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			3 orang	3 orang	39.527.500	39.721.900	39.721.900	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	3 orang	35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.09		Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	877.536.305	126.041.105	136.041.105			100 Persen	155.000.000	
					Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen			100 Persen	100 Persen							100 Persen		
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			32 unit	32 unit	103.376.305	101.441.105	111.441.105	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	32 unit	80.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			42 unit	42 unit	24.600.000	24.600.000	24.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN di Lingsha	42 unit	25.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Hasil Penelitian Mandiri Tim Mandiri Penerimaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai		Nilai	270 Nilai	270 Nilai	3.998.217.735	3.194.794.495	3.351.888.495			270 Nilai	4.547.885.500	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang di angkat melalui Seleksi Pengadaan ASN	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	922.656.750	922.656.750	1.091.816.750			60 Persen	1.560.070.000	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan formasi ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dilakukan secara terbuka			350 orang	432 orang	525.746.750	525.746.750	582.832.750	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	432 orang	891.220.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah administrasi ASN yang memasuki BUP yang terkoleksi dan terselesaikan			220 orang	220 orang	124.421.000	124.421.000	124.421.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	220 orang	200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	8	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Korpi yang difasilitasi.			4 kali	4 kali	169.564.000	169.564.000	169.564.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	4 kali	250.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Penerbitan Kartu ASN			190 orang	950 orang	43.889.000	43.889.000	78.641.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	950 orang	51.995.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Elektronik Kepegawaian terkoleksi secara update			5150 orang	5150 orang	59.036.000	59.036.000	136.358.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	5150 orang	167.255.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	560.584.185	421.681.250	438.177.250			80 Persen	447.000.000	
5	3	2	2.02	1	Pengadaan Mutasi ASN	Jumlah usulan Mutasi ASN yang ditindaklanjuti			500 orang	400 orang	301.681.250	251.681.250	251.681.250	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	400 orang	207.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	2	Pengadaan Keseluruhan Pangkat ASN	Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terkoleksi dan terselesaikan			1200 orang	1400 orang	238.702.935	170.000.000	186.496.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	1400 orang	240.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	Persen		Persen	48 Persen	48 Persen	1.798.955.800	1.403.892.495	1.219.396.495			48 Persen	1.887.322.500	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti seleksi dan peningkatan kompetensi			161 orang	100 orang	1.154.427.600	799.284.255	716.788.255	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	100 orang	1.262.322.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	4	Pengadaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti izin belajar dan tugas belajar			120 orang	120 orang	644.528.200	604.688.200	502.688.200	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	120 orang	625.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	716.221.000	446.864.000	602.888.000			90 Persen	653.491.000	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang ditindaklanjuti			4 Laporan	4 Laporan	254.536.000	254.536.000	259.970.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	4 Laporan	183.991.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	4	Pengadaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN berprestasi yang diberi penghargaan			440 orang	440 orang	295.000.000	86.918.000	110.036.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	440 orang	295.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti			100 persen	100 persen	95.100.000	95.100.000	232.492.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	100 persen	95.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.712.549.000	2.306.369.000	1.716.485.500					3.791.081.500	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen		Persen	53 Persen	53 Persen	2.712.549.000	2.306.369.000	1.716.485.500			53 Persen	3.791.081.500	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	277.549.000	174.459.000	174.459.500			80 Persen	352.025.000	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Aparatur yang terfasilitasi mengikuti diklat teknis			8 orang	8 orang	277.549.000	174.459.000	179.433.500	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN se Kabupa	8 orang	352.025.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif		RPPD 2022	APBD 2022					RPPD 2022 Perubahan	Lokasi		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022													
5	4	2	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pim / Diklat Penjenjangan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.435.000.000	2.131.910.000	1.537.050.000					100 Persen	3.439.056.500				
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar / Prajabatan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen					
5	4	2	2.02	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Keperencanaan, dan Prajabatan	Jumlah Aparatur yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Dasar dan Diklat Penjenjangan			152 orang	136 orang	2.435.000.000	2.131.910.000	1.537.050.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	ASN Se Kabup	136 orang	3.439.056.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA				
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						10.809.636.607	10.503.693.707	11.549.900.122						12.496.812.807				
6	1			INSPEKTORAT DAERAH						7.874.772.507	7.674.604.807	8.036.260.972						22 Nilai	8.736.983.807			
6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai													
6	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	11.880.000	11.880.000	13.128.000					90 Persen	15.730.000				
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun		7 Dokumen	7 Dokumen	11.880.000	11.880.000	13.128.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inspektoriat Das	7 Dokumen	15.730.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	6.496.838.307	6.496.838.307	6.534.953.472					100 Persen	6.681.900.607				
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		53 Orang	53 Orang	6.496.838.307	6.496.838.307	6.534.953.472	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Insep	53 Orang	6.681.900.607	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	234.068.500	111.032.500	148.707.500					100 Persen	257.400.000				
					Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen									90 Persen				
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		3 Diklat	3 Diklat	234.068.500	111.032.500	148.707.500	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	kantor dan apa	3 Diklat	257.400.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	678.075.700	715.149.700	962.241.700					100 Persen	1.388.577.600				
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan		2 Jenis	2 Jenis	3.566.000	3.566.000	3.566.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gedung dan ap	2 Jenis	3.922.600	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		4 Jenis	4 Jenis	98.771.700	98.771.700	142.081.700	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gedung dan ap	4 Jenis	108.647.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan		8 Eksemplar	8 Eksemplar	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gedung dan ap	8 Eksemplar	23.760.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan		30 Kali	30 Kali	535.538.000	597.812.000	801.624.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gedung dan ap	30 Kali	1.058.000.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	300.410.000	274.317.200	290.717.200					100 Persen	317.173.600				
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Suntu Memurat	Capaian ketersediaan kebutuhan suntu memurat		100 Persen	100 Persen	3.510.000	3.510.000	3.510.000	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor dan apa	100 Persen	3.385.600	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		4 Rekening	4 Rekening	128.900.000	101.900.000	118.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor dan apa	4 Rekening	141.750.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan		14 Orang	14 Orang	168.000.000	168.907.200	168.907.200	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kantor dan apa	14 Orang	170.000.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.09	Pembelihan/Bazas Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	63.500.000	63.387.100	86.513.100					100 Persen	79.200.000				
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		11 Unit	11 Unit	27.000.000	24.000.000	24.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana dan pra	11 Unit	29.700.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.09	6	Pembelihan/Pemalanan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemalanan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		30 Unit	30 Unit	11.000.000	15.887.100	17.513.100	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana dan pra	30 Unit	16.500.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	1	2.09	10	Pembelihan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	25.300.000	25.300.000	45.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana dan pra	2 Unit	33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	2		PROGRAM PENYELINGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rencana aksi program pembesantasan konsep terintegrasi	Nilai	Nilai	85 Nilai	85 Nilai	2.548.458.750	2.528.738.450	2.822.830.750					85 Nilai	2.951.196.000				
6	1	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai rencana aksi program pembesantasan konsep terintegrasi	Nilai	Nilai	85 Nilai	85 Nilai	2.100.028.000	1.919.860.700	2.052.302.900					85 Nilai	2.458.996.000				
					Persentase tindak lanjut temuan	Persen	Persen	74 Persen	74 Persen									74 Persen				
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Pemerintah Daerah		5 LHA	5 LHA	132.124.800	72.634.800	71.509.800	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemda Kab Inb	5 LHA	214.054.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Keuangan Pemerintah Daerah		5 LHA	5 LHA	148.230.000	147.322.500	99.170.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemda Kab Inb	5 LHA	520.000.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	2	2.01	3	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		5 LHR	70 LHR	363.757.000	337.592.500	407.472.750	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemda Kab Inb	70 LHR	398.300.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	2	2.01	4	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan		1 LHR	1 LHR	20.930.000	20.930.000	11.485.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemda Kab Inb	1 LHR	38.500.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Audit Dana Desa		15 LHA	15 LHA	196.949.700	280.718.400	323.170.900	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemda Kab Inb	15 LHA	268.394.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal		2 Laporan	2 Laporan	664.548.000	615.504.000	597.052.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemda Kab Inb	2 Laporan	527.659.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APSP		77 %	77 %	575.488.300	475.168.300	542.442.300	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemda Kab Inb	77 %	690.489.000	INSPEKTORAT DAERAH				
6	1	2	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Nilai rencana aksi program pembesantasan konsep terintegrasi	Nilai	Nilai	85 Nilai	85 Nilai	448.430.750	608.877.750	770.527.750					85 Nilai	492.800.000				
					Persentase penyelesaian penanganan temuan/daerah/negara	Persen	Persen	77 Persen	77 Persen									77 Persen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPI/MD	Realisasi Capaian RKP/MD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKP/MD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah								
6	1	2	2.02	1	Pemangangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah			77 %	77 %	243.070.750	193.287.750	193.287.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inh	77 %	267.300.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu			5 %	18 LHA	205.360.000	415.990.000	577.240.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemda Kab Inh	18 LHA	225.500.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase temuan APIT yang ditindaklanjuti	Persen	Persen	74 Persen	74 Persen	386.404.750	303.350.450	690.808.450					74 Persen	808.633.000			
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Laporan hasil monitoring	Laporan	Laporan	40 Laporan	40 Laporan	386.404.750	303.350.450	690.808.450					40 Laporan	808.633.000			
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Penurunan jumlah temuan	Persen	Persen	74 Persen	74 Persen	75.065.750	106.248.450	145.826.450	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Desa	17 OPD	82.500.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukannya			4 Laporan	10 Laporan	291.857.000	194.102.000	544.980.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Desa	10 Laporan	504.151.000	INSPEKTORAT DAERAH	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN						8.597.266.820	8.550.019.520	8.184.362.597					100 Persen	8.411.446.820			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KECAMA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	8.480.050.220	8.324.952.920	7.851.044.697						100 Persen	8.299.246.820		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	-	-	3.940.000						90 Persen	-		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	3.940.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	8 Dokumen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	7.995.756.820	7.995.756.820	7.486.019.897					100 Persen	7.995.756.820			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan			14 Bulan	12 Bulan	7.995.756.820	7.995.756.820	7.486.019.897	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan kualitas SDM yang berorientasi dan berdaya saing	Aparatur Kecan	12 Bulan	7.995.756.820	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	19.200.000	19.257.600	19.257.600						100 Persen	14.400.000		
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan kantor yang dibayarkan			2 Orang	2 Orang	19.200.000	19.257.600	19.257.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Peme	2 Orang	14.400.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	287.550.150	131.617.600	143.845.100						100 Persen	104.070.000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibutuhkan			10 jenis	10 jenis	1.800.600	1.800.600	2.295.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	10 jenis	1.850.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan perlengkapan yang disediakan			25 jenis	25 jenis	44.683.500	44.683.500	39.614.750	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	25 jenis	15.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat			24 kegiatan	24 kegiatan	64.900.000	36.937.500	30.735.250	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	24 kegiatan	20.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan			10000 lembar	10000 lembar	11.486.000	10.406.000	13.409.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	10000 lembar	6.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan			24 eksemplar	24 eksemplar	2.400.000	1.800.000	1.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	24 eksemplar	2.400.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan			52 paket	52 paket	162.280.000	35.990.000	35.990.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	52 paket	58.820.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	199.723.250	160.500.850	172.682.100						100 Persen	137.000.000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sunat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang melayani			380 lembar	380 lembar	1.500.000	1.500.000	3.090.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	380 lembar	3.800.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik dan wifi			2 Rekening	2 Rekening	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kecan	2 Rekening	24.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer pelayanan umum yang terakomodir			14 orang	14 orang	128.223.250	129.000.850	139.592.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	14 orang	109.200.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	17.800.000	17.800.000	15.300.000						100 Persen	18.000.000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			1 unit	1 unit	17.800.000	17.800.000	13.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	1 unit	10.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			13 unit	13 unit	-	-	2.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	13 unit	8.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	16.581.600	16.581.600	13.531.600						100 Persen	28.000.000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	8.750.000						100 Persen	10.000.000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	8.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan			Aparatur Kecan	100 Persen	10.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang ditentibkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	6.581.600	6.581.600	4.781.600						100 Persen	18.000.000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan yang di tentibkan			700 rekomendasi	700 rekomendasi	6.581.600	6.581.600	4.781.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecan	700 rekomendasi	18.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	-	100.000.000						1 Laporan	-		
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	-	100.000.000						1 Laporan	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPJ 2022	APBD 2022	RKPJ 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	Nasional	Daerah																			
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1	Laporan	-	100.000.000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Publik dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan keberagaman dan ketertuhan	Kecamatan Tem	1	Laporan	-	KECAMATAN TEMBILAHAN						
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase/penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	Persen	100	100	Persen	52.900.000	160.750.000							100	Persen	90.000.000						
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan	Presentase Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina dan Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Persen	Persen	100	100	Persen	52.900.000	160.750.000							100	Persen	90.000.000						
7	1	5	2.01	4	Pembiayaan Kerukunan Antaraku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan			1	kegiatan	2	kegiatan	52.900.000	160.750.000		187.231.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Aparatur Kewan	2	kegiatan	90.000.000		KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	Persen	100	100	Persen	47.735.000	47.735.000							100	Persen	24.200.000						
7	1	6	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	Persen	100	100	Persen	47.735.000	47.735.000							100	Persen	24.200.000						
						Presentase Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina dan Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Persen	Persen	100	100	Persen											100	Persen					
7	1	6	2.01	12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina			3	kembaga	3	kembaga	41.960.000	41.960.000		26.780.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lembaga Peme	3	kembaga	14.200.000		KECAMATAN TEMBILAHAN	
7	1	6	2.01	13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah rekomendasi usulan kecamatan pada musrenbang kecamatan			9	dokumen	9	dokumen	5.775.000	5.775.000		5.775.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lembaga Peme	9	dokumen	10.000.000		KECAMATAN TEMBILAHAN	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1	3			KECAMATAN							199.460.000	199.584.000											200.000.000				
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100	100	Persen	199.460.000	199.584.000									100	Persen	-				
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100	100	Persen	199.460.000	199.584.000									100	Persen	-				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana yang dibutuhkan			30000000	rupiah	30000000	rupiah	199.460.000	199.584.000		142.934.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Aparatur Kewan	30000000	rupiah	-		KECAMATAN TEMBILAHAN	
						Presentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan				100	Persen	100	Persen									100	Persen	-				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1				KECAMATAN							174.950.000	174.981.200											174.981.200	-			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100	100	Persen	174.950.000	174.981.200									100	Persen	-				
						Perubahan Konsistensi Program RPMD kedalam RKPJ	%	%	100 %	100 %														100 %	-			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100	100	Persen	174.950.000	174.981.200									100	Persen	-				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana yang dibutuhkan						174.950.000	174.981.200		137.531.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Aparatur Kelurahan dan Masyarakat			-		KECAMATAN TEMBILAHAN	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1				KECAMATAN							345.400.000	345.788.800											345.788.800	-			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100	100	Persen	345.400.000	345.788.800									100	Persen	-				
						Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	Persen	100	100	Persen												100	Persen	-			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100	100	Persen	345.400.000	345.788.800									100	Persen	-				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Hilir				100	Persen	100	Persen	345.400.000	345.788.800		345.788.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Aparatur Kewan	100	Persen	-		KECAMATAN TEMBILAHAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1				KECAMATAN							254.600.000	255.053.600											255.053.600	-			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100	100	Persen	254.600.000	255.053.600									100	Persen	-				
						Presentase Kegiatan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100	100	Persen	254.600.000	255.053.600									100	Persen	-				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Beringin				100	Persen	100	Persen	254.600.000	255.053.600		255.053.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Publik dan Transformasi Pelayanan Publik			Aparatur Kewan	100	Persen	-		KECAMATAN TEMBILAHAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	1				KECAMATAN							220.600.000	220.899.200											220.899.200	-			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100	100	Persen	220.600.000	220.899.200									100	Persen	-				
						Presentase Kegiatan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100	100	Persen	220.600.000	220.899.200									100	Persen	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Praktikan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelempok Sasaran			Target	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				Target	Pagu Indikatif
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Aparatur di Kelurahan	6 Lembaga	6 Lembaga	220.600.000	220.899.200	220.899.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Sungaiparak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelur	6 Lembaga	-	KECAMATAN TEMBLAHAN	
					Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan/Sungai Perak	100 Persen	100 Persen					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		100 Persen				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik						
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				334.500.000	410.712.900	410.712.900						-		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	334.500.000	410.712.900	410.712.900			100 Persen		-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	334.500.000	410.712.900	410.712.900			100 Persen		-	
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pekan Arba	100 Persen	100 Persen	334.500.000	410.712.900	410.712.900	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Pekan Arba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Kelur	100 Persen		KECAMATAN TEMBLAHAN	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				184.900.000	185.199.200	185.199.200							-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	184.900.000	185.199.200	185.199.200			100 Persen		-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	184.900.000	185.199.200	185.199.200			100 Persen		-	
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana yang dibutuhakan	300000000 rupiah	300000000 rupiah	184.900.000	185.199.200	185.199.200	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Seberang Temblahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelur	300000000 rupiah		KECAMATAN TEMBLAHAN	
					Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Temblahan	100 Persen	100 Persen					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas SIM yang bermutu dan berlaya saing		100 Persen				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas SIM yang bermutu dan berlaya saing						
													Peningkatan kualitas SIM yang bermutu dan berlaya saing						
													Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik						
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				452.100.000	452.618.400	452.618.400							-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	452.100.000	452.618.400	452.618.400			100 Persen		-	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	452.100.000	452.618.400	452.618.400			100 Persen		-	
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Aparatur di Kelurahan	6 Lembaga	6 Lembaga	452.100.000	452.618.400	452.618.400	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik/Dinamika Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kelur	6 Lembaga		KECAMATAN TEMBLAHAN	
					Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Temblahan Kota	100 Persen	100 Persen								100 Persen				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				3.976.579.530	3.931.579.530	4.120.054.164							4.109.704.530	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/OTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.978.468.530	3.761.763.730	3.850.840.364			100 Persen		3.792.728.530	
					Persentase aparatur yang berkemampuan baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen							90 Persen			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.494.079.530	3.494.079.530	3.573.154.164			100 Persen		3.494.079.530	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	34 Orang	34 Orang	3.494.079.530	3.494.079.530	3.573.154.164		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN di Wilayah	34 Orang	3.494.079.530	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelitana	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	21.794.400	21.794.400	21.794.400			100 Persen		48.000.000	
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	5 Orang	5 Orang	21.794.400	21.794.400	21.794.400			Jasa Tenaga Ke	5 Orang	48.000.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	5.400.000	5.400.000	5.400.000			100 Persen		8.250.000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakain Dinas Boserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Boserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	45 Stel	45 Stel	5.400.000	5.400.000	5.400.000			Aparatur Sipil	45 Stel	8.250.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	125.637.500	108.221.900	118.221.900			100 Persen		130.075.000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	41.367.500	25.377.900	29.117.500			Aparatur Sipil	20 Jenis	36.045.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	18.000.000	18.000.000	18.000.000			Aparatur Sipil	3 Jenis	14.000.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	14.630.000	15.894.400	22.154.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	4 Jenis	14.630.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	8 Eksemplar	8 Eksemplar	4.800.000	4.800.000	4.800.000			Aparatur Sipil	8 Eksemplar	9.600.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	56 Kali	56 Kali	46.840.000	44.150.000	44.150.000			Aparatur Sipil	56 Kali	55.800.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	112.851.500	112.969.900	112.969.900			100 Persen		93.725.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surtir Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	4.400.000	4.400.000	4.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Sipil	90 Persen	2.550.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	24 Rekening	24 Rekening	29.700.000	29.700.000	29.700.000			Aparatur Sipil	24 Rekening	22.200.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	7 Orang	7 Orang	78.351.500	78.669.900	78.669.900			Aparatur Sipil	7 Orang	68.975.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelitana dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	19.300.000	19.300.000	19.300.000			100 Persen		18.600.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	11.800.000	11.800.000	11.800.000			Barang Milik Da	10 Unit	14.600.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	7.500.000	7.500.000	7.500.000			Barang Milik Da	6 Unit	4.000.000		KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	2			PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	21.690.000	21.779.600	21.779.600			100 Persen		54.000.000	
7	1	2	2.02		Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	21.690.000	21.779.600	21.779.600			100 Persen		54.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelempok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022			Pagu Indikatif							Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	5 jenis	5 jenis	21.650.000	21.799.600	21.799.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semas Kelurahan			Aparatur Sipil	5 jenis	54.000.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000	6.000.000			100 Persen	18.125.000			
7	1	3	2.01	3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000	6.000.000			100 Persen	18.125.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.000.000	6.000.000	6.000.000			Lemaba Maasy			4 Kegiatan	18.125.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	100.000.000			6 Laporan	100.000.000			
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	100.000.000			6 Laporan	100.000.000			
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			6 Laporan	6 Laporan	-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi Serta Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	6 Laporan	100.000.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase/penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	75.200.000	46.190.000	46.190.000			100 Persen	64.000.000			
7	1	5	2.01		Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang diorganisir	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	75.200.000	46.190.000	46.190.000			100 Persen	64.000.000			
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan, seni dan budaya yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	75.200.000	46.190.000	46.190.000			Kegiatan Keaga			3 Kegiatan	64.000.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	95.261.200	95.844.200	95.844.200			100 Persen	80.850.000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	95.261.200	95.844.200	95.844.200			100 Persen	80.850.000			
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	3 Kelompok	3 Kelompok	91.410.000	91.993.200	91.993.200			Masyarakat dan			3 Kelompok	64.000.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	300 Usulan	300 Usulan	3.851.000	3.851.000	3.851.000			Masyarakat dan			300 Usulan	16.850.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				199.300.000	199.300.000	199.300.000							199.300.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	199.300.000	199.300.000	199.300.000			100 Persen	199.300.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	199.300.000	199.300.000	199.300.000			100 Persen	199.300.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Barat	100 Persen	100 Persen	199.300.000	199.300.000	199.300.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi Serta Transformasi Pelayanan Publik		100 Persen	199.300.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				433.900.000	433.900.000	433.900.000							433.900.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	433.900.000	433.900.000	433.900.000			100 Persen	433.900.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	433.900.000	433.900.000	433.900.000			100 Persen	433.900.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Hulu dan Tembilahan Barat	100 Persen	100 Persen	433.900.000	433.900.000	433.900.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi Serta Transformasi Pelayanan Publik		100 Persen	433.900.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				433.900.000	433.900.000	433.900.000							433.900.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	433.900.000	433.900.000	433.900.000			100 Persen	433.900.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	433.900.000	433.900.000	433.900.000			100 Persen	433.900.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Hulu dan Tembilahan Barat	100 Persen	100 Persen	433.900.000	433.900.000	433.900.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi Serta Transformasi Pelayanan Publik		100 Persen	433.900.000	KECAMATAN TEMBLAHAN HULU	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				4.886.176.644	4.786.176.644	4.802.507.209							4.893.020.000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	22 Nilai	22 Nilai	4.886.176.644	4.601.726.644	4.601.726.644			22 Nilai	4.575.500.000			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen	persen	90 persen	90 persen	28.000.000	26.925.000	26.925.000			90 persen	35.000.000			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	18.000.000	16.575.000	16.575.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat	2 dokumen	20.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	10.000.000	10.550.000	10.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat	5 dokumen	15.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen	persen	100 persen	100 persen	4.225.176.644	4.225.176.644	3.719.507.209			100 persen	4.300.000.000			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	31 orang	31 orang	4.225.176.644	4.225.176.644	3.719.507.209	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kantor Ca	31 orang	4.300.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen	persen	100 persen	100 persen	141.116.000	115.695.000	60.415.000			100 persen	108.500.000			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	1.439.000	1.439.000	1.439.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	8 jenis	3.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36 jenis	33 jenis	98.425.000	72.425.000	28.925.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	33 jenis	50.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	5.935.000	5.935.000	5.935.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	3 jenis	7.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2.407.000	3.021.000	3.021.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	2 jenis	4.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	27 kali	18 kali	28.710.000	32.875.000	21.095.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	18 kali	40.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak dan Penunjang Operasional Kantor	Presentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen	persen	100 persen	100 persen	204.934.000	197.230.000	197.230.000			100 persen	46.000.000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Suntu Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	100 persen	100 persen	110.000.000	110.777.600	110.777.600	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	100 persen	4.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 rekening	3 rekening	16.308.000	16.308.000	16.308.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	3 rekening	17.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	3 orang	3 orang	78.626.000	70.144.400	70.144.400	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	3 orang	25.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	persen	persen	100 persen	100 persen	32.500.000	36.700.000	15.500.000			100 persen	66.000.000			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	9 unit	9 unit	7.500.000	10.500.000	10.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	9 unit	10.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	4 unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat T	4 unit	6.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	71.400.000	71.400.000	53.400.000			100 Persen	75.000.000			
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlaksana	persen	persen	90 persen	90 persen	71.400.000	71.400.000	53.400.000			90 persen	75.000.000			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2 jenis	2 jenis	71.400.000	71.400.000	71.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Kec		2 jenis	75.000.000	KECAMATAN TEMPULING	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	-	-	100.000.000			100 Persen	100.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMID	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pemondan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPD 2022	APBD 2022					RKPD 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi														
7 1 4 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keterlibatan Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	100.000.000	-	-	-	Kab. Indragiri Hilir, Tumpaling, Semau Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			1 Laporan	100.000.000	KECAMATAN TEMPULING			
7 1 4 2.03 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 Laporan	-	-	100.000.000	-	-	-					1 Laporan	100.000.000	KECAMATAN TEMPULING			
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	44.900.000	42.900.000	44.900.000	42.900.000	42.900.000					100 Persen	135.000.000				
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang diseleksi	persen	persen	100 persen	100 persen	44.900.000	42.900.000	44.900.000	42.900.000	42.900.000					100 persen	135.000.000				
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasektu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Kerukunan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan, seni dan budaya yang dilaksanakan			1 kegiatan	1 kegiatan	44.900.000	42.900.000	44.900.000	42.900.000	42.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tumpaling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat kec	1 kegiatan	135.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	53.150.000	52.150.000	53.150.000	52.150.000	52.150.000					100 Persen	109.520.000				
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara baik	persen	persen	90 persen	90 persen	53.150.000	52.150.000	53.150.000	52.150.000	52.150.000					90 persen	109.520.000				
7 1 6 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina			9 kelompok	9 kelompok	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tumpaling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 kelurahan dan	9 kelompok	95.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7 1 6 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan			45 usulan	45 usulan	10.150.000	9.150.000	10.150.000	9.150.000	9.150.000	Kab. Indragiri Hilir, Tumpaling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 kelurahan dan	45 usulan	14.520.000	KECAMATAN TEMPULING		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN						302.100.000	299.100.000	302.100.000	299.100.000	299.100.000										
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	302.100.000	299.100.000	302.100.000	299.100.000	299.100.000					100 Persen	500.000.000				
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen	persen	90 persen	90 persen	302.100.000	299.100.000	302.100.000	299.100.000	299.100.000					90 persen	500.000.000				
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Salak	persen	persen	90 persen	90 persen	302.100.000	299.100.000	302.100.000	299.100.000	299.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tumpaling, Sungaisalak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di k	90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN						194.800.000	191.800.000	194.800.000	191.800.000	191.800.000										
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	194.800.000	191.800.000	194.800.000	191.800.000	191.800.000					100 Persen	500.000.000				
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen	persen	90 persen	90 persen	194.800.000	191.800.000	194.800.000	191.800.000	191.800.000					90 persen	500.000.000				
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tempuling	persen	persen	90 persen	90 persen	194.800.000	191.800.000	194.800.000	191.800.000	191.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tumpaling, Tempuling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di k	90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN						152.100.000	149.100.000	152.100.000	149.100.000	149.100.000										
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	152.100.000	149.100.000	152.100.000	149.100.000	149.100.000					100 Persen	500.000.000				
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen	persen	90 persen	90 persen	152.100.000	149.100.000	152.100.000	149.100.000	149.100.000					90 persen	500.000.000				
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pangkalan Tujah	persen	persen	90 persen	90 persen	152.100.000	149.100.000	152.100.000	149.100.000	149.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tumpaling, Pangkalan Tujah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di k	90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN						175.500.000	172.500.000	175.500.000	172.500.000	172.500.000										
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	175.500.000	172.500.000	175.500.000	172.500.000	172.500.000					100 Persen	500.000.000				
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen	persen	90 persen	90 persen	175.500.000	172.500.000	175.500.000	172.500.000	172.500.000					90 persen	500.000.000				
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tanjung Pidada	persen	persen	90 persen	90 persen	175.500.000	172.500.000	175.500.000	172.500.000	172.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tumpaling, Tanjungpidada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di k	90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN						3.245.678,877	3.284.557,057	3.245.678,877	3.284.557,057	3.284.557,057										
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KEKOTA	Persentase aparat yang berkinerja baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	2.999.566,557	2.809.097,757	2.999.566,557	2.809.097,757	2.809.097,757					90 Persen	3.255.523,213				
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Caji dan Tunjangan	Orang	Orang	22 Orang	21 Orang	2.583.598,249	2.561.598,249	2.583.598,249	2.561.598,249	2.561.598,249					21 Orang	2.841.738,074				
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Caji dan Tunjangan	Orang	Orang	22 Orang	21 Orang	2.583.598,249	2.561.598,249	2.583.598,249	2.561.598,249	2.561.598,249	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	21 Orang	2.841.738,074	KECAMATAN BATANG TUAKA	
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Orang	Orang	3 Orang	3 Orang	57.600.000	57.988.860	57.600.000	57.988.860	57.988.860					3 Orang	63.360.000				
7 1 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dan/ atau Pembantu Pengelola Administrasi Kantor yang dibayarkan			3 Orang	3 Orang	28.800.000	28.994.400	28.800.000	28.994.400	28.994.400	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	4 Orang	31.680.000	KECAMATAN BATANG TUAKA		
7 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan			3 Orang	3 Orang	28.800.000	28.994.400	28.800.000	28.994.400	28.994.400	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	3 Orang	31.680.000	KECAMATAN BATANG TUAKA		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Jenis	Jenis	18 Ruangan	18 Ruangan	270.908,508	147.716,308	270.908,508	147.716,308	147.716,308					18 Ruangan	297.999,139				
		Jumlah bahan-bahan yang disediakan	Jenis	Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis					100 Jenis					
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis					100 Jenis					
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis					100 Jenis					
		Jumlah jasa perawatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis					100 Jenis					
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Jenis	Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis					100 Jenis					
		Jumlah rekening yang dibayarkan	Jenis	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis					2 Jenis					
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis	Jenis	10 Jenis	10 Jenis	91	91	91	91	91	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	10 Jenis	1.001	KECAMATAN BATANG TUAKA		
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	100 Jenis	100 Jenis	179.999.908	75.277.908	179.999.908	75.277.908	75.277.908	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	100 Jenis	197.999.899	KECAMATAN BATANG TUAKA		
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	100 Jenis	120 Jenis	14.410.620	14.410.620	14.410.620	14.410.620	14.410.620	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	120 Jenis	15.851.715	KECAMATAN BATANG TUAKA		
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	Jenis	100 Jenis	100 Jenis	6.396.750	6.396.750	6.396.750	6.396.750	6.396.750	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	100 Jenis	7.004.425	KECAMATAN BATANG TUAKA		
7 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan-Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan-Bahan yang disediakan	Jenis	Jenis	1 Eksemplar	1 Eksemplar	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaijering	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	1 Eksemplar	3.960.000	KECAMATAN BATANG TUAKA		
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	Kali	12 Kali	20 Kali	66.410.000	47.940.000	66.410.000	47.940.000	47.940.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	20 Kali	73.051.000	KECAMATAN BATANG TUAKA		
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	38.160.000	33.794.400	38.160.000	33.794.400	33.794.400					100 Persen	41.976.000				
		Jumlah rekening yang dibayarkan	Rekening	Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening					3 Rekening					
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang					3 Orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendaman						Kategori Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Kategori Sasaran		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022									RKPD 2022 Perubahan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	9.360.000	4.800.000	16.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	3 Rekening	10.296.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya pelaksanaan yang dibayarkan	3 Orang	3 Orang	28.800.000	28.994.400	51.194.400	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	3 Orang	31.680.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Rumah Singsang/Kantor Perwakilan Kecamatan di Ibokota Kabupaten dalam rangka Implementasi Inovasi Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	9.500.000				1 Unit			
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Unit	8 Unit	8 Unit					8 Unit			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	8.000.000	8.000.000	12.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Unit	8.800.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	1	2			PROGRAM FENELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diwujudkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	53.370.000				100 Persen	36.707.000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	33.370.000				100 Persen	36.707.000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	33.370.000	225.772.000	263.752.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	100 Persen	36.707.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinatif	Laporan	Laporan	1 Laporan		100.000.000				1 Laporan	110.000.000		
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Laporan	Laporan	1 Laporan		100.000.000				1 Laporan	110.000.000		
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan				100.000.000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		0	1 Laporan	110.000.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	44.837.300				100 Persen	49.321.000		
7	1	6	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah organisasi, kelembagaan, dan masyarakat yang dibina	Kelompok	Kelompok	30 Kelompok	30 Kelompok	44.837.300				30 Kelompok	49.321.000		
7	1	6	2.01	12	Facilitasi Pelaksanaan Tagas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	30 Kelompok	30 Kelompok	26.442.000	24.942.000	43.842.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	30 Kelompok	29.084.200	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	1	6	2.01	13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah rekomendasi usulan kecamatan pada Musrenbang kecamatan	10 Usulan	13 Usulan	18.395.300	16.843.300	49.543.300	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipetung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantauan pemetaan pembangunan	0	13 Usulan	20.234.830	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ormas				229.632.250				4 pokmas/ormas	252.995.475	KECAMATAN BATANG TUAKA	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang	Orang	14 Orang	14 Orang	2.238.849.791				14 Orang	2.431.099.791		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	orang	14 orang	14 orang	1.791.649.791				14 orang	1.791.649.791		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	1 Tahun	1 Tahun	1.791.649.791	1.791.649.791	1.630.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1 Tahun	1.791.649.791	KECAMATAN CONCONG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Ketersediaan Administrasi dan Peralatan/Perlengkapan Kantor	Jenis	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	177.100.000				3 Jenis	244.350.000		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	5 Set	5 Jenis	16.430.000	15.976.400	24.954.900	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Jenis	25.000.000	KECAMATAN CONCONG	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang Tersedia	3 Set/Kegiatan	3 Set/Kegiatan	33.670.000	33.670.000	33.560.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Set/ Kegiatan	33.670.000	KECAMATAN CONCONG	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	70 Kali	100 Kali	127.000.000	127.000.000	185.680.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Kali	185.680.000	KECAMATAN CONCONG	
7	1	1	2.06		Ketersediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan	7 kali	8 Kali							8 Kali			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Kantor	orang	orang	7 orang	7 orang	87.000.000				7 orang	87.000.000		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	87.000.000	62.453.600	55.878.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	1 Tahun	87.000.000	KECAMATAN CONCONG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipangkas Pertumbuhannya	Unit	Unit	10 Unit	10 Unit	8.100.000				10 Unit	8.100.000		
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	8.100.000				100 Persen			
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	10 Unit	6 Unit	8.100.000	8.100.000	5.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	6 Unit	8.100.000	KECAMATAN CONCONG
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Persen	Persen	100 Persen		100.000.000				100 Persen	100.000.000		
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Persen	Persen	100 Persen		100.000.000				100 Persen	100.000.000		
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terwujudnya Kerukunan dan Ketertiban bagi Masyarakat	100 Persen				100.000.000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan kerukunan ketentraman dan ketertiban	100 Persen	100.000.000	KECAMATAN CONCONG	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diwujudkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	130.000.000				100 Persen	130.000.000		
7	1	5	2.01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia umat beragama	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	130.000.000				1 Kegiatan	130.000.000		
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarwasku dan Intra-wasku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya/Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	95 %	95 %	130.000.000	130.000.000	130.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kelompok Mas	95 %	130.000.000	KECAMATAN CONCONG
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	65.000.000				100 Persen	70.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Tahun 2022		Tahun 2023		RPPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2023				Nasional					Daerah				
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Person	Person	100 Person	100 Person	65.000.000	65.000.000	68.287.000						100 Person	70.000.000	KECAMATAN CONGCONG		
7	1	6	2.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Masyarakat yang di Fasilitasi			2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000	50.000.000	55.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Congcong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata letak lembaga pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kewan	2	Kelompok	55.000.000	KECAMATAN CONGCONG	
7	1	6	2.01	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan			6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000	15.000.000	13.287.000	Kab. Indragiri Hilir, Congcong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan pemerataan pembangunan	Aparatur Kewan	6	Dokumen	15.000.000	KECAMATAN CONGCONG	
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN	Perentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Person	Person	100 Person	100 Person	200.000.000	200.000.000	190.000.000						100 Person	200.000.000			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Person	Person	100 Person	100 Person	200.000.000	190.000.000	190.000.000						100 Person	200.000.000			
7	1	3	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Perentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan			95 Person	95 Person	200.000.000	190.000.000	190.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Congcong, Congcong, Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang betimam dan berkarya saing	Aparatur Kelu	95	Person	200.000.000	KECAMATAN CONGCONG	
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Person	Person	100 Person	100 Person	3.629.021.417	3.640.021.417	3.376.254.475						100 Person	3.580.921.417			
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	Orang	26 Orang	26 Orang	3.265.021.417	3.265.021.417	2.941.254.475						26	Orang	3.265.021.417		
7	1	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	%	%	100 %	100 %									100 %				
7	1	1	2.02	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			26 Orang	26 Orang	3.265.021.417	3.265.021.417	2.941.254.475	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum				1	26	Orang	3.265.021.417	KECAMATAN ENOK
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	%	%	100 %	100 %	75.008.500	74.360.500	108.768.500						100 %		-		
7	1	1	2.06	2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			1 Set	3 Jenis	5.222.500	5.222.500	25.472.500	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	3	Jenis	-	KECAMATAN ENOK
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan			342 liter	342 liter	8.000.000	8.000.000	15.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	342	liter	-	KECAMATAN ENOK
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak yang Disediakan			7 Kali	7 Kali	3.436.000	3.538.000	5.766.000					1	40	Meter	-	KECAMATAN ENOK
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penggandaan yang Disediakan			5784 Lembar	5784 Lembar	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	600	Eksemplar	-	KECAMATAN ENOK
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan			48 kali	48 kali	55.350.000	54.580.000	59.030.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	48	kali	-	KECAMATAN ENOK
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	%	%	100 %	100 %	94.092.000	97.540.000	102.540.000						100 %		97.000.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Saurat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			100 Lembar	100 Lembar	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum			1	100	Lembar	2.000.000	KECAMATAN ENOK
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			10 Orang	10 Orang	17.520.000	17.520.000	21.520.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum			1	3	Rekening	-	KECAMATAN ENOK
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			9 Orang	9 Orang	74.772.000	78.220.000	79.220.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum			1	9	Orang	55.000.000	KECAMATAN ENOK
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perentase Pelayanan yang diselesaikan	Person	Person	100 Person	100 Person	58.730.000	56.930.000	7.522.000						100 Person	58.000.000			
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Dokumen	Dokumen	100 Dokumen	35 Dokumen	58.730.000	56.930.000	7.522.000						35	Dokumen	58.000.000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			100 Jenis	35 Jenis	58.730.000	56.930.000	7.522.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum			1	35	Jenis	58.000.000	KECAMATAN ENOK
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	100.000.000						2	Kegiatan	100.000.000		
7	1	4	2.03	Koordinasi Ujup Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	100.000.000						2	Kegiatan	100.000.000		
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Layanan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	100.000.000					0	2	Kegiatan	100.000.000	KECAMATAN ENOK
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Person	Person	100 Person	100 Person	86.895.500	65.595.500	65.595.500						100 Person	55.000.000			
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselesaikan	Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	86.895.500	65.595.500	65.595.500						2	Kegiatan	55.000.000		
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarwarga dan Intrukutu, Umot Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan kegotamawanan, seni dan budaya yang dilaksanakan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	86.895.500	65.595.500		Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum			2	2	Kegiatan	55.000.000	KECAMATAN ENOK
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perentase Desa yang Terbti Administrasi	Person	Person	100 Person	100 Person	40.574.000	40.574.000	50.574.000						100 Person	45.500.000			
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Kelompok	Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	49.274.000	40.574.000	50.574.000						3	Kelompok	45.500.000		
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	6	2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Perentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	%	%	100 %	100 %									100 %				
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina			3 Kelompok	3 Kelompok	44.500.000	35.800.000	45.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum			5	3	Kelompok	38.500.000	KECAMATAN ENOK
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan			70 Usulan	70 Usulan	4.774.000	4.774.000	4.774.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum			3	70	Usulan	7.000.000	KECAMATAN ENOK
UNSUR KEWILAYAHAN																						
KECAMATAN																						
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Person	Person	100 Person	100 Person	154.500.000	154.500.000	154.500.000						100 Person	100.000.000			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan	%	%	100 %	100 %	154.500.000	154.500.000	154.500.000						100 %		100.000.000		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Perentase Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan	%	%	100 %	100 %	154.500.000	154.500.000	154.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Telukmedan	Dana Transfer Umum-Dana Akhisi Umum			8	100 %	100.000.000	100.000.000	KECAMATAN ENOK
UNSUR KEWILAYAHAN																						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKM	Realisasi Capaian RPKM Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKM Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktik Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		APBD 2022		RKPD 2022 Perubahan			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional								Daerah
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		0	1 Laporan	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase/penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100 Persen	100 Persen	92.888.000	78.388.000	77.708.000			100 Persen	92.888.000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang diselesaikan	Persen	100 Persen	100 Persen	92.888.000	78.388.000	77.708.000			100 Persen	92.888.000			
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Persen	100 Persen	100 Persen	92.888.000	78.388.000	77.708.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Camat C	2 Kegiatan	92.888.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib-Administrasi	Persen	100 Persen	100 Persen	71.392.000	52.342.000	52.342.000			100 Persen	71.392.000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	100 Persen	100 Persen	71.392.000	52.342.000	52.342.000			100 Persen	71.392.000			
7	1	6	2.01		Persentase Desa yang Tertib-Administrasi	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Persen	100 Persen	100 Persen	66.842.000	47.792.000	47.792.000			100 Persen	66.842.000			
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Persen	100 Persen	100 Persen	66.842.000	47.792.000	47.792.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kelompok	3 Kelompok	66.842.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	1	8	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Maunreng Kecamatan		60 Usulan	60 Usulan	4.550.000	4.550.000	4.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Usulan	4.550.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
7					UNSUR KIWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN					231.600.000	231.600.000	231.600.000					231.600.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100 Persen	100 Persen	231.600.000	231.600.000	231.600.000			100 Persen	231.600.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100 Persen	100 Persen	231.600.000	231.600.000	231.600.000			100 Persen	231.600.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	100 Persen	100 Persen	231.600.000	231.600.000	231.600.000			100 Persen	231.600.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Empat	Persen	100 Persen	100 Persen	231.600.000	231.600.000	231.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Sungsongat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Lurah S	100 Persen	231.600.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7					UNSUR KIWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN					360.700.000	360.700.000	360.700.000					360.700.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100 Persen	100 Persen	360.700.000	360.700.000	360.700.000			100 Persen	360.700.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100 Persen	100 Persen	360.700.000	360.700.000	360.700.000			100 Persen	360.700.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	100 Persen	100 Persen	360.700.000	360.700.000	360.700.000			100 Persen	360.700.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Pinang	Persen	100 Persen	100 Persen	360.700.000	360.700.000	360.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Lurah T	100 Persen	360.700.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7					UNSUR KIWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN					140.400.000	140.400.000	140.400.000					140.400.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100 Persen	100 Persen	140.400.000	140.400.000	140.400.000			100 Persen	140.400.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100 Persen	100 Persen	140.400.000	140.400.000	140.400.000			100 Persen	140.400.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	100 Persen	100 Persen	140.400.000	140.400.000	140.400.000			100 Persen	140.400.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tanjung Harapan	Persen	100 Persen	100 Persen	140.400.000	140.400.000	140.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Tanjungharapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Lurah T	100 Persen	140.400.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7					UNSUR KIWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN					3.087.286.089	3.087.286.089	2.866.573.641					3.588.000.000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100 Persen	100 Persen	2.918.770.589	2.878.650.589	2.425.093.641			100 Persen	3.000.000.000			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan Persentase Pelaporan Beban yang disusun sesuai standar	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.666.286.089	2.666.286.089	2.425.093.641			1 Tahun	3.000.000.000			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100 Persen	100 Persen	2.666.286.089	2.666.286.089	2.425.093.641	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	100 Persen	3.000.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100 Persen	100 Persen	139.429.500	99.309.500	91.609.500			100 Persen	160.000.000			
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		17 Jenis	17 Jenis	99.744.500	99.744.500	99.744.500	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	17 Jenis	70.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		17103 Jenis	17103 Jenis	22.955.000	22.955.000	18.955.000	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	17103 Jenis	30.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan		65 kali	65 kali	56.730.000	56.610.000	52.910.000	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	65 kali	60.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100 Persen	100 Persen	113.055.000	113.055.000	113.055.000			100 Persen	121.000.000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	100 Persen	10.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	100 Persen	100 Persen	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	100 Persen	10.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Tahun	3 Rekening	3 Rekening	29.620.000	29.620.000	29.620.000	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	3 Rekening	31.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100 Persen	100 Persen	74.435.000	74.435.000	74.435.000	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	100 Persen	80.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Ketenteraman dan Kertertiban Umum	Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	-	100.000.000			1 Laporan	100.000.000			
7	1	4	2.05		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Kertertiban Umum	Koordinasi Ketertamanan dan Kertertiban Umum	Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	-	100.000.000			1 Laporan	100.000.000			
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	-	100.000.000	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Sema Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Kecamatan Kab	1 Laporan	100.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase/penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100 Persen	100 Persen	45.900.000	45.900.000	45.900.000			100 Persen	50.000.000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.900.000	45.900.000	45.900.000			1 Kegiatan	50.000.000			
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Persen	100 Persen	100 Persen	45.900.000	45.900.000	45.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Katieman, Tegayara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Kewan	100 Persen	50.000.000	KECAMATAN KATIEMAN	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib-Administrasi	Persen	100 Persen	100 Persen	82.615.500	82.615.500	82.615.500			100 Persen	77.000.000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	100 Persen	100 Persen	82.615.500	82.615.500	82.615.500			100 Persen	77.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022			RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah					
7	1	6	2.01	12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina			100	100	65.615.500	65.615.500	65.615.500	Kab. Indragiri Hilir, Katemman, Tegayaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kewan	100	60.000.000	KECAMATAN KATEMAN	
7	1	6	2.01	13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan			100	100	17.000.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Katemman, Tegayaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kewan	100	17.000.000	KECAMATAN KATEMAN	
UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1	3			KECAMATAN						178.200.000	178.200.000	213.200.000							200.000.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Person	Person	100	100	178.200.000	178.200.000	213.200.000							200.000.000		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Person	Person	100	100	178.200.000	178.200.000	213.200.000							200.000.000		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Person	Person	100	100	178.200.000	178.200.000	213.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Katemman, Bander Sri Gemilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kelur	100	200.000.000	KECAMATAN KATEMAN	
UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1	3			KECAMATAN						345.100.000	345.100.000	405.100.000							400.000.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Person	Person	100	100	345.100.000	345.100.000	405.100.000							400.000.000		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Person	Person	100	100	345.100.000	345.100.000	405.100.000							400.000.000		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Person	Person	100	100	345.100.000	345.100.000	405.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Katemman, Tegayaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kelur	100	400.000.000	KECAMATAN KATEMAN	
UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1	3			KECAMATAN						145.100.000	145.100.000	180.100.000							200.000.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Person	Person	100	100	145.100.000	145.100.000	180.100.000							200.000.000		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Person	Person	100	100	145.100.000	145.100.000	180.100.000							200.000.000		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Person	Person	100	100	145.100.000	145.100.000	180.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Katemman, Amal Bakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkhsankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelur	100	200.000.000	KECAMATAN KATEMAN	
UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1	1			KECAMATAN						3.406.353.778	3.358.636.978	3.164.090.707							3.562.500.000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DEWATA	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	Orang	19	19	3.304.576.778	3.272.489.978	2.946.413.707							3.407.500.000		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Tahun	Tahun	1	1	3.008.353.778	3.008.353.778	2.713.767.507							3.100.000.000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	Orang	19	19	3.008.353.778	3.008.353.778	2.713.767.507	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kewan	19	3.100.000.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Person	Person	100	100	152.223.000	140.793.000	124.103.000							161.500.000		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			3	3	44.318.000	44.318.000	30.318.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkhsankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kewan	3	45.000.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1	1	11.475.000	11.475.000	11.475.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkhsankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kewan	1	35.000.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			4	4	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkhsankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kewan	4	1.500.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			69	69	95.230.000	83.800.000	81.110.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkhsankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kewan	69	100.000.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	1	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Person	Person	100	100	135.200.000	112.543.200	108.543.200							138.000.000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Tahun	Tahun	1	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kewan	90	5.000.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			3	3	13.800.000	13.800.000	13.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kewan	3	14.000.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			4	4	115.400.000	94.743.200	90.743.200	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kewan	4	116.000.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	1	1	-	-	100.000.000							100.000.000		
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	1	1	100.000.000	-	-							100.000.000		
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			14	14	-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan kerukunan berketenteraman dan ketertiban	kecamatan Kem	14	100.000.000	KECAMATAN KEMPAS		
7	1	5			PROGRAM PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Person	Person	100	100	52.129.000	38.129.000	61.619.000							100	Person	-
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan	1	1	52.129.000	38.129.000	61.619.000							1	Kegiatan	-
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarwarga dan Intrawarga, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan			3	3	52.129.000	38.129.000	61.619.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kewan	3	Kegiatan	-	KECAMATAN KEMPAS
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terlibit Administrasi	Person	Person	100	100	49.648.000	48.018.000	56.018.000							100	Person	55.000.000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Person	Person	100	100	49.648.000	48.018.000	56.018.000							100	Person	55.000.000
7	1	6	2.01	12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina			2	2	39.248.000	37.618.000	45.618.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkhsankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kewan	2	40.000.000	KECAMATAN KEMPAS	
7	1	6	2.01	13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan			800	800	10.400.000	10.400.000	10.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkhsankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kewan	800	10.400.000	KECAMATAN KEMPAS	
UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1	3			KECAMATAN						367.000.000	367.324.000	367.324.000							-		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Person	Person	100	100	367.000.000	367.324.000	367.324.000							100	Person	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional					Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi												
7 1 3 2.02	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	367.000.000	367.324.000	367.324.000						100 Persen	-			
7 1 3 2.02.3	Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kompas Jaya			90 Persen	90 Persen	367.000.000	367.324.000	367.324.000	Kab. Indragiri Hilir, Kompas, Kompas Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.		Aparatur Kelur	90 Persen	-	KECAMATAN KEMPAS		
UNSR KEWILAYAHAN																			
7 1 3	KECAMATAN						249.500.000	249.688.800	249.688.800						100 Persen	250.000.000			
7 1 3	PROGRAM PEMBEYDAYAN MASTARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Cakupan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	249.500.000	249.688.800	249.688.800						100 Persen	250.000.000			
7 1 3 2.02	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	249.500.000	249.688.800	249.688.800						100 Persen	250.000.000			
7 1 3 2.02.3	Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan			100 Persen	100 Persen	249.500.000	249.688.800	249.688.800	Kab. Indragiri Hilir, Kompas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelur	100 Persen	250.000.000	KECAMATAN KEMPAS		
7 1 3 2.02.3	Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan			100 Persen	100 Persen	249.500.000	249.688.800	249.688.800				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik						
UNSR KEWILAYAHAN																			
7 1 3	KECAMATAN						2.801.096.975	2.751.096.475	2.774.844.128						100 Persen	3.214.974.975			
7 1 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.554.918.975	2.549.914.975	2.491.642.628						100 Persen	2.690.766.975			
7 1 3 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.432.973.225	2.432.973.225	2.386.730.878						1 Tahun	2.432.973.225			
7 1 3 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			20 Orang	20 Orang	2.432.973.225	2.432.973.225	2.386.730.878	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 OPD	20 Orang	2.432.973.225	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Non Program RPJMD	%	%	100 %	100 %	500	500	6.000.000						100 %	15.000.000			
7 1 3 2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen				
7 1 3 2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan			2 orang	2 orang	500	500	6.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wilayah Kantor	2 orang	15.000.000	KECAMATAN KEMUNING			
7 1 3 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana yang di Butuhkan	Jenis	Jenis	25 Jenis	25 Jenis	98.388.550	94.870.150	86.920.150						25 Jenis	150.693.750			
		Dana yang di Butuhkan	sat	sat	2 sat	2 sat									2 sat				
		Dana yang di Butuhkan	Liter	Liter	728 Liter	728 Liter									728 Liter				
		Persentase sarana-prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen				
7 1 3 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			7 jenis	7 jenis	21.524.800	21.008.400	16.508.400	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 jenis	25.000.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	6.464.250	6.464.250	6.464.250	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	19.184.250	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	6.483.300	3.483.300	5.539.300	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	8.983.300	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			44 kali	44 kali	63.916.000	63.916.000	58.410.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	44 kali	97.526.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	12.057.200	12.251.400	38.001.400						90 Persen	80.100.000			
7 1 3 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			85 Persen	85 Persen	5.925.000	5.925.000	5.925.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	85 Persen	9.300.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			2 rekening	2 rekening	2.900.000	2.900.000	7.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 rekening	10.600.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			10 Orang	10 Orang	3.232.200	3.426.600	24.876.600	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Orang	60.000.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan baik	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	11.000.000	9.000.000	4.000.000						100 Persen	12.000.000			
7 1 3 2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinaan Kelembagaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			11 unit	11 unit	11.000.000	9.000.000	4.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 unit	12.000.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %	67.550.000	62.673.500	62.673.500						100 %	143.050.000			
7 1 3 2.01.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Dana yang di Butuhkan	%	%	100 %	100 %	62.730.000	58.053.500	58.053.500						100 %	138.050.000			
7 1 3 2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %									100 %				
7 1 3 2.01.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			2 Jenis	2 Jenis	62.730.000	58.053.500	58.053.500	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 OPD	2 Jenis	138.050.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 3 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dana yang di Butuhkan	Rekomendasi	Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	4.620.000	4.620.000	4.620.000						2 Rekomendasi	5.000.000			
7 1 3 2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			2 Jenis	2 Jenis	4.620.000	4.620.000	4.620.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 OPD	2 Jenis	5.000.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	100.000.000	-						1 Laporan	150.000.000			
7 1 4 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	100.000.000	-						1 Laporan	150.000.000			
7 1 4 2.03.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 Laporan	-	-	100.000.000	-	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.		Kecamatan Ken	1 Laporan	150.000.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyenggara Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	Kali	1 Kali	1 Kali	97.060.000	67.060.000	67.060.000						1 Kali	110.760.000			
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyenggara Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali	Kali	2 Kali	2 Kali									2 Kali				
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Yang di Butuhkan	Kali	Kali	1 Kali	1 Kali	97.060.000	67.060.000	67.060.000						1 Kali	110.760.000			
7 1 5 2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarwasku dan Intrawasku, Umot Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	97.060.000	67.060.000	67.060.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 OPD	3 Kegiatan	110.760.000	KECAMATAN KEMUNING		
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	81.768.000	71.768.000	53.468.000						100 Persen	120.000.000			
7 1 6 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	%	%	100 %	100 %	81.768.000	71.768.000	53.468.000						100 %	120.000.000			
7 1 6 2.01.2	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Remasyarakat	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	%	%	100 %	100 %									100 %				
7 1 6 2.01.2	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Remasyarakat	Jumlah Organisasi, kelembapan dan masyarakat yang dibina			9 kelompok	9 kelompok	67.057.000	57.057.000	38.757.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selemen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 OPD	9 kelompok	100.000.000	KECAMATAN KEMUNING		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana				Prioritas	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022								
7	1	6	2.01	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
UNSUB KEMERDEKAAN																	
KEMERDEKAAN																	
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KEMERDEKAAN																	
7	1	3	2.02	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Kelurahan																	
7	1	3	2.02	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pembinaan Masyarakat di Kelurahan																	
UNSUB KEMERDEKAAN																	
KEMERDEKAAN																	
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KEMERDEKAAN																	
7	1	3	2.02	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
7	1	1	2.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
7	1	1	2.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
7	1	1	2.05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
7	1	1	2.05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	
7	1	1	2.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
7	1	1	2.06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pengangan Bangunan Kantor																	
7	1	1	2.06	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor																	
7	1	1	2.06	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
7	1	1	2.06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
7	1	1	2.06	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
7	1	1	2.06	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
7	1	1	2.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	1	1	2.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengadaan Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
7	1	1	2.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	1	1	2.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
7	1	1	2.08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Penyediaan Jasa Komutasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
7	1	1	2.08	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
7	1	1	2.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	1	1	2.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
7	1	2	2.01	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7	1	2	2.01	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
7	1	2	2.01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
7	1	4	2.03	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
7	1	4	2.03	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
7	1	4	2.03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
7	1	5	2.01	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
PROGRAM PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
7	1	5	2.01	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah																	
7	1	5	2.01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Penyusunan Kerangka Acuan dan Instruksi, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
7	1	6	2.01	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
7	1	6	2.01	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
7	1	6	2.01	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																	
7	1	6	2.01	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																	
UNSUB KEMERDEKAAN																	
KEMERDEKAAN																	
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KEMERDEKAAN																	
7	1	3	2.02	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Kelurahan																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Tahun 2022			Tahun 2023				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan	Nasional								Daerah	
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Ketepatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kotabaru Rereliefbilitasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan	100 Persen	100 Persen	308.200.000	301.904.000	301.904.000	Kab. Indragiri Hilir, Keriting, Kota Baru Beteh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan Kota	100 Persen	318.200.000	KECAMATAN KERITANG	
UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN			2.498.676.169	2.463.325.169	2.375.793.770										
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROYA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	90 Persen	90 Persen	2.333.626.169	2.338.473.169						90 Persen	2.708.837.169		
7	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	17 orang	15 orang	2.135.676.169	2.135.676.169						15 orang	2.135.676.169		
7	1	1	2.02	1	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		17 Orang	17 Orang	2.135.676.169	2.135.676.169	1.938.144.770	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur	17 Orang	2.135.676.169	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	166 kali	166 kali	113.230.000	112.775.000	107.775.000					166 kali	165.118.500		
7	1	1	2.06	2	Pemediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		23 jenis	23 jenis	8.751.000	8.751.000	8.751.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sarana dan pras	23 jenis	9.057.500	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.06	4	Pemediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		2 jenis	2 jenis	16.675.000	16.675.000	16.675.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sarana dan pras	2 jenis	31.300.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.06	5	Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		4576 lembar	4576 lembar	2.144.000	2.144.000	2.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sarana dan pras	4576 lembar	4.531.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan		166 kali	166 kali	85.680.000	85.205.000	79.945.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sarana dan pras	166 kali	120.250.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.08		Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketepatan kebutuhan surat menyurat	persen	100 persen	100 persen	43.700.000	44.024.000	45.324.000						100 persen	39.200.000	
7	1	1	2.08	1	Pemediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekoning	2 rekening	2 rekening	1.500.000	1.500.000	2.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penunjang Perk	100 persen	2.700.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.08	2	Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		2 rekening	2 rekening	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penunjang Perk	2 rekening	3.000.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.08	4	Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan		5 Orang	5 Orang	39.200.000	39.524.000	39.524.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penunjang Perk	5 Orang	33.500.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5 unit	5 unit	41.000.000	26.000.000	32.000.000						5 unit	15.500.000	
7	1	1	2.09	2	Pemediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		6 unit	6 unit	25.000.000	16.000.000	16.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Persm	6 unit	31.000.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	1 unit	15.000.000	9.000.000		Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Persm	1 unit	-	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		5 unit	5 unit	1.000.000	1.000.000	7.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Persm	5 unit	4.500.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	100 Persen	100 Persen	4.330.000	4.300.000	9.300.000						100 Persen	40.400.000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis	1 jenis	1 jenis	4.330.000	4.300.000	9.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 jenis	40.400.000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		1 jenis	1 jenis	4.330.000	4.300.000	9.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintahan	1 jenis	40.400.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persen	100 persen		-	-	100.000.000						100 persen	-	
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		95 persen		-	-	100.000.000						95 persen	-	
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 laporan		-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berlaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Masyarakat	2 laporan	-	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase/penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	100 Persen	100 Persen	46.000.000	45.950.000	68.950.000						100 Persen	72.080.000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	46.000.000	45.950.000	68.950.000						1 kegiatan	72.080.000	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraku, Umot Beragama, Ra, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan		1 kegiatan	1 kegiatan	46.000.000	45.950.000	68.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berlaya saing	Suku dan Umot	1 kegiatan	72.080.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100 Persen	100 Persen	94.700.000	74.600.000	74.300.000						100 Persen	220.862.500	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	kelompok	2 kelompok	2 kelompok	94.700.000	74.600.000	74.300.000						2 kelompok	220.862.500	
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina		2 kelompok	2 kelompok	87.500.000	67.600.000	67.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Lembaga kemsa	2 kelompok	212.800.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musabehing Kecamatan		400 usulan	400 usulan	7.000.000	6.950.000	6.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Lembaga kemsa	400 usulan	8.062.500	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN				218.600.000	218.384.200	218.384.200									453.550.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100 Persen	100 Persen	218.600.000	218.384.200	218.384.200						100 Persen	218.384.200	453.550.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	persen	100 persen	100 persen	218.600.000	218.384.200	218.384.200						100 persen	453.550.000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan		1 kegiatan	1 kegiatan	218.600.000	218.384.200	218.384.200	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragit, Supat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Podukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berlaya saing	Masyarakat dan	1 kegiatan	453.550.000	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN				2.704.423.828	2.669.179.428	2.671.384.828									2.997.800.000
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROYA	cakupan Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.538.338.828	2.535.858.828	2.418.061.226						1 Tahun	2.672.800.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2022			Tahun 2023				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan	Nasional							
7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	2.529.425.828	2.529.425.828	2.231.611.229			90 Persen				
				Persentase cakupan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun	2.400.000.000			
7	1	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Keuangan yang diaman sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen						100 Persen				
				Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang	Orang	20 Orang	20 Orang	2.529.425.828	2.529.425.828	2.231.611.229	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	ASN Kantor Ca	20 Orang	2.400.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	16.800.000	16.800.000	16.800.000			100 Persen	14.400.000			
7	1	2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan			2 Orang	2 Orang	16.800.000	16.800.000	16.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Kantor Camat S	2 Orang	14.400.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	12.800.000	12.800.000	12.800.000			100 Persen	30.000.000			
7	1	2.05.2	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan			27 Stel	27 Stel	12.800.000	12.800.000	12.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	ASN Kantor Ca	27 Stel	30.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	156.924.750	129.644.750	129.644.750			100 Persen	204.000.000			
7	1	2.06.2	Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			9 Jenis	9 Jenis	60.056.500	44.056.500	44.056.500	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Kantor Camat S	9 Jenis	80.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			2 jenis	2 jenis	13.576.500	5.972.500	5.972.500	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Kantor Camat S	2 jenis	20.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			1 Jenis	1 Jenis	1.261.750	1.261.750	1.261.750	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum - Dana Akkasi Umum	Kantor Camat S	1 Jenis	1.600.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			24 Eksampulr	24 Eksampulr	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Kantor Camat S	24 Eksampulr	2.400.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			46 Kali	46 Kali	79.610.000	76.010.000	76.010.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Kantor Camat S	46 Kali	100.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	22.385.250	27.185.250	27.185.250			100 Persen	24.400.000			
7	1	2.08.1	Penyediaan Jasa Surot Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			90 Persen	90 Persen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Ragi Hasil	Kantor Camat S	90 Persen	2.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan			12 Rekening	12 Rekening	2.400.000	7.200.000	7.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Kantor Camat S	12 Rekening	2.400.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan			2 Orang	2 Orang	17.585.250	17.585.250	17.585.250	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Kantor Camat S	2 Orang	20.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	36.800.000	35.633.600	35.633.600			100 Persen	60.000.000			
7	1	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Pemeliharaan Umum yang tertangani	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	8.000.000	6.400.000	6.400.000			90 Persen	30.000.000			
7	1	2.01.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			80 persen	80 persen	8.000.000	6.400.000	6.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah		17 Desa/kehur	80 persen	30.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	28.800.000	29.253.600	29.253.600			90 Persen	30.000.000			
7	1	2.02.3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			5 Jenis	5 Jenis	28.800.000	29.253.600	29.253.600	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Masyarakat	5 Jenis	30.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	1 Laporan		-	-	100.000.000			1 Laporan	100.000.000			
7	1	4.2.03	Koordinasi Ujup Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Laporan	1 Laporan		-	-	100.000.000			1 Laporan	100.000.000			
7	1	4.2.03.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 Laporan		-	-	100.000.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kecamatan Mar	1 Laporan	100.000.000	KECAMATAN MANDAH
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	86.990.000	83.890.000	83.890.000			100 Persen	100.000.000			
7	1	5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	86.990.000	83.890.000	83.890.000			100 Persen	100.000.000			
7	1	5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarwaku dan Intrawaku, Umot Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	86.990.000	83.890.000	83.890.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Masyarakat Kec	2 Kegiatan	100.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terlibat Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	42.300.000	33.780.000	33.780.000			100 Persen	65.000.000			
7	1	6.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa secara Baik	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	42.300.000	33.780.000	33.780.000			90 Persen	65.000.000			
7	1	6.2.01.12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina			2 Kelompokk	2 Kelompokk	28.650.000	25.130.000	25.130.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	16 Desa 1 kehur	2 kelompokk	50.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1	6.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan			17 usulan	17 usulan	13.450.000	8.650.000	8.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	16 Desa 1 kehur	17 usulan	15.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1		UNSUR KAWILAYAHAN KECAMATAN						410.400.000	210.209.200	210.209.200					500.000.000		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	410.400.000	210.209.200	210.209.200			100 Persen	500.000.000			
7	1	3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	410.400.000	210.209.200	210.209.200			100 Persen	500.000.000			
7	1	3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Khairiah Mandah			90 persen	90 persen	410.400.000	210.209.200	210.209.200	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Masyarakat Kel	90 persen	500.000.000	KECAMATAN MANDAH	
7	1		UNSUR KAWILAYAHAN KECAMATAN						2.881.985.008	2.829.094.608	3.017.733.559					2.963.921.000		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.701.385.008	2.673.494.608	2.753.733.559			100 Persen	2.741.400.000			
7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	orang	26 orang	26 orang	2.488.985.008	2.488.985.008	2.587.623.959				26 orang	2.500.000.000		
7	1	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	orang	26 orang	26 orang	2.488.985.008	2.488.985.008	2.587.623.959	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Memperkuat Stabilitas Poltubkhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	26 orang	2.500.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	157.700.000	138.680.000	137.464.800			100 Persen	173.000.000			
7	1	2.06.2	Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pralatan kantor yang disediakan			23 jenis	23 jenis	67.036.000	47.036.000	36.926.800	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Memperkuat Stabilitas Poltubkhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	23 jenis	75.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7	1	2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang Tersedia			3 jenis	3 jenis	16.210.000	16.210.000	15.984.200	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Akkasi Umum	Memperkuat Stabilitas Poltubkhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	3 jenis	17.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Tahun 2022		APBD 2022		RKPJ 2022						RKPJ 2022 Perubahan	RKPJ 2022		RKPJ 2022 Perubahan	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022	RKPD 2022												
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	5.474.000	5.474.000	5.473.750	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	2 jenis	6.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN					
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	63 Kali	63 Kali	66.980.000	66.960.000	79.080.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	63 Kali	75.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN					
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	pesen	pesen	100 pesen	100 pesen	32.200.000					100 pesen	32.400.000						
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat		240 Buah	240 Buah	3.040.000	3.040.000	3.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	240 Buah	2.400.000	KECAMATAN PELANGIRAN				
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	2 rekening	2 rekening	9.960.000	9.960.000	9.960.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	2 rekening	10.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN					
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	2 Orang	2 Orang	19.200.000	19.329.600	9.664.800	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	2 Orang	20.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN					
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	pesen	pesen	100 pesen	100 pesen	16.500.000					100 pesen	30.000.000						
7	1	1	2.09	2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kelembagaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		1 Unit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	1 Unit	5.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN					
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	15.000.000	15.000.000	4.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	1 Unit	25.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN					
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Pesen	100 Pesen	100 Pesen	25.500.000	5.500.000					100 Pesen	30.000.000						
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	pesen	100 pesen	100 pesen	25.500.000	5.500.000					100 pesen	30.000.000						
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		5 Jenis	5 Jenis	25.500.000	5.500.000	5.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	5 Jenis	30.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN				
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		1 Laporan	-	-	100.000.000				1 Laporan	-						
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		1 Laporan	-	-	100.000.000				1 Laporan	-						
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat			1 laporan	-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Kecamatan Pelay	1 laporan	-	KECAMATAN PELANGIRAN				
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Pesen	100 Pesen	100 Pesen	75.850.000	70.850.000	70.850.000				100 Pesen	94.971.000						
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	pesen	100 pesen	100 pesen	75.850.000	70.850.000	70.850.000				100 pesen	94.971.000						
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.850.000	70.850.000	70.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	1 kegiatan	94.971.000	KECAMATAN PELANGIRAN				
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Pesen	100 Pesen	100 Pesen	79.250.000	87.630.000	87.630.000				100 Pesen	39.550.000						
7	1	6	2.01		Penyediaan, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	79.250.000	79.250.000	87.630.000				1 Tahun	39.550.000						
7	1	6	2.01	12	Penyediaan Desa yang tertib Administrasi	Persentase Desa yang tertib Administrasi	pesen	100 pesen	100 pesen	100 pesen	64.300.000	64.300.000	72.680.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	1 Kelompok	19.775.000	KECAMATAN PELANGIRAN			
7	1	6	2.01	13	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina		1 Kelompok	1 Kelompok	64.300.000	64.300.000	72.680.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	1 Kelompok	19.775.000	KECAMATAN PELANGIRAN				
7	1	6	2.01	13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan		149 Usulan	149 Usulan	14.950.000	14.950.000	14.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur Kewan	149 Usulan	19.775.000	KECAMATAN PELANGIRAN				
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN					288.900.000	289.029.600	289.029.600				100 Pesen	350.000.000						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Pesen	100 Pesen	100 Pesen	288.900.000	289.029.600	289.029.600				100 Pesen	350.000.000						
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	pesen	100 pesen	100 pesen	288.900.000	289.029.600	289.029.600				100 pesen	350.000.000						
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pelangiran		90 Pesen	90 Pesen	288.900.000	289.029.600	289.029.600	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihkshankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kelurahan Pelay	90 Pesen	350.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN			
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN					2.695.357.046	2.660.357.046	2.768.408.455				100 pesen	2.798.157.046						
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KEKOTA	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	pesen	100 pesen	100 pesen	2.535.571.046	2.526.685.046	2.538.572.455				100 pesen	2.538.571.046						
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	25 orang	25 orang	2.334.357.046	2.334.357.046	2.342.408.455				25 orang	2.334.357.046						
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	pesen	100 pesen	100 pesen	2.334.357.046	2.334.357.046	2.342.408.455	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Buring, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 kegiatan	22 orang	2.334.357.046	KECAMATAN PULAU BURUNG					
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	stel	25 stel	22 stel	10.000.000	7.200.000	4.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Buring, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 kegiatan	22 stel	10.000.000	KECAMATAN PULAU BURUNG					
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	pesen	100 pesen	100 pesen	142.730.500	146.714.900	185.074.900				100 pesen	142.730.500						
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan		5 jenis	2 jenis	850	1.700.000	1.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Buring, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 kegiatan	2 jenis	850	KECAMATAN PULAU BURUNG					
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		17 jenis	25 jenis	17.542.500	18.096.900	21.596.900	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Buring, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 kegiatan	25 jenis	17.542.500	KECAMATAN PULAU BURUNG					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendaman										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		RKP2022		APBD 2022		RKPD 2022 Perubahan		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKP2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional	Daerah										
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 jenis	2 jenis	9.060.000	11.640.000	11.640.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	2 jenis	9.060.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				2 jenis	3 jenis	6.748.000	6.748.000	7.148.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	3 jenis	6.748.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				92 kali	91 kali	108.530.000	108.530.000	142.990.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	91 kali	108.530.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	persen	persen	100 persen	100 persen	48.453.500	38.413.100	26.109.100						100 persen	48.453.500		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Susut Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 persen	100 persen	2.000.000	2.000.000	2.260.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 kegiatan	100 persen	2.000.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 rekening	24 rekening	7.440.000	9.240.000	8.820.800	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 kegiatan	24 rekening	7.440.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 orang	1 orang	39.043.500	27.175.100	15.108.300	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 kegiatan	1 orang	39.043.500	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	720	720	1.600.000						100 Persen	720		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	persen	persen	100 persen	100 persen	720	720	1.600.000						100 persen	720		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				15 jenis	2 jenis	720	720	1.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 kegiatan	2 jenis	720	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	persen	persen	100 persen	100 persen	10.224.000	2.000.000	1.870.000						100 persen	10.224.000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	kelompok	kelompok	2 kelompok	2 kelompok	10.224.000	2.000.000	1.870.000						2 kelompok	10.224.000		
						Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	persen	persen	100 persen	100 persen	10.224.000	2.000.000	1.870.000						100 persen	10.224.000		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	10.224.000	2.000.000	1.870.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SIM yang beriman dan berlaya saing	2 kegiatan	2 kegiatan	10.224.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-	-	-	100.000.000						100.000.000			
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertibn Umum					-	-	-	100.000.000						100.000.000			
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 laporan	-	-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			1 laporan	100.000.000	KECAMATAN PULAU BURUNG	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	80.320.000	70.980.000	70.980.000						100 Persen	80.320.000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	persen	persen	100 persen	100 persen	80.320.000	70.980.000	70.980.000						100 persen	80.320.000		
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kemitraan Antararsuk dan Intrarsuk, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan kemitraan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	80.320.000	70.980.000	70.980.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 kegiatan	1 kegiatan	80.320.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terlib Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	68.522.000	59.972.000	35.386.000						100 Persen	68.522.000		
7	1	6	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa secara Baik	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	persen	persen	100 persen	100 persen	68.522.000	59.972.000	35.386.000						100 persen	68.522.000		
7	1	6	2.01	12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 kelompok	2 kelompok	53.522.000	53.422.000	28.836.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 kegiatan	2 kelompok	53.522.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1	6	2.01	13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang				700 usulan	466 usulan	15.000.000	6.550.000	6.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Bunting, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 kegiatan	466 usulan	15.000.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	1				UNSUB KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN								3.783.383.064	3.740.063.864	3.736.015.864					3.883.383.064		
7	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NEGARA	Cakupan ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.649.882.264	3.606.370.664	3.522.320.664						100 Persen	3.649.882.264		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.397.383.264	3.397.383.264	3.313.333.264						100 Persen	3.397.383.264		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				27 Orang	27 Orang	3.397.383.264	3.397.383.264	3.313.333.264	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	27 Orang	3.397.383.264	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	14.400.000	14.594.400	14.594.400						100 Persen	14.400.000		
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				3 Orang	3 Orang	14.400.000	14.594.400	14.594.400	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	3 Orang	14.400.000	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	159.149.000	148.119.000	148.119.000						100 Persen	159.149.000		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Pesalitan dan Perlingkapan Kantor	Jumlah Jenis Pesalitan dan Perlingkapan Kantor yang disediakan				16 jenis	16 jenis	19.064.000	7.064.000	7.064.000	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & /	16 jenis	19.064.000	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 jenis	3 jenis	10.725.000	10.725.000	10.725.000	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & /	3 jenis	10.725.000	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				2 jenis	2 jenis	4.950.000	4.950.000	4.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & /	2 jenis	4.950.000	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				12 Eksemplar	12 Eksemplar	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & /	12 Eksemplar	2.500.000	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				123 Kali	123 Kali	121.910.000	119.880.000	119.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & /	123 Kali	121.910.000	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	37.150.000	37.474.000	37.474.000						100 Persen	37.150.000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Susut Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	90 Persen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	90 Persen	1.800.000	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	2 Rekening	10.800.000	10.800.000	10.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	2 Rekening	10.800.000	KECAMATAN RETEH
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				5 Orang	5 Orang	24.550.000	24.874.000	24.874.000	Kab. Indragiri Hilir, Reth, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	5 Orang	24.550.000	KECAMATAN RETEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Unit	Unit	Unit	2 Unit	2 Unit	11.800.000	11.800.000	11.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	11.800.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 1 2.09	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kewajiban Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kewajiban Dinas/Operasional/Lapangan yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	11.800.000	11.800.000	11.800.000						2 Unit	11.800.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	21.636.600	21.636.600	21.636.600						100 Persen	21.636.600	KECAMATAN RETEH	
7 1 2 2.02	Penyeenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	21.636.600	21.636.600	21.636.600						100 Persen	21.636.600	KECAMATAN RETEH	
7 1 2 2.02	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				3 Jenis	3 Jenis	21.636.600	21.636.600	21.636.600	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Jenis	21.636.600	KECAMATAN RETEH	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							-	-	100.000.000						100.000.000			
7 1 4 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketelembutan dan Ketertiban Umum							-	-	100.000.000						100.000.000			
7 1 4 2.03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1 Laporan	-	-	100.000.000						1 Laporan	100.000.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	84.730.000	84.730.000	84.730.000						100 Persen	84.730.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 5 2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	84.730.000	84.730.000	84.730.000						100 Persen	84.730.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 5 2.01	Pembinaan Kerkonkuran Antarsukur dan Intrasukur, Umot Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni, dan budaya yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	84.730.000	84.730.000	84.730.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kegiatan	84.730.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terlibit Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	27.134.200	27.134.200	27.134.200						100 Persen	27.134.200	KECAMATAN RETEH	
7 1 6 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	27.134.200	27.134.200	27.134.200						100 Persen	27.134.200	KECAMATAN RETEH	
7 1 6 2.01	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				3 Kelompok	3 Kelompok	16.419.700	16.419.700	16.419.700	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Kelompok	16.419.700	KECAMATAN RETEH	
7 1 6 2.01	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				70 Usulan	70 Usulan	10.714.500	10.714.500	10.714.500	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	70 Usulan	10.714.500	KECAMATAN RETEH	
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							383.900.000	383.900.000	383.900.000						383.900.000			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	383.900.000	383.900.000	383.900.000						100 Persen	383.900.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	383.900.000	383.900.000	383.900.000						90 Persen	383.900.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 3 2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Pelati Kijang				90 Persen	90 Persen	383.900.000	383.900.000	383.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Pulaukang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90 Persen	383.900.000	KECAMATAN RETEH
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							165.000.000	165.000.000	165.000.000						165.000.000			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	165.000.000	165.000.000	165.000.000						100 Persen	165.000.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	165.000.000	165.000.000	165.000.000						90 Persen	165.000.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 3 2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Madani				90 Persen	90 Persen	165.000.000	165.000.000	165.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90 Persen	165.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							171.000.000	171.000.000	171.000.000						171.000.000			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	171.000.000	171.000.000	171.000.000						100 Persen	171.000.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	171.000.000	171.000.000	171.000.000						90 Persen	171.000.000	KECAMATAN RETEH	
7 1 3 2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Metro				90 Persen	90 Persen	171.000.000	171.000.000	171.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90 Persen	171.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							2.494.512.300	2.449.810.300	2.453.647.713							2.636.911.800		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.339.205.800	2.314.374.200	2.210.911.613						100 Persen	2.366.305.800		
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.060.512.300	2.060.512.300	1.964.349.713						100 Persen	2.060.512.300		
7 1 1 2.02	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				18 Orang	18 Orang	2.060.512.300	2.060.512.300	1.964.349.713	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Orang	2.060.512.300	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.400.000	14.529.600	14.529.600						100 Persen	14.400.000		
7 1 1 2.03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				2 Orang	2 Orang	14.400.000	14.529.600	14.529.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Orang	14.400.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	197.693.500	163.843.500	136.033.500						100 Persen	203.693.500		
7 1 1 2.06	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	850	850	2.030.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Jenis	850	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
7 1 1 2.06	Penyelesaian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				47 Jenis	37 Jenis	55.817.000	35.817.000	36.947.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					37 Jenis	60.817.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 1 2.06	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	28.802.500	28.427.500	28.427.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Jenis	28.802.500	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 1 2.06	Penyelesaian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	6.264.000	6.119.000	6.119.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Jenis	7.264.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional					Daerah	Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi													
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	68 Kali	47 Kali	105.980.000	92.650.000	82.510.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur dan s	47 Kali	105.980.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	75.100.000					100 Persen	76.200.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sinar Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat		95 Persen	95 Persen	1.000.000	1.000.000	1.510.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur dan O	95 Persen	1.800.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	11.700.000	11.700.000	11.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur dan O	3 Rekening	12.500.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	6 Orang	6 Orang	62.400.000	62.788.800	62.788.800	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur dan O	6 Orang	62.400.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jenis	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	18.550.000					2 Jenis	18.550.000			
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	18.550.000	18.679.600					2 Jenis	18.679.600			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		2 Jenis		18.550.000	18.679.600	18.679.600	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan	2 Jenis	18.550.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	100.000.000				1 Laporan	100.000.000			
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Kertertiban Umum	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	100.000.000				1 Laporan	100.000.000			
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan		-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semas Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Masyarakat	1 Laporan	100.000.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemngasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	85.960.500					90 Persen	85.960.500			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemngasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemngasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	85.960.500					90 Persen	85.960.500			
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraaku, Umat Beragama, Raa, dan Gerakan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.960.500	85.960.500	85.960.500	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat	2 Kegiatan	85.960.500	KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	30.796.000					90 Persen	30.796.000			
7	1	6	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	30.796.000					90 Persen	30.796.000			
7	1	6	2.01	12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	2 Kelompok	2 Kelompok	23.296.000	23.296.000	30.596.000	Kab. Indragiri Hilir, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Organisasi dan	2 Kelompok	25.296.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
7	1	6	2.01	13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Organisasi dan	1 dokumen	7.800.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG		
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						248.400.000							300.000.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	248.400.000					90 Persen	300.000.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	248.400.000					90 Persen	300.000.000			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Berinteg	Persen	90 Persen	90 Persen	248.400.000	248.400.000	248.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempkuat Stabilitas Publikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Masyarakat dan	90 Persen	300.000.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
																		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		
																		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		
																		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		
																		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		
																		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						2.886.218.677							2.994.380.000		
7	1	1			PROGRAM PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.519.038.677					100 Persen	2.528.380.000			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2.095.218.677					100 Persen	2.096.000.000			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		16 Orang	14 Orang	2.095.218.677	2.095.218.677	1.838.247.647	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 ASN	14 Orang	2.096.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	90 Persen	90 Persen	17.500.000	17.500.000	17.500.000				90 Persen	17.500.000			
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan		25 Snel	25 Snel	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Orang	25 Snel	17.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	284.660.000					90 Persen	287.880.000			
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		25 Jenis	25 Jenis	49.000.000	32.000.000	32.042.800	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Kegiatan	25 Jenis	50.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		3 Jenis	3 Jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Kegiatan	3 Jenis	50.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKMD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RPKMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolempok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional			Daerah								
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	10.533.000	10.533.000	10.533.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan	2 Jenis	12.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan			12 Eksemplar	12 Eksemplar	2.880.000	2.880.000	2.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan	12 Eksemplar	2.880.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			213 Kali	213 Kali	172.227.000	172.227.000	172.227.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan	213 kali	175.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	119.140.000	148.540.000	158.497.200					100 Persen	121.500.000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			95 Persen	95 Persen	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan	95 Persen	9.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan			5 Rekening	5 Rekening	25.540.000	25.540.000	25.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan	5 Rekening	26.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya pelaksanaan yang dibayarkan			11 Orang	14 Orang	84.600.000	114.000.000	125.957.200	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan	14 Orang	86.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	1	2.09		Pembelajaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya sarana prasana aparat yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	2.500.000	2.500.000	2.500.000					90 Persen	2.500.000		
7	1	1	2.09	6	Pembelajaran Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			10 Unit	10 Unit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 unit	10 Unit	2.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	3			PROGRAM FEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	64.450.000	66.450.000	66.450.000					100 Persen	65.000.000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	64.450.000	66.450.000	66.450.000					100 Persen	65.000.000		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	64.450.000	66.450.000	66.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Kolempok Ke	2 Kegiatan	65.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	-	-	-	100.000.000							100.000.000		
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	-	-	-	100.000.000							100.000.000		
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 Laporan		-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				2 Laporan	100.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	114.000.000	89.000.000	89.000.000					100 Persen	115.000.000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	114.000.000	89.000.000	89.000.000					100 Persen	115.000.000		
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Komunikasi Antarsuku dan Intrasuku, Umot, Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan komunikasi, seni dan budaya yang dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	114.000.000	89.000.000	89.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kolempok Ke	1 Kegiatan	115.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	188.750.000	197.350.000	197.350.000					100 Persen	189.000.000		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	188.750.000	197.350.000	197.350.000					100 Persen	189.000.000		
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina			11 Kolempok	11 Kolempok	174.750.000	183.350.000	183.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kolempok Ke	11 Kolempok	175.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Masembeng Kecamatan			100 usulan	100 usulan	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semas Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kolempok Ke	100 usulan	14.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN						246.000.000	285.718.300	285.718.300							285.000.000		
7	1				KECAMATAN						246.000.000	285.718.300	285.718.300						100 Persen	250.000.000		
7	1	3			PROGRAM FEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	246.000.000	285.718.300	285.718.300						100 Persen	250.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	246.000.000	285.718.300	285.718.300					95 Persen	250.000.000		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kuala Enok			95 Persen	95 Persen	246.000.000	285.718.300	285.718.300	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Kolempok M	95 Persen	250.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN						2.385.564.946	2.487.574.144	2.588.050.724							2.374.658.864		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGOTA	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2.086.885.946	2.105.695.146	2.204.138.724						100 Persen	1.986.099.864	
7	1				KECAMATAN	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	100 persen	1.671.564.946	1.671.564.946	1.634.138.524						100 persen	1.670.917.864	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			1 Tahun	11 orang	1.671.564.946	1.671.564.946	1.634.138.524	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongcong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Jumlah Gaji ASN	11 orang	1.670.917.864	KECAMATAN TELUK BELONGKONG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	317.501.000	316.451.000	434.451.000						100 persen	210.752.000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			21 Jenis	25 Jenis	44.751.000	44.751.000	125.510.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongcong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	25 Jenis	27.530.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			5 Jenis	5 Jenis	31.200.000	31.200.000	31.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongcong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	5 Jenis	17.076.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			4241 lembar	4241 lembar	5.480.000	5.480.000	5.533.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongcong, Semas Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	4241 lembar	3.290.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			108 kali	116 kali	236.270.000	235.020.000	272.238.000					Desa	116 kali	162.896.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	47.500.000	67.500.000	85.340.000					100 persen	47.756.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian SKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kategori Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		RPPD 2022	APBD 2022					RPPD 2022 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RPPD 2022	APBD 2022												
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Lainnya yang dibangun	1 unit	1 unit	47.700.000	67.500.000	85.340.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Desa	1 unit	47.750.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	persen	persen	100 persen	100 persen	49.920.000	50.179.200	50.179.200			100 persen	56.640.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surtir Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	100 Persen	100 Persen	4.320.000	4.320.000	4.320.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan, Des	100 Persen	4.320.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	1 Rekening	1 Rekening	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan, Des	1 Rekening	12.000.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	4 Orang	4 Orang	33.600.000	33.890.200	33.890.200	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan, Des	4 Orang	40.320.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	55.850.000	55.850.000	55.850.000			100 Persen	54.800.000				
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	persen	persen	100 persen	100 persen	95.850.000	95.850.000	95.850.000			100 persen	54.800.000				
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	1 Jenis	1 Jenis	55.850.000	55.850.000	55.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa dan Kelu	1 Jenis	54.800.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	-	100.000.000						100.000.000				
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum				-	-	100.000.000						100.000.000				
7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan		100 Persen	-	-	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan kualitas SIM yang betimam dan berkarya saing	100 Persen	100.000.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG				
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	101.050.000	100.030.000	109.600.000			100 Persen	100.670.000				
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	persen	persen	100 persen	100 persen	101.050.000	100.030.000	109.600.000			100 persen	100.670.000				
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarwarga dan Intrawarga, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Causa Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan, seni dan budaya yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	101.050.000	100.030.000	109.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa, Kelurahan	1 Kegiatan	100.670.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	95.937.000	105.937.000	118.462.000			100 Persen	87.467.000				
7	1	6	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	persen	persen	100 persen	100 persen	95.937.000	105.937.000	118.462.000			100 persen	87.467.000				
7	1	6	2.01	12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	2 kelompok	2 kelompok	77.814.000	87.814.000	100.339.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa	2 kelompok	69.344.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
7	1	6	2.01	13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	65 Usulan	65 Usulan	18.125.000	18.125.000	18.125.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belongkong, Semau Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa	65 Usulan	18.125.000	KECAMATAN TELUK BELONGKONG			
8	1				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	15.436.462.113	15.102.997.913	16.607.492.739			100 Persen	16.200.480.614				
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen	140.105.650	132.050.050	147.960.050			90 Persen	147.110.933				
						Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	Persen	90 Persen	90 Persen							90 Persen				
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hibituar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	10 Dokumen	11 Dokumen	140.105.650	132.050.050	147.960.050	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Perencanaan, P	11 Dokumen	147.110.933	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	4.330.092.113	4.330.092.113	3.941.956.939			100 Persen	4.330.092.113				
						Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen				
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	38 Orang	38 Orang	4.330.092.113	4.330.092.113	3.941.956.939	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil P	38 Orang	4.330.092.113	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	107.281.000	67.050.600	56.040.600			100 Persen	112.643.050				
						Persentase aparatur yang mengikuti dilat/ pengembangan kompetensi	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen				
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	5 Diklat	2 Diklat	91.681.000	51.450.600	56.040.600	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil P	2 Diklat	96.263.050	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	3.798.401.750	3.885.453.750	3.981.421.750			100 Persen	4.104.241.838				
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	44 Jenis	10 Jenis	59.171.000	59.171.000	20.571.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil P	10 Jenis	62.129.550	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 jenis	31 jenis	3.090.156.000	3.513.151.000	3.230.675.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil P	31 jenis	3.570.663.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	34.200.000	34.200.000	34.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil P	1 Jenis	35.910.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 jenis	7 jenis	5.998.750	5.998.750	15.998.750	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil P	7 jenis	6.298.688	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	221 Eksemplar	221 Eksemplar	28.160.000	28.160.000	9.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil P	221 Eksemplar	29.568.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	163 Kali	209 Kali	571.116.000	444.773.000	650.677.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil P	209 Kali	599.671.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	902.130.000	886.850.000	679.350.000			100 Persen	947.257.500				
8	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	3 Unit	2 Unit	902.130.000	886.850.000	679.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Instansi Vertikal	2 Unit	947.257.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	228.508.600	234.828.600	198.928.600			100 Persen	239.930.880				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKM	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022			Tahun 2023			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan	Nasional			Daerah					
8.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Pns	90 Pns	27.600.000	27.229.600	19.029.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Badan Kesatuan	90 Pns	28.980.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	2 Rekening	147.200.000	147.200.000	120.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Badan Kesatuan	2 Rekening	154.360.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 Orang	3 Orang	53.705.600	59.900.000	59.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Badan Kesatuan	3 Orang	56.390.880	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.1.2.09	Pembelahan Bazung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	2.396.156.000	2.093.720.800	2.134.320.800					100 Pns	2.389.963.800			
8.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				18 Unit	24 Unit	57.800.000	57.864.800	82.864.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kendaraan Din	24 Unit	60.690.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.1.2.09.9	Pembelahan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	2.538.356.000	2.035.856.000	2.051.456.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kendaraan Din	4 Unit	2.329.273.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	900.000.000	795.729.600	795.729.600					100 Pns	945.000.000			
8.1.2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	900.000.000	795.729.600	795.729.600					100 Pns	945.000.000			
8.1.2.2.01.1	Perumusan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan				8 Kegiatan	8 Kegiatan	290.000.000	290.014.800	290.014.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat, To	8 Kegiatan	305.550.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.2.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan				250 Peserta	30 Peserta	375.000.000	274.900.000	274.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat, To	30 Peserta	390.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.2.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah Peserta Seminar Pembauran Kebangsaan & Rapat FFK yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	159.000.000	155.244.800	155.244.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat, To	100 Orang	166.950.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi bela negara				50 Peserta	50 Peserta	75.000.000	74.950.000	74.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat, To	50 Peserta	78.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	1.605.370.000	1.564.457.600	3.518.987.600					100 Pns	1.685.638.500			
8.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	1.605.370.000	1.564.457.600	3.518.987.600					100 Pns	1.685.638.500			
8.1.3.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Partai Politik yang di bina				11 Parpol	11 Parpol	1.405.370.000	1.364.492.800	3.518.922.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Partai Politik, d	11 Parpol	1.475.638.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.3.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan				200 Masyarakat	200 Masyarakat	200.000.000	199.984.800	199.984.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Partai Politik, d	200 Masyarakat	210.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	645.000.000	527.955.400	527.955.400					100 Pns	677.250.000			
8.1.4.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	645.000.000	527.955.400	527.955.400					100 Pns	677.250.000			
8.1.4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti pembinaan				282 Ormas/LSM	282 Ormas/LSM	645.000.000	527.955.400	527.955.400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			282 Ormas/LSM	282 Ormas/LSM	677.250.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	275.000.000	292.874.400	333.206.400					100 Pns	288.750.000			
8.1.5.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	275.000.000	292.874.400	333.206.400					100 Pns	288.750.000			
8.1.5.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penegahan Penyalgan Narkotika, Fasilitas Kenukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Honorarium 1 Kali yang diselenggarakan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	275.000.000	292.874.400	333.206.400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			6 Kegiatan	6 Kegiatan	288.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KIWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	312.000.000	291.934.000	291.934.000					100 Pns	327.600.000			
8.1.6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Pns	100 Pns	312.000.000	291.934.000	291.934.000					100 Pns	327.600.000			
8.1.6.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Korpsama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Intelijen yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali	65.550.500	65.070.100	65.070.100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Ideologi, Politik	4 Kali	71.979.025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.6.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Korpsama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dipantau				20 Kecamatan	20 Kecamatan	243.449.500	226.863.900	226.863.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Ideologi, Politik	20 Kecamatan	255.621.975	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL								1.891.435.349.587	1.972.017.179.761	2.132.118.564.332					2.277.740.133.332				

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dilakukan dengan dasar pertimbangan terjadinya beberapa pergeseran pada perkiraan pendapatan maupun pembiayaan daerah di Tahun 2022 serta beberapa penyesuaian terhadap program/kegiatan dalam mencapai target yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN